

**PENENTUAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
BERDASARKAN URUTAN PRIORITAS ASPEK
KNOMI, SOSIAL DAN FISIK DI KOTA GRESIK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Teknik**



**Disusun oleh :
QURROTU AINI
NIM. 0210660044-66**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK
MALANG
2007**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Atas berkat rahmat Allah SWT beserta taufik dan hidayah-Nya, akhirnya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Penentuan Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Urutan Prioritas Aspek Ekonomi, Sosial dan Fisik di Kota Gresik” Adapun maksud dan tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian kelulusan pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang.

Ucapan dan rasa syukur yang tiada hentinya penulis haturkan kepada Allah SWT yang memberikan kasih sayang dan ampunan-Nya dalam pengerjaan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga tidak henti-hentinya penulis haturkan kepada keluarga (Ibu, Bapak, Dani dan Adin), yang telah memberikan dukungan sepenuhnya baik lahir maupun batin. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat,

1. Bapak Ir. Agus Dwi Wicaksono Lic.rer.reg selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan Laporan Tugas akhir ini.
2. Bapak Wisnu Sasongko, ST, MT selaku pembimbing yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan Laporan Tugas akhir ini.
3. Bapak Ir. A. Wachid Hasyim MT, Ibu Christia Meidiana, ST, M.Eng, dan Ibu Turningtyas ST, MT selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritik untuk penyempurnaan Laporan Tugas akhir ini
4. Seluruh teman dan sahabat yang ada di dekat dan di sekitar penulis dengan segala kesan dan pesan yang ditinggalkannya.
5. Semua teman angkatan 2002 sebagai teman seperjuangan di PWK..

Semoga kebaikan-kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang seharusnya dari Allah SWT. Penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amin Ya Rabbal Alamin.

Malang, Mei 2007

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan	9
1.6 Ruang Lingkup	10
1.6.1 Ruang lingkup wilayah	10
1.6.2 Ruang lingkup materi.....	12
1.7. Manfaat Penelitian	13
1.7.1 Bagi Akademisi.....	13
1.7.2 Bagi Mahasiswa.....	13
1.7.3 Bagi pemerintah.....	13
1.7.4 Bagi masyarakat (pedagang dan pengunjung).....	13
1.8 Kerangka Pemikiran	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Sektor Informal Dan Pedagang Kaki Lima	16
2.1.1 Sektor informal	16
A. Konsep sektor informal.....	16
B. Pengertian sektor informal.....	17
C. Ciri-ciri sektor informal	19
2.1.2 Pedagang kaki lima di perkotaan	21
A. Pengertian pedagang kaki lima.....	21
B. Karakteristik pedagang kaki lima	23
2.2 Tinjauan Aspek Penentuan Lokasi PKL	30
2.2.1 Kedekatan lokasi usaha PKL dengan tempat tinggal.....	30
2.2.2 Kemudahan memperoleh angkutan	31
2.2.3 Kedekatan lokasi usaha PKL dengan pusat kegiatan/ keramaian kota	32
2.2.4 Penentuan lokasi PKL menurut pemerintah kota	34
2.2.5 Konsep penawaran dan permintaan kegiatan PKL	35
2.3 Metode Delphi	36
2.3.1 Konsep dasar dan penerapan metode delphi.....	36
2.3.2 Desain penelitian metode delphi.....	36
2.4 Studi Pendahuluan	37
2.5 Defenisi Operasional.....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Lokasi Penelitian.....	43



3.3	Diagram Alir Penelitian	48
3.4	Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	50
3.4.1	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.4.2	Teknik Pengolahan Data.....	56
3.5.	Metode Pengambilan Sampel	57
3.5.1	Metode Pengambilan Sampel PKL.....	58
3.5.2	Metode Pengambilan Sampel Masyarakat.....	59
3.5.3	Metode Pengambilan Sampel Pemerintah Kota dan Ahli	59
3.6	Penentuan Variabel	63
3.7	Metode dan Teknik Analisis	68
3.7.1	Analisis deskriptif mengenai persepsi lokasi pedagang kaki lima	68
3.7.2	Analisis deskriptif kualitatif dengan distribusi frekwensi	68
3.7.3	Analisis deskriptif dengan metode delphi.....	69
3.7.4	Analisis alternatif lokasi pedagang kaki lima	76
3.8	Desain Survei.....	80

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 82

4.1	Tinjauan wilayah Kota Gresik	82
4.1.1	Kondisi fisik geografis dan luas wilayah.....	82
4.1.2	Struktur tata ruang dan fungsi wilayah Kota Gresik.....	82
4.1.3	Kependudukan wilayah Kota Gresik	90
4.1.4	Penggunaan Tanah	93
4.1.5	Fasilitas perkotaan	97
4.1.6	Perekonomian wilayah Kota Gresik	101
4.2	Tinjauan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap Pedagang kaki Lima.....	103
4.2.1	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Ijin Penempatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima... ..	103
4.2.2	Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Gresik	105
4.3	Karakteristik Pedagang Kaki Lima Wilayah Kota Gresik.....	108
4.3.1	Jumlah Pedagang Kaki Lima Kabupaten Gresik	109
4.3.2	Karakteristik responden pedagang kaki lima.....	110
A.	Jenis Kelamin Pedagang Kaki Lima.....	112
B.	Usia Pedagang Kaki Lima	112
C.	Tingkat Pendidikan Pedagang Kaki Lima	113
D.	Status Pedagang Kaki Lima	114
E.	Asal Daerah Pedagang Kaki Lima.....	114
F.	Status Tempat Tinggal Pedagang Kaki Lima	115
G.	Mata Pencaharian Pedagang Kaki Lima.....	116
4.3.3	Karakteristik Aktivitas pedagang kaki lima.....	117
A.	Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima	117
B.	Waktu Dagang Pedagang Kaki Lima.....	118
C.	Lama Menjadi Pedagang Kaki Lima	123
D.	Alasan Menjalankan Usaha	123
E.	Kerjasama Antar Pedagang Kaki Lima	124
4.3.4	Kondisi Fisik Bangunan/Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima ...	125
A.	Tempat Berdagang.....	125

B. Sarana Berdagang	126
C. Ruang Usaha	127
D. Pola Melakukan Usaha Dagang	128
4.3.5 Aspek Permodalan Pedagang Kaki Lima	129
A. Modal Usaha	129
B. Asal Modal Usaha.....	130
C. Jumlah Keluarga yang Ditopang.....	130
D. Jumlah Pendapatan Yang Diperoleh Per Hari	131
4.3.6 Permasalahan pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik.....	133
A. Kesulitan / Kendala Yang Dihadapi dalam Aktivitas Pedagang Kaki Lima.....	133
B. Pengetahuan Tentang Perda Pengaturan Pedagang Kaki Lima.....	134
C. Bantuan, Penyuluhan (Pembinaan) untuk Mengembangkan Usaha Pedagang Kaki Lima.....	135
D. Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	136
E. Kesan Terhadap Kebijakan Penertiban.....	137
4.4 Karakteristik masyarakat pengunjung	139
4.4.1 Jenis kelamin pengunjung.....	139
4.4.2 Usia pengunjung	140
4.4.3 Asal Daerah pengunjung.....	140
4.4.4 Status Pengunjung.....	141
4.4.5 Tingkat pendidikan pengunjung	142
4.4.6 Mata Pencaharian.....	143
4.4.7 Pendapatan pengunjung	144
4.4.8 Frekwensi belanja	144
4.5 Pembahasan	145
4.5.1 Identifikasi persepsi mengenai lokasi usaha pedagang kaki lima dalam faktor fisik, ekonomi dan sosial menurut pedagang, masyarakat dan pemerintah	145
A. Identifikasi persepsi aspek-aspek dalam faktor ekonomi	147
B. Identifikasi persepsi mengenai lokasi usaha dalam faktor sosial.....	149
C. Identifikasi persepsi mengenai lokasi usaha dalam faktor fisik.....	154
4.5.2 Identifikasi prioritas aspek dalam penentuan lokasi pedagang kaki lima meliputi faktor fisik, ekonomi, dan sosial ...	157
A. Identifikasi Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Responden PKL	157
B. Identifikasi Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Responden Pemerintah.....	178
C. Identifikasi Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Responden Masyarakat	190
4.5.3 Identifikasi Urutan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Para Ahli	203
A. Identifikasi Urutan Prioritas Aspek Pada Faktor Ekonomi dalam Menentukan Lokasi Jualan PKL.....	205
B. Identifikasi Urutan Prioritas Aspek Pada Faktor Sosial dalam Menentukan Lokasi Jualan PKL	247

C. Identifikasi Urutan Prioritas Aspek Pada Faktor Fisik dalam Menentukan Lokasi Jualan PKL 253

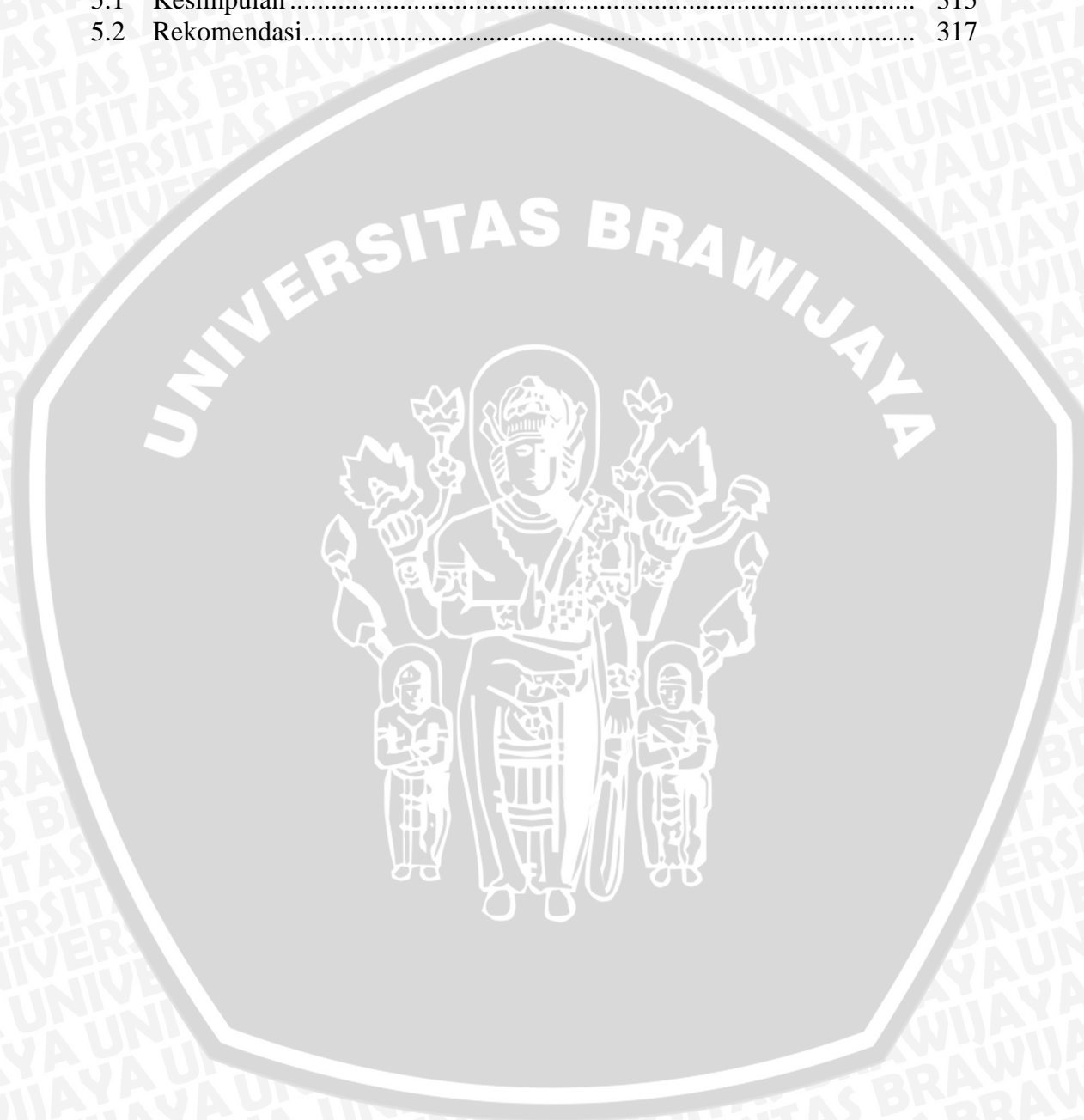
D. Kesimpulan Urutan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Pedagang, Masyarakat, Pemerintah dan Ahli 282

E. Penentuan Lokasi Jualan PKL Sesuai Hasil Urutan 289

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI..... 315

5.1 Kesimpulan 315

5.2 Rekomendasi..... 317



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Gresik Tahun 2005	4
Tabel 2.1	Ciri-ciri Sektor Informal	20
Tabel 2.2	Kriteria Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Tempat Tinggal PKL	31
Tabel 2.3	Kriteria Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Pusat Kegiatan/ Keramaian Kota	33
Tabel 2.4	Studi Pendahuluan yang Terkait Dengan Penelitian.....	40
Tabel 3.1	Lokasi penelitian.....	45
Tabel 3.2	Kerangka analisis metode delphi	49
Tabel 3.3	Data kuisioner	53
Tabel 3.4	Jenis dan kegunaan data.....	56
Tabel 3.5	Jumlah pedagang kaki lima pada lokasi penelitian.....	59
Tabel 3.6	Jumlah sampel pedagang kaki lima	59
Tabel 3.7	Rata-rata jumlah masyarakat pengunjung lokasi pedagang kaki lima	60
Tabel 3.8	Sampel masyarakat pengunjung lokasi pedagang kaki lima	61
Tabel 3.9	Jumlah sampel responden pemerintah	61
Tabel 3.10	Responden ahli dan jabatan	62
Tabel 3.11	Dasar pemilihan variabel	65
Tabel 3.12	Variabel penelitian	68
Tabel 3.13	Responden ahli dan jabatan	70
Tabel 3.14	Pelaksanaan kegiatan metode delphi putaran I	72
Tabel 3.15	Pelaksanaan kegiatan metode delphi putaran II.....	73
Tabel 3.16	Pelaksanaan kegiatan metode delphi putaran II.....	74
Tabel 3.17	Matriks analisis alternatif lokasi pedagang kaki lima.....	79
Tabel 3.18	Hasil pembobotan alternatif lokasi pedagang kaki lima di Kota Gresik.....	79
Tabel 3.19	Desain survei.....	80
Tabel 4.1	Pembagian wilayah dan arahan kegiatan	87
Tabel 4.2	Pembagian jumlah penduduk menurut jenis kelamin	90
Tabel 4.3	Pembagian jumlah penduduk menurut lapangan usaha.....	91
Tabel 4.4	Pembagian jumlah pencari kerja wilayah Kota Gresik tahun 2004...	92
Tabel 4.5	Fasilitas perdagangan kota gresik tahun 2002	99
Tabel 4.6	Perekonomian kota gresik tahun 2002.....	101
Tabel 4.7	Jumlah pedagang kaki lima di wilayah kota gresik tahun 2005	109
Tabel 4.8	Jumlah pedagang kaki lima di timur alon-alon gresik.....	109
Tabel 4.9	Jumlah pedagang kaki lima di lahan milik PT. Multi Sarana Plaza ..	110
Tabel 4.10	Jumlah pedagang kaki lima di pasar kota gresik	110
Tabel 4.11	Jenis kelamin pedagang kaki lima	112
Tabel 4.12	Usia pedagang kaki lima.....	112
Tabel 4.13	Tingkatan pendidikan pedagang kaki lima	113
Tabel 4.14	Status pedagang kaki lima	114
Tabel 4.15	Asal daerah pedagang kaki lima	114
Tabel 4.16	Status tempat tinggal pedagang kaki lima	115
Tabel 4.17	Pekerjaan sebelum menjadi pedagang kaki lima	116
Tabel 4.18	Jenis barang dagangan pedagang kaki lima.....	117

Tabel 4.19	Kesesuaian jenis barang dagangan dengan keinginan Pedagang kaki lima	118
Tabel 4.20	Waktu berdagang pedagang kaki lima	118
Tabel 4.21	Lama menjadi pedagang kaki lima	123
Tabel 4.22	Alasan menjalankan usaha pedagang kaki lima	123
Tabel 4.23	Kerjasama antar pedagang kaki lima	124
Tabel 4.24	Pemilihan tempat berdagang.....	125
Tabel 4.25	Sarana berdagang	126
Tabel 4.26	Ukuran ruang usaha (sarana berdagang).....	127
Tabel 4.27	Pola melakukan usaha berdagang.....	128
Tabel 4.28	Modal usaha pedagang kaki lima.....	129
Tabel 4.29	Asal modal pedagang kaki lima.....	130
Tabel 4.30	Jumlah keluarga yang ditopang	131
Tabel 4.31	Jumlah pendapatan yang diperoleh per hari	131
Tabel 4.32	Kecukupan jumlah pendapatan yang diperoleh per bulan	132
Tabel 4.33	Kesulitan/kendala yang dihadapi dalam	133
Tabel 4.34	Pengetahuan tentang perda pengaturan pedagang kaki lima	135
Tabel 4.35	Bantuan, penyuluhan (pembinaan) untuk mengembangkan.....	136
Tabel 4.36	Pernah/tidak mengalami razia penertiban pedagang kaki lima	136
Tabel 4.37	Kesan terhadap kebijakan penertiban oleh pemerintah daerah.....	137
Tabel 4.38	Jenis kelamin pengunjung.....	139
Tabel 4.39	Usia pengunjung	140
Tabel 4.40	Asal daerah pengunjung.....	140
Tabel 4.41	Status pengunjung.....	141
Tabel 4.42	Tingkatan pendidikan pengunjung.....	142
Tabel 4.43	Mata pencaharian pengunjung	143
Tabel 4.44	Pendapatan pengunjung	144
Tabel 4.45	Frekwensi belanja pengunjung	144
Tabel 4.46	Identifikasi persepsi aspek ekonomi dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima	147
Tabel 4.47	Identifikasi persepsi aspek sosial dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima	153
Tabel 4.48	Identifikasi persepsi aspek fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima	154
Tabel 4.49	Urutan prioritas aspek ekonomi menurut responden pedagang kaki lima	157
Tabel 4.50	Urutan prioritas jenis dagangan pedagang kaki lima responden	158
Tabel 4.51	Penggunaan lahan dan jenis aktivitas di sekitar lokasi PKL di wilayah Kota Gresik	164
Tabel 4.52	Urutan prioritas pilihan lokasi responden pedagang kaki lima.....	166
Tabel 4.53	Urutan prioritas waktu jual pedagang kaki lima responden	167
Tabel 4.54	Urutan prioritas aspek sosial menurut pedagang kaki lima responden.....	170
Tabel 4.55	Urutan prioritas aspek dalam faktor fisik menurut pedagang kaki lima responden.....	171
Tabel 4.56	Urutan prioritas sarana transportasi pilihan pedagang kaki lima responden.....	172
Tabel 4.57	Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan pasar/pusat perbelanjaan menurut pedagang kaki lima responden.....	174

Tabel 4.58	Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perkantoran/sekolah	174
Tabel 4.59	Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan terminal.....	175
Tabel 4.60	Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perumahan	176
Tabel 4.61	Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan tempat tinggal.....	177
Tabel 4.62	Kesimpulan urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima	178
Tabel 4.63	Urutan prioritas aspek ekonomi menurut responden pemerintah Kabupaten Gresik	178
Tabel 4.64	Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha makanan .	179
Tabel 4.65	Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha non makanan/minuman.....	180
Tabel 4.66	Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha bahan mentah	180
Tabel 4.67	Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima makanan/minuman.....	181
Tabel 4.68	Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima non makanan/minuman menurut responden pemerintah Kabupaten Gresik	182
Tabel 4.69	Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima bahan mentah	182
Tabel 4.70	Urutan prioritas aspek sosial menurut responden pemerintah Kabupaten Gresik	184
Tabel 4.71	Urutan prioritas aspek fisik menurut responden pemerintah Kabupaten Gresik	185
Tabel 4.72	Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima	186
Tabel 4.73	Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perkantoran/sekolah menurut responden pemerintah Kabupaten Gresik	187
Tabel 4.74	Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan terminal.....	187
Tabel 4.75	Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perumahan penduduk menurut responden pemerintah Kabupaten Gresik	188
Tabel 4.76	Kesimpulan urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima	189
Tabel 4.77	Urutan prioritas aspek ekonomi menurut masyarakat responden	190
Tabel 4.78	Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha makanan/minuman.....	191
Tabel 4.79	Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha non makanan/minuman.....	192
Tabel 4.80	Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha bahan mentah	193
Tabel 4.81	Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima makanan/minuman.....	194
Tabel 4.82	Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima non makanan/minuman menurut masyarakat responden.....	195

Tabel 4.83	Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima bahan mentah	196
Tabel 4.84	Urutan prioritas aspek sosial menurut masyarakat responden.....	197
Tabel 4.85	Urutan prioritas aspek fisik menurut masyarakat responden.....	198
Tabel 4.86	Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan pasar/pusat perbelanjaan menurut masyarakat responden	199
Tabel 4.87	Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perkantoran/sekolah	200
Tabel 4.88	Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan terminal	201
Tabel 4.89	Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perumahan penduduk menurut masyarakat responden	202
Tabel 4.90	Urutan kesimpulan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima	203
Tabel 4.91	Urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima makanan/minuman	206
Tabel 4.92	Kesimpulan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima makanan/minuman.....	209
Tabel 4.93	Keterangan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima makanan/minuman menurut responden ahli	210
Tabel 4.94	Urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima non makanan/minuman	213
Tabel 4.95	Kesimpulan urutan prioritas lokasi	215
Tabel 4.96	Keterangan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima non makanan/minuman menurut ahli	216
Tabel 4.97	Urutan prioritas lokasi pkl bahan mentah jawaban para ahli.....	219
Tabel 4.98	Kesimpulan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima bahan mentah menurut ahli.....	221
Tabel 4.99	Keterangan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima bahan mentah menurut ahli.....	222
Tabel 4.100	Urutan prioritas waktu jual pedagang kaki lima makanan/minuman.....	225
Tabel 4.101	Kesimpulan urutan prioritas waktu jualan	228
Tabel 4.102	Keterangan urutan prioritas waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman menurut ahli	229
Tabel 4.103	Urutan prioritas waktu jual pedagang kaki lima non makanan/minuman.....	231
Tabel 4.104	Kesimpulan urutan prioritas waktu jualan	234
Tabel 4.105	Keterangan urutan prioritas waktu jualan pedagang kaki lima non makanan/minuman menurut ahli	235
Tabel 4.106	Urutan prioritas waktu jual pedagang kaki lima bahan mentah jawaban para ahli	237
Tabel 4.107	Kesimpulan urutan prioritas waktu jualan	239
Tabel 4.108	Keterangan urutan prioritas waktu jualan pedagang kaki lima bahan mentah menurut ahli.....	240
Tabel 4.109	Urutan prioritas aspek ekonomi jawaban para ahli.....	242
Tabel 4.110	Kesimpulan urutan prioritas aspek ekonomi menurut ahli	244
Tabel 4.111	Keterangan urutan prioritas aspek ekonomi dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima menurut ahli.....	245
Tabel 4.112	Jawaban urutan prioritas aspek sosial jawaban para ahli.....	248
Tabel 4.113	Kesimpulan urutan prioritas aspek sosial menurut ahli	250
Tabel 4.114	Keterangan urutan prioritas aspek sosial dalam menentukan	

	lokasi aktivitas pedagang kaki lima menurut ahli.....	251
Tabel 4.115	Jawaban urutan prioritas pusat keramaian berjarak dekat (<100m) ..	253
Tabel 4.116	Kesimpulan urutan prioritas pusat keramaian berjarak dekat (<100m)	257
Tabel 4.117	Keterangan urutan prioritas pusat keramaian berjarak dekat (<100m) dengan lokasi pedagang kaki lima menurut ahli.....	258
Tabel 4.118	Jawaban urutan prioritas pusat keramaian berjarak sedang (100 – 500 m).....	260
Tabel 4.119	Kesimpulan urutan prioritas pusat keramaian berjarak sedang (100 – 500 m).....	263
Tabel 4.120	Keterangan urutan prioritas pusat keramaian berjarak sedang (100 – 500 m) dengan lokasi pedagang kaki lima menurut ahli.....	264
Tabel 4.121	Jawaban urutan prioritas pusat keramaian berjarak jauh (>500 m)...	266
Tabel 4.122	Kesimpulan urutan prioritas pusat keramaian berjarak jauh (>500 m)	269
Tabel 4.123	Keterangan urutan prioritas pusat keramaian berjarak jauh (>500 m) dengan lokasi pedagang kaki lima menurut ahli.....	270
Tabel 4.124	Jawaban urutan prioritas jarak lokasi pedagang kaki lima	272
Tabel 4.125	Kesimpulan urutan prioritas jarak lokasi pedagang kaki lima.....	274
Tabel 4.126	Keterangan urutan jarak prioritas lokasi pedagang kaki lima dengan tempat tinggalnya menurut ahli.....	275
Tabel 4.127	Jawaban urutan prioritas aspek fisik menurut ahli.....	277
Tabel 4.128	Kesimpulan urutan prioritas aspek fisik menurut ahli.....	279
Tabel 4.129	Keterangan urutan prioritas aspek fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima menurut ahli.....	280
Tabel 4.130	Kesimpulan prioritas aspek ekonomi penentuan lokasi pedagang kaki lima	282
Tabel 4.131	Prioritas aspek ekonomi dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima	284
Tabel 4.132	Kesimpulan prioritas aspek sosial penentuan lokasi pedagang kaki lima	284
Tabel 4.133	Prioritas aspek sosial dalam menentukan lokasi.....	286
Tabel 4.134	Kesimpulan prioritas aspek fisik penentuan lokasi pedagang kaki lima	287
Tabel 4.135	Prioritas aspek fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima di kota gresik.....	288
Tabel 4.136	Persyaratan lokasi aktivitas utama pedagang kaki lima sesuai hasil urutan prioritas	289
Tabel 4.137	Eksisting lokasi pasar/pusat perbelanjaan/pertokoan di Kota Gresik.....	290
Tabel 4.138	Matriks analisis alternatif lokasi pedagang kaki lima.....	306
Tabel 4.139	Hasil pembobotan alternatif lokasi pedagang kaki lima di kota gresik.....	307
Tabel 4.140	Kawasan pusat perdagangan jl. gubernur suryo dilihat dari urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik.....	309

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Permasalahan	5
Gambar 1.2	Lokasi PKL Pilihan Pemerintah	6
Gambar 1.3	Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Gresik	6
Gambar 1.4	Peta Orientasi Wilayah Studi	11
Gambar 1.5	Kerangka Pemikiran	15
Gambar 4.1	Peta orientasi wilayah Kabupaten Gresik	83
Gambar 4.2	Peta orientasi Kota Gresik	84
Gambar 4.3	Peta Administrasi Kota Gresik	85
Gambar 4.4	Pembagian SWP Kabupaten Gresik	86
Gambar 4.5	Peta Struktur Kota Gresik	89
Gambar 4.6	Pembagian jumlah penduduk	90
Gambar 4.7	Pembagian jumlah penduduk menurut lapangan usaha	91
Gambar 4.8	Pembagian jumlah penduduk menurut lapangan usaha	92
Gambar 4.9	Pembagian jumlah pencari kerja wilayah kota gresik Tahun 2004	92
Gambar 4.10	Pembagian jumlah pencari kerja	93
Gambar 4.11	Eksisting penggunaan lahan/ daratan di wilayah Kota Gresik	96
Gambar 4.12	Lokasi fasilitas transportasi yang ada di wilayah perencanaan	98
Gambar 4.13	Grafik fasilitas perkotaan kota gresik tahun 2002	99
Gambar 4.14	Lokasi fasilitas Perdagangan dan jasa	100
Gambar 4.15	Sektor Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2004	103
Gambar 4.16	Peta persebaran lokasi PKL di Kota Gresik	111
Gambar 4.17	Jenis Kelamin Pedagang Kaki Lima	112
Gambar 4.18	Usia Pedagang Kaki Lima	112
Gambar 4.19	Tingkatan Pendidikan Pedagang Kaki Lima	113
Gambar 4.20	Status Pedagang Kaki Lima	114
Gambar 4.21	Asal Daerah Pedagang Kaki Lima	115
Gambar 4.22	Status Tempat Tinggal Pedagang Kaki Lima	115
Gambar 4.23	Pekerjaan Sebelum Menjadi Pedagang Kaki Lima	116
Gambar 4.24	Jenis Barang Dagangan Pedagang Kaki Lima	117
Gambar 4.25	Waktu Berdagang Pedagang Kaki Lima	118
Gambar 4.26	Peta jenis dagangan PKL di Kota Gresik	119
Gambar 4.27	Lama Menjadi Pedagang Kaki Lima	123
Gambar 4.28	Alasan Menjalankan Usaha Pedagang Kaki Lima	124
Gambar 4.29	Pemilihan Tempat Berdagang	126
Gambar 4.30	Sarana Berdagang	126
Gambar 4.31	Ukuran Ruang Usaha (Sarana Berdagang)	127
Gambar 4.32	Pola Melakukan Usaha Berdagang	128
Gambar 4.33	Modal Usaha Pedagang Kaki Lima	129
Gambar 4.34	Asal Modal Pedagang Kaki Lima	130
Gambar 4.35	Jumlah Keluarga Yang Ditopang	131
Gambar 4.36	Jumlah Pendapatan Yang Diperoleh Per Hari	132
Gambar 4.37	Kesulitan/kendala yang dihadapi dalam	134
Gambar 4.38	Pengetahuan Tentang Perda Pengaturan Pedagang Kaki Lima	135
Gambar 4.39	Pernah/Tidak Mengalami Razia Penertiban Pedagang Kaki Lima	136
Gambar 4.40	Jenis Kelamin Pengunjung	139
Gambar 4.41	Usia Pengunjung	140

Gambar 4.42	Asal Daerah Pengunjung	141
Gambar 4.43	Status Pengunjung.....	141
Gambar 4.44	Tingkatan Pendidikan Pengunjung	142
Gambar 4.45	Mata pencaharian pengunjung	143
Gambar 4.46	Penghasilan Pengunjung	144
Gambar 4.47	Frekwensi Belanja Pengunjung	145
Gambar 4.48	Keamanan	150
Gambar 4.49	Kenyamanan	151
Gambar 4.50	Ketertiban.....	152
Gambar 4.51	Kebersihan	152
Gambar 4.52	Urutan Prioritas Aspek Ekonomi Menurut Pedagang Kaki Lima ..	157
Gambar 4.53.a	Guna Lahan dan Aktivitas.....	160
Gambar 4.54	Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Responden .	166
Gambar 4.55	Urutan Prioritas Waktu Jual Pedagang Kaki Lima Responden	168
Gambar 4.56	Peta asal/domisili PKL.....	169
Gambar 4.57	Urutan Prioritas Aspek Sosial Menurut Pedagang Kaki Lima Responden.....	170
Gambar 4.58	Urutan Prioritas Aspek Fisik Menurut Pedagang Kaki Lima Responden.....	171
Gambar 4.59	Urutan Prioritas Sarana Transportasi Pilihan Pedagang Kaki Lima Responden.....	173
Gambar 4.60	Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha PKL dengan	174
Gambar 4.61	Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima Dengan Perkantoran/Sekolah Menurut Pedagang Kaki Lima Responden.....	175
Gambar 4.62	Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Terminal	175
Gambar 4.63	Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima.....	176
Gambar 4.64	Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima.....	177
Gambar 4.65	Urutan Prioritas Aspek Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik	178
Gambar 4.66	Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Makanan/minuman	179
Gambar 4.67	Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Usaha Bahan Mentah	180
Gambar 4.68	Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Makanan/Minuman Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik	181
Gambar 4.69	Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Non Makanan/Minuman Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik	182
Gambar 4.70	Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Bahan Mentah	183
Gambar 4.71	Urutan Prioritas Aspek Sosial.....	184
Gambar 4.72	Urutan Prioritas Aspek Fisik.....	185
Gambar 4.73	Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Pasar/Pusat Perbelanjaan Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik	186
Gambar 4.74	Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Perkantoran/Sekolah Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik	187

Gambar 4.75	Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Terminal	188
Gambar 4.76	Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Perumahan Penduduk Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik	188
Gambar 4.77	Prioritas Aspek Ekonomi Menurut Masyarakat Responden.....	190
Gambar 4.78	Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Usaha Makanan.....	192
Gambar 4.79	Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Usaha Non Makanan/Minuman Menurut Masyarakat Responden.....	193
Gambar 4.80	Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Usaha Bahan Mentah	194
Gambar 4.81	Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Makanan/Minuman Menurut Masyarakat Responden.....	195
Gambar 4.82	Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Non Makanan/Minuman Menurut Masyarakat Responden.....	196
Gambar 4.83	Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Bahan Mentah	196
Gambar 4.84	Urutan Prioritas Aspek Sosial Menurut Masyarakat Responden....	197
Gambar 4.85	Urutan Prioritas Aspek Fisik Menurut Pemerintah Kabupaten Gresik	198
Gambar 4.86	Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Pasar/Pusat Perbelanjaan Menurut Masyarakat Responden	200
Gambar 4.87	Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Perkantoran/Sekolah Menurut Masyarakat Responden	200
Gambar 4.88	Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Terminal	201
Gambar 4.89	Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Perumahan Penduduk Menurut Masyarakat Responden....	202
Gambar 4.90	Diagram Venn Aspek Ekonomi.....	283
Gambar 4.91	Diagram Venn Aspek Sosial.....	285
Gambar 4.92	Diagram Venn Aspek Fisik.....	287
Gambar 4.93.	Eksisting lokasi pasar/pusat perbelanjaan/pertokoan di Kota Gresik.....	291
Gambar 4.94.	Penilaian Indikator Prioritas I Aspek Ekonomi : Jenis Dagangan..	296
Gambar 4.95.	Penilaian Indikator Prioritas II Aspek Ekonomi : Waktu Jualan....	297
Gambar 4.96.	Penilaian Indikator Prioritas III Aspek Ekonomi : Biaya Angkutan	298
Gambar 4.97.	Penilaian Indikator Prioritas IV Aspek Ekonomi : Sewa Lahan	299
Gambar 4.98.	Penilaian Indikator Prioritas V Aspek Ekonomi : Daya Beli Masyarakat.....	300
Gambar 4.99.	Penilaian Indikator Prioritas I Aspek Sosial : Ketertiban	301
Gambar 4.100	Penilaian Indikator Prioritas I Aspek Fisik : Kedekatan Lokasi Dengan Pusat Keramaian.....	302
Gambar 4.101	Penilaian Indikator Prioritas II Aspek Fisik : Kemudahan Aksesibilitas/Sarana Transportasi.....	303
Gambar 4.102	Penilaian Indikator Prioritas III Aspek Fisik : Kedekatan Lokasi dengan Tempat Tinggal PKL.....	304
Gambar 4.103	Kawasan pusat perdagangan dan jenis kegiatan ini terpusat di daerah Jl. Gubernur Suryo.	308

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan kota yang merupakan pusat dari kegiatan ekonomi menimbulkan suatu fenomena urbanisasi yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Urbanisasi telah menyebabkan peningkatan jumlah penduduk kota yang sangat pesat (pada tahun 2005 mencapai 220 juta jiwa)¹. Sebagai akibat dari proses urbanisasi dan pertambahan penduduk yang sangat cepat, maka jumlah penduduk angkatan kerja juga meningkat. Fenomena ini tidak diimbangi oleh kemampuan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja formal sehingga jumlah pengangguran di kota semakin membengkak. Sulitnya mencari pekerjaan dan terbatasnya lapangan kerja di kota karena besarnya persaingan antar individu dalam kegiatan pencarian pekerjaan, sehingga penduduk yang hanya didukung oleh kemampuan dan ketrampilan terbatas banyak yang tersingkir dari sektor formal. Kondisi ini menyebabkan penduduk banyak yang beralih menuju ke sektor informal. Suatu keadaan dimana sektor modern belum mampu menciptakan lapangan kerja secepat pertumbuhan angkatan kerja (dan sebaliknya juga yaitu suatu keadaan dimana tingkat kualitas angkatan kerja masih terlalu rendah untuk dapat diserap semuanya dalam sektor modern) maka sektor informal merupakan bidang kegiatan yang memberi harapan untuk mencari penghidupan (Poeba, dalam Soto, 1991 : vii).

Peran sektor informal bagi perekonomian mendapat tanggapan yang berbeda-beda dari para ahli. Terdapat dua kubu dalam menyikapi terjadinya sektor informal, yaitu kelompok yang setuju dan kelompok yang tidak setuju. Kelompok yang tidak setuju lebih berorientasi pada ketertiban, keindahan, kebersihan, ketaatan pada hukum, dan sebagainya. Sementara kelompok yang setuju dengan kehadiran sektor informal lebih berorientasi pada faktor tenaga kerja (Alisjahbana, 2003:61). Dilihat dari aspek penyediaan lapangan kerja, memang sektor informal telah mampu melaksanakan fungsinya. Namun dengan jumlah sekitar 42,2 juta pekerja yang menyambung hidupnya dari sektor informal maka sudah selayaknya dipikirkan suatu paket kebijaksanaan yang dapat mengangkat pekerja di sektor informal (Alisjahbana, 2003:75). Memang harus diakui selama ini pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mengelola dan membina sektor informal lewat berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan, tetapi

¹ Data BPS pada tahun 2005 www.bps.go.id

pada kenyataannya beberapa kebijakan tersebut banyak menimbulkan bias karena kebijakan pembinaan sektor informal yang diterapkan pemerintah terkesan menyulitkan ruang gerak, kreativitas dan dinamika sektor informal (PKL) dengan adanya kepentingan pemerintah dalam mewujudkan kota yang tertib, nyaman, bersih dan indah. Dapat dipahami bila pelaksanaan kebijakan tersebut bertitik berat pada ketertiban, karena persepsi dasar pemerintah (kota) terhadap kehadiran kegiatan sektor informal ialah menyelamatkan sarana dan fasilitas umum yang diduduki secara tidak sah, dan mencegah usaha yang mengganggu ketertiban umum, keindahan, kebersihan serta kelancaran lalu lintas. Namun bila titik berat dasar kebijakan diletakkan pada penanggulangan masalah ketenagakerjaan maka akan terjadi deregulasi, menghilangkan sampai seminimal mungkin pembatasan, melindungi dan memfasilitasi tanpa mengorbankan sarana, fasilitas dan ketertiban umum kota (Alisjahbana, 2003:87).

Perkembangan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan perkotaan semakin marak, ditandai dengan banyaknya lokasi publik yang ditempati oleh PKL. Keberadaan PKL yang kurang tertata sering menimbulkan masalah ruang fisik kota, yaitu menurunkan kualitas lingkungan fisik kota dan aktivitasnya terkesan menempati lokasi yang bukan peruntukannya dengan menyerobot ruang-ruang publik kota. Peletakan lokasi untuk fungsi perdagangan yang tidak pada tempatnya akan sangat mengganggu dalam proses penataan kota dan selalu menimbulkan *spread effect*. Pemanfaatan lahan publik yang tidak sesuai aturan dengan munculnya pedagang kaki lima selalu berkaitan dengan segi estetika yang tidak dapat berkompromi dengan kepentingan ekonomi masyarakat (Jayadiningrat, dalam Hanarti 1999: 40-41).

Kebijakan yang mengatur mengenai PKL di Kabupaten Gresik adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03/2003 tentang izin penempatan dan pembinaan pedagang kaki lima. Sebagian besar isi Perda tersebut hanya mengatur retribusi dan izin penempatan PKL, tidak sampai pada persyaratan lokasi yang diperbolehkan atau dilarang untuk melakukan aktivitas PKL. Kebijakan penetapan jalan bebas PKL merupakan langkah kontroversial yang seringkali diikuti dengan tindakan kekerasan atau bentrokan antara petugas razia dengan para pedagang kaki lima, seperti upaya penertiban yang digelar Satpol PP di sekitar wilayah Pasar Baru Gresik ternyata memicu kerusuhan, sekitar 100 PKL dan puluhan petugas Satpol PP terlibat bentrok fisik hingga menyebabkan tiga petugas terluka (*Kompas*, 9 April 2003). Kejadian ini menunjukkan bahwa cara penertiban represif akan memunculkan perlawanan dan kemarahan yang semakin memungkinkan terjadinya disintegrasi sosial antar

masyarakat. Namun, kondisi yang tidak menguntungkan PKL tersebut tidak menjadikan suatu penghalang, terbukti dengan perkembangan PKL di kawasan pengembangan kota yang semakin marak terutama di lokasi-lokasi sentra aktivitas masyarakat. Pertumbuhan pedagang kaki lima sulit dihilangkan, bahkan mustahil dihilangkan, karena sudah menjadi sangat kronis. Setiap kali diadakan penertiban, pasti mereka kembali ke tempat semula, bahkan pertumbuhannya seperti cendawan di musim hujan, tumbuh subur dan tidak dapat dikendalikan (Alisjahbana, 2003 hal 129).

Problema lokasi bagi usaha pedagang kaki lima di perkotaan, tampaknya menjadi sentra yang melatarbelakangi adanya keluhan dari pedagang kaki lima tersebut. Kebutuhan akan lokasi adalah hal yang logis saja karena tumpuan aktivitas sektor ini memang lebih banyak kepada perdagangan fisik. Namun masalahnya, dalam penentuan lokasi pemerintah kurang melibatkan para PKL. Padahal menurut PKL, lokasi yang “jauh dari konsumen” membuat usahanya beresiko bangkrut. Inilah yang menyebabkan para PKL umumnya tidak antusias dengan model relokasi yang diterapkan oleh pemerintah. Dengan segala keterbatasan kemampuan yang dimilikinya tidaklah mengherankan bila mereka kemudian mengambil lokasi yang strategis, dalam arti demi kelancaran pemasaran usahanya sebagai akibat dari keinginan mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik (Nasution, 1988, dalam Alisjahbana, 2003:159).

Permasalahan penanganan PKL ini dapat didekati dengan menggunakan pendekatan manajemen konflik. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan menstrukturkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini. Pihak yang terkait langsung dengan konflik adalah para PKL dengan Pemkot. Pihak pertama yaitu PKL yang memiliki kepentingan agar dapat melakukan aktivitas usaha pada lokasi yang mereka pilih. pedagang kaki lima tumbuh pada tempat-tempat publik, seperti: trotoar, badan jalan, alun-alun, taman kota dll. Hal ini tentu menimbulkan kesan semrawutnya kawasan yang dipakai oleh kegiatan PKL. Selain itu PKL yang memanfaatkan sebagian badan jalan, juga ikut menambah permasalahan lalu lintas. Persoalan inilah yang dipermasalahkan oleh pihak kedua, yaitu Pemkot yang memiliki kepentingan untuk menertibkan pelaksanaan fungsi kawasan sebagaimana mestinya. Dasar pijakan Pemkot dalam bertindak adalah persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh PKL dan tidak adanya izin yang dimiliki. Maka disinilah timbul adanya konflik kepentingan, yaitu kepentingan antara PKL dan Pemkot.

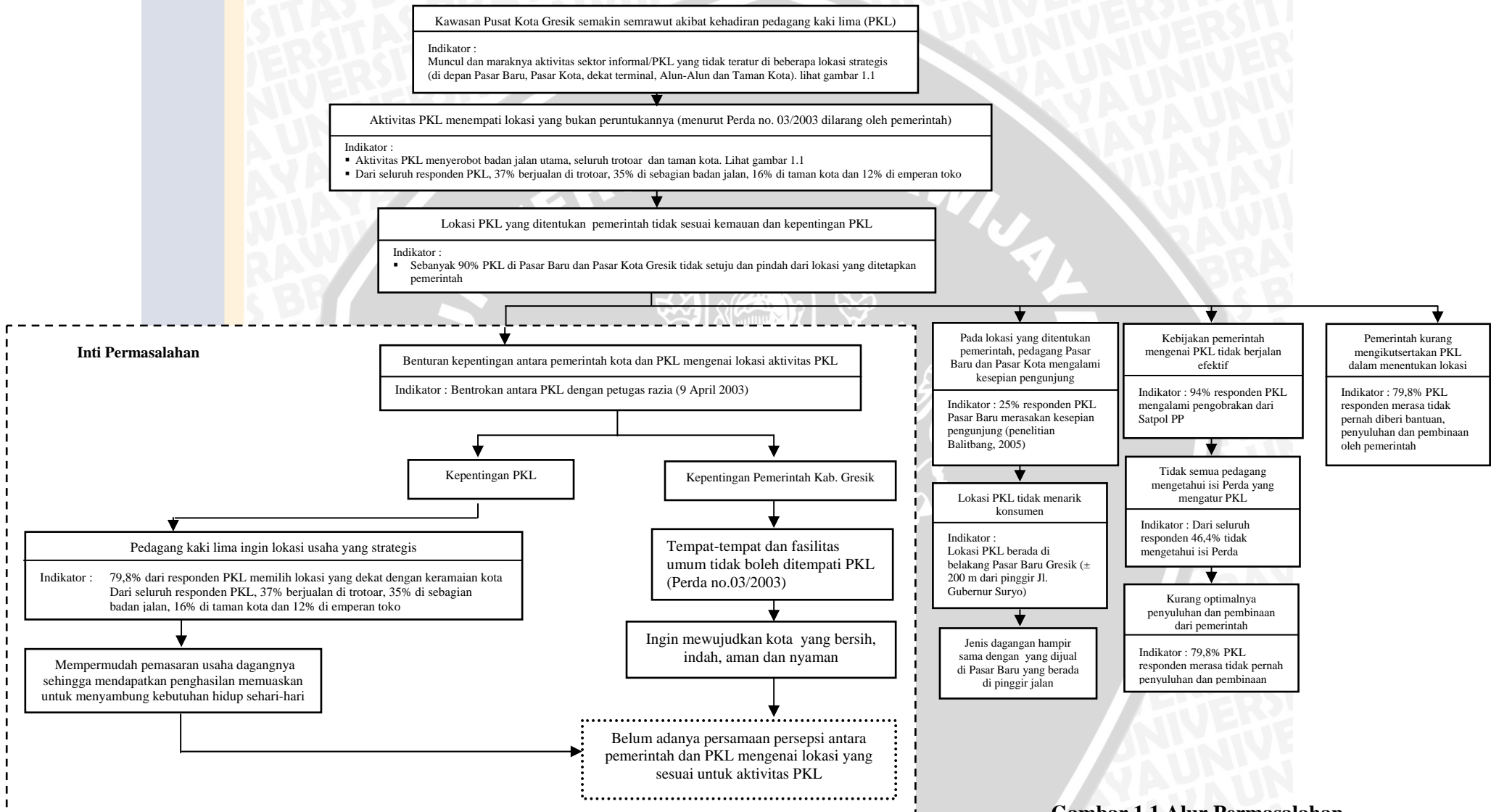
Jumlah pedagang kaki lima menurut data yang dihimpun oleh Dinas Pasar dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gresik pada tahun 2005 sebanyak 651 pedagang yang tersebar di beberapa lokasi strategis di kawasan pusat kota. Jumlah tersebut merupakan pedagang yang telah terdata dan sudah memiliki paguyuban/perwakilan pengurus sebanyak 651 orang. Data mengenai jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kota Gresik dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah pedagang kaki lima di wilayah kota gresik tahun 2005

No.	Lokasi	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasar Kota Gresik	Gresik	200	Ada paguyuban
2.	Pasar Baru Gresik	Gresik	130	Ada paguyuban
3.	Timur Alon-Alon Gresik	Gresik	41	Ada paguyuban
4.	PT. Multi Sarana Plaza	Gresik	110	Ada paguyuban
5.	TPG II Randu Agung	Randu Agung	30	Ada paguyuban
6.	di wilayah perempatan Sidomoro, Jl. Kartini, Jl. Usman Sadar, Jl. Pahlawan	Gresik	140	Tidak ada paguyuban

Sumber : Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL Kab. Gresik

Kondisi aktivitas PKL yang terdapat di sekitar Pasar Baru Gresik, Pasar Kota Gresik dan di depan PT. Multi Sarana Plaza sudah sangat padat dan kurang diimbangi oleh ketersediaan lahan yang ada sehingga aktivitasnya terkesan menempati lokasi yang bukan peruntukannya dengan menyerobot ruang-ruang publik kota seperti jalur pedestrian, jalan utama, dan emperan pertokoan. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik telah berkali-kali melakukan penataan PKL dengan membebaskan jalan utama dari berbagai aktivitas PKL dengan merelokasi PKL yang ada di depan Pasar Baru dan Pasar Kota Gresik menuju ke lahan penampungan sementara PT. Multi Sarana Plaza yang letaknya di belakang pasar (lihat gambar 1.2). Pelaksanaan penataan aktivitas PKL tersebut dengan memberikan kavling-kavling khusus, dimana PKL dibebankan membayar biaya sewa dan retribusi yang terjangkau. Pada awalnya para PKL bersedia untuk ditata sehingga lingkungan sekitar pasar bebas dari aktivitas PKL. Namun tidak lama kemudian, para PKL kembali menempati daerah badan jalan sehingga kesemrawutan lingkungan muncul kembali. Menurut Ketua Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL (Tahun 2005) fenomena tersebut disebabkan dari perilaku PKL yang tidak pernah puas dan ingin cepat memperoleh penghasilan banyak, sehingga walaupun sudah menempati kavling yang disediakan pemerintah, mereka tetap mengajak kerabatnya yang lain untuk berjualan di depan Pasar Baru sehingga ruang pekerjaan mereka menjadi banyak. Sedangkan aktivitas PKL di Timur Alon-Alon dan TPG II Randu Agung terlihat menempati ruang publik kota berupa taman kota dan lapangan. Berikut dibawah ini adalah bagan alur permasalahan PKL di Kota Gresik :



Gambar 1.1 Alur Permasalahan



Gambar 1.2 Lokasi PKL pilihan pemerintah



a b



c d

Gambar 1.3 lokasi pedagang kaki lima di kota gresik

Keterangan :

- a : PKL depan PT. Multi Sarana Plaza
- b : PKL depan Pasar Baru Gresik
- c : PKL depan Alun-Alun Gresik
- d : PKL TPG Randu Agung

Berdasarkan permasalahan di atas, jika dikaji lebih dalam, inti dari permasalahan aktivitas PKL ini adalah adanya benturan atau konflik kepentingan antara pemerintah kota dengan PKL tentang aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi yang sesuai bagi aktivitas dagang para PKL. Karena pilihan lokasi yang tidak tepat, akan membuyarkan rencana yang telah digariskan (Alisjahbana, 2003 hal 149). Pemerintah memiliki prioritas yang cenderung mengutamakan ekстетika dan keteraturan kota, begitu pula pedagang yang mempertahankan keberadaannya sebagai mata pencaharian utama penyambung hidup keluarga (faktor ekonomi). Sedangkan masyarakat memiliki preferensi

sendiri sebagai pengunjung dan konsumen. *Stakeholder* dalam hal ini pemerintah, PKL, dan masyarakat sebagai komponen, perlu dilibatkan untuk mencari titik temu tentang prioritas faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi bagi peruntukan aktivitas PKL.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dilakukan penelitian guna menentukan urutan prioritas aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi sebagai aktivitas usaha pedagang kaki lima di Kota Gresik. Pertimbangan prioritas aspek-aspek penentuan lokasi PKL ini dengan melibatkan pemerintah, masyarakat serta PKL itu sendiri. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau arahan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang menyangkut lokasi PKL di Kota Gresik.

1.2. Identifikasi Masalah

Sisi lain dari keberadaan PKL yang menjamur, bila dilihat dari segi keindahan, ketertiban maupun keteraturan dalam sebuah tata kota memang tidak enak dipandang mata, semrawut, kumuh bahkan dapat mengganggu arus lalu lintas atau menjadi sebab kemacetan lalu lintas yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan umum. Namun apakah adil bila mereka diperlakukan dengan seenaknya, barang dagangannya dirampas, digusur, bahkan ada yang diperlakukan kasar atau dipukuli oleh oknum aparat penegak aturan².

Keberadaan PKL menimbulkan masalah yang kompleks terhadap elemen lingkungan perkotaan yaitu penurunan kualitas lingkungan fisik kota dan penempatan lokasi yang bukan peruntukannya (dilarang oleh pemerintah Kabupaten Gresik), sehingga pemerintah Kabupaten Gresik membuat kebijakan mengenai penataan aktivitas PKL. Namun dalam pelaksanaannya, banyak PKL yang melanggar kebijakan tersebut dengan ditandai semakin maraknya aktivitas PKL di kawasan pusat Kota Gresik. Kondisi ini disebabkan antara lain :

1. Kebijakan pemerintah daerah Kota Gresik yang diterapkan menyulitkan ruang gerak pedagang kaki lima karena terbentur oleh adanya kepentingan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota yang nyaman, bersih dan indah dan dari sudut pandang pemerintah keberadaan PKL masih dianggap tidak menguntungkan sehingga kebijakan penataan PKL menjadi tidak efektif dan ternyata memicu

² Penelitian Balitbang, 2005 "Kajian Penataan dan Pengembangan PKL di Kabupaten Gresik"

- kerusuhan, dimana sekitar 100 PKL dan puluhan petugas Satpol PP terlibat bentrok fisik hingga menyebabkan tiga petugas terluka (*Kompas*, 9 April 2003).
2. Kebijakan yang mengatur PKL di Kabupaten Gresik adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 tahun 2003 tentang ijin penempatan dan pembinaan pedagang kaki lima. Namun di dalam Perda tersebut sebagian besar hanya mengatur retribusi dan ijin penempatan PKL dan tidak sampai pada kriteria lokasi yang diperbolehkan atau dilarang untuk melakukan aktivitas PKL.
 3. Upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan dan penataan PKL tidak berjalan efektif karena walaupun pemerintah telah mencoba menata aktivitas PKL dengan memberikan kavling-kavling khusus pada lahan penampungan sementara milik PT. Multi Sarana Plaza, mereka tetap mengajak kerabatnya yang lain untuk berjualan di depan Pasar Baru sehingga ruang pekerjaan mereka menjadi semakin banyak dan akhirnya kesemrawutan lingkungan muncul kembali.
 4. Maraknya aktivitas PKL di Kota Gresik terjadi karena adanya benturan atau konflik kepentingan antara pemerintah kota dengan PKL tentang aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi yang sesuai bagi aktivitas dagang para PKL. Pemerintah memiliki prioritas kepentingan sendiri yang cenderung mengutamakan estetika dan keteraturan kota, begitu pula pedagang yang mempertahankan keberadaannya sebagai mata pencaharian utama penyambung hidup keluarga (faktor ekonomi). Sedangkan masyarakat memiliki preferensi sendiri sebagai pengunjung dan konsumen.

1.3. Pembatasan Masalah

Inti dari permasalahan lokasi aktivitas PKL yang terjadi adalah karena adanya benturan atau konflik kepentingan antara pemerintah kota dengan PKL tentang aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi yang sesuai bagi aktivitas PKL. Pemerintah memiliki prioritas sendiri yang cenderung mengutamakan estetika dan keteraturan kota, begitu pula pedagang yang mempertahankan keberadaannya sebagai mata pencaharian utama penyambung hidup keluarga (faktor ekonomi). Sedangkan masyarakat memiliki preferensi sendiri sebagai pengunjung dan konsumen. Stakeholder dalam hal ini pemerintah, PKL, dan masyarakat sebagai komponen, perlu dilibatkan untuk mencari titik temu tentang prioritas faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi bagi peruntukan aktivitas PKL.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka bagaimanakah jalan tengah sebagai usaha menuju terwujudnya keadilan dari benturan berbagai kepentingan para *stakeholder*. Dari sinilah dituntut kepedulian pemerintah terhadap keberadaan PKL sebagai wujud perkembangan dari otonomi daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, terarah serta mudah diselesaikan, maka diperlukan adanya pembatasan masalah penelitian antara lain :

- Identifikasi persepsi mengenai aspek ekonomi sosial dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima menurut pedagang, masyarakat dan pemerintah.
- Identifikasi urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik menurut pedagang, pemerintah, masyarakat dan para ahli dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.
- Arahan penentuan lokasi aktivitas utama pedagang kaki lima berdasarkan urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima menurut pedagang, pemerintah, masyarakat dan para ahli.

1.4. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi pedagang, masyarakat dan pemerintah mengenai aspek ekonomi, sosial, dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik ?
2. Bagaimana urutan prioritas dari masing-masing aspek ekonomi, sosial dan fisik menurut pedagang, pemerintah, masyarakat dan para ahli dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik ?
3. Bagaimana arahan penentuan lokasi aktivitas utama pedagang kaki lima berdasarkan hasil urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik menurut pedagang, pemerintah, masyarakat dan para ahli tersebut?

1.5 Tujuan

1. Mengetahui persepsi pedagang, masyarakat dan pemerintah mengenai aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik.
2. Mengidentifikasi urutan prioritas dari masing-masing aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima menurut pedagang, pemerintah, masyarakat dan para ahli di Kota Gresik?

3. Menentukan lokasi aktivitas utama pedagang kaki lima berdasarkan hasil urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik menurut pedagang, pemerintah, masyarakat dan para ahli tersebut.

1.6 Ruang Lingkup

1.6.1 Ruang lingkup wilayah

Ruang lingkup makro wilayah penelitian "Penentuan Lokasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Urutan Prioritas Aspek Ekonomi, Sosial dan Fisik di Kota Gresik" adalah wilayah Kota Gresik yang termasuk SSWP II dengan kegiatan yang berkembang antara lain berupa:

- Perdagangan
- Pemerintahan
- Industri
- Perikanan
- Pertanian Tanaman Pangan
- Pertambangan
- Perumahan
- Pariwisata
- Maritim
- Industri Kecil

Wilayah Kota Gresik menurut RTRW Jatim Tahun 2004 adalah terkonsentrasi di Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar dan Kecamatan Kebomas dengan batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kota Surabaya
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Barat : Kecamatan Cerme

Ruang lingkup mikro lokasi kegiatan pedagang kaki lima di Kota Gresik tepatnya di Kawasan Pengembangan Kota Gresik yaitu :

- Pasar Baru Kota Gresik
- Pasar Kota Gresik
- Lahan Penampungan Sementara Milik PT. Multi Sarana Plaza
- Timur Alon-Alon Gresik
- TPG II Randuagung
- Di wilayah perempatan Sidomoro, Jl. Kartini, Jl. Usman Sadar, Jl. Pahlawan

Peta orientasi wilayah studi dari lokasi pedagang kaki lima di Kota Gresik berdasarkan data dari Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL Kabupaten Gresik dapat dilihat pada peta 1.4.

Gambar 1.4 Peta orientasi wilayah studi



1.6.2 Ruang lingkup materi

Mengkaji PKL melalui pendekatan Metode Delphi. Kajian PKL yang dimaksud adalah melihat urutan prioritas aspek-aspek dari masing-masing faktor yaitu faktor sosial, ekonomi dan fisik dalam kaitannya dengan penentuan lokasi PKL di Kota Gresik. Pemilihan aspek yang berhubungan dengan faktor ekonomi ini didasarkan dari hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Purnama³, dimana dalam studinya, Purnama melihat faktor ekonomi lokasi PKL dalam kaitannya dengan penentuan lokasi PKL di Kota Mataram. Pemilihan aspek ekonomi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa aktivitas PKL merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, yaitu berupa aktivitas perdagangan. Pengertian ekonomi disini berhubungan dengan "keuntungan" yang ingin diperoleh yaitu terdiri dari jenis dagangan, biaya angkutan dan waktu berjualan.

Pemilihan faktor sosial dalam penelitian ini dilakukan dengan alasan karena aktivitas PKL dilaksanakan dalam suatu "ruang", dimana "ruang" tersebut terdapat aktivitas-aktivitas masyarakat yang lain. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara aktivitas PKL dengan aktivitas masyarakat yang lain maka perlu ada batasan dalam hal ini aspek yang berkaitan dengan sosial masyarakat seperti, keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kebersihan. Pemilihan aspek sosial ini didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 3 Tahun 2003 tentang izin penempatan dan pembinaan pedagang kaki lima Bab III Pasal 3.

Pemilihan aspek-aspek yang berhubungan dengan aktivitas fisik didasarkan dari hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmedi Widodo, dimana dalam studinya, Widodo⁴ melihat karakteristik fisik lokasi PKL dalam kaitannya dengan penentuan lokasi PKL di Kota Semarang, sehingga aspek-aspek fisik adalah kemudahan aksesibilitas, kedekatan dengan pusat keramaian masyarakat/kota, dan kedekatan lokasi usaha PKL dengan tempat tinggal PKL.

³ dalam "Studi Aspek yang Diprioritaskan pada Faktor Ekonomi, Sosial, dan Fisik dalam penentuan Lokasi PKL di Kota Mataram", Magister Teknik Pembangunan Kota Program pasca Sarjana UNDIP Semarang Tahun 2003

⁴ dalam "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL Kota Semarang" Magister Teknik Pembangunan Kota Program pasca Sarjana UNDIP Semarang Tahun 2003

1.7. Manfaat Penelitian

1.7.1 Bagi akademisi

1. Sebagai salah satu referensi studi kasus dan model penelitian mengenai penyelesaian permasalahan pedagang kaki lima (PKL) yang selalu menjadi fenomena tiap kota.
2. Dapat dilakukan studi lebih lanjut menuju pada penataan dan pengembangan pedagang kaki lima berdasarkan pertimbangan penentuan lokasi menurut penelitian.

1.7.2 Bagi mahasiswa

1. Sebagai sarana latihan menunangkan gagasan, ide, atau pikiran mengenai permasalahan lokasi aktivitas PKL ke dalam bentuk tulisan,
2. Mendorong dan melatih mahasiswa untuk berpikir kritis, logis dan meningkatkan daya serap informasi, khususnya mengenai tema pedagang kaki lima,
3. Melatih mengolah dan menggabungkan beberapa sumber dalam penelitian ini yaitu pemerintah, masyarakat, PKL dan para ahli dan menuangkannya ke dalam bentuk pemikiran yang lebih matang,

1.7.2 Bagi pemerintah

1. Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka menentukan kebijakan sektor informal tentang pengaturan lokasi PKL di Kabupaten Gresik,
2. Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berminat dalam kajian tentang pedagang kaki lima, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik sektor informal PKL,
3. Dapat meningkatkan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan PKL di Kabupaten Gresik, sehingga terhindar dari konflik terutama mengenai kepentingan dan preferensi pengaturan PKL.

1.7.3 Bagi masyarakat (pedagang dan pengunjung)

1. Sebagai sarana untuk menyamakan persepsi mengenai penentuan lokasi aktivitas PKL, sehingga dapat terhindar dari konflik antar pedagang dan pemerintah,
2. Dapat meningkatkan kesadaran pedagang untuk mematuhi kebijakan pengaturan PKL yang telah ditetapkan, karena pedagang diikutkan dalam perumusannya.

3. Sebagai sarana untuk menuangkan gagasan, ide, atau pikiran mengenai lokasi aktivitas PKL menurut keinginan masyarakat sebagai pedagang dan pengunjung.

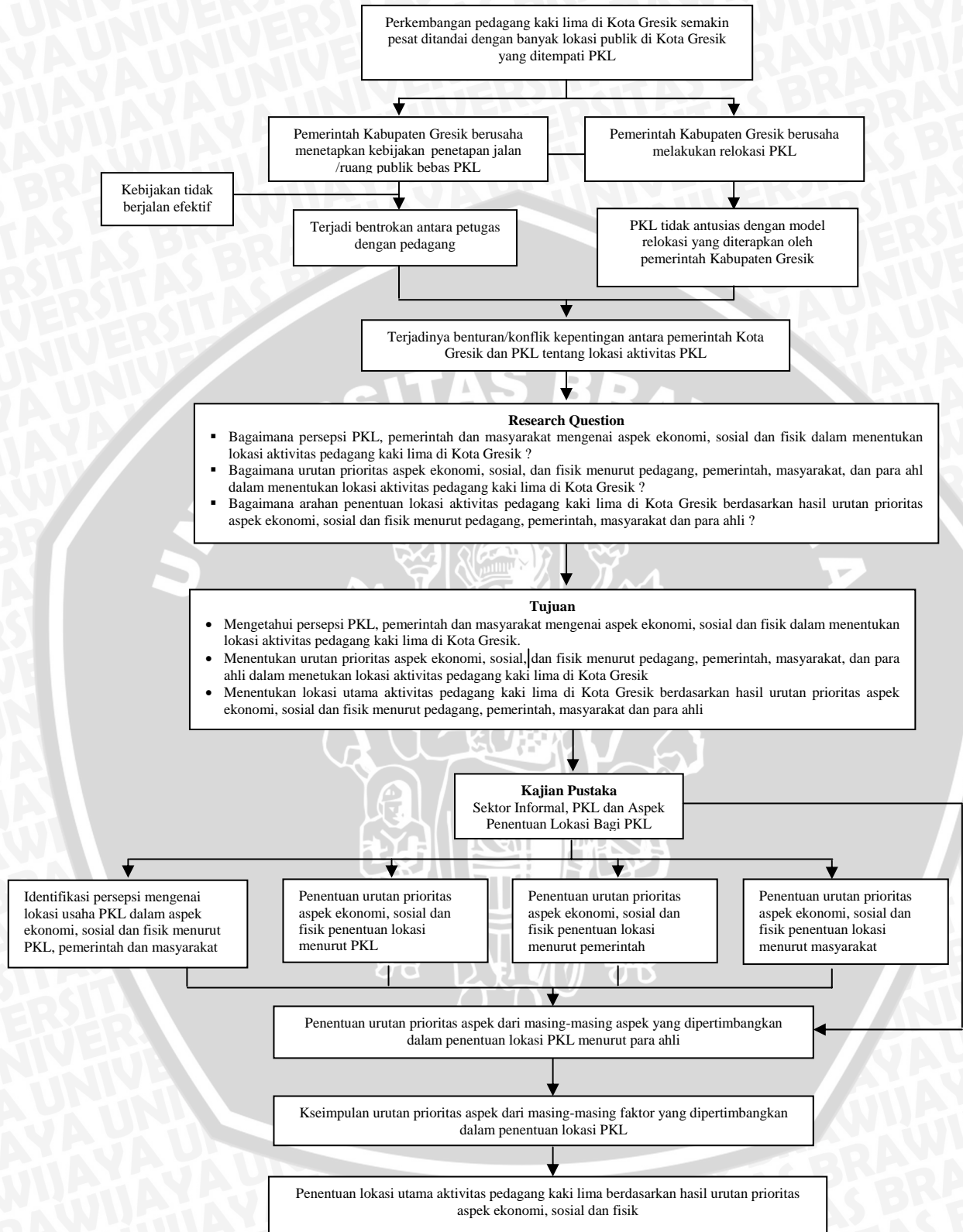
1.8 Kerangka Pemikiran

Pedagang kaki lima di Kota Gresik semakin marak ditandai dengan banyaknya pedagang kaki lima yang menempati lokasi-lokasi publik secara ilegal sehingga menimbulkan penurunan kualitas lingkungan perkotaan baik di kawasan perdagangan, pemerintahan, permukiman, maupun pendidikan di Kota Gresik. Adanya fenomena ini menyebabkan pemerintah Kabupaten Gresik melakukan berbagai upaya antara lain mencoba menetapkan kebijakan jalan/ruang publik bebas aktivitas PKL yang diaplikasikan dalam bentuk penertiban secara rutin dan gencar oleh Satpol PP. Selain itu pemerintah juga berusaha untuk melakukan relokasi pedagang kaki lima.

Namun, sayangnya upaya-upaya pemerintah tersebut tidak berjalan dengan efektif karena upaya penertiban hanya menimbulkan bentrokan antara pedagang dan petugas yang menyebabkan beberapa petugas terluka. Sedangkan PKL juga tidak antusias dengan model relokasi yang ditetapkan pemerintah karena tidak sesuai dengan harapan PKL karena lokasi tidak dapat menjamin kesejahteraan mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa inti dari permasalahan pedagang kaki lima di Kota Gresik adalah adanya benturan/konflik kepentingan antara pemerintah dan pedagang dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima. Dimana pemerintah cenderung mengutamakan estetika dan keteraturan kota sedangkan pedagang cenderung mempertahankan lokasi-lokasi publik yang strategis dan ramai demi mempertahankan kesejahteraan hidup mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, menurut Rachbini (1991) mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan sektor informal harus diikuti dengan pengetahuan yang baik mengenai keadaan mereka, baik motivasi maupun asumsinya. Untuk menghasilkan kebijakan penataan lokasi pedagang kaki lima yang efektif perlu dilakukan suatu analisis guna mengetahui aspek penentuan lokasi antara lain aspek ekonomi, sosial dan fisik yang dapat dijadikan prioritas untuk dipertimbangkan dalam menentukan lokasi bagi aktivitas mereka dengan cara memadukan urutan aspek-aspek dari seluruh *Stakeholder* yang berpengaruh yaitu pemerintah, pedagang kaki lima, masyarakat dan para ahli.

Hasil analisisnya adalah urutan prioritas dari masing-masing aspek ekonomi, sosial dan fisik yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai arahan dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik, sehingga dapat meminimalkan terjadinya konflik kepentingan khususnya antara pemerintah dan pedagang kaki lima.

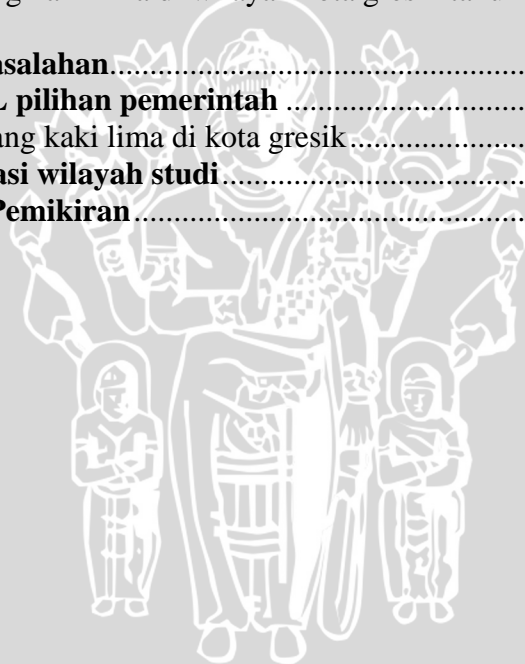


Gambar 1.5 Kerangka Pemikiran

Sumber : Hasil Pemikiran 2006



BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Pembatasan Masalah.....	8
1.4. Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan	9
1.6 Ruang Lingkup	10
1.6.1 Ruang lingkup wilayah	10
1.6.2 Ruang lingkup materi.....	12
1.7. Manfaat Penelitian	13
1.7.1 Bagi akademisi.....	13
1.7.2 Bagi mahasiswa	13
1.7.2 Bagi pemerintah.....	13
1.7.3 Bagi masyarakat (pedagang dan pengunjung).....	13
1.8 Kerangka Pemikiran	14
 Tabel 1.1 Jumlah pedagang kaki lima di wilayah kota gresik tahun 2005	 4
 Gambar 1.1 Alur Permasalahan	 5
Gambar 1.2 Lokasi PKL pilihan pemerintah	6
Gambar 1.3 lokasi pedagang kaki lima di kota gresik.....	6
Gambar 1.4 Peta orientasi wilayah studi	11
Gambar 1.5 Kerangka Pemikiran	15



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Sektor Informal Dan Pedagang Kaki Lima

2.1.1 Sektor informal

A. Konsep sektor informal

Berkaitan dengan pekerjaan di sektor informal ini J. Bremen dalam (Suparlan, Parsudi, 1986:29) mengklasifikasikan dalam beberapa kategori yaitu :

1. Kelompok "petit burgeois", yaitu mereka yang memiliki usaha sendiri dengan modal dan ketrampilan yang cukup;
2. Kelompok "labour elite", yaitu mereka yang memperoleh penghasilan tetap;
3. Kelompok "proletariat", yaitu buruh pada usaha kecil dan usaha sendiri tanpa modal atau dengan modal yang sangat terbatas;
4. Kelompok "lumpen proletariat", atau "populer" yang kelompok miskin yang kegiatannya di luar hukum atau mirip gelandangan atau pengemis.

Dua kelompok disebut terakhir itulah yang paling menonjol di lingkungan permukiman kumuh di kota-kota besar di Indonesia. Friedmann dan Sullivan secara menyeluruh menjelaskan tentang kelompok sosial ekonomi kota yang diperinci sebagai berikut :

1. Sektor formal terdiri dari tiga kelompok, yaitu *corporate professional managerial* yang terdiri dari pegawai tinggi, profesional, manager, dan pengusaha perusahaan besar maupun menengah; *corporate supervision* yang terdiri dari pengawas, mandor, dan pekerja administrasi; dan *corporate production* yang terdiri dari pada buruh industri atau perusahaan.
2. Sektor informal terdiri dari dua kelompok yaitu *family enterprise sector* atau pengusaha kecil milik keluarga, dan *individual enterprise workers* atau mereka yang usaha sendiri atau memburuh secara tidak tetap.

Konsep dualistis bagi lapangan kerja di kota yang memisahkan sektor formal dan sektor informal, yang dipelopori oleh ILO dan banyak digunakan oleh para peneliti di Indonesia, sebetulnya sudah mulai diragukan. Keberatan utama yang diajukan adalah konsep sektor informal dan definisi operasional yang diterapkan terlalu bersifat umum sehingga mencakup usaha dan pekerja dengan ciri ekonomi dan sosial yang terlalu jauh berbeda.

Pada kalangan para pemerhati dan peneliti tentang sektor informal telah memiliki semacam konsensus (tidak tertulis) perihal dua hal. Pertama, bahwa sektor informal pada hakekatnya merupakan konsep ekonomi, sehingga kegiatannya dapat dikelompokkan menurut klasifikasi lapangan usaha. Kedua, bahwa yang dianalisis adalah perilaku “unit usaha” dan bukan “keluarga” atau “individu”. Terhadap unit usaha yang skalanya paling kecil (swakarya atau mandiri) maka perilaku unit usaha akan identik dengan perilaku individu (Hidayat, 1996 : 6).

Konsep operasional yang mungkin dapat dipakai dalam membatasi siapakah yang tergolong ke dalam sektor informal adalah (Firdausy, 1995 : 9):

1. Unit usaha yang kecil;
2. Pola kegiatannya tidak teratur baik dalam arti waktu, permodalannya dan penerimaannya;
3. Tidak mempunyai tempat yang tetap atau keterikatan dengan usaha lain;
4. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus, sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan angkatan kerja;
5. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian;
6. Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga sering dikatakan “liar”.

Berdasarkan teori di atas dapat diketahui bahwa sektor informal di Kota Gresik termasuk kelompok “proletariat”, yaitu buruh pada usaha kecil dan usaha sendiri tanpa modal atau dengan modal yang sangat terbatas. Sektor informal di Kota Gresik juga masuk dalam seluruh konsep operasional yang mungkin dapat dipakai dalam membatasi siapakah yang tergolong ke dalam sektor informal.

B. Pengertian sektor informal

Sektor informal berkembang karena pertumbuhan kesempatan kerja di sektor formal tidak secepat laju pertumbuhan pencari kerja (Soedarsono, 1985). Oleh karena itu inti dari timbulnya sektor informal di perkotaan adalah karena alasan kesempatan kerja. Hampir setengah dari angkatan kerja di kota bekerja di sektor informal, yang berarti sektor tersebut memberikan sumbangsih kepada *regional income* kota. Dilihat dari ketahanan nasional adanya sektor informal kota dapat membantu stabilisasi di sektor perburuhan karena sektor tersebut menghasilkan barang dan jasa yang

dikonsumsi oleh tenaga kerja rendah yang bekerja di sektor formal (sering pula dikonsumsi oleh tenaga kerja berpenghasilan tinggi).

Secara rinci Sethuraman mencoba menguraikan sektor informal sebagai berikut :

“Sektor informal terdiri dari unit-unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri dan dalam usahanya itu sangat dihadapkan berbagai kendala seperti faktor modal fisik, faktor pengetahuan, dan faktor ketrampilan” (Sethuraman, 1981).

Sampai saat ini para peneliti belum berhasil merumuskan secara tajam apa yang dimaksud dengan sektor informal, yang sudah dilakukan adalah menandai kegiatan-kegiatan ekonomi yang mencerminkan ciri-ciri tertentu. Oleh karena itu secara umum pengertian sektor informal dapat diuraikan melalui beberapa ciri/karakter yang dimilikinya. Menurut Hart dan ILO (Prisma 1985 : 6), sektor informal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Bersifat padat karya;
2. Didominasi oleh hubungan kekeluargaan/ kekerabatan;
3. Pendidikan formal cenderung rendah;
4. Skala kegiatan kecil;
5. Tidak adanya proteksi dari pemerintah;
6. Keahlian dan keterampilan rendah;
7. Mudah dimasuki atau dilakukan oleh siapa saja;
8. Memiliki pola berubah-ubah atau tidak stabil;
9. Tingkat pendapatan tidak sepenuhnya dibenarkan.

Walaupun demikian, pengertian terhadap sektor informal tidak secara mutlak mengikuti ciri-ciri tersebut. Ciri sektor informal masih sangat kabur, walaupun permasalahannya cukup jelas (*Kompas*, Juli 1982, November 1984), yaitu antara lain mengganggu ketertiban kota dan merusak keindahan kota, disamping masalah pengangguran dan ketenagakerjaan.

Sedangkan di Indonesia pengertian umum tentang sektor informal meliputi tiga hal (Hidayat, 1983) :

1. Sektor yang tidak meminta bantuan atau proteksi ekonomi dari pemerintah, seperti perlindungan tarif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan, pemberian kredit dengan bunga yang relatif rendah, pembimbingan teknis dan ketatalaksanaan, perlindungan dan perawatan tenaga kerja, penyediaan teknologi, hak paten;

2. Sektor yang belum mempergunakan bantuan ekonomi pemerintah, meskipun bantuan itu telah tersedia;
3. Sektor yang telah menerima dan serta menggunakan bantuan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, tetapi bantuan itu belum sanggup membuat unit usaha itu berdikari.

Berdasarkan teori di atas dapat diketahui bahwa pengertian sektor informal di Kota Gresik yang termasuk dalam ciri-ciri sektor informal menurut Hart dan ILO adalah bersifat padat karya, dominasi oleh hubungan kekeluargaan/kekerabatan, pendidikan formal cenderung rendah (SD dan SMP), skala kegiatan kecil, tidak adanya proteksi dari pemerintah untuk pedagang kaki lima illegal, keahlian dan keterampilan rendah, mudah dimasuki atau dilakukan oleh siapa saja, memiliki pola berubah-ubah atau tidak stabil dan tingkat pendapatan tidak sepenuhnya dibenarkan. Sedangkan menurut pengertian secara umum sektor informal di Kota Gresik adalah sektor yang belum mempergunakan bantuan ekonomi pemerintah, meskipun bantuan itu telah tersedia dan ada juga yang telah menerima serta menggunakan bantuan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, tetapi bantuan itu belum sanggup membuat unit usaha itu berdikari.

C. Ciri-ciri sektor informal

Terminologi sektor informal yang digunakan oleh buruh internasional (ILO) yakni bahwa umumnya mereka yang terlibat dalam sektor informal adalah miskin, kebanyakan dalam usia kerja utama, berpendidikan rendah, upah yang diterima di bawah upah minimum, modal usaha rendah serta sektor ini memberikan kemungkinan untuk mobilitas vertikal (Manning dan Noer, 1996:76). Cakrawala mereka tampaknya masih terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dan menghasilkan pendapatan yang langsung bagi dirinya sendiri.

Adapun dari studi yang dilakukan oleh Magdalena dalam Yustika, (2000:194-195) didapatkan ciri-ciri sektor informal adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan usahanya yang tidak terorganisir secara baik, karena unit usaha timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor informal;
2. Pada umumnya unit usahanya tidak mempunyai ijin usaha;
3. Pola kegiatan usaha yang tidak teratur dengan baik dalam arti lokasi maupun jam kerja;
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai pada sektor ini;

5. Unit usaha berganti-ganti dari satu sub sektor ke sub sektor yang lain;
6. Teknologi yang digunakan masih tradisional;
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga kecil;
8. Untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
9. Pada umumnya unit usaha termasuk "one man enterprise" dan walaupun pekerja biasanya berasal dari keluarga sendiri;
10. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi;
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Berdasarkan uraian mengenai ciri-ciri sektor informal tersebut, dapat ditabulasikan secara lebih detail pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1 Ciri-ciri sektor informal

Aspek	Sektor Informal
Skala usaha	Kecil dan tidak berbadan hukum
Kelayakan usaha	Tidak ada/seadanya
Pembukuan usaha	Tidak ada/sederhana
Perencanaan usaha	Ada sambil jalan
Permodalan	Kecil
Sumber modal	Milik sendiri/patungan Bank plecit (lembaga keuangan tidak resmi)
Perputaran modal	Lambat
Pengakuan negara	Tidak ada/kecil
Perlindungan hukum	Tidak ada/kecil
Bantuan negara	Tidak ada/tidak sampai
Ijin usaha	Tidak resmi
Pemberi ijin	RT/RW/tetangga usaha
Unit usaha	Mudah berganti
Kegiatan usaha	Kurang terorganisir
Organisasi	Kekeluargaan
Teknologi yang digunakan	Sederhana dan padat karya
Pendidikan formal	Tidak begitu diperlukan
Ketrampilan	Lebih banyak bukan dari lembaga formal
Jam kerja	Tidak tentu
Stok barang	Sedikit hingga sedang
Kualitas barang	Rendah hingga menengah
Omzet	Tidak tentu dan sulit diprediksi
Khalayak sasaran	Kelas bawah, menengah, hingga atas
Jumlah karyawan	Tidak tentu biasanya 1-5 orang
Hubungan kerja	Kekeluargaan dan saling percaya
Hubungan majikan karyawan	Kekeluargaan, teman, keluarga
Tempat usaha	Mudah berpindah-pindah tempat, sempit
Kontribusi terhadap negara	Relatif kecil
Karakteristik usaha	Mudah dimasuki

Sumber : Alisjahbana, 2003 : 20

Berdasarkan teori di atas, maka dapat diketahui bahwa ciri-ciri yang termasuk dalam karakteristik sektor informal di Kota Gresik adalah skala usahanya kecil, tidak ada pembukuan usaha, tidak ada perencanaan usaha, modal kecil, sumber modal milik sendiri, perputaran modal lambat, tidak ada pengakuan negara bagi pedagang kaki lima ilegal, terdapat perlindungan hukum bagi pedagang kaki lima legal, terdapat bantuan pemerintah namun tidak sampai, ijin usaha tidak resmi, unit usaha mudah berganti, kegiatan usaha kurang terorganisir, organisasi kekeluargaan, teknologi yang digunakan sederhana, pendidikan formal tidak diperlukan, ketrampilan rendah, jam kerja tidak tentu, stok barang sedikit-menengah, kualitas barang sedang, omzet tidak tentu, khalayak sasaran kelas bawah – atas, jumlah karyawan tidak tentu, tempat usaha berpindah-pindah dan tetap, kontribusi pada negara kecil dan mudah dimasuki.

2.1.2 Pedagang kaki lima di perkotaan

A. Pengertian pedagang kaki lima

Secara umum pengertian pedagang kaki lima berasal dari kata “kaki lima” yang semula merupakan suatu ordonansi, yang menentukan bahwa pada jalur-jalur tertentu diperlukan pengadaan jalur selebar 5 (lima) *feet* (lima kaki) atau sekitar 1,5 meter sebagai trotoar, yang selanjutnya dipakai untuk sebutan pedagang kaki lima atau tempat pedagang yang memanfaatkan trotoar (FT Unpar, 1980).

Pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan oleh Kartono, dkk. (1980 : 3-7), yaitu :

1. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen;
2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain (menggunakan pikulan, kereta dorong atau tempat stan yang tidak permanen serta bongkar pasang);
3. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran;
4. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekadar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya;
5. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah dan bisanya tidak berstandar;
6. Volume peredaran uang tidak besar, para pembeli umumnya merupakan pembeli berdaya beli rendah;

7. Usaha skala kecil bisa berupa *family enterprise*, dimana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung;
8. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha perdagangan kaki lima;
9. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan secara musiman;
10. Barang yang dijual biasanya merupakan *convenience goods* jarang sekali *speciality goods*;
11. Sering kali dalam suasana psikologis tidak tenang, diliputi perasaan takut kalau tiba-tiba kegiatan mereka dihentikan oleh Tim Penertiban Umum sebagai aparat pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor informal pedagang kaki lima perkotaan tidak saja merupakan pelembagaan perilaku ekonomi semata, lebih dari itu sektor informal juga merupakan pelembagaan sosial yaitu keadaan integral, baik internal maupun eksternal, dari beragam faktor baik sosial ekonomi, politik, maupun budaya pada masyarakat modern industrial perkotaan.

Menurut Kuntro, dalam Purnama (2003:48), pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pedagang/jasa yaitu melayani kebutuhan barang-barang/makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas dalam melakukan usaha tersebut guna menggerakkan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar, sebagian badan jalan) dengan tidak mempunyai legalitas formal.

Sedangkan istilah "kaki lima" berasal dari kata "trotoar" yang dahulu berukuran 5 feet atau sama dengan 1,5 meter, sehingga pengertian pedagang kaki lima adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima dan biasanya mengambil tempat/lokasi di lahan keramaian umum seperti trotoar depan pertokoan, kawasan perdagangan, parkir, sekolah (Widodo, 2002 : 27).

Karakteristik pembeli dari perdagangan sektor informal didominasi oleh penduduk yang berpendapatan rendah (Mc. Gee, 1975), walaupun secara faktual tidak selalu demikian. Pada kasus tertentu, para pedagang kaki lima tersebut juga melayani atau dapat didominasi oleh pembeli dari golongan penduduk berpendapatan menengah ke atas. Pada prinsipnya lokasi perdagangan diharapkan dapat meraup sebanyak

mungkin konsumen. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dimengerti bahwa jenis barang yang diperdagangkan serta cara menjajakan/menampilkan barang yang diperdagangkan akan memberikan pengaruh pada pemilihan lokasi tempat mangkalnya.

Disamping itu elemen “waktu” juga memberikan pengaruh dalam suatu kegiatan. Kondisi setiap lingkungan perkotaan selalu mengalami perubahan penampilan dari waktu ke waktu. Hal ini berarti bahwa elemen ‘waktu” tidak terpisahkan dari aspek “tempat” atau ‘*place*’ (Lynch, 1972). Konsep waktu dan tempat ini dapat dipandang sesuai dengan skala peninjauannya, yaitu dalam skala harian, mingguan, bulanan dan seterusnya. Bila dikaitkan dengan para pelakunya, konsep “waktu” tersebut dipengaruhi secara individual, institusional ataupun dalam arti kelompok sosial (Bourne, 1982), dalam hal ini pedagang kaki lima sebagai suatu unsur pembentuk penampilan lingkungan sangat dipengaruhi oleh elemen “waktu”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa jenis dagangan dan waktu memberikan pengaruh pada pemilihan lokasi tempat mangkal pedagang kaki lima. Sehingga aspek jenis dagangan dan waktu berjualan pedagang diambil sebagai variabel penelitian dalam aspek ekonomi penentuan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik.

B. Karakteristik pedagang kaki lima

1. Jenis dagang pedagang kaki lima

Mc Gee (1977 : 81-82) menggolongkan jenis barang yang diperdagangkan menjadi :

- a. Jenis bahan mentah dan setengah diolah, seperti buah-buahan atau sayuran dan sebagainya;
- b. Jenis bahan makanan jadi, seperti martabak, roti bakar dan sebagainya;
- c. Jenis bahan bukan makanan, seperti lukisan, kacamata dan sebagainya;
- d. Jenis barang berupa jasa, seperti reparasi.

2. Bentuk sarana perdagangan pedagang kaki lima

Ditinjau dari alat/sarana jual yang dipergunakan, maka kegiatan perdagangan kaki lima dapat dibagi menjadi lima tipe dasar, yaitu (Wawoeroentoe, 1974) :

a. Hampanan di Lantai

Merupakan kelompok kegiatan perdagangan kaki lima yang mempergunakan alat jual seperti tikar, kain, plastik, meja dalam bentuk sederhana, bakul atau

yang sejenis sebagai alas untuk menjajakan barang dagangannya. Jika dikaitkan dengan cara melakukan kegiatannya, pedagang kaki lima dalam kelompok ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok pedagang kaki lima berpindah.

b. Pikulan

Merupakan kelompok kegiatan perdagangan kaki lima yang mempergunakan sebuah atau dua buah keranjang dengan cara dipikul. Kelompok kegiatan dengan sarana jual pikulan merupakan suatu bentuk aktivitas perdagangan yang masih menunjukkan ciri-ciri tradisional. Jika dikaitkan dengan tata cara melakukan kegiatannya dapat digolongkan ke dalam kelompok pedagang kaki lima berkeliling atau berpindah.

c. Meja/jongko

Merupakan kelompok kegiatan perdagangan kaki lima yang mempergunakan meja/jongko sebagai sarana penjualan barang yang diperdagangkan. Pada kelompok yang mempergunakan meja ada yang diberi pelengkap atap dan ada yang tidak. Fungsi atap tersebut adalah untuk melindungi barang maupun pedagang itu sendiri dari cuaca seperti panas, hujan ataupun dari gangguan debu. Bila dikaitkan dengan tata cara melakukan kegiatan, kelompok ini dapat dimasukkan dalam kelompok pedagang kaki lima menetap.

d. Kereta dorong

Merupakan kelompok kegiatan perdagangan kaki lima yang mempergunakan sebuah kereta dorong sebagai sarana dagangnya. Alat ini pun ada yang dilengkapi dengan atap, ada yang tidak dan ada yang diberi tenda. Bila dikaitkan dengan tata cara pelaksanaan kegiatannya, kelompok ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok pedagang kaki lima menetap. Penggunaan alat kereta dorong banyak dipakai oleh pedagang kaki lima yang memerlukan kemudahan dalam mengangkut barang dagangannya.

e. Kios

Merupakan kelompok kegiatan perdagangan kaki lima yang mempergunakan kios sebagai sarana penjualannya. Bentuk kios ini dapat dikatakan mempunyai tingkatan yang lebih maju dibandingkan dengan bentuk sarana jual yang lain. Kios yang dipergunakan ada yang berupa kios permanen ataupun semi permanen. Bila dikaitkan dengan tata cara pelaksanaan kegiatannya, kelompok ini dapat dimasukkan ke dalam kelompok pedagang kaki lima menetap.

Selanjutnya menurut Mc. Gee dan Yeung (1977 : 82-83) membedakan sarana usaha menjadi tiga yaitu:

a. Non Permanen (Mobile Hawker Units)

Adalah tipe yang mewakili berbagai bentuk sarana dagang yang mudah dibawa atau bergerak mulai dari sepeda sampai dengan keranjang.

b. Semi Permanen (Semistatic Hawker Units)

Adalah tipe dimana sarana digerakkan setelah waktu cukup lama.

c. Permanen (*Static Hawker Units*)

Adalah tipe dimana sarana dagang didirikan secara permanen di jalan atau ruang publik.

3. Ruang aktivitas pedagang kaki lima

Pengertian ruang dalam Undang-Undang No.24/1992 adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan menurut Ashihara (1983) dalam Devitasari (2003:38) ruang aktivitas adalah suatu wadah atau ruang yang terbentuk oleh elemen arsitektural, yang didalamnya terkandung dan terdapat fungsi, maksud, tujuan dan kehendak manusia.

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977:61) dalam Devitasari (2003 : 38) berpendapat bahwa pedagang kaki lima pada umumnya cenderung untuk beraktivitas secara berkelompok pada suatu area yang memiliki tingkat intensitas aktivitas yang tinggi, seperti pusat-pusat hiburan, pasar, taman, maupun pada simpul-simpul jalur transportasi. Sama halnya dengan pendapat Bromley, dalam Manning dan Effendi (1996:232) berdasarkan penelitiannya mengenai sektor informal di Cali, Colombo, dimana para pedagang sektor informal dijumpai di semua sektor kota, terutama berpusat di tengah kota dan pusat-pusat hiburan lainnya ketika ada pertunjukan sehingga menarik sejumlah besar penduduk.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima cenderung memilih ruang tempat beraktivitasnya pada lokasi-lokasi strategis yang tingkat kunjungannya tinggi seperti pusat-pusat aktivitas di suatu kota. Kecenderungan ini berkaitan dengan salah satu fungsi pemasaran yakni mendekatkan komoditi kepada konsumen (*place utility*). Seperti yang dikatakan Ramli (1992:38) dalam Devitasari (2003:38) pedagang kaki lima selalu berusaha agar barang dagangannya terjual, untuk

itu memilih tempat berjualan yang umum dan banyak di datangi pengunjung seperti jalan raya, emper-emper toko dan pasar-pasar.

Menurut Shirvani (1985:37) dalam Devitasari (2003 : 38) mengungkapkan bahwa aktivitas pedagang kaki lima di perkotaan merupakan pendukung aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang ada (*activity support*). Dimana aktivitas pedagang kaki lima muncul karena adanya aktivitas-aktivitas fungsional kota. Seperti yang diungkapkan Rachbini dan Hamid (1994 : 90 – 91) dalam Devitasari (2003 : 38) dalam observasinya mengenai pedagang kaki lima di Jakarta dan Surabaya, ditemukan adanya kecenderungan bahwa setiap berdiri gedung bertingkat di Jalan Sudirman Jakarta maka muncullah sejumlah pedagang kaki lima berderet sepanjang jalan. Aktivitas pedagang kaki lima ini bertujuan untuk melayani para karyawan atau pegawai yang bergaji rendah. Jadi dimana ada aktivitas-aktivitas fungsional, pedagang kaki lima siap menawarkan jasanya yang juga mendukung aktivitas utama tersebut.

Sesuai dengan uraian di atas, dapat terlihat pada kenyataan pedagang kaki lima pada umumnya menempati ruang umum atau ruang privat yang ada di kota. Ruang umum atau disebut juga ruang publik merupakan tempat berkumpulnya warga kota untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperkuat ikatan sebagai suatu komunitas (Devitasari, 2003 : 39). Ruang umum merupakan ruang milik pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Seperti trotoar, taman kota, ruang terbuka termasuk fasilitas atau sarana kota seperti halte, jembatan penyeberangan dan lain sebagainya. Ruang privat adalah ruang yang dimiliki oleh pemilik toko, perkantoran, dan lain-lain. Penggunaan ruang-ruang ini kemudian menjadi *conflict of interest* atau permasalahan-permasalahan yang timbul akibat keberadaan pedagang kaki lima mulai dari pemanfaatan ruang publik sampai kepada kemerosotan fisik kota.

Beberapa kriteria sebagai tolak ukur kesesuaian ruang aktivitas PKL pada suatu kawasan pusat kota, antara lain :

- a. Lokasi tersebut memiliki ruang untuk aktivitas PKL dengan ukuran lebar minimal ruang usaha yang dipakai PKL di kawasan ditambah 2 meter ruang untuk pejalan;
- b. Lokasi PKL mudah dilihat dan berada pada lokasi yang sering dikunjungi orang (tingkat kunjungan tinggi);
- c. Ruang aktivitas PKL yang dikembangkan harus sesuai dengan guna lahan yang telah ditentukan pemerintah;

- d. Ruang aktivitas PKL keberadaannya tidak melanggar ketentuan-ketentuan teknis dalam pembangunan;
- e. Aktivitas PKL pada suatu ruang mempunyai interaksi dengan aktivitas formal di sekitarnya (memiliki hubungan yang saling mendukung);
- f. Keberadaan PKL diterima oleh masyarakat sekitar (rasa aman masyarakat tidak terganggu) dan memiliki batas sosial dengan jarak minimal 1,2 meter dari bangunan tempat masyarakat tinggal;
- g. Ruang aktivitas PKL mendapat dukungan masyarakat (terutama masyarakat sekitar lokasi PKL).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa karakteristik pedagang kaki lima di Kota Gresik yang cenderung memilih tempat berjualan pada lokasi-lokasi strategis yang tingkat kunjungannya tinggi seperti pusat-pusat aktivitas di suatu kota seperti jalan raya, emper-emper toko dan pasar-pasar. Oleh karena 5 (lima) dari 9 (sembilan) titik lokasi aktivitas pedagang kaki lima berada di awasan pusat kota Gresik maka teori kriteria tolak ukur kesesuaian ruang aktivitas PKL pada suatu kawasan pusat kota diperlukan dalam pembahasan arahan penentuan lokasi pedagang kaki lima di Kota Gresik.

4. Pola pelayanan aktivitas pedagang kaki lima

a. Fungsi pelayanan pedagang kaki lima

Sehubungan dengan fungsi yang dimiliki oleh kegiatan pedagang kaki lima, secara umum memiliki 4 (empat) fungsi (Noegraha, 1986), yaitu :

- Fungsi pelayanan perdagangan eceran

Perdagangan kaki lima yang tergolong ekonomi lemah mempunyai fungsi perdagangan eceran, maksudnya kegiatan ini langsung dikonsumsi oleh konsumen. Hal ini karena kegiatan tersebut mempunyai kegiatan perekonomian skala kecil, maka barang dan atau jasa yang dihasilkan biasanya terbatas yang tergantung dari modal maupun keterampilan yang dimiliki. Pada umumnya setiap unit usaha menyediakan barang secara spesifik, satu atau dua barang. Selain itu barang yang disediakan juga sangat beragam sifatnya, mulai dari kelompok barang primer (barang kebutuhan sehari-hari seperti sayur-sayuran, bumbu masak dll), sampai barang-barang sekunder (barang bukan kebutuhan sehari-hari seperti sepatu, buah-buahan dan jasa).

Faktor yang mendorong munculnya kegiatan tersebut adalah karena pedagang kaki lima dapat menyediakan barang yang relatif murah dibandingkan dengan harga barang di toko. Begitu pula stratifikasi penduduk yang memanfaatkan kegiatan ini sangat beragam, dari golongan pendapatan rendah sampai tinggi.

- **Fungsi pelayanan jasa**

Selain sebagai unit usaha yang menyediakan barang, ada pedagang kaki lima yang menyediakan pelayanan jasa. Tetapi unit usaha ini relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan kelompok yang pertama yang mempunyai fungsi komersial (pedagang eceran), karena memerlukan keterampilan khusus untuk membuka usaha tersebut. Termasuk dalam kelompok ini misalnya : tukang tambal ban, tukang reparasi, tukang stempel dan lain-lain.

Faktor pendorong timbulnya kegiatan ini adalah sifat pelayanan jasa yang disediakan kurang atau tidak dimungkinkan disediakan oleh sektor formal, disamping itu lokasi kegiatannya juga pada tempat-tempat tertentu saja.

- **Fungsi pelayanan hiburan**

Kegiatan perdagangan kaki lima mempunyai fungsi sosial sebagai tempat hiburan, yang berarti mempunyai fungsi hiburan yaitu dalam arti bisa memberikan suatu suasana yang menyenangkan atau memiliki ciri yang khas, yang kebanyakan dimiliki oleh kegiatan perdagangan kaki lima yang melakukan aktivitas pada malam hari. Fungsi yang sebenarnya muncul sebagai akibat sampingan dari kegiatan hiburan dan sifat kegiatan formal dalam melakukan aktivitasnya, dimana kegiatan perdagangan kaki lima malam hari ini dapat beroperasi sampai tengah malam atau dini hari sementara kegiatan formal terbatas waktu kerjanya. Keadaan ini mendorong minat para pedagang untuk menggantikan fungsi tersebut.

- **Fungsi pelayanan sosial – ekonomi**

Fungsi ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pemerintah dan sisi pedagang. Bagi pemerintah keberadaan pedagang kaki lima dapat mengurangi pengangguran karena lapangan pekerjaan ini bersifat padat karya. Sedangkan dari sisi pedagang merupakan sumber penghasilan terakhir yang dapat dikerjakan oleh pedagang atau sebagai sumber pendapatan tambahan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka fungsi pelayanan pedagang kaki lima di Kota Gresik termasuk pada fungsi pelayanan pedagang eceran, jasa dan hiburan.

b. Golongan pengguna jasa pedagang kaki lima

Golongan pengguna jasa PKL yang dilayani oleh aktivitas jasa PKL pada umumnya terdiri dari golongan pendapatan menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena harga yang ditawarkan oleh pedagang sektor informal relatif lebih rendah sehingga terjangkau bagi golongan pendapatan rendah sekalipun. Sedangkan bagi golongan berpendapatan tinggi ada kecenderungan untuk tidak mengunjungi lokasi aktivitas PKL, terutama untuk jenis barang dagangan bukan makanan. Pertimbangannya adalah segi kualitas barang yang biasanya lebih rendah, adanya kemungkinan penipuan dalam hal kualitas barang yang biasanya lebih rendah, adanya kemungkinan penipuan dalam hal kualitas barang, dan sebagainya. Sehingga golongan ini lebih memilih untuk berbelanja di toko atau supermarket. Selain alasan tersebut, dari sisi psikologis ada kecenderungan gaya hidup masyarakat kota yang selalu menjaga gengsi, sehingga mereka lebih percaya diri apabila berbelanja di tempat-tempat yang dapat mewakili status mereka. Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa masyarakat berpendapatan menengah ke atas mendatangi lokasi aktivitas perdagangan sektor informal, tetapi ini terjadi sekali waktu atau bersifat insidental.

Menurut Rachbini dan Hamid (1994 : 92), sekitar dua juta buruh atau pegawai sektor informal (swasta maupun negeri) di Jakarta kurang lebih satu setengah juta membeli makanan dari sektor informal. Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan dalam kondisi gaji di sektor informal yang rata-rata rendah. Kondisi ini juga menunjukkan adanya hubungan antara sektor formal dan informal.

Berdasarkan penjelasan teori di atas dapat diketahui bahwa karakteristik masyarakat yang mengunjungi dan yang berada di sekitar lokasi pedagang kaki lima merupakan masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah yang menyukai mengunjungi dan membeli dari pedagang kaki lima karena harganya lebih murah dan banyak macam pilihannya.

c. Skala pelayanan aktivitas pedagang kaki lima

Skala pelayanan suatu aktivitas jasa pedagang sektor informal dapat diketahui dari asal pengguna jasa. Besar kecilnya skala pelayanan tergantung dari jauh dekatnya pengguna jasa tersebut. Semakin dekat asal pengguna, maka skala pelayanan semakin kecil, sebaliknya semakin jauh asal pengguna jasa tersebut, maka skala pelayanan semakin besar (Manning dan Effendi, 1996 : 366-372).

Berdasarkan penjelasan teori di atas maka skala pelayanan aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik adalah skala Kabupaten, karena masyarakat yang mengunjungi dan yang berada di lokasi pedagang kaki lima sebagian besar berasal dari Kabupaten Gresik

d. Waktu pelayanan aktivitas pedagang kaki lima

Menurut Mc Gee dan Yeung (1977 : 76), pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Adapun perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan, walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antar keduanya. Temuan ini didasarkan pada penelitiannya terhadap “*hawkers*” di kota-kota Asia Tenggara.

Saat teramai pada suatu waktu pelayanan dipengaruhi oleh orientasi jasa terhadap pusat-pusat kegiatan di sekitarnya. Saat teramai bagi aktivitas pedagang sektor informal di dekat pusat-pusat perbelanjaan akan berbeda dengan saat-saat ramai di dekat kawasan wisata, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka aspek waktu pelayanan aktivitas/waktu berjualan pedagang kaki lima diambil sebagai variabel penelitian dalam aspek ekonomi penentuan/pemilihan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik.

2.2 Tinjauan Aspek Penentuan Lokasi Pedagang Kaki Lima

2.2.1 Kedekatan lokasi usaha pedagang kaki lima dengan tempat tinggal

Menurut Turner, dalam Widodo (2000 : 98) membedakan preferensi pemilihan rumah tinggal berdasarkan tingkat penghasilan masyarakat. Masyarakat berpenghasilan rendah lebih memilih rumah tinggal yang dekat dengan tempat kerja, berbeda dengan

golongan masyarakat atas yang lebih mementingkan aspek kenyamanan dan ketersediaan fasilitas sosial sebagai prioritas utama dalam memilih lokasi tempat tinggal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka PKL sebagai kelompok masyarakat yang dominan berpenghasilan rendah, tentunya akan berusaha memilih lokasi usaha sedekat mungkin dengan tempat tinggal mereka. Jarak lokasi usaha sedekat mungkin dengan tempat tinggal mereka. Jarak lokasi PKL dengan tempat tinggal pedagang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2 Kriteria kedekatan lokasi usaha pedagang kaki lima dengan tempat tinggalnya

Jarak	Kriteria
Kurang dari 1 km	Dekat
1 s/d 5 km	Sedang
Lebih dari 5 km	Jauh

Sumber : Purnama, 2003 : 57

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachbini dan Hamid (1994 : 101) juga turut mendukung adanya keterkaitan antara jarak lokasi dengan rumah tempat tinggal para PKL. Menurut mereka, terdapat korelasi yang tinggi antara lokasi usaha dengan tempat tinggal, atau dengan kata lain PKL akan bertempat tinggal dimana saja asal jaraknya dekat dengan lokasi usahanya. Seperti yang diutarakan oleh Sugiono (1998 : 10) bahwa faktor-faktor yang memperkecil modal adalah faktor jarak tempat kerja dengan tempat tinggal. Mereka harus dekat dengan lokasi usaha, apabila tidak ingin dililit besarnya ongkos transportasi.

Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka aspek kedekatan lokasi usaha pedagang kaki lima dengan tempat tinggal diambil sebagai variabel penelitian dalam aspek fisik penentuan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik.

2.2.2 Kemudahan memperoleh angkutan

Kemudahan dan kedekatan dalam wilayah suatu kota berfungsi memperlancar pertukaran barang dan jasa. Berbagai macam kegiatan ekonomi yang berada dalam suatu wilayah, apabila didukung dengan sistem angkutan kota, maka kegiatan ekonomi tersebut akan berkembang dengan lebih pesat (Reksohadiprodo, 1994 : 95). Sedangkan menurut Nelson (1958) daya tarik pada suatu fasilitas perdagangan bagi konsumen (pembeli) adalah adanya faktor kemudahan yaitu baik transportasi umum (biaya, waktu dan frekwensi) maupun transportasi pribadi (parkir, aksesibilitas, kondisi lalu lintas, jalan parkir).

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Dean, dalam Manning (1996 : 348) dalam penelitiannya mengenai sektor informal PKL di Kota Ujung Pandang, bahwa terdapat kaitan yang erat antara persebaran lokasi sektor informal PKL dengan jaringan transportasi, dimana sektor informal tumbuh pesat di sepanjang jalan besar dan memerlukan sarana dan prasarana transportasi untuk melayani penduduk.

Teori lokasi yang mengemukakan tentang transportasi disebutkan bahwa penting untuk menentukan lokasi sedemikian rupa sehingga diperoleh biaya angkutan yang minimum (Djojodipuro, 1992 : 30). Hal ini berkait pula dengan ketersediaan sarana transportasi, baik bagi PKL bersangkutan maupun pembeli/konsumen. Aktivitas perekonomian kota umumnya merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku kegiatan. Penempatan lokasi kegiatan ekonomi yang tidak mudah dijangkau, dalam arti sarana transportasi yang tersedia kurang/tidak memadai merupakan faktor penyebab kegagalan bagi pelaku yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka aspek kemudahan angkutan/sarana transportasi diambil sebagai variabel penelitian dalam aspek fisik penentuan/pemilihan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik.

2.2.3 Kedekatan lokasi usaha pedagang kaki lima dengan pusat kegiatan/keramaian kota

Aspek kedekatan (*proximity*) antara PKL dengan pusat kegiatan/keramaian kota ditunjukkan dengan lokasi aktivitas mereka yang cenderung menempati kawasan perdagangan, rekreasi, perkantoran, rumah sakit, sekolah, dan tempat-tempat keramaian lainnya yang bersifat temporer. Hal ini menjelaskan bahwa PKL mempunyai kecenderungan untuk memasarkan barang dagangannya sedekat mungkin dengan calon pembeli. Seperti yang dikemukakan oleh Bromly, dalam Manning dan Effendi (1996 : 236) bahwa dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya, PKL akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli. Mereka akan berusaha agar barang atau jasa yang dijual terlihat oleh pembeli. Oleh karena itu mereka akan memilih lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau di suatu lokasi yang merupakan lokasi aktivitas masyarakat. Sehingga kehadiran PKL banyak dijumpai di sekitar lokasi aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya. Dalam teori lokasi juga disebutkan bahwa bagi pedagang terdapat kecenderungan untuk berorientasi kepada konsentrasi konsumen dalam menentukan lokasi tempat usaha (Djojodipuro, 1992 : 30).

Adapun kriteria kedekatan lokasi usaha PKL dengan pusat kegiatan/keramaian kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Kriteria kedekatan lokasi usaha pedagang kaki lima dengan pusat kegiatan/keramaian kota

Jarak	Kriteria
Kurang dari 100 m	Dekat
Antara 100 m s/d 500 m	Sedang
Lebih dari 500 m	Jauh

Sumber : Purnama, 2003 : 57

Keberadaan PKL tersebut tidak lepas dari adanya keterkaitan antara sektor formal dan sektor informal. Semakin berkembang sektor formal, semakin berkembang pula sektor informal (Budihardjo, 1993 : 54). Hal senada juga disebutkan oleh Swasono, dalam Rachbini (1994 : 92) bahwa secara struktural kehadiran sektor informal dibutuhkan atau dapat dikatakan sebagai penyangga sektor informal, dan menurut Wirahadikusuma (1991 : 31), sektor ini disebut sebagai *bumper* bagi sektor kapitalis, yang disamping mempunyai fungsi produksi juga fungsi konsumsi.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Joedo (1997) dalam Widjajanti (2000 : 35) disebutkan bahwa penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

- Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari.
- Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar.
- Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit.
- Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Sedangkan menurut Mc. Gee dan Yeung (1977 : 108), dinyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial.

Ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat khususnya para konsumen, dikatakan oleh Nelson (1958 : 40) ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam merencanakan lokasi perdagangan eceran, antara lain :

- Kenyamanan tempat penjualan
- Kemudahan aksesibilitas (sarana transportasi)

- Berada pada pusat perdagangan

Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka aspek kemudahan angkutan/sarana transportasi diambil sebagai variabel penelitian dalam aspek fisik penentuan/pemilihan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik

2.2.4 Penentuan lokasi pedagang kaki lima menurut pemerintah kota

Menurut Alisjahbana (2003:61), peran sektor informal bagi perekonomian mendapat tanggapan berbeda-beda dari para ahli. Minimal ada dua kubu dalam menyikapi terjadinya sektor informal, yaitu kelompok yang setuju dan tidak setuju. Ada berbagai argumen yang diungkapkan oleh masing-masing kubu yang semuanya rasional. Kelompok yang tidak setuju lebih berorientasi pada ketertiban, keindahan, kebersihan, ketaatan pada hukum, dan sebagainya. mereka yang tidak setuju dalam melakukan penanganan, lebih setuju dengan pola "usir dan gusur demi ketertiban dan keindahan kota". Kelompok yang tidak setuju dengan kehadiran sektor informal menyatakan bahwa kehadiran sektor ini sebagai patologi sosial yang muncul dalam dinamika pembangunan perkotaan serta mengganggu kenyamanan dan ketertiban.

Menurut Tadjuddin Noor Effendi (1995:40), keberadaan sektor informal kurang dikehendaki keberadaannya oleh pengambil kebijakan (pemerintah pusat/daerah). Kehadiran mereka dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, keamanan, dan keindahan. Pola operasi mereka yang menempati lokasi usaha seenaknya dan membuang sisa dagangan di sembarang tempat, di mata pemerintah sangat mengganggu bagi tujuan kebersihan dan keteraturan kota.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 tentang ijin penempatan dan pembinaan pedagang kaki lima, pada Bab III yang membahas tentang pengaturan tempat usaha pada Pasal 3 disebutkan bahwa :

- (1) Dalam menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan serta alur lalu lintas jalan raya di Kabupaten Gresik, dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima tanpa ijin Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Ijin tersebut pada ayat (1) hanya diberikan untuk penggunaan tempat atau fasilitas umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Kepala Daerah dalam penetapan tempat-tempat atau fasilitas umum sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini mempertimbangkan kepentingan

sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan lingkungan disekitarnya serta keadaan pasar.

Berdasarkan penjelasan teori di atas, maka aspek kenyamanan, ketertiban, keamanan, dan kebersihan diambil sebagai variabel penelitian dalam aspek sosial penentuan/pemilihan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik

2.2.5 Konsep penawaran dan permintaan kegiatan pedagang kaki lima

Penelitian Dewan Riset Nasional (dalam Purnama, 2003 : 62) tentang kegiatan pedagang kaki lima di empat kota yaitu Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya menghasilkan temuan bahwa sebesar 77,9 % dari respondennya memiliki motivasi menjadi pedagang kaki lima karena kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan/*skill* yang dimiliki. Menjadi pedagang kaki lima merupakan pilihan yang paling mudah dimasuki, karena menjadi pedagang kaki lima dianggap sebagai cara termudah untuk mempertahankan hidup. Hal ini berkaitan dengan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh sektor informal ini yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat beroperasi, bergantung pada sumber daya lokal, dan skala usaha yang relatif kecil.

Oleh sebab itu dapat dijumpai semakin bertebarannya jumlah pedagang kaki lima di perkotaan, yang memang juga disebabkan ada kebutuhan akan keberadaan mereka. Seperti yang dituturkan oleh Ramli (1992 : 20) dalam Purnama (2003 : 62) bahwa selain sebagai penyedia lapangan pekerjaan, keberadaan sektor informal ini juga dibutuhkan terutama dalam kaitannya dengan berbagai macam produk dan jasa yang dihasilkannya. Beberapa ahli juga beranggapan bahwa sektor formal pun membutuhkan keberadaan sektor informal ini. Lebih jauh disampaikan oleh Ramli (1992 : 54) bahwa usaha kaki lima merupakan jalur terdepan dari jajaran distribusi dan ujung tombak pelayanan masyarakat yang langsung berhadapan dengan konsumen, terutama dalam pelayanan kebutuhan pokok perorangan.

Dicontohkan juga oleh Rachbini dan Hamid (1994 : 92) bahwa dari sekitar dua juta buruh atau pegawai sektor formal (swasta maupun negeri) di Jakarta, kurang lebih satu setengah juta membeli makanan dari sektor informal. Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan dalam kondisi gaji di sektor formal yang rata-rata rendah.

2.3 Persepsi

2.3.1 Pengertian Persepsi

Asngari 1984 (dalam Sugiyanto, 1966) mengemukakan bahwa pembentukan persepsi diawali dari perolehan informasi kemudian orang tersebut membentuk persepsi dari pemilihan/penjaringan kemudian informasi tersebut disusun mejadi satu kesatuan yang bermakna dan akhirnya diinterpretasikan fakta dan keseluruhan informasi. Proses pembentukan perilaku seseorang melalui persepsi tentang sesuatu terjadi dalam beberapa tahapan proses belajar, yaitu sebagai berikut :

1. Menyeleksi tentang obyek yang akan dituju
2. Memberikan makna dari obyek yang ada
3. Melakukan pemahaman terhadap obyek yang dituju selajutnya diikuti dengan engabilan tindakan dan pemilihan alternatif dari tindakan yang langsung dilakukan tersebut.

Persepsi adalah satu faktor psikologi yang sangat erat hubungannya dengan keberhasilan manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat. Davidoff (1988) memandang persepsi sebagai satu proses yang antara satu dengan yang lan sifatnya berbeda (individualistik) dari apa yang diperkirakan orang, sehingga apa yang dipersepsikan oleh orang bisa jadi secara substansial berbeda dengan kenyataan obyek tersebut, karena individu-individu melihat obyek yang semu tapi memandangnya berbeda (rabbins, 1991).

Thoha (1992) menyatakan persepsi sebagai suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penerimaan.

2.3.2 Unsur-Unsur Persepsi

Unsur-unsur persepsi menurut Assal (1992 : 45) adalah sebagai berikut :

1. Perhatian, pada dasarnya perhatian dapat dikatakan sebagai suatu proses pemberitahuan dari stimulus/rangsangan, stimulus tersebut disaring, kemudian dicocokkan apakah stimulus tersebut sesuai dengan keinginan da pengalaman yang dimiliki oleh seseorang individu.
2. Pemahaman, merupakan penafsiran suatu stimulus makna/arti ini akan bergantung pada bagaimana suatu stimulus dikategorikan dan diuraikan berkenaan dengan pengetahuan yang sudah ada. Mowen (1990 : 50) menambahi bahwa pemahaman tersebut merupakan "The process through individuals organism and interpret

information". Sesuai dengan keterangan tersebut maka terdapat dua aspek penting dari pemahaman yaitu organisasi dan interpretasi. Organisasi persepsi adalah bagaimana seseorang mengorganisasikan/menggabungkan stimulus menjadi satu keseluruhan yang bermakna. Interpretasi merupakan proses unik ketika hal ini dihubungkan dengan apa yang diinginkan seseorang terhadap suatu obyek yang didasarkan atas pengalamannya terdahulu.

3. Ingatan, pada prinsipnya pesan yang telah dicatat dan dipahami mungkin akan dilupakan. Pesan harus benar-benar sesuai dengan keinginan kebutuhan masyarakat sehingga akan lebih mudah untuk diingat. Perlu diketahui bahwa setiap informasi yang bermakna bagi individu akan disimpan di dalam otak dalam bentuk ingatan. Ingatan merupakan fungsi terbalik dalam mengenang pengalaman masa lalu, karena adanya pemindahan tafsiran stimulus ke dalam ingatan jangka panjang.

2.3.3 Proses Terjadinya Persepsi

Persepsi pertama kali dimunculkan oleh stimulus yang menggerakkan indera setelah indera menangkap informasi yang diberikan. Setelah informasi diterima oleh indera kemudian informasi tersebut diorganisasi dan diterjemahkan (penafsiran stimulus) lalu diteruskan ke syaraf sehingga mempengaruhi perilaku pembentukan.

Gibson dalam Stefanus (1991) menyatakan bahwa persepsi mengalami beberapa proses sebelum sasaran memutuskan melakukan aksi/tidak yaitu meliputi :

1. Penerimaan stimulus
2. Pengorganisasian
3. Penerjemahan/penafsiran stimulus yang telah diorganisasikan

Menurut Parcek dalam Stefanus (1991) mengidentifikasi adanya enam tahapan dalam proses persepsi yaitu sebagai berikut :

Penerimaan stimulus

1. Seleksi stimulus
2. Pengorganisasian
3. Penafsiran interpretasi
4. Pengecekan/pengujian dan reaksi

2.3.4 Hasil dari Persepsi

Setelah mengalami tahapan-tahapan proses tersebut di atas, maka didapatkan hasil berupa perilaku tanggapan dan pembentukan sikap yang selanjutnya menjadi dasar

pengetahuan dalam proses persepsi. Sikap adalah determinan perilaku seba sikap berkaitan dengan persepsi kepribadian dan motivasi. "Sikap" adalah perasaan positif dan negatif/keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus pada respon seseorang terhadap orang, obyek-obyek da keadaan (Gibson et all, 1991 : 58).

Adapun dampak dari adanya persepsi yang terdapat dalam diri seseorang sangatlah beragam. Gibson et all (1996 : 134) menyebutkan bahwa persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan menerjemahkannya/ menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Dengan kata lain yaitu persepsi berpengaruh pada perilaku dan dapat membentuk sikap.

Jadi sikap merupakan bagian dari kepribadian seseorang, beberapa teori berusaha untuk menjelaskan pembentukan dan perubahan sikap. Salah satu teori menyatakan bahwa seseorang mencari kecocokan antara kepercayaan dan perasaan mereka terhadap obyek dan mengarahkan bahwa peubahan sikap tergantung pada baik perubahan perasaan/kepercayaan. Teori selanjutnya menganggap bahwa seseorang memiliki sikap yang terstruktur, gabungan dari berbagai komponen afektif dan kognitif. Saling hubungan antar komponen ini berarti bahwa perubahan pada yang satu mempercepat perubahan pada yang lainnya. Ketika komponen ini tdak konsisten/ menjadi besar dari tingkat toleransi seseorang, maka hasilnya adalah ketidakpastian dapat diperbaiki dengan (1) pengungkapan kabar yang dirancang untuk mempengaruhi sikap, (2) frakmentasi sikap, atau (3) menerima ketidakkonsistenan sehingga sikap baru dibentuk. Teori menyatakan bahwa afeksi, kognisi, dan perilaku menentukan sikap, sebaliknya sikap menentukan afeksi, kognitif dan perilaku.

2.4 Studi Pendahuluan

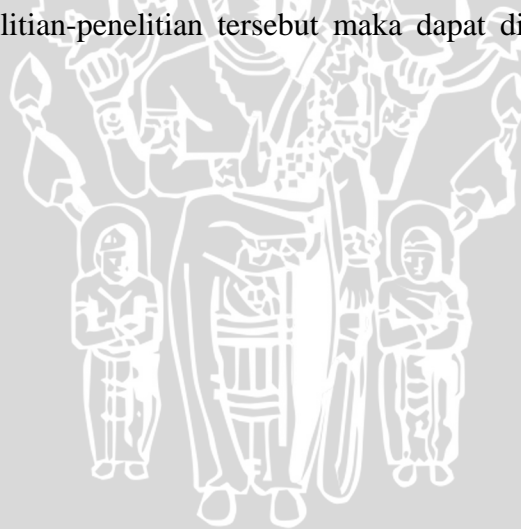
Studi pendahuluan ini sangat membantu dalam memberikan referensi penelitian dan digunakan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang sejenis. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan refensi dan acuan dari penelitian mengenai pedagang kaki lima ini dapat dijelaskan pada paragraf berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2003), mengenai studi aspek yang diprioritaskan pada faktor ekonomi, sosial dan fisik dalam penentuan lokasi pedagang kaki lim di Kota Mataram mencoba untuk mengetahui urutan prioritas aspek-aspek

dalam faktor ekonomi, sosil dan fisik yang dipertimbangkan oleh semua pihak yang berpengaruh dalam penentuan lokasi pedagang kaki lima di Kota Mataram yaitu dari pihak pedagang, masyarakat, pemerintah dan para ahli yang terlibat langsung dalam menangani permasalahan pedagang kaki lima di Kota Mataram. Adapun metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan tabel frekwensi dan teknik delphi. Hasil akhir dari penelitian tersebut adalah urutan prioritas aspek-aspek dalam faktor ekonomi, sosil dan fisik yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pedagang kaki lima di Kota Gresik.

Penelitian tentang penentuan lokasi pedagang kaki lima juga dilakukan oleh Widodo (2003) dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha pedagang kaki lima di Kota Semarang. Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha pedagang kaki lima di Koa Gresik adalah jenis dagangan, sarana transportasi yang digunakan, modal, umur, pendidikan, kedekatan lokasi usaha dengan tempat keramaian, kedekatan lokasi usaha dengan tempat tinggal dan kemdahan sarana angkutn menuju lokasi.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka dapat dibuat tabulasi sebagai berikut:



Tabel 2.4 Studi pendahuluan yang terkait dengan penelitian

No.	Peneliti	Judul	Tujuan	Variabel	Metode	Output	Manfaat Penelitian
1.	Aulia Purnama (Universitas Diponegoro, 2003)	Studi Aspek yang Diprioritaskan pada Faktor Ekonomi, Sosial, dan Fisik dalam penentuan Lokasi PKL di Kota Mataram	Untuk menentukan aspek-aspek yang diprioritaskan dari masing-masing faktor (ekonomi, sosial, fisik) dalam menentukan lokasi bagi PKL di Kota Mataram menurut PKL, pemerintah serta masyarakat	Variabel yang dikaji antara lain Jenis dagangan, waktu jualan, biaya angkutan, kenyamanan, keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban, kedekatan dengan pusat keramaian kota, kemudahan sarana angkutan, kedekatan dengan tempat tinggal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metode deskriptif kualitatif dengan distribusi frekwensi dan ▪ Metode delphi 	Urutan prioritas dari masing-masing faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pedagang kaki lima di Kota Mataram	Penelitian tentang studi urutan peioritas aspek penentuan lokasi PKL ini dugunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam studi khususnya dalam menentukan urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi asktivitas pdgagang kaki lima di Kota Gresik
2.	Ahmedi Widodo (Universitas Diponegoro, 2003)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL Kota Semarang	Mengevaluasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL Kota Semarang.	Variabel yang dikaji antara lain Jenis dagangan, sarana transportasi yang digunakan, modal Umur, pendidikan, kedekatan dengan tempat keramaian, kedekatan dengan tempat tinggal	Metode analisis faktor	Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL di Kota Semarang	Penelitian tentang studi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi usaha PKL ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam studi terutama dalam menentukan variabel penelitian terkait dengan aspek ekonomi dan fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima di Kota Gresik.

Sumber : Purnama (2003), Widodo (2003)

2.5 Definisi Operasional

Berdasarkan pada kajian pustaka diatas, maka dapat ditentukan definisi operasional yang dapat membantu melakukan penelitian tentang penentuan lokasi aktivitas pedagang kaki lima berdasarkan urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik di Kota Gresik yang didalamnya membahas mengenai persepsi mengenai aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima, penentuan urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima dan penentuan lokasi aktivitas pedagang kaki lima berdasarkan urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik tersebut.

a) Pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pedagang/jasa yaitu melayani kebutuhan masyarakat baik makanan/minuman, non makanan/minuman dan bahan mentah, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas dalam melakukan usaha tersebut guna menggerakkan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar, sebagian badan jalan) dengan tidak mempunyai legalitas formal.

b) Persepsi mengenai aspek ekonomi, sosial dan fisik

Menurut Asngari 1984 (dalam Sugiyanto, 1996) adalah pembentukan persepsi diawali dari perolehan informasi kemudian orang tersebut membentuk persepsi dari pemilihan, penjaringan kemudian informasi tersebut disusun menjadi satu kesatuan yang bermakna dan akhirnya diinterpretasikan fakta dan keseluruhan informasi. Persepsi menurut Thoha (1992) adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penerimaan. Persepsi mengenai aspek ekonomi, sosial dan fisik yang dimaksud dalam penelitian adalah proses berfikir seseorang dalam memahami informasi mengenai aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima lewat penghayatan, perasaan, pemilihan dan penjaringan dari aspek-aspek tersebut dan akhirnya disusun menjadi satu kesatuan yang bermakna.

c) Penentuan urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima

Menurut Kamus Besar Indonesia (1996) penentuan adalah penetapan dan urutan prioritas adalah susunan atau deretan yang teratur berawal dari yang paling diutamakan. Penentuan urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima

yang dimaksud dalam penelitian adalah penetapan urutan dari yang paling diutamakan mengenai aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima. Adapun aspek ekonomi yang dimaksud adalah jenis dagangan, waktu jualan dan biaya angkutan. Untuk aspek sosial adalah keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan, sedangkan aspek fisik adalah kemudahan sarana angkutan menuju lokasi, kedekatan lokasi dengan tempat keramaian, dan kedekatan lokasi dengan tempat tinggal pedagang.

d) Penentuan lokasi pedagang kaki lima

Penentuan lokasi pedagang kaki lima yang dimaksud dalam penelitian adalah penetapan lokasi aktivitas pedagang kaki lima yang sesuai dengan hasil urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik yang telah dilakukan dalam analisis sebelumnya.



BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Sektor Informal Dan Pedagang Kaki Lima	16
2.1.1 Sektor informal	16
A. Konsep sektor informal.....	16
B. Pengertian sektor informal.....	17
C. Ciri-ciri sektor informal.....	19
2.1.2 Pedagang kaki lima di perkotaan.....	21
A. Pengertian pedagang kaki lima.....	21
B. Karakteristik pedagang kaki lima	23
2.2 Tinjauan Aspek Penentuan Lokasi Pedagang Kaki Lima.....	30
2.2.1 Kedekatan lokasi usaha pedagang kaki lima dengan tempat tinggal.....	30
2.2.2 Kemudahan memperoleh angkutan	31
2.2.3 Kedekatan lokasi usaha pedagang kaki lima dengan pusat kegiatan/keramaian kota	32
2.2.4 Penentuan lokasi pedagang kaki lima menurut pemerintah kota.....	34
2.2.5 Konsep penawaran dan permintaan kegiatan pedagang kaki lima	35
2.3 Persepsi	36
2.3.1 Pengertian Persepsi	36
2.3.2 Unsur-Unsur Persepsi	36
2.3.3 Proses Terjadinya Persepsi	37
2.3.4 Hasil dari Persepsi	37
2.4 Studi Pendahuluan	38
2.5 Definisi Operasional	41
Tabel 2.1 Ciri-ciri sektor informal.....	20
Tabel 2.2 Kriteria kedekatan lokasi usaha pedagang kaki lima.....	31
Tabel 2.3 Kriteria kedekatan lokasi usaha pedagang kaki lima.....	33
Tabel 2.4 Studi pendahuluan yang terkait dengan penelitian	40
Gambar 2.1 Pola penyebaran memanjang (linear).....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.2 Pola penyebaran mengelompok.....	Error! Bookmark not defined.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah sistematis. Metode ini menyangkut masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian (Hasan, 2002 : 20).

3.1 Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian berdasarkan jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Metode deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang (Hasan, 2002 : 22).

Berdasarkan hasil yang diperoleh, penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk penelitian *applied research*, yaitu penelitian yang mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui, bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang jauh lebih baik, lebih efektif dan efisien (Hasan, 2002:10). Sedangkan berdasarkan teknik yang digunakan penelitian ini termasuk penelitian survei (*survey research*) yaitu penelitian dengan tidak melakukan perubahan (tidak ada perlakuan khusus) terhadap variabel-variabel yang diteliti (Hasan, 2002:11).

Sedangkan yang dibahas dalam penelitian ini adalah identifikasi persepsi dari pedagang, pemerintah dan masyarakat mengenai aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima, serta penentuan urutan prioritas masing-masing aspek ekonomi, sosial dan fisik dari pedagang, pemerintah, masyarakat dan para ahli yang memperhatikan masalah pedagang kaki lima di Kota Gresik serta yang terlibat langsung dalam pembinaan dan penataannya dalam kaitannya dengan penentuan lokasi aktivitas PKL. Kemudian dari hasil penelitian mengenai persepsi dan penentuan urutan prioritas masing-masing aspek tersebut dapat digunakan untuk

memberikan arahan penentuan lokasi aktivitas PKL yang sesuai dengan hasil urutan yang telah disepakati oleh *Stakeholder* di Kota Gresik.

Metode penelitian yang dijabarkan ini meliputi metode penentuan lokasi, metode pengumpulan data, metode populasi dan pengambilan sampel penelitian, metode penentuan variabel dan metode analisis data. Hasil akhir dari penelitian ini berupa urutan prioritas masing-masing aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima beserta arahan lokasi yang sesuai dengan hasil urutan tersebut.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam studi "Penentuan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik" secara umum adalah wilayah Kota Gresik. Wilayah perkotaan Gresik menurut RTRW Jatim Tahun 2004 adalah terkonsentrasi pada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar dan Kecamatan Kebomas dengan batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Selat Madura
Sebelah Selatan	: Kota Surabaya
Sebelah Timur	: Selat Madura
Sebelah Barat	: Kecamatan Cerme

Untuk lebih jelasnya peta administrasi Kota Gresik dapat dilihat pada gambar 4.3. Sedangkan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik yang dijadikan wilayah studi adalah 9 titik yang terkonsentrasi di Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas. Persebaran lokasi penelitian ditinjau dari letak BWK dan fungsi kawasan menurut Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) Kota Gresik dapat dilihat pada tabel 3.1. Adapun persebaran lokasi aktivitas pedagang kaki lima yang dijadikan wilayah studi dapat dilihat pada gambar 3.1.

Tabel 3.1 Lokasi penelitian

No.	Lokasi	Kecamatan	BWK	Fungsi Kawasan Menurut RTRK Kota Gresik Tahun 2002-2012
1.	Pedagang kaki lima (PKL) depan Pasar Baru Gresik	Kecamatan Gresik	I Berpusat di Pusat Perdagangan/pasar Jl. Gubernur Suryo (Pusat Kota)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman ▪ Pusat Pelayanan Kota ▪ Perdagangan, Jasa, Fasum ▪ Pelabuhan, Pergudangan
2.	Pedagang kaki lima (PKL) depan Pasar Kota Gresik	Kecamatan Gresik	I Berpusat di Pusat Perdagangan/pasar Jl. Gubernur Suryo (Pusat Kota)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman ▪ Pusat Pelayanan Kota ▪ Perdagangan, Jasa, Fasum ▪ Pelabuhan, Pergudangan
3.	Pedagang kaki lima (PKL) depan lahan penampungan milik PT. Multi Sarana Plaza	Kecamatan Gresik	I Berpusat di Pusat Perdagangan/pasar Jl. Gubernur Suryo (Pusat Kota)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman ▪ Pusat Pelayanan Kota ▪ Perdagangan, Jasa, Fasum ▪ Pelabuhan, Pergudangan
4.	Pedagang kaki lima (PKL) timur Alon-Alon Gresik	Kecamatan Gresik	I Berpusat di Pusat Perdagangan/pasar Jl. Gubernur Suryo (Pusat Kota)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman ▪ Pusat Pelayanan Kota ▪ Perdagangan, Jasa, Fasum ▪ Pelabuhan, Pergudangan
5.	Pedagang kaki lima (PKL) TPG II Randu Agung	Kecamatan Kebomas	II Berpusat di Kelurahan Roomo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri dan Pergudangan ▪ Permukiman ▪ Perdagangan, jasa dan Fasum ▪ Jalur Hijau
6.	Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah perempatan Sidomoro, Jl. Kartini, Jl. Usman Sadar, Jl. Pahlawan	Kecamatan Gresik	I Berpusat di Pusat Perdagangan/pasar Jl. Gubernur Suryo (Pusat Kota)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman ▪ Pusat Pelayanan Kota ▪ Perdagangan, Jasa, Fasum ▪ Pelabuhan, Pergudangan

Sumber : Basis Data Kabupaten Gresik Tahun 2005

Pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam menentukan lokasi penelitian di atas antara lain adalah :

1. Lokasi penelitian sesuai dengan data Dinas Pasar dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tahun 2005 ;
2. Lokasi penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Kabupaten Gresik mengenai Kajian Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Gresik pada tahun 2005 yang bekerja sama dengan instansi-instansi yang menangani pedagang kaki lima Kabupaten Gresik ;

3. Berdasarkan aspek kedekatan (*proximity*) antara pedagang kaki lima dengan pusat kegiatan/keramaian kota ditunjukkan dengan lokasi aktivitas yang cenderung menempati kawasan perdagangan, rekreasi, perkantoran, rumah sakit, sekolah, dan tempat-tempat keramaian lainnya yang bersifat temporer. Seperti yang dikemukakan oleh Bromly, dalam Manning dan Effendi (1996 : 236) bahwa dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya, PKL akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli. Oleh karena itu mereka memilih lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau di suatu lokasi yang merupakan lokasi aktivitas masyarakat. Sedangkan 9 titik lokasi aktivitas pedagang kaki lima ini terletak di dekat pusat keramaian berupa pasar/pertokoan, perumahan, sekolah dan perkantoran di Kota Gresik ;
4. Salah satu lokasi penelitian pernah menjadi salah satu permasalahan *intern* Kabupaten Gresik, dimana upaya penertiban yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja di sekitar wilayah Pasar Baru Kota Gresik pernah memicu kerusuhan, yaitu sekitar 100 PKL dan puluhan petugas Satpol PP terlibat bentrok fisik hingga menyebabkan tiga petugas terluka (*Kompas, 9 April 2003*).

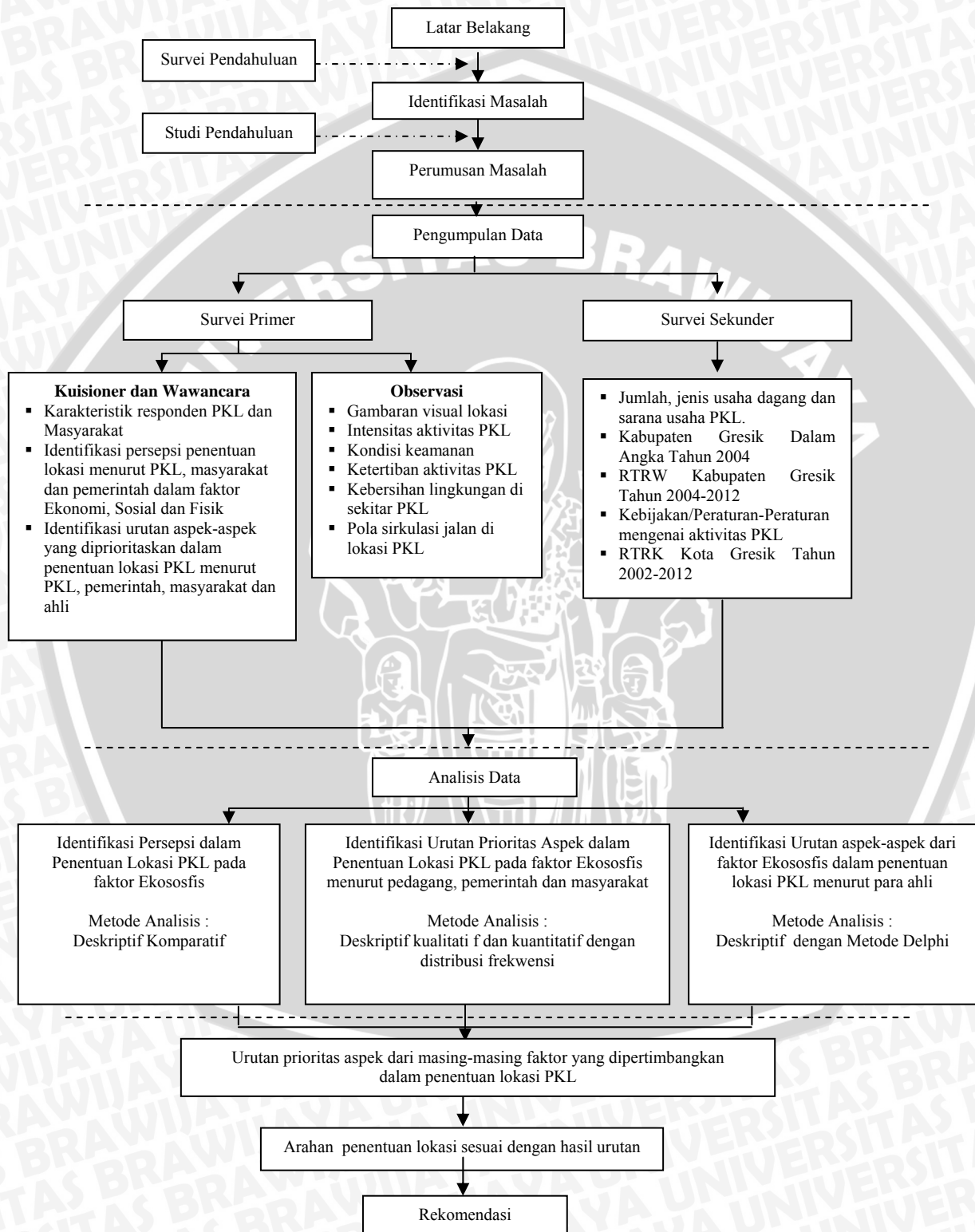


Gambar 3.1 Peta wilayah studi



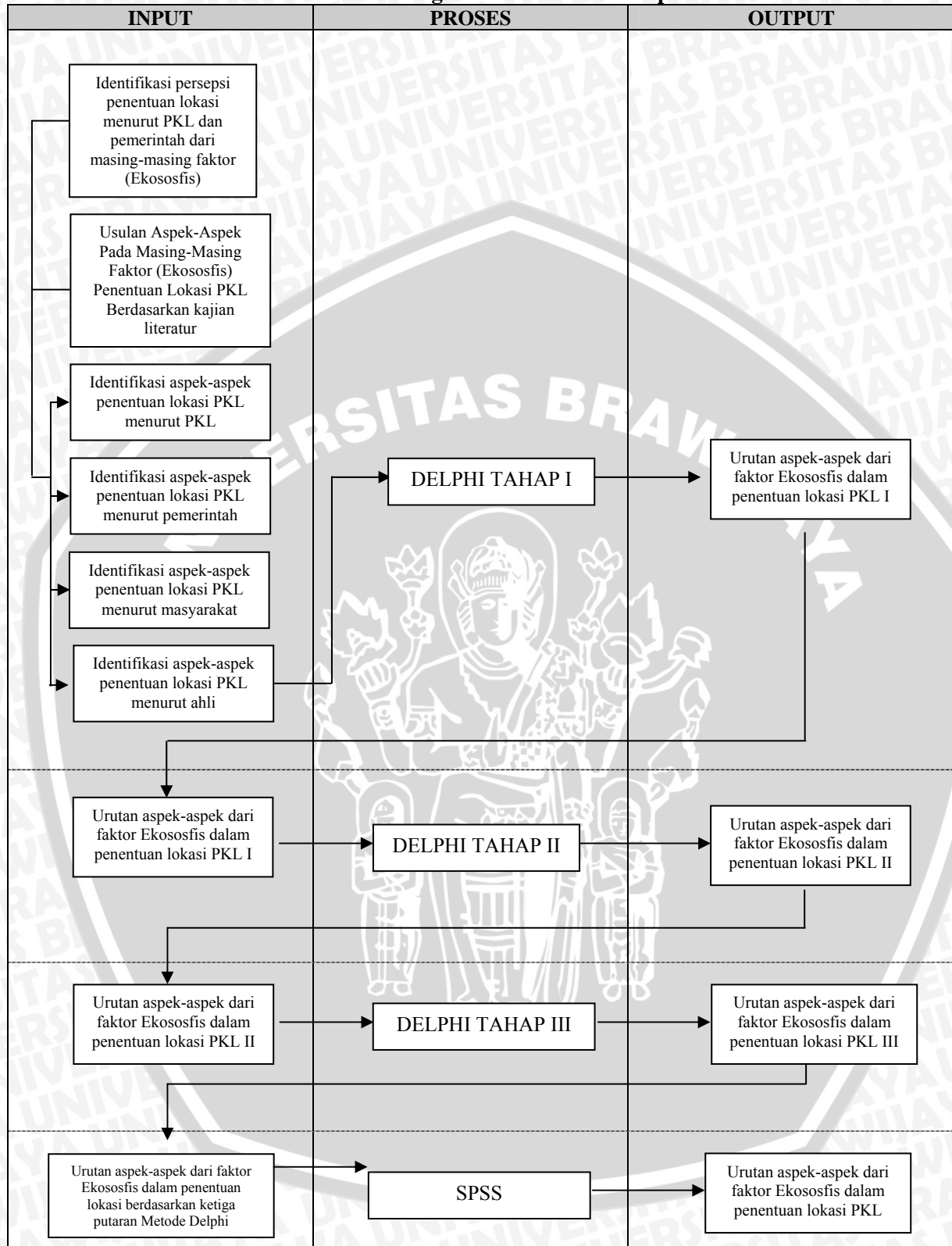
3.3 Diagram Alir Penelitian

Diagram alir penelitian merupakan diagram yang menjelaskan bagaimana proses studi berjalan. Diagram alir penelitian dari studi ini dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian

Tabel 3.2 Kerangka analisis metode delphi



Sumber : Hasil Pemikiran 2006

Berdasarkan diagram alir penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berawal dari latar belakang kemudian dilakukan survei pendahuluan untuk

mengidentifikasi berbagai permasalahan pada lokasi studi sesuai dengan latar belakang sebelumnya. Agar penelitian lebih fokus dan terarah maka dibantu dengan adanya studi pendahuluan sehingga didapat rumusan masalah yang akan dilakukan penelitian. Setelah itu baru dilakukan pengumpulan berbagai data yang mendukung penelitian baik data primer maupun sekunder yang nantinya dilanjutkan pada pengolahan data untuk menuju pada pembahasan atau analisis sampai pada rekomendasi.

3.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian (Hasan, 2002 : 82).

Sedangkan pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus tertentu (Hasan, 2002 : 89). Untuk lebih jelasnya, berikut ini keterangan mengenai teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian.

3.4.1 Teknik pengumpulan data

Data adalah sekumpulan fakta yang sesuai dengan kenyataan di lapangan yang diperlukan dalam kegiatan analisis, baik berupa data primer maupun sekunder. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, dilakukan teknik-teknik pengumpulan data untuk mempermudah perolehan data.

Pengumpulan data berdasarkan sumber pengambilannya dapat dibedakan atas dua, yakni data primer (survei primer) dan data sekunder (survei sekunder).

A. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru (Hasan, 2002 : 82). Teknik-teknik yang digunakan untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi/Pengamatan

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme in situ, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris (Hasan, 2002 : 86). Observasi/pengamatan lapangan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran visual dari 9 lokasi aktivitas pedagang kaki

lima di Kota Gresik, permasalahan, dan intensitas aktivitas pedagang kaki lima. Bentuk dari observasi lapangan ini berupa *plotting* peta, foto-foto, maupun deskripsi kondisi lingkungan yang ada. Gambaran visual yang diamati adalah : aktivitas jual-beli pedagang kaki lima, jenis dan sarana dagang, sarana prasarana pendukung yang ada di lokasi, kegiatan/bangunan yang ada di sekitar lokasi, deskripsi kondisi keamanan, ketertiban aktivitas pedagang, kebersihan lingkungan akibat aktivitas pedagang, pola sirkulasi jalan di lokasi dan jarak kedekatan lokasi aktivitas pedagang dengan pusat keramaian masyarakat/keramaian kota. Sedangkan intensitas aktivitas yang diamati meliputi penggunaan lokasi dan tempat usaha pedagang. Peralatan yang digunakan dalam survei primer observasi ini antara lain : alat tulis dan kamera.

2. Penyebaran Kuisisioner/Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan (*respons*) atas-atau, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan (Hasan, 2002 : 84). Adapun penyebaran kuisisioner ini ditujukan kepada beberapa responden antara lain:

- Pedagang kaki lima meliputi pedagang yang termasuk anggota paguyuban maupun yang tidak termasuk anggota paguyuban. Pedagang kaki lima ini adalah pedagang yang berjualan di tempat umum misalnya trotoar, bahu jalan, emperan toko, atau di atas saluran. Berdasarkan sarana berusahanya mereka pada umumnya tidak permanen, mudah dipindahkan, misalnya gerobak atau tenda tetapi bukan pedagang keliling. Sesuai dengan jenis dagangan maka pedagang kaki lima yang disurvei adalah pedagang makanan jadi (makanan ringan, nasi bungkus, lauk pauk, soto/bakso/mie ayam, sate, terang bulan/martabak), pedagang non makanan (jam, kacamata, pakaian, sandal, mainan, tas, bensin, rokok, bacaan), pedagang bahan mentah (buah-buahan, sayuran, ikan, peracangan).
- Masyarakat meliputi masyarakat kota secara luas yaitu sebagai pengunjung dan konsumen, atau masyarakat yang berada di sekitar lokasi aktivitas pedagang kaki lima (karyawan toko, pegawai kantor, dsb).
- Pihak pemerintah diwakili oleh instansi-instansi yang terkait dan memahami permasalahan pedagang kaki lima di Kota Gresik, antara lain : Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL, Dinas

Kebersihan, Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, Kantor Satpol Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas PU.

- Responden ahli adalah dari pihak pemerintah yang terlibat langsung dalam pembinaan dan penanganan pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik meliputi kepala atau staf dari instansi-instansi terkait yaitu Bappeda, Dinas PU, Dinas Pasar dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, Dinas Kebersihan, Kantor Satpol PP, kemudian dari akademisi sebagai pemerhati masalah ekonomi termasuk pedagang kaki lima di Kota Gresik yaitu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kabupaten Gresik dan dari paguyuban pedagang kaki lima sebagai pelaku sektor informal.

Bentuk kuisioner yang digunakan adalah *semi opened qesitionare* (kuisioner semi terbuka) yaitu kuisioner yang pertanyaannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan menurut pilihan-pilihan jawaban yang telah disediakan untuk merangsang respons jawaban responden.

Penyebaran kuisioner ini terdapat dua macam, yaitu pertama, untuk mengetahui persepsi dan urutan prioritas pedagang, pemerintah dan masyarakat mengenai aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima. Kedua, untuk mengetahui urutan prioritas dari para ahli mengenai aspek ekonomi (jenis dagangan, biaya angkutan, waktu berjualan), aspek sosial (keamanan, kenyamanan, ketertiban, kebersihan) dan aspek fisik (kemudahan aksesibilitas/sarana angkutan, kedekatan lokasi usaha pedagang dengan tempat tinggalnya, dan kedekatan lokasi usaha dengan pusat keramaian masyarakat) berkaitan dengan penentuan lokasi aktivitas pedagang kaki lima dengan menggunakan metode delphi yang akan dijelaskan pada bahasan tentang metode delphi.

Tujuan dari penyebaran kuisioner dalam penerapan metode delphi ini adalah untuk mengetahui kepentingan sosial atau organisasional dari masing-masing responden ahli. Penyebaran kuisioner ini juga diikuti dengan kegiatan wawancara untuk melengkapi perolehan data. Untuk lebih jelasnya daftar pertanyaan yang digunakan dalam kuisioner penelitian beserta kegunaannya dapat dilihat pada tabel 3.3. Sedangkan untuk format kuisioner dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 3.3 Data kuisioner

No.	Sumber Data	Jenis Data	Kegunaan Data
1.	Pedagang kaki lima	Karakteristik responden, meliputi : Nama, jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, status, status tempat tinggal, asal daerah/tempat tinggal, pekerjaan sebelumnya, lama berdagang	Untuk mengetahui karakteristik responden pedagang kaki lima yang dijadikan sampel penelitian.
		Aktivitas pedagang kaki lima, meliputi : Waktu berdagang, alasan menjalankan usaha, adanya dan bentuk kerjasama antar pedagang	Untuk mengetahui karakteristik aktivitas responden pedagang kaki lima
		Fisik bangunan pedagang kaki lima, meliputi: Tempat berjualan, sarana berdagang, ruang usaha, lokasi jualan, frekwensi pindah lokasi dan alasannya	Untuk mengetahui karakteristik fisik bangunan pedagang kaki lima
		Modal/pendapatan pedagang kaki lima, meliputi : Besarnya modal usaha, asal modal, jumlah anggota keluarga, pendapatan/hari, kecukupan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan	Untuk mengetahui aspek permodalan dan pendapatan pedagang kaki lima
		Kebijakan pemerintah, meliputi : Pengetahuan tentang perda pedagang kaki lima, adanya bantuan, pembinaan/penyuluhan pemerintah, frekwensi razia dan sikap menghadapi razia	Untuk mengetahui permasalahan atau konflik pedagang kaki lima dengan pemerintah
		Aspek ekonomi dalam menentukan lokasi usaha, meliputi : Alasan memilih lokasi, jenis dagangan yang diperjualbelikan, pilihan lokasi usaha yang disukai, pertimbangan biaya transportasi dalam memilih lokasi, pertimbangan waktu berjualan dalam memilih lokasi, pengaturan jam berjualan, prioritas aspek ekonomi dalam menentukan lokasi usaha	Untuk mengetahui persepsi dan urutan prioritas pedagang mengenai aspek ekonomi penentuan lokasi usaha PKL
		Aspek sosial dalam menentukan lokasi usaha, meliputi: Prioritas aspek sosial dalam menentukan lokasi usaha dan alasannya	Untuk mengetahui persepsi dan urutan prioritas pedagang mengenai aspek sosial penentuan lokasi usaha PKL
2.	Pemerintah	Aspek ekonomi dalam menentukan lokasi usaha, meliputi : Pertimbangan jenis dagangan dalam pemilihan lokasi usaha PKL, pilihan lokasi yang sesuai untuk usaha PKL, pilihan lokasi untuk PKL (makanan/minuman, non makanan dan bahan mentah), pertimbangan biaya transportasi dalam pemilihan lokasi PKL, pengaruh waktu berjualan dalam pemilihan lokasi PKL, pengaturan jam berjualan PKL, prioritas aspek ekonomi dalam menentukan lokasi usaha	Untuk mengetahui persepsi dan urutan prioritas pemerintah mengenai aspek ekonomi penentuan lokasi usaha PKL
		Aspek sosial dalam menentukan lokasi usaha, meliputi: Prioritas aspek sosial dalam menentukan lokasi PKL dan alasannya	Untuk mengetahui persepsi dan urutan prioritas pemerintah mengenai aspek sosial penentuan lokasi usaha PKL
		Aspek fisik dalam menentukan lokasi usaha, meliputi : Pertimbangan kemudahan angkutan dalam memilih lokasi usaha, pertimbangan kedekatan lokasi usaha dengan pusat keramaian masyarakat, jarak ideal responden antara lokasi usaha dengan pusat keramaian masyarakat, pertimbangan kedekatan tempat tinggal dengan lokasi usaha, jarak ideal responden antara tempat tinggal dan lokasi usaha, prioritas aspek fisik dalam menentukan lokasi usaha	Untuk mengetahui persepsi dan urutan prioritas pemerintah mengenai aspek fisik penentuan lokasi usaha PKL

No.	Sumber Data	Jenis Data	Kegunaan Data
3.	Masyarakat	aspek fisik dalam menentukan lokasi usaha	
		Karakteristik responden, meliputi : Nama, jenis kelamin, umur, pendapatan, pekerjaan, pendidikan terakhir, status, asal daerah/tempat tinggal, frekwensi belanja	Untuk mengetahui karakteristik responden masyarakat pengunjung, konsumen maupun yang berada di sekitar lokasi aktivitas PKL
		Aspek ekonomi dalam menentukan lokasi usaha, meliputi : Alasan memilih lokasi PKL, pertimbangan biaya transportasi dalam memilih lokasi PKL, jenis dagangan yang diminati, pilihan lokasi usaha yang disukai untuk PKL (makanan/minuman, non makanan dan bahan mentah), pertimbangan waktu berjualan dalam memilih lokasi PKL, pengaturan jam berjualan sesuai kebiasaan/kebutuhan responden, prioritas aspek ekonomi dalam menentukan lokasi usaha	Untuk mengetahui persepsi dan urutan prioritas masyarakat mengenai aspek ekonomi penentuan lokasi usaha PKL
		Aspek sosial dalam menentukan lokasi usaha, meliputi: Prioritas aspek sosial dalam menentukan lokasi PKL dan alasannya	Untuk mengetahui persepsi dan urutan prioritas masyarakat mengenai aspek sosial penentuan lokasi usaha PKL
4.	Ahli	Aspek fisik dalam menentukan lokasi usaha, meliputi : Sarana angkutan yang digunakan menuju lokasi PKL, kemudahan memperoleh sarana angkutan, pertimbangan kedekatan lokasi PKL dengan pusat keramaian masyarakat, jarak ideal responden antara lokasi PKL dengan pusat keramaian masyarakat, prioritas aspek fisik dalam menentukan lokasi usaha	Untuk mengetahui persepsi dan urutan prioritas masyarakat mengenai aspek fisik penentuan lokasi usaha PKL
		Prioritas aspek-aspek ekonomi kaitannya dalam pemilihan lokasi aktivitas pedagang kaki lima, meliputi : Jenis dagangan, waktu berjualan dan biaya angkutan, aspek lainnya	Untuk mengetahui urutan prioritas para ahli mengenai aspek ekonomi dalam menentukan lokasi PKL dan usulan aspek ekonomi lainnya
		Aspek ekonomi, jenis dagangan meliputi : Prioritas lokasi untuk PKL makanan/minuman, non makanan dan bahan mentah Aspek ekonomi, waktu berjualan meliputi : Prioritas waktu berjualan untuk PKL makanan/minuman, non makanan dan bahan mentah	Untuk mengetahui urutan prioritas para ahli mengenai aspek ekonomi jenis dagangan dan waktu berjualan dalam menentukan lokasi PKL
		Prioritas aspek-aspek sosial kaitannya dalam pemilihan lokasi aktivitas pedagang kaki lima, meliputi : Keamanan, kenyamanan, ketertiban, kebersihan, aspek lainnya	Untuk mengetahui urutan prioritas para ahli mengenai aspek sosial dalam menentukan lokasi PKL dan usulan aspek sosial lainnya
		Prioritas aspek-aspek fisik kaitannya dalam pemilihan lokasi aktivitas pedagang kaki lima, meliputi : Kemudahan sarana angkutan menuju lokasi usaha, kedekatan lokasi usaha dengan pusat keramaian masyarakat, kedekatan lokasi usaha dengan tempat tinggal, aspek lainnya	Untuk mengetahui urutan prioritas para ahli mengenai aspek fisik dalam menentukan lokasi PKL dan usulan aspek fisik lainnya
		Aspek fisik, kedekatan lokasi usaha dengan pusat keramaian masyarakat, meliputi : Prioritas pusat keramaian masyarakat yang berjarak dekat (<100 m), sedang (100-500 m) dan jauh (>500 m) dengan lokasi usaha Aspek fisik, kedekatan lokasi usaha dengan tempat tinggal, meliputi : Prioritas jarak tempat tinggal dengan lokasi usaha	Untuk mengetahui urutan prioritas para ahli mengenai aspek fisik kedekatan lokasi usaha dengan pusat keramaian masyarakat dan kedekatan dengan tempat tinggal dalam menentukan lokasi PKL

Sumber : Hasil Pembahasan, 2006

3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

Kegiatan wawancara ini ditujukan kepada :

- Pedagang kaki lima meliputi pedagang yang termasuk anggota paguyuban PKL dan tidak termasuk anggota paguyuban. PKL ini adalah pedagang yang berjualan di tempat umum misalnya trotoar, bahu jalan, emperan toko, atau di atas saluran. Berdasarkan sarana berusahanya mereka pada umumnya tidak permanen, mudah dipindahkan, misalnya gerobak atau tenda tetapi bukan pedagang keliling. Sesuai dengan jenis dagangan maka PKL yang disurvei adalah PKL makanan jadi (makanan ringan, nasi bungkus, lauk pauk, soto/bakso/mie ayam, sate, terang), bulan/martabak), PKL non makanan (jam, kacamata, pakaian, sandal, mainan, tas, bensin, rokok, bacaan), PKL bahan mentah (buah-buahan, sayuran, ikan, peracangan)
- Masyarakat meliputi masyarakat kota secara luas yaitu sebagai pengunjung dan konsumen, atau masyarakat yang berada di sekitar lokasi aktivitas pedagang kaki lima (karyawan toko, pegawai kantor, dsb).
- Pihak pemerintah diwakili oleh instansi-instansi yang terkait dan memahami permasalahan pedagang kaki lima di Kota Gresik, antara lain : Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL, Dinas Kebersihan, Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah, Kantor Satpol Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas PU.
- Responden ahli adalah dari pihak pemerintah yang terlibat langsung dalam pembinaan dan penanganan pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik meliputi kepala atau staf dari instansi-instansi terkait yaitu Bappeda, Dinas PU, Dinas Pasar dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, Dinas Kebersihan, Kantor Satpol PP, kemudian dari akademisi sebagai pemerhati masalah ekonomi termasuk pedagang kaki lima di Kota Gresik yaitu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Kabupaten Gresik dan dari paguyuban pedagang kaki lima sebagai pelaku sektor informal.

Teknik wawancara ini merupakan kegiatan pendukung dari penyebaran kuisioner untuk memperoleh kelengkapan data dan informasi.

B. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002 : 82). Adapun jenis data dan kegunaannya untuk penelitian yang bersumber dari dokumen dan data-data yang dimiliki oleh instansi-instansi terkait dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Jenis dan kegunaan data

No.	Jenis data	Sumber Data	Instansi	Kegunaan
1.	Jumlah PKL pada lokasi, jenis usaha dagang dan sarana usaha PKL	Profil PKL	Dinas Pasar	Untuk mengetahui karakteristik PKL di Kabupaten Gresik terutama pada lokasi studi dan mengetahui karakteristik aspek faktor ekonomi dalam penentuan lokasi PKL.
2.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kependudukan wilayah Kota Gresik (Menurut Jenis Kelamin, Mata Pencaharian, Tenaga Kerja dan Kepadatan Penduduk) ▪ Fasilitas perkotaan 	Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2004	BPS	Untuk mengetahui karakteristik kependudukan Wilayah Kota Gresik
3.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi fisik geografis dan luas wilayah ▪ Struktur tata ruang dan fungsi wilayah ▪ Perekonomian wilayah ▪ Peta kabupaten Gresik 	RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2004-2012	Bappeda	Untuk mengetahui tinjauan wilayah Kabupaten dan Kota Gresik
4.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kondisi fisik geografis dan luas wilayah ▪ Struktur tata ruang dan fungsi wilayah Kota Gresik ▪ Penggunaan Tanah ▪ Fasilitas perkotaan ▪ Perekonomian wilayah Kota Gresik ▪ Peta Wilayah Kota Gresik 	RTRK Kota Gresik Tahun 2002-2012	Bappeda	Untuk mengetahui tinjauan wilayah Kabupaten dan Kota Gresik.
5.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Ijin Penempatan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Gresik 	Dokumen Kebijakan/Peraturan-Peraturan mengenai aktivitas PKL	Dinas Pasar dan Satpol PP	Untuk mengetahui aspek-aspek faktor sosial dalam penentuan lokasi PKL menurut kebijakan pemerintah Kabupaten Gresik

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

3.4.2 Teknik pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu (Iqbal Hasan, 2002 : 89). Teknik pengolahan dan penyajian data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu editing, coding, dan tabulasi. Berikut di bawah ini adalah penjelasan dari ketiga teknik tersebut yaitu :

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Hal-hal yang perlu diedit pada data masuk adalah :

- Dipenuhi tidaknya instruksi sampling
- Dapat dibaca atau tidaknya data yang masuk
- Kelengkapan pengisian
- Keserasian
- Apakah isi jawaban dapat dipahami

b. *Coding*

Coding adalah pemberian/pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori sama. Dalam kelompok yang sama misalnya data primer untuk PKL, masyarakat, pemerintah dan para ahli dibedakan dengan memberikan tanda sehingga menjadi teratur. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka-angka/huruf-huruf yang memberikan petunjuk, atau identitas pada suatu informasi atau data yang akan dianalisis.

c. Tabulasi

Data-data baik data sekunder maupun primer dimasukkan dalam tabel, mengatur angka-angkanya kemudian dihitung sesuai dengan kebutuhan analisis data. Penyajian data primer dalam bentuk tabel distribusi frekwensi, tabulasi silang, gambar dan grafik. Sedangkan penyajian data sekunder dilakukan secara sistematis sehingga diperlukan pengolahan lebih lanjut.

3.5. Metode Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.

Jumlah populasi pedagang kaki lima yang ada di Kota Gresik sebanyak 651 pedagang yang tersebar di Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas (*Data Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL Tahun 2005*). Untuk populasi masyarakat adalah sesuai dengan skala pelayanan lokasi pedagang kaki lima menurut Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL adalah skala Kabupaten dengan jumlah penduduk 237.674 jiwa (*Gresik Dalam Angka Tahun 2004*).

Pengambilan sampel yang ideal dalam suatu penelitian menurut Mantra dan Kasto. dalam Singarimbun dan Effendi (1989:149) memiliki sifat-sifat yaitu :

- Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti.
- Dapat menentukan presisi dari hasil penelitian
- Sederhana, sehingga mudah dilaksanakan
- Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya serendah-rendahnya.

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam studi ini yaitu :

3.5.1 Metode pengambilan sampel pedagang kaki lima

Menurut Singarimbun (1995 : 37), jumlah sampel dalam penelitian deskriptif adalah antara 5 - 10 % dari jumlah populasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, jumlah sampel PKL yang diambil sebanyak-banyaknya 10% yang diambil secara proporsional dari setiap lokasi yang telah ditentukan yaitu Pasar Baru Kota, Pasar Kota, lahan penampungan sementara PT. Multi Sarana Plaza, TPG II Randuagung, Timur Alon-Alon Gresik, di wilayah perempatan Sidomoro, Jl. Kartini, Jl. Usman Sadar, dan Jl. Pahlawan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *Random Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan semua individu dalam suatu populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Metode pengambilan sampel pedagang kaki lima yang digunakan dalam penelitian mengikuti rumus Slovin sebagai berikut :

$$N' = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan :

N' = Jumlah sampel

d = Derajat kepercayaan 90 % dengan tingkat kecermatan 0,1 (10%)

N = Jumlah pengunjung rata-rata seluruh pusat perbelanjaan

Jumlah pedagang kaki lima menurut data yang dihimpun oleh Dinas Pasar dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Gresik pada tahun 2005 sebanyak 651 pedagang yang tersebar di beberapa lokasi strategis di wilayah Kota Gresik. Sesuai dengan pengambilan sampel lokasi dengan pertimbangan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diketahui data mengenai jumlah PKL pada lokasi penelitian pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Jumlah pedagang kaki lima pada lokasi penelitian

No.	Lokasi	Kecamatan	Jumlah
1.	Pasar Kota Gresik	Gresik	200
2.	Pasar Baru Gresik	Gresik	130
3.	Timur Alon-Alon Gresik	Gresik	41
4.	PT. Multi Sarana Plaza	Gresik	110
5.	TPG II Randu Agung	Randu Agung	30
6.	Di wilayah perempatan Sidomoro, Jl. Kartini, Jl. Usman Sadar, Jl. Pahlawan	Gresik	140
Jumlah			651

Sumber : Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL Kab. Gresik Tahun 2005

Berdasarkan data di atas maka dapat dilakukan perhitungan yang dijadikan sampel penelitian. Berikut ini adalah perhitungan sampel penelitian sesuai dengan rumus Slovin :

$$N' = \frac{651}{651(10\%)^2 + 1} = 86,684421 \sim 87 \text{ sampel}$$

Berdasarkan dari hasil perhitungan di atas diketahui jumlah PKL yang diambil agar per unit pengamatan dapat proporsional adalah sebesar 87 sampel. Dari jumlah keseluruhan PKL pada lokasi studi sebanyak 651 PKL, maka jumlah sampel yang diambil setiap lokasi agar dicapai jumlah yang proporsional per unit pengamatan dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Jumlah sampel pedagang kaki lima

No.	Lokasi	Total	
		P	S
1.	Depan Pasar Baru Kota Gresik	110	15
2.	Depan lahan penampungan PT. Multi Sarana Plaza	130	17
3.	Depan Pasar Kota Gresik	200	27
4.	Timur Alun-Alun Kota Gresik	41	5
5.	TPG II Randuagung	30	4
6.	Di wilayah perempatan Sidomoro, Jl. Kartini, Jl. Usman Sadar, Jl. Pahlawan	140	5
Total		651	87

Sumber : Hasil Perhitungan 2006

Keterangan : P = Populasi

S = Sampel

3.5.2 Metode pengambilan sampel masyarakat

Metode pengambilan sampel masyarakat menggunakan teknik *Accidental Sampling*. Menurut Suhartono (2000 : 62), orang yang diambil sebagai sampel adalah mereka yang kebetulan ditemukan atau mudah ditemui atau mudah dijangkau. Dalam pengambilan sampel ini diasumsikan bahwa jumlah pengunjung dan pembeli yang datang ke lokasi pedagang kaki lima tidak diketahui, sehingga pengambilan sampel

dapat menggunakan rumus *quota sampling* dengan populasi tidak diketahui. Menurut Sigit (2001 : 89) penentuan sampel untuk populasi yang tidak diketahui dapat menggunakan *quota sampling*. Sedangkan penetapan jumlah sampel melalui *quota sampling* untuk penelitian deskriptif adalah sebanyak 100. Oleh karena populasi tidak diketahui maka perlu dilakukan pengamatan awal jumlah pengunjung pada lokasi pedagang kaki lima di Kota Gresik. Jumlah pengunjung berdasarkan pengamatan awal pada masing-masing lokasi pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rata-rata jumlah masyarakat pengunjung lokasi pedagang kaki lima

No.	Lokasi	Waktu (30 menit)	Jumlah pengunjung		Rata-rata pengunjung		Rata-rata Jumlah Pengunjung	Prosentase
			Hari Biasa (Rabu)	Hari Sibuk (Sabtu)	Hari Biasa (Rabu)	Hari Sibuk (Sabtu)		
1.	Depan Pasar Baru Kota Gresik	Siang	23	31	16	19	17	14 %
		Sore	15	21				
		Malam	13	12				
2.	Depan lahan penampungan PT. Multi Sarana Plaza	Siang	15	17	17	21	19	15 %
		Sore	12	16				
		Malam	6	10				
3.	Depan Pasar Kota Gresik	Siang	17	20	11	14	12	9 %
		Sore	15	17				
		Malam	15	21				
4.	Timur Alun-Alun Kota Gresik	Siang	17	25	9	15	12	9 %
		Sore	18	27				
		Malam	23	31				
5.	TPG II Randuagung	Siang	9	15	19	28	23	18 %
		Sore	11	15				
		Malam	15	7				
6.	Perempatan Sidomoro	Siang	15	15	6	10	13	10 %
		Sore	21	23				
		Malam	27	19				
7.	Jl. Kartini	Siang	3	5	21	19	17	14 %
		Sore	5	9				
		Malam	4	6				
8.	Jl. Usman Sadar	Siang	9	15	4	6	5	4 %
		Sore	11	17				
		Malam	7	13				
9.	Jl. Pahlawan	Siang	7	11	5	12	8	7 %
		Sore	6	13				
		Malam	5	7				
Total					108	144	126	100 %

Sumber : Hasil Perhitungan 2007

Berdasarkan perhitungan rata-rata jumlah masyarakat pengunjung lokasi pedagang kaki lima maka dapat diketahui proporsi prosentase rata-rata pengunjung pada masing-masing lokasi yang dijadikan acuan proporsi pengambilan sampel pengunjung pada masing-masing lokasi pedagang kaki lima. Adapun sampel pengunjung pada masing-masing lokasi PKL dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Sampel masyarakat pengunjung lokasi pedagang kaki lima

No.	Lokasi	Prosentase	Sampel Masyarakat
1.	Depan Pasar Baru Kota Gresik	14 %	14
2.	Depan lahan penampungan PT. Multi Sarana Plaza	15 %	15
3.	Depan Pasar Kota Gresik	9 %	9
4.	Timur Alun-Alun Kota Gresik	9 %	9
5.	TPG II Randuagung	18 %	18
6.	Perempatan Sidomoro	10 %	10
7.	Jl. Kartini	14 %	14
8.	Jl. Usman Sadar	4 %	4
9.	Jl. Pahlawan	7 %	7
Total		100 %	100

Sumber : Hasil Perhitungan 2007

Berdasarkan hasil dari hasil perhitungan di atas diketahui jumlah pengunjung (konsumen PKL) yang diambil agar per unit pengamatan dapat proporsional adalah sebesar 100 sampel dengan pembagian sampel pada masing-masing lokasi sesuai dengan tabel 3.8.

3.5.3 Metode pengambilan sampel pemerintah kota dan ahli

Teknik sampel untuk responden pemerintah kota dan para ahli (*expert*) adalah menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Umar (2001 : 42) teknik ini adalah pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui. Teknik ini dianggap sesuai dengan analisis yang digunakan khususnya Metode Delphi yang mensyaratkan responden adalah pakar yaitu orang yang berkaitan dan memahami masalah PKL. Jumlah sampel responden pemerintah kota dan ahli dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.9 Jumlah sampel responden pemerintah

No.	Dinas/Instansi/Lembaga/Organisasi	Jumlah
1.	Bappeda	1
2.	Dinas Perindustrian dan perdagangan	1
3.	Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL	1
4.	Dinas Kebersihan	1
5.	Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah	1
6.	Dinas PU	1
7.	Kantor Satpol PP	1
8.	Balitbang	1

Sumber : Survei Sekunder 2006

Kunci dari penelitian sukses Delphi terdapat pada pemilihan peserta karena hasil dari penelitian Delphi bergantung pada pengetahuan dan kerjasama anggota panel (*daisy channing*)¹. Orang-orang yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam penelitian berdasarkan pencarian ilmiah yang sesuai dengan bidang penelitian berupa pihak

¹ Dalam makalah yang berjudul "Future Research Methodology, The Delphi Method", Theodore Jay Gordon, 1994

instansi yang memiliki wewenang dan ikut serta terlibat langsung dalam tim pembinaan dan penataan pedagang kaki lima atau orang-orang yang direkomendasikan dari institusi tertentu dan para ahli pemerhati masalah pedagang kaki lima yang lain.

Sedangkan untuk jumlah responden ahli untuk menerapkan metode Delphi sesuai yaitu antara 2-5 kuisioner berkelanjutan yang diberikan pada sebuah kelompok yang terdiri atas sekitar 15-25 orang (terkadang lebih dari 100 orang) yang dipilih sebagai golongan ahli dalam bidang yang sedang diteliti (apabila tujuan dari soal-soal yang ada di dalamnya untuk mengumpulkan pendapat para ahli untuk beberapa permasalahan) atau sebagai golongan orang yang sangat memperhatikan beberapa isu yang diteliti (apabila tujuannya adalah untuk mengetahui kepentingan sosial atau organisasional). Namun, kuisioner ini dapat dikirim ke panel ahli dalam ukuran terkecil (10 orang atau lebih) untuk dapat bekerjasama dalam tim penelitian².

Berdasarkan penjelasan di atas maka, jumlah responden ahli yang telah dipilih adalah sebanyak 10 (sepuluh) responden yaitu dari pihak pemerintah yang terlibat langsung dalam pembinaan dan pengelolaan pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik antara lain Bappeda, Dinas PU, Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL, Dinas Kebersihan, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM dan Kantor Satpol PP. Sedangkan dari pihak PKL diwakili oleh paguyuban PKL dan juga dari pihak akademisi sebagai pemerhati masalah ekonomi termasuk pedagang kaki lima di Kota Gresik yang diwakili oleh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik. Adapun jabatan dari masing-masing responden dapat dilihat pada tabel 3.9.

Tabel 3.10 Responden ahli dan jabatan

No.	Instansi	Nama	Jabatan	Pengalaman	Keterangan
1.	Bappeda	Ir. Agus Budiono, MM	Kepala Bidang Perencanaan	Tim Pembinaan dan Pengelolaan PKL	Sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Gresik
2.	Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL	Drs. H. Soenyoto, MS.i	Kepala Kantor Pengelolaan Pasar dan PKL	Tim Pembinaan dan Pengelolaan PKL	Sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Gresik
3.	Dinas Kebersihan	Drs. Imam Syafi'i	Kepala Sub Dinas Kebersihan	Penanganan Kebersihan Kabupaten Gresik	Rekomendasi dari pihak Bappeda
4.	Kantor Satpol PP	Fransisca Hasan, S.Psg	Staff Bidang Administrasi	Tim Operasi Ketertiban Umum PKL	Sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Gresik
5.	Dinas PU	Ir. Agus Juari	Kepala Bidang Jalan raya dan transportasi	Tim Pembinaan dan Pengelolaan PKL	Sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Gresik
6.	Balitbang	Drs. Oedi Margiantonius	Staff Bidang Sumber Daya Manusia	Penelitian Kajian Penataan dan Pengembangan PKL Kabupaten Gresik	Penelitian melibatkan Kantor Pasar & PKL, Dinas Perhubungan, Dinas PU, Kantor Satpol PP, Paguyuban PKL Gresik dan 80 orang anggota PKL

² Dalam makalah yang berjudul "Future Research Methodology, The Delphi Method", Theodore Jay Gordon, 1994

No.	Instansi	Nama	Jabatan	Pengalaman	Keterangan
7.	Dinas Perdagangan	Drs Ahmad Widodo	Staff Bidang PK-5	Pemerhati masalah PKL di Kota Gresik	Pemerhati PKL Kabupaten Gresik
8.	Dinas Koperasi dan UKM	Arasnadi, SH, M.Si	Kepala Unit Usaha Kecil Menengah	Pemerhati masalah PKL di Kota Gresik	Pemerhati PKL Kabupaten Gresik
9.	Universitas Muhammadiyah Gresik	Ir. Agus Budiono, MM	Dosen Fakultas Ekonomi	Pemerhati masalah PKL di Kota Gresik	Rekomendasi pihak Bappeda
10.	Paguyuban PKL	H. Samsul Bahri	Sekretaris Paguyuban PKL	Pelaku sektor infromal	Pelaku Kegiatan

Sumber : Survei Primer 2006

3.6 Penentuan Variabel

Setiap observasi dalam penelitian tentunya perlu ditentukan karakter yang akan diobservasi dari unit pengamatan yang disebut variabel (*variable*). Variabel merupakan objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam studi ini digunakan beberapa variabel penelitian yang terfokus pada aspek-aspek penentuan lokasi PKL dilihat dari faktor ekonomi, sosial dan fisik. Penentuan variabel ini telah disesuaikan dengan tujuan studi yaitu untuk menentukan urutan aspek-aspek penentuan lokasi PKL dalam faktor ekonomi, sosial dan fisik di wilayah studi. Pertimbangan penentuan ketiga faktor tersebut berdasarkan studi pendahuluan dan studi literatur, antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Pemilihan aspek faktor ekonomi diambil dari studi pendahuluan³ dimana pemilihan faktor ini didasarkan atas pertimbangan bahwa aktivitas PKL merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, yaitu berupa aktivitas perdagangan. Pengertian ekonomi disini berhubungan dengan "keuntungan" yang ingin diperoleh yang bisa didapat dari aspek jenis dagangan, biaya angkutan dan waktu berjualan.

2. Faktor Sosial

Pemilihan faktor sosial dalam penelitian ini diambil juga dari studi pendahuluan mengenai penentuan lokasi PKL⁴, dimana pertimbangannya adalah dengan alasan karena aktivitas PKL dilaksanakan dalam suatu "ruang", dimana "ruang" tersebut terdapat aktivitas-aktivitas masyarakat yang lain. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan antara aktivitas PKL dengan aktivitas masyarakat yang lain maka perlu ada batasan dalam hal ini aspek yang berkaitan dengan sosial masyarakat seperti, keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kebersihan. Pemilihan

³ Purnama, "Studi Aspek yang Diprioritaskan pada Faktor Ekonomi, Sosial, dan Fisik dalam penentuan Lokasi PKL di Kota Mataram"

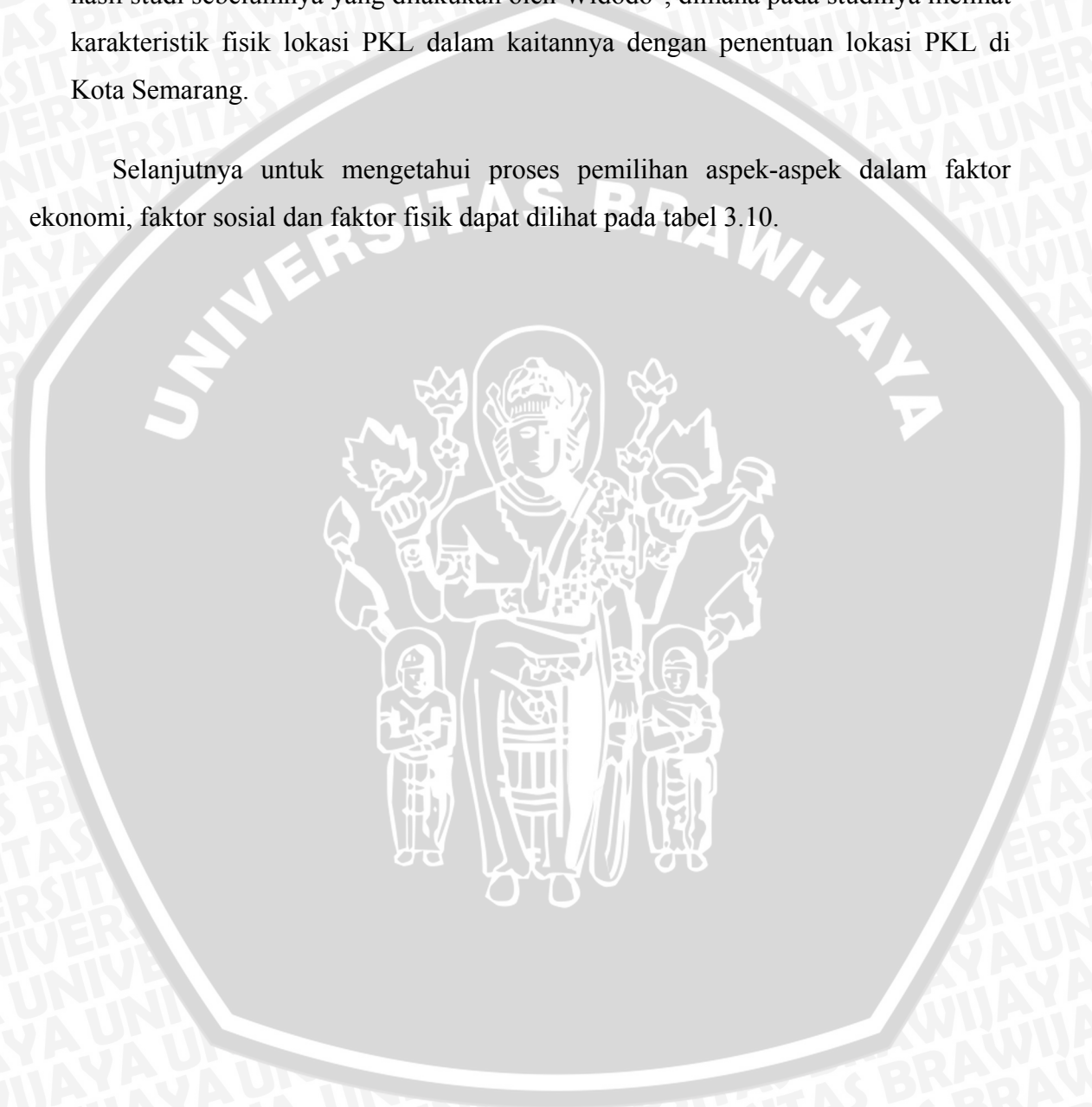
⁴ Purnama, "Studi Aspek yang Diprioritaskan pada Faktor Ekonomi, Sosial, dan Fisik dalam penentuan Lokasi PKL di Kota Mataram"

aspek faktor sosial ini juga didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 3 Tahun 2003 tentang ijin penempatan dan pembinaan pedagang kaki lima Bab III Pasal 3.

3. Faktor Fisik

Pemilihan aspek-aspek yang berhubungan dengan aktivitas fisik didasarkan dari hasil studi sebelumnya yang dilakukan oleh Widodo⁵, dimana pada studinya melihat karakteristik fisik lokasi PKL dalam kaitannya dengan penentuan lokasi PKL di Kota Semarang.

Selanjutnya untuk mengetahui proses pemilihan aspek-aspek dalam faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor fisik dapat dilihat pada tabel 3.10.



⁵ Magister Teknik Pembangunan Kota Program pasca Sarjana UNDIP Semarang, 2003 "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL Kota Semarang"

Tabel 3.11 Dasar pemilihan variabel

No.	Faktor	Sumber Pustaka	Aspek	Dasar Pertimbangan	Keterangan	Aspek yang Diuji
1.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian oleh Aulia Purnama, 2003 Penelitian oleh Ahmadi Widodo, 2003 	Jenis Dagangan	Pemilihan lokasi PKL disesuaikan dengan jenis dagangan yang di butuhkan masyarakat disekitar lokasi (sektor formal)	Diambil sebagai variabel yang diujikan	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Dagangan Biaya Angkutan Waktu Jualan
		<ul style="list-style-type: none"> Penelitian oleh Aulia Purnama, 2003 	Biaya Angkutan	Salah satu faktor yang dapat memperkecil modal antara lain adalah rendahnya biaya angkutan menuju lokasi jualan.	Diambil sebagai variabel yang diujikan	
		<ul style="list-style-type: none"> Penelitian oleh Aulia Purnama, 2003 	Waktu Jualan	Pola aktivitas PKL menyesuaikan irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan perilaku kegiatan formal	Diambil sebagai variabel yang diujikan	
		<ul style="list-style-type: none"> Hawkers In Southeast Asian Cities Planning For The Bazaar Economy, 1977 Penelitian oleh Ahmadi Widodo, 2003 	Modal	Pembuat kebijakan cenderung tidak melihat besar kecilnya modal PKL dalam menentukan lokasi jualan PKL. Sama halnya dengan biaya angkutan.	Tidak diambil sebagai variabel yang diujikan	
2.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 	Keamanan	Lokasi PKL yang sebagian besar ruang publik membutuhkan keamanan dari segala macam aktivitas yang dilarang.	Diambil sebagai variabel yang diujikan	<ul style="list-style-type: none"> Keamanan Kenyamanan Ketertiban Kebersihan
		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 Urban Hidden Economy Peran Sembunyi Sektor Informal Perkotaan, 2003 	Kenyamanan	Penentuan lokasi PKL dilihat dari sudut kepentingan masyarakat khususnya para konsumen sebagai golongan pengguna jasa pedagang kaki lima	Diambil sebagai variabel yang diujikan	
		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 	Ketertiban	Lokasi PKL yang sebagian besar ruang publik membutuhkan ketertiban	Diambil sebagai variabel yang diujikan	

No.	Faktor	Sumber Pustaka	Aspek	Dasar Pertimbangan	Keterangan	Aspek yang Diuji
		03 Tahun 2003 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 ▪ Urban Hidden Economy Peran Sembunyi Sektor Informal Perkotaan, 2003 ▪ Ekonomi Informal Perkotaan, 1994 		dari segala macam aktivitas yang dilarang.		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 ▪ Urban Hidden Economy Peran Sembunyi Sektor Informal Perkotaan, 2003 ▪ Ekonomi Informal Perkotaan, 1994 	Kebersihan	Lokasi PKL yang sebagian besar ruang publik membutuhkan kebersihan baik dari kegiatan yang menghasilkan sampah basah maupun sampah kering	Diambil sebagai variabel yang diujikan	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 ▪ Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 ▪ Urban Hidden Economy Peran Sembunyi Sektor Informal Perkotaan, 2003 ▪ Ekonomi Informal Perkotaan, 1994 	Keindahan	Sama halnya dengan gabungan kebersihan dan ketertiban	Tidak diambil sebagai variabel yang diujikan	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Urban Hidden Economy Peran Sembunyi Sektor Informal Perkotaan, 2003 	Ketaatan pada hukum	Sama halnya dengan ketertiban	Tidak diambil sebagai variabel yang diujikan	
'3.	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian oleh Ahmadi Widodo, 2003 ▪ Teori Lokasi, 1992 ▪ Urbanisasi, Pengangguran 	Kemudahan Aksesibilitas/sarana transportasi	Daya tarik pada suatu fasilitas perdagangan bagi konsumen (pembeli) adalah adanya faktor kemudahan yaitu baik transportasi	Diambil sebagai variabel yang diujikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemudahan Aksesibilitas/sarana transportasi ▪ Kedekatan

No.	Faktor	Sumber Pustaka	Aspek	Dasar Pertimbangan	Keterangan	Aspek yang Diuji
		dan Sektor Informal di Perkotaan		umum (biaya, waktu dan frekwensi) maupun transportasi pribadi (parkir, aksesibilitas, kondisi lalu lintas, jalan parkir)		dengan Pusat Keramaian /Kegiatan Masyarakat
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian oleh Ahmadi Widodo, 2003 ▪ Teori Lokasi, 1992 ▪ Ekonomi Informal Perkotaan, 1994 ▪ Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Perkotaan 	Kedekatan dengan Pusat Keramaian /Kegiatan Masyarakat	PKL mempunyai kecenderungan memasarkan barang dagangannya sedekat mungkin dengan pembeli, sehingga PKL memilih lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau di lokasi yang merupakan pusat aktivitas masyarakat.	Diambil sebagai variabel yang diujikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Tempat Tinggal PKL
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penelitian oleh Ahmadi Widodo, 2003 ▪ Ekonomi Informal Perkotaan, 1994 	Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Tempat Tinggal PKL	Faktor-faktor yang memperkecil modal adalah faktor jarak tempat kerja dengan tempat tinggal Karena terdapat korelasi yang tinggi antara lokasi usaha dengan tempat tinggal, dengan kata lain PKL akan bertempat tinggal dimana saja asal jaraknya dekat dengan lokasi usahanya	Diambil sebagai variabel yang diujikan	

Sumber : Hasil Pemikiran 2006

Berdasarkan penentuan dan pemilihan variabel pada tabel 3.11 maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian yang digunakan dalam studi adalah :

Tabel 3.12 Variabel penelitian

No.	Variabel/Faktor	Sub Variabel/Aspek
1.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis Dagangan ▪ Biaya Angkutan ▪ Waktu Berjualan
2.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keamanan ▪ Kenyamanan ▪ Ketertiban ▪ Kebersihan
3.	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kemudahan Aksesibilitas ▪ Kedekatan dengan pusat keramaian Masyarakat/Kota ▪ Kedekatan Lokasi usaha PKL dengan Tempat Tinggal PKL

Sumber : Hasil Pemikiran 2006

3.7 Metode dan Teknik Analisis

Metode analisis dilakukan untuk mendeskriptifkan tentang teknik analisis yang digunakan dalam penelitian. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.7.1 Analisis deskriptif mengenai persepsi lokasi pedagang kaki lima

Analisis deskriptif ini digunakan dalam pembahasan rumusan pertama mengenai identifikasi persepsi mengenai aspek ekonomi, sosial dan fisik kaitannya dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui perbedaan/kesamaan persepsi antara pedagang, masyarakat dan pemerintah mengenai aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima berdasarkan dari hasil survey primer, yang nantinya dijadikan sebagai pengantar awal bagi responden sebelum masuk pada urutan prioritas dari aspek-aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima tersebut.

3.7.2 Analisis deskriptif kualitatif dengan distribusi frekwensi

Analisa satu variabel/tabel frekwensi ini termasuk analisis kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya, metode analisis ini bersifat deskriptif berupa uraian dan penjelasan dari tabel-tabel, grafik-grafik atau angka yang tersedia.

Analisis deskriptif ini digunakan dalam pembahasan mengenai identifikasi pemilihan urutan priortas aspek ekonomi, sosial dan fisik para pedagang, masyarakat

dan pemerintah dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima. Tujuan dari analisis ini untuk menampilkan dan mendeskriptifkan data/karakteristik sampel penelitian yang terdiri atas satu variabel saja. Karena setiap sampel biasanya dipilih dari populasi yang lebih luas, analisa satu variabel juga dianggap menerangkan karakteristik populasi (Singarimbun dan Effendi, 1989 : 269).

3.7.3 Analisis deskriptif dengan metode delphi

Adanya konflik kepentingan baik antar pemerintah dan pedagang kaki lima dan dalam lingkup antar pemerintah sendiri, ditambah lagi dengan adanya bentrokan antar petugas dan pedagang yang selalu terjadi pada saat dilakukannya razia oleh Satpol PP⁶, serta perdebatan mengenai ketidakcocokan pedagang dengan lokasi yang ditetapkan pemerintah⁷, sehingga sebagai usaha untuk menyelaraskan kepentingan sosial atau organisasional dari berbagai pihak maka dapat dicoba mengaplikasikan metode Delphi. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Murray Turoff and Harold Linstone⁸ dimana antara 2-5 kuisoner berkelanjutan yang diberikan pada sebuah kelompok yang dipilih sebagai golongan ahli dalam bidang yang sedang diteliti (apabila tujuan dari soal-soal yang ada di dalamnya untuk mengumpulkan pendapat para ahli untuk beberapa permasalahan) atau sebagai golongan orang yang sangat memperhatikan beberapa isu yang diteliti (apabila tujuannya adalah untuk mengetahui kepentingan sosial atau organisasional).

Konsep dasar Metode Delphi ini adalah sebenarnya didasari oleh konsep penyelenggaraan diskusi yang diikuti oleh sekelompok orang dalam suatu panel yang membahas tentang suatu topik untuk mencapai suatu konsensus. Metode Delphi ini didesain untuk mendorong adanya debat yang sesungguhnya, yang merupakan kebebasan dari setiap individu, karena jika mempertemukan mereka dalam suatu panel bisa jadi suara yang menggebu-gebu akan lebih mendominasi daripada argumen yang bagus/sangat patut untuk diperhitungkan karena menyangkut kepentingan dasar mereka. Sehingga metode Delphi adalah merupakan sistem debat yang terkontrol. Salah satu keuntungan dari wawancara secara pribadi adalah bahwa cara ini sangat fleksibel, salah satu sifat yang tidak bisa didapatkan dalam kuisoner. Metode Delphi ini dibangun sehubungan dengan faktor-faktor tidak penting yang mengganggu jalannya pertemuan

⁶ diberitakan pada harian Kompas, 9 April 2003

⁷ hasil dari Wawancara dengan Ketua Dinas Pasar

⁸ dalam bukunya yang berjudul "The Delphi Method : Techniques and Applications", 2002 (<http://www.mycoted.com/Delphi>)

para ahli. Alasan-alasan untuk pendapat yang ekstrim dilakukan dengan terbuka, pemberian saran dilakukan dengan tenang, dan tanpa kemarahan atau kerusuhan. Seringkali, kelompok para ahli akan menghasilkan kesepakatan dan walaupun kesepakatan ini tidak terjadi, alasan-alasan yang menyebabkan dua kubu yang berbeda akan kelihatan secara jelas. Para perencana yang menilai materi ini dapat memutuskan berdasarkan alasan-alasan tersebut, tujuan-tujuan dan pengetahuan mereka⁹.

Dalam studi ini Metode Delphi dilakukan dengan tidak mempertemukan secara langsung para ahli (*expert*) yang telah dipilih, tetapi mempertemukan mereka melalui suatu serangkaian pertanyaan (*kuisioner*) sebagai alat untuk menyampaikan pikiran/pendapat mereka.

Adapun secara garis besar alur pelaksanaan tiap putaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Melakukan pemilihan peserta (*daisy channing*) karena hasil dari penelitian Delphi bergantung pada pengetahuan dan kerjasama anggota panel. Orang-orang yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam penelitian berdasarkan pencarian ilmiah yang sesuai dengan bidang penelitian berupa pihak instansi yang memiliki wewenang dan ikut serta terlibat langsung dalam tim pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan orang-orang yang direkomendasikan dari institusi tertentu dan para ahli pemerhati masalah pedagang kaki lima yang lain. Hasil pemilihan responden ahli dapat dilihat pada tabel 3.13.

Tabel 3.13 Responden ahli dan jabatan

No.	Instansi	Nama	Jabatan	Pengalaman	Keterangan
1.	Bappeda	Ir. Agus Budiono, MM	Kepala Bidang Perekonomian	Tim Pembinaan dan Pengelolaan PKL	Sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Gresik
2.	Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL	Drs. H. Soenyoto, MS.i	Kepala Kantor Pengelolaan Pasar dan PKL	Tim Pembinaan dan Pengelolaan PKL	Sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Gresik
3.	Dinas Kebersihan	Drs. Imam Syafi'i	Kepala Sub Dinas Kebersihan	Penanganan Kebersihan Kabupaten Gresik	Rekomendasi dari pihak Bappeda
4.	Kantor Satpol PP	Fransisca Hasan, S.Psg	Staff Bidang Administrasi	Tim Operasi Ketertiban Umum PKL	Sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Gresik
5.	Dinas PU	Ir. Agus Juaeri	Kepala Bidang Jalan raya dan transportasi	Tim Pembinaan dan Pengelolaan PKL	Sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Gresik
6.	Balitbang	Drs. Oedi Margiantonius	Staff Bidang Sumber Daya Manusia	Penelitian Kajian Penataan dan Pengembangan PKL Kabupaten Gresik	Penelitian melibatkan Kantor Pasar & PKL, Dinas Perhubungan, Dinas PU, Kantor Satpol PP, Paguyuban PKL Gresik dan 80 orang anggota PKL
7.	Dinas Perdagangan	Drs Ahmad Widodo	Staff Bidang PK-5	Pemerhati masalah PKL di Kota Gresik	Pemerhati PKL Kabupaten Gresik

9 Theodore Jay Gordon, 1994. *Millenium Project Futures Research Methodology "The Delphi Method"*

No.	Instansi	Nama	Jabatan	Pengalaman	Keterangan
8.	Dinas Koperasi dan UKM	Arasnadi, SH, M.Si	Kepala Unit Usaha Kecil Menengah	Pemerhati masalah PKL di Kota Gresik	Pemerhati PKL Kabupaten Gresik
9.	Universitas Muhammadiyah Gresik	Ir. Agus Budiono, MM	Dosen Fakultas Ekonomi	Pemerhati masalah PKL di Kota Gresik	Rekomendasi pihak Bappeda
10.	Paguyuban PKL	H. Samsul Bahri	Sekretaris Paguyuban PKL	Pelaku sektor informal	Pelaku Kegiatan

Sumber : Survei Primer 2006

2. Survey awal adalah membuat surat survey yang mencantumkan kesediaan/permohonan untuk dilakukan wawancara selama tiga kali putaran, dengan batas waktu yang sudah ditentukan yaitu selama 3 bulan untuk penerapan metode Delphi melalui wawancara dan pemberian kuisioner putaran I, putaran II, dan putaran III.

3. Selanjutnya adalah pertemuan dengan responden ahli, dimana pertemuan dibuat berdasarkan kenyamanan responden. Sehingga waktu sangat fleksibel dan bisa berubah-ubah.

4. Penerapan penelitian Metoda Delphi yang dilakukan 3 putaran, dengan penjelasan sebagai berikut :

▪ **Putaran I : Identifikasi urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima**

Pada tahap ini, responden diminta untuk mengemukakan pendapat mengenai aspek-aspek yang menjadi prioritas mereka dalam menentukan lokasi usaha PKL. Responden (pakar) dapat menambah atau mengurangi aspek-aspek yang ada, karena Metode Delphi adalah metode yang menghasilkan pendapat/pemikiran para pakar.

Adapun aspek-aspek awal yang akan dijadikan stimulan jawaban responden meliputi aspek-aspek dari faktor ekonomi, sosial, dan fisik dalam menentukan lokasi usaha bagi usaha PKL, yaitu :

- Faktor Ekonomi : jenis dagangan, biaya angkutan, dan waktu berjualan.
- Faktor Sosial : keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kebersihan.
- Faktor fisik : kemudahan aksesibilitas (sarana angkutan kota), kedekatan dengan pusat kegiatan masyarakat/keramaian kota, kedekatan lokasi usaha PKL dengan tempat tinggal PKL.

Pelaksanaan putaran I metode Delphi dilakukan pada akhir bulan Agustus 2006 kepada sampel responden ahli, dengan pembagian teknik survei sebagai berikut :

Tabel 3.14 Pelaksanaan kegiatan metode delphi putaran I

Pelaksanaan Metode Delphi	Sasaran Instansi	Nama Responden Ahli	Waktu		
			Akhir Agustus 2006		
			Hari ke1	Hari ke2	Hari ke3
Putaran I Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebaran kuisioner metode delphi putaran I ▪ Sosialisasi tentang maksud, tujuan penelitian, dan pelaksanaan metode delphi pada masing-masing responden ▪ Mengkonfirmasi ulang kesediaan responden untuk ikut serta bersama responden ahli yang lain dalam pelaksanaan metode delphi sebanyak 3 kali putaran. ▪ Sosialisasi mengenai kuisioner putaran I, dimana responden diminta mengemukakan pendapat mereka hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan lokasi PKL terkait dengan aspek ekonomi, sosial dan fisik. ▪ Responden dapat menambah atau mengurangi aspek-aspek yang ada dan menentukan urutan berdasarkan permasalahan riil di Kota Gresik dan kepentingan mereka. ▪ Pengambilan kuisioner secara fleksibel yaitu sesuai dengan kesediaan, waktu dan kesibukan responden. Jika responden sangat sibuk maka kuisioner bisa diambil pada waktu atau hari lain sesuai perjanjian. ▪ Melakukan negosiasi perjanjian pertemuan disesuaikan antara permintaan responden dan rencana pelaksanaan metode delphi putaran II. 	Bappeda	Ir. Agus Budiono, MM			
	Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL	Drs. H. Soenyoto, MS.i			
	Dinas Kebersihan	Drs. Imam Syafi'i			
	Kantor Satpol PP	Fransisca Hasan, S.Psg			
	Dinas PU	Ir. Agus Juaeri			
	Balitbang	Drs. Oedi Margiantonius			
	Dinas Perdagangan	Drs Ahmad Widodo			
	Dinas Koperasi dan UKM	Arasnadi, SH, M.Si			
	Universitas Muhammadiyah Gresik	Ir. Agus Budiono, MM			
	Paguyuban PKL	H. Samsul Bahri			

Sumber : Hasil Survei Primer 2006

Selanjutnya hasil dari putaran I dikompilasikan dan dibuat hasil konsensus urutan prioritas putaran I yang nantinya akan diajukan untuk pendukung kuisioner pada putaran II, dalam hal ini responden ahli telah diberi penjelasan sebelumnya bahwa akan ada kuisioner putaran II dengan waktu kurang lebih 1 bulan setelah terkumpulnya kuisioner putaran I, serta terakhir kuisioner putaran III sebagai kesepakatan akhir dari urutan prioritas masing-masing responden.

▪ **Putaran II : Pengungkapan dan peninjauan ulang hasil putaran I**

Hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I diungkapkan pada putaran II kepada responden. Selanjutnya dalam tahap ini responden diminta untuk meninjau kembali pendapatnya dengan melihat hasil kesimpulan umum (konsensus). Jika responden tidak sependapat terhadap hasil pada putaran I dan ingin merubah pendapatnya, responden diharapkan dapat memberikan argumen yang logis.

Pada putaran II ini diharapkan dapat diperoleh hasil berupa urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima. Hasil konsensus putaran II ini kemudian akan dikemukakan kepada para responden dalam putaran III. Adanya perbedaan pendapat

dari masing-masing responden diharapkan dapat diatasi dengan pemberian argumen yang kuat dan logis dari masing-masing responden serta konsekuensi terhadap jawaban tersebut. Waktu pelaksanaan penyebaran kuisiner putaran II adalah pada pertengahan bulan September 2006 dengan teknik pembagian waktu survey sama seperti putaran I. Berikut tabel pelaksanaan kegiatan metode delphi putaran II.

Tabel 3.15 Pelaksanaan kegiatan metode delphi putaran II

Pelaksanaan Metode Delphi	Sasaran Instansi	Nama Responden Ahli	Waktu		
			Pertengahan September 2006		
			Hari ke1	Hari ke2	Hari ke3
Putaran I Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghubungi masing-masing responden untuk mengingatkan akan dilakukannya metode delphi putaran II ▪ Penyebaran kuisiner metode delphi putaran II ▪ Sosialisasi tentang hasil konsensus kuisiner putaran I mengenai urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima di Kota Gresik ▪ Para ahli diminta merespon dengan membandingkan antara hasil konsensus dengan jawaban mereka pada putaran I dengan mengisi ulang jawaban pada kuisiner putaran II. ▪ Responden yang tidak konsisten dan ingin merubah jawaban setelah melihat hasil konsensus putaran I harus disertai dengan alasan yang jelas dan logis. ▪ Pengambilan kuisiner secara fleksibel yaitu sesuai dengan kesediaan, waktu dan kesibukan responden. Jika responden sangat sibuk maka kuisiner bisa diambil pada waktu atau hari lain sesuai perjanjian. ▪ Melakukan negosiasi perjanjian pertemuan disesuaikan antara permintaan responden dan rencana untuk melanjutkan pada pelaksanaan metode delphi putaran III. 	Bappeda	Ir. Agus Budiono, MM			
	Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL	Drs. H. Soenyoto, MS.i			
	Dinas Kebersihan	Drs. Imam Syafi'i			
	Kantor Satpol PP	Fransisca Hasan, S.Psg			
	Dinas PU	Ir. Agus Juaeri			
	Balitbang	Drs. Oedi Margiantonius			
	Dinas Perdagangan	Drs. Ahmad Widodo			
	Dinas Koperasi dan UKM	Arasnadi, SH, M.Si			
	Universitas Muhammadiyah Gresik	Ir. Agus Budiono, MM			
	Paguyuban PKL	H. Samsul Bahri			

Sumber : Hasil Survei Primer 2006

▪ **Putaran III : Pengungkapan hasil putaran II dan penentuan prioritas aspek dari masing-masing faktor penentuan lokasi pedagang kaki lima**

Pelaksanaan putaran III ini berlangsung pada akhir bulan September 2006. Pada tahap ini, hasil dari tahap II diungkapkan kembali kepada responden. Hasil putaran III ini berupa konsensus akhir responden ahli mengenai urutan prioritas dari aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik.

Tabel 3.16 Pelaksanaan kegiatan metode delphi putaran II

Pelaksanaan Metode Delphi	Sasaran Instansi	Nama Responden Ahli	Waktu		
			Akhir September 2006		
			Hari ke1	Hari ke2	Hari ke3
Putaran I Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghubungi masing-masing responden untuk mengingatkan akan dilakukannya metode delphi putaran III. ▪ Penyebaran kuisioner metode delphi putaran III. ▪ Sosialisasi tentang hasil konsensus kuisioner putaran II mengenai urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima di Kota Gresik. ▪ Para ahli diminta merespon dengan membandingkan antara hasil konsensus dengan jawaban mereka pada putaran II dengan mengisi ulang jawaban pada kuisioner putaran III. ▪ Responden yang tidak konsisten dan ingin merubah jawaban setelah melihat hasil konsensus putaran I harus disertai dengan alasan yang jelas dan logis sekaligus penetapan jawaban sebagai keputusan akhir. ▪ Pengambilan kuisioner secara fleksibel yaitu sesuai dengan kesediaan, waktu dan kesibukan responden. Jika responden sangat sibuk maka kuisioner bisa diambil pada waktu atau hari lain sesuai perjanjian. ▪ Hasil kesimpulan metode delphi putaran II ini merupakan hasil konsensus akhir. 	Bappeda	Ir. Agus Budiono, MM			
	Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL	Drs. H. Soenyoto, MS.i			
	Dinas Kebersihan	Drs. Imam Syafi'i			
	Kantor Satpol PP	Fransisca Hasan, S.Psg			
	Dinas PU	Ir. Agus Juaeri			
	Balitbang	Drs. Oedi Margiantonius			
	Dinas Perdagangan	Drs Ahmad Widodo			
	Dinas Koperasi dan UKM	Arasnadi, SH, M.Si			
	Universitas Muhammadiyah Gresik	Ir. Agus Budiono, MM			
	Paguyuban PKL	H. Samsul Bahri			

Sumber : Hasil Survei Primer 2006

Cara pemberian ranking/prioritas dalam kuisioner dilakukan dengan membandingkan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain pada faktor yang bersangkutan melalui pemberian nilai (angka) sesuai dengan tingkatan yang paling menentukan hingga kurang menentukan. Berdasarkan hasil pada putaran terakhir ini, akan disusun kesimpulan yang dapat diukur dengan menggunakan ukuran pusat (*central tendency*) dan dispersi. Adapun analisis perhitungan statistik yang dilakukan untuk mengetahui hasil konsensus urutan prioritas jawaban responden antara lain meliputi:

1. Ukuran Pusat (*central tendency*)

Perhitungan ukuran pusat memberikan gambaran tentang pemusatan nilai-nilai observasi sampel. Cara perhitungan ukuran pusat yang digunakan untuk mendukung hasil kesimpulan dalam metode Delphi adalah rata-rata.

- Perhitungan rata-rata hitung

$$x = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{N} \quad x = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{N}$$

Dimana :

X_1 = Data kesatu N = Banyaknya data/sampel

Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden, hasil kesimpulan rata-rata dapat digunakan untuk menentukan urutan prioritas responden terhadap masing-masing aspek.

Responden	Aspek Ekonomi Penentuan Lokasi								
	Jenis Dagangan			Waktu Jualan			Biaya Angkutan		
	Put I	Put II	Put III	Put I	Put II	Put III	Put I	Put II	Put III
X1									
X2									
X3									
Xn									
$\sum Ri$ (Jumlah tiap kolom)									
Rata-Rata (Mean)									
Prioritas									

2. Uji Koefisien Konkordansi Kendall

Adapun untuk mengetahui tingkat konsistensi dan keselarasan jawaban dari sekelompok orang (responden ahli) dalam menilai urutan masing-masing obyek (aspek ekonomi, sosial, dan fisik), digunakan uji koefisien konkordansi Kendall (W). Nilai konkordansi kendall (Kendall W) dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{N^2k(k^2-1)}$$

Dimana :

W = Nilai konsistensi

k = Jumlah variabel, dalam kasus ini adalah masing-masing aspek dalam faktor ekonomi, sosial dan fisik

n = Jumlah penilai, dalam kasus ini adalah 8 responden ahli

Ri = Jumlah tiap kolom

Nilai W berkisar 0 – 1. semakin mendekati 1 menunjukkan semakin konsistennya jawaban responden terhadap masing-masing aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik.

3. Proses Pengambilan Keputusan

a) Hipotesis :

Ho : Responden ahli memiliki urutan prioritas yang sama (konsisten) terhadap aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima

Hi : Responden ahli memiliki urutan prioritas yang berbeda terhadap aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima

b) Dasar pengambilan keputusan

- Membandingkan Chi Square hitung dengan Chi Square tabel. Disini W hitung diubah ke Chi Square dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W$$

Jika Chi Square hitung < chi square tabel, maka Ho diterima

Jika Chi Square hitung > chi square tabel, maka Ho ditolak

- Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Probabilitas > 0,05, maka Ho diterima

Probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak

c) Logika Angka Probabilitas

Untuk angka Asymp.sig yang terdapat pada tabel output adalah angka prosentase probabilitas untuk menolak Ho.

4. Tingkat Keselarasan

W = 0 - 0,200 = Sangat Rendah

W = 0,201 - 0,400 = Rendah

W = 0,401 - 0,600 = Cukup

W = 0,601 - 0,80 = Tinggi

W = 0,801 - 1 = Sangat Tinggi

3.7.4 Analisis alternatif lokasi pedagang kaki lima

Setelah diketahui hasil konsensus urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik dari masing-masing pihak yaitu pedagang, pemerintah, masyarakat dan para ahli, maka dapat ditentukan arahan lokasi berdasarkan prioritas aspek-aspek penentuan lokasi

tersebut dengan menggunakan analisis alternatif lokasi pedagang kaki lima. Alternatif adalah kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipilih, sedangkan analisis alternatif adalah kegiatan mengidentifikasi, menetapkan kriteria, memberi bobot dan memilih salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan¹⁰. Analisis alternatif lokasi pedagang kaki lima ini digunakan untuk mengetahui prioritas lokasi pedagang kaki lima dengan melakukan pembobotan antara alternatif lokasi dengan kriteria penentuan lokasi yang merupakan hasil dari output rumusan masalah kedua. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Menentukan alternatif utama dari kawasan yang diperuntukkan untuk lokasi pedagang kaki lima di Kota Gresik (misalnya ditempatkan pada kawasan pasar/pusat perbelanjaan/ruko, perkantoran/sekolah, terminal, perumahan/tempat tinggal dan lain-lain). Penentuan ini dilakukan dengan mengoverlay jawaban prioritas pertama lokasi pedagang makanan/minuman, non makanan/minuman dan bahan mentah dari pihak pedagang, pemerintah, masyarakat dan para ahli. Hasil overlay jawaban merupakan hasil konsensus atau kesepakatan penentuan kawasan lokasi pedagang kaki lima.
2. Mengidentifikasi persebaran dari alternatif utama kawasan untuk lokasi pedagang kaki lima (hasil kesepakatan sebelumnya) di Kota Gresik dalam pembagian wilayah kota (untuk kemudahan identifikasi maka dibuat dalam per Bagian Wilayah Kota (BWK)).
3. Melakukan analisis alternatif lokasi pedagang kaki lima dengan penentuan kriteria yang didasarkan pada urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima meliputi aspek ekonomi, sosial dan fisik (output dari rumusan masalah kedua). Adapun kriteria-kriteria pada masing-masing aspek sesuai prioritasnya antara lain antara lain adalah:
 - a) Aspek Ekonomi
 - I. **Kesesuaian jenis dagangan pedagang kaki lima dengan kebutuhan masyarakat pengunjung/ yang berada di sekitar lokasi.** Semakin sesuai jenis dagangan dengan kebutuhan pengunjung/ yang berada di sekitar lokasi semakin tinggi prioritasnya.

10 Wicaksono, DwiAgus, Ir.lic.rer.reg dan Sugiarto Budi Ir, MSP. 2001. Modul perencanaan desa

- II. **Kesesuaian waktu jualan pedagang kaki lima dengan aktivitas masyarakat yang mengunjungi dan yang berada di sekitar lokasi.** Semakin sesuai waktu jualan dengan aktivitas pengunjung/yang berada di sekitar lokasi semakin tinggi prioritasnya.
 - III. **Besar biaya angkutan yang dikeluarkan.** Semakin rendah biaya angkutan yang dikeluarkan menuju lokasi semakin tinggi prioritasnya.
 - IV. **Biaya sewa tempat pada lokasi.** Semakin menjangkau anggaran dengan biaya sewa tempat pada lokasi semakin tinggi prioritasnya.
 - V. **Daya beli masyarakat yang mengunjungi dan yang berada di sekitar lokasi.** Semakin besar kemungkinan masyarakat untuk membeli semakin tinggi prioritasnya.
- b) Aspek Sosial
- I. **Ketertiban pedagang kaki lima pada lokasi** dalam arti kemungkinan PKL dapat diatur pada lokasi yang tidak menyebabkan kemacetan dan tidak menempati wilayah-wilayah yang secara hukum dilarang, seperti di halaman toko lain, di trotoar, di badan jalan atau di tanah kosong milik orang lain. Semakin besar kemungkinan ketertiban pedagang kaki lima pada lokasi semakin tinggi prioritasnya.
 - II. **Keamanan lokasi baik bagi pedagang dan pengunjung** dalam arti bagi pedagang aktivitas tidak terganggu oleh razia petugas ketertiban umum (Satpol PP) dan bagi pengunjung keamanan dari gangguan kriminal seperti pencopetan, gangguan preman dll. Semakin menjamin keamanan bagi pedagang dan pengunjung pada lokasi semakin tinggi prioritasnya.
 - III. **Kenyamanan bagi masyarakat pengunjung dan yang berada di sekitar lokasi.** Semakin besar kemungkinan kenyamanan pengunjung pada lokasi semakin tinggi prioritasnya.
 - IV. **Kebersihan pada lokasi yang diperuntukkan untuk pedagang kaki lima.** Semakin menjamin kebersihan pada lokasi semakin tinggi prioritasnya.
 - V. **Keindahan lokasi yang diperuntukkan untuk pedagang kaki lima.** Semakin menjamin keindahan pada lokasi semakin tinggi prioritasnya.

c) Aspek Fisik

I. **Kedekatan lokasi dengan pusat keramaian masyarakat/kegiatan.**

Semakin dekat lokasi dengan pusat keramaian masyarakat semakin tinggi prioritasnya.

II. **Kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi.** Semakin mudah aksesibilitas/sarana transportasi menuju lokasi semakin tinggi prioritasnya.III. **Kedekatan lokasi dengan tempat tinggal PKL.** Semakin dekat lokasi dengan tempat tinggal PKL semakin tinggi prioritasnya.IV. **Adanya lahan kosong.** Semakin banyak lahan kosong pada lokasi perdagangan dan jasa semakin tinggi prioritasnya.

4. Melakukan pembobotan antara kriteria aspek penentuan lokasi dengan alternatif lokasi pada kawasan yang telah disepakati. Nilai tertinggi merupakan prioritas pertama, sedangkan nilai terendah merupakan prioritas terakhir. Hasil analisis ini merupakan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima, yang nantinya akan dipilih salah satu lokasi untuk mencapai tujuan.

Sedangkan metode pembobotannya menggunakan metode kualitatif dengan nilai adalah sebagai berikut :

- 1 (rendah) jika lokasi memiliki keterkaitan kecil dengan kriteria aspek penentuan lokasi
 2 (sedang) jika lokasi memiliki keterkaitan cukup dengan kriteria aspek penentuan lokasi
 3 (tinggi) jika lokasi memiliki keterkaitan tinggi dengan kriteria aspek penentuan lokasi

Tabel 3.17 Matriks analisis alternatif lokasi pedagang kaki lima

NO	KRITERIA	TOTAL BOBOT	BO-BOT B	Lokasi Perdagangan dan Jasa										
				a		b		c		d		e		
				N	NxB	N	NxB	N	NxB	N	NxB	N	NxB	
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
7.														
TOTAL														

Tabel 3.18 Hasil pembobotan alternatif lokasi pedagang kaki lima di kota gresik

Prioritas	Lokasi Pedagang Kaki Lima	Bobot
1		
2		
3		

3.8 Desain Survei

Tabel 3.19 Desain survei

No.	Sasaran	Tujuan	Faktor	Aspek	Jenis Data	Bantuk Data	Sumber Data	Analisis	Output
1.	Identifikasi persepsi mengenai aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas PKL menurut pedagang, pemerintah dan masyarakat	Mengetahui persepsi pedagang, pemerintah dan masyarakat mengenai aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi aktivitas PKL di Kota Gresik.	Faktor Ekonomi Faktor Sosial Faktor Fisik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis Dagangan ▪ Biaya Angkutan ▪ Waktu Berjualan ▪ Keamanan ▪ Kenyamanan ▪ Ketertiban ▪ Kebersihan ▪ Kemudahan Aksesibilitas ▪ Kedekatan dengan pusat keramaian Kota/ kegiatan Masyarakat ▪ Kedekatan Lokasi usaha PKL dengan Tempat Tinggal PKL 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Sekunder ▪ Data Primer ▪ Data Primer ▪ Data Primer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deskripsi ▪ Kuisisioner, ▪ Wawancara ▪ Foto ▪ Kuisisioner, ▪ Wawancara ▪ Kuisisioner ▪ Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pasar ▪ Responden PKL, Pemerintah dan masyarakat ▪ Observasi ▪ Responden PKL, Pemerintah dan masyarakat ▪ Responden PKL, Pemerintah dan masyarakat 	Analisis Deskriptif persepsi mengenai lokasi pedagang kaki lima	Persepsi mengenai aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima menurut pedagang, masyarakat dan pemerintah
2.	Identifikasi urutan prioritas dari masing-masing aspek ekonomi, sosial dan fisik menurut PKL	Untuk mengetahui urutan prioritas aspek yang dipertimbangkan PKL dalam menentukan lokasi usaha mereka.	Faktor Ekonomi Faktor Sosial Faktor Fisik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis Dagangan ▪ Biaya Angkutan ▪ Waktu Berjualan ▪ Keamanan ▪ Kenyamanan ▪ Ketertiban ▪ Kebersihan ▪ Kemudahan Aksesibilitas ▪ Kedekatan dengan pusat keramaian Kota/ kegiatan Masyarakat ▪ Kedekatan Lokasi usaha PKL dengan Tempat Tinggal PKL 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Primer ▪ Data Primer ▪ Data Primer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuisisioner ▪ Wawancara ▪ Foto ▪ Kuisisioner ▪ Wawancara ▪ Kuisisioner ▪ Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Responden PKL ▪ Observasi ▪ Responden PKL ▪ Responden PKL 	Analisis Deskriptif Kualitatif dengan Distribusi Frekwensi	Urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima menurut PKL
	Identifikasi urutan prioritas dari masing-masing aspek ekonomi, sosial dan fisik menurut pemerintah	Untuk mengetahui urutan prioritas aspek yang dipertimbangkan pemerintah dalam menentukan lokasi PKL	Faktor Ekonomi Faktor Sosial Faktor Fisik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jenis Dagangan ▪ Biaya Angkutan ▪ Waktu Berjualan ▪ Keamanan ▪ Kenyamanan ▪ Ketertiban ▪ Kebersihan ▪ Kemudahan Aksesibilitas ▪ Kedekatan dengan pusat keramaian Kota/ kegiatan Masyarakat ▪ Kedekatan Lokasi usaha PKL dengan Tempat Tinggal PKL 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Primer ▪ Data Primer ▪ Data Primer 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuisisioner ▪ Wawancara ▪ Foto ▪ Kuisisioner ▪ Wawancara ▪ Kuisisioner ▪ Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pasar dan PKL ▪ Responden (Bappeda, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Balitbang, Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL, Dinas Kebersihan, Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, Kantor Satpol PP, Dinas PU) 	Analisis Deskriptif Kualitatif dengan Distribusi Frekwensi	Urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima menurut pemerintah

No.	Sasaran	Tujuan	Faktor	Aspek	Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data	Analisis	Output
	Identifikasi urutan prioritas dari masing-masing aspek ekonomi, sosial dan fisik menurut masyarakat	Untuk mengetahui urutan prioritas aspek yang dipertimbangkan masyarakat dalam menentukan lokasi PKL	Faktor Ekonomi Faktor Sosial Faktor Fisik	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Dagangan Waktu Berjualan Keamanan Kenyamanan Ketertiban Kebersihan Kemudahan Aksesibilitas Kedekatan dengan pusat keramaian Kota/ kegiatan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Data Primer Data Primer Data Primer 	<ul style="list-style-type: none"> Kuisisioner Wawancara Kuisisioner Wawancara Kuisisioner Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> Responden masyarakat Observasi Responden masyarakat Responden masyarakat 	Analisis Deskriptif Kualitatif dengan Distribusi Frekwensi	Urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima menurut masyarakat
	Identifikasi urutan prioritas dari masing-masing aspek ekonomi, sosial dan fisik menurut responden ahli	Untuk mengetahui urutan prioritas aspek yang dipertimbangkan responden ahli dalam menentukan lokasi PKL	Faktor Ekonomi Faktor Sosial Faktor Fisik	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Dagangan Waktu Berjualan Biaya Angkutan Keamanan Kenyamanan Ketertiban Kebersihan Kemudahan Aksesibilitas Kedekatan dengan pusat keramaian Kota/ kegiatan Masyarakat Kedekatan Lokasi usaha PKL dengan Tempat Tinggal PKL 	<ul style="list-style-type: none"> Data Primer Data Primer Data Primer 	<ul style="list-style-type: none"> Kuisisioner Wawancara Kuisisioner Wawancara Kuisisioner Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pasar dan PKL Responden (Bappeda, Dinas Pasar dan PKL, Balitbang, Dinas Kebersihan, Kantor Satpol PP, Dinas PU, Dosen Fakultas Ekonomi, Paguyuban PKL) 	Analisis Deskriptif dengan Metode Delphi	Urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima menurut para ahli
3.	Penentuan lokasi utama aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik yang sesuai dengan hasil urutan prioritas <i>Stakeholder</i>	Untuk mengetahui lokasi utama aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik yang sesuai dengan hasil urutan prioritas <i>Stakeholder</i>	Faktor Ekonomi Faktor Sosial Faktor Fisik	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Dagangan Waktu Berjualan Biaya Angkutan Keamanan Kenyamanan Ketertiban Kebersihan Kemudahan Aksesibilitas Kedekatan dengan pusat keramaian Kota/ kegiatan Masyarakat Kedekatan Lokasi usaha PKL dengan Tempat Tinggal PKL 	<ul style="list-style-type: none"> Data Primer Data Primer Data Primer 	<ul style="list-style-type: none"> Kuisisioner Wawancara Kuisisioner Wawancara Kuisisioner Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> Pedagang Pemerintah Masyarakat Ahli 	Analisis alternatif lokasi pedagang kaki lima	Penentuan lokasi utama aktivitas PKL di Kota Gresik berdasarkan hasil urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik

Sumber : *Desan Survey 2006*

BAB III.....	43
METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Lokasi Penelitian.....	44
3.3 Diagram Alir Penelitian.....	48
3.4 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	50
3.4.1 Teknik pengumpulan data.....	50
3.4.2 Teknik pengolahan data.....	56
3.5. Metode Populasi dan Sampel.....	57
3.5.1 Sampel pedagang kaki lima.....	58
3.5.2 Metode pengambilan sampel masyarakat.....	59
3.5.3 Metode pengambilan sampel pemerintah kota dan ahli.....	59
3.6 Penentuan Variabel.....	63
3.7 Metode dan Teknik Analisis.....	68
3.7.1 Analisis deskriptif mengenai persepsi lokasi pedagang kaki lima.....	68
3.7.2 Analisis deskriptif kualitatif dengan distribusi frekwensi.....	68
3.7.3 Analisis deskriptif dengan metode delphi.....	69
3.7.4 Analisis alternatif lokasi pedagang kaki lima.....	76
3.8 Desain Survei.....	80
Tabel 3.1 Lokasi penelitian.....	45
Tabel 3.2 Kerangka analisis metode delphi.....	49
Tabel 3.3 Data kuisioner.....	53
Tabel 3.4 Jenis dan kegunaan data.....	56
Tabel 3.5 Jumlah pedagang kaki lima pada lokasi penelitian.....	59
Tabel 3.6 Jumlah sampel pedagang kaki lima.....	59
Tabel 3.7 Rata-rata jumlah masyarakat pengunjung lokasi pedagang kaki lima.....	60
Tabel 3.8 Sampel masyarakat pengunjung lokasi pedagang kaki lima.....	61
Tabel 3.9 Jumlah sampel responden pemerintah.....	61
Tabel 3.10 Responden ahli dan jabatan.....	62
Tabel 3.11 Dasar pemilihan variabel.....	65
Tabel 3.12 Variabel penelitian.....	68
Tabel 3.13 Responden ahli dan jabatan.....	70
Tabel 3.14 Pelaksanaan kegiatan metode delphi putaran I.....	72
Tabel 3.15 Pelaksanaan kegiatan metode delphi putaran II.....	73
Tabel 3.16 Pelaksanaan kegiatan metode delphi putaran II.....	74
Tabel 3.17 Matriks analisis alternatif lokasi pedagang kaki lima.....	79
Tabel 3.18 Hasil pembobotan alternatif lokasi pedagang kaki lima di kota gresik.....	79
Tabel 3.19 Desain survei.....	80

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Wilayah Kota Gresik

4.1.1 Kondisi fisik geografis dan luas wilayah

Secara administrasi, wilayah Kota Gresik meliputi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Gresik dengan 21 desa/kelurahan, Kecamatan Kebomas dengan 21 Desa/Kelurahan dan sebagian Kecamatan Manyar dengan 5 Desa. Batas-batas administrasi dari wilayah kota Gresik adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Selat Madura
Sebelah Timur	: Kota Surabaya
Sebelah Selatan	: Selat Madura
Sebelah Barat	: Kecamatan Manyar dan Kecamatan Cerme.

Peta orientasi Kabupaten Gresik terhadap Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada gambar 4.1. Peta orientasi wilayah Kota Gresik terhadap Kabupaten Gresik dan peta administrasi wilayah Kota Gresik dapat dilihat pada gambar 4.2 dan gambar 4.3. Luas wilayah Kota Gresik adalah 131,02 Km² (2,14% dari luas total Kabupaten Gresik) dengan proporsi luas terbesar adalah Kecamatan Manyar sebesar 95,42 km².

4.1.2 Struktur tata ruang dan fungsi wilayah kota gresik

Wilayah Kota Gresik berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota Gresik Tahun 2002-2012¹ terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar, dan terletak pada SSWP II dengan pusat berada di Kecamatan Kebomas. Fungsi dari SSWP II dalam konteks pengembangan wilayah Kabupaten Gresik² adalah sebagai pusat pemerintahan, perdagangan pariwisata, dan industri. Kegiatan utama yang dikembangkan antara lain : mendorong pertumbuhan aktivitas perdagangan, mendorong pertumbuhan aktivitas pertanian tanaman, melakukan penataan kawasan industri, mendorong pertumbuhan aktivitas pengolahan hasil perikanan, membangun sarana pemerintahan, mengendalikan dampak aktivitas pertambangan, mengembangkan pariwisata budaya, dan mendorong pertumbuhan aktivitas industri kecil. Pembagian SWP Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar 4.4.

¹ Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) Kota Gresik Tahun 2002/2003-2006/2007 Hal IV-8

² Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2002-2012 Hal IV-3

Gambar 4.1 Peta orientasi wilayah Kabupaten Gresik



Gambar 4.2 peta orientasi Kota Gresik



Gambar 4.3 peta Administrasi Kota Gresik



Gambar 4.4 Pembagian SWP Kabupaten Gresik



Sedangkan fungsi pelayanan yang mendukung IKK Kebomas sebagai sub pusat regional adalah mendorong berkembangnya aktivitas perdagangan terutama perdagangan regional. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2002-2012, wilayah Kota Gresik diarahkan untuk pengembangan industri, perdagangan, jasa dan pendidikan. Sedangkan menurut Revisi Tata Ruang Kota (RTRK) Kota Gresik Tahun 2002/2003-2006/2007³, arahan fungsi kegiatan di wilayah Kota Gresik adalah industri, perdagangan dan jasa, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pemerintahan serta fasilitas campuran. Berdasarkan kecenderungan perkembangan saat ini, fungsi kegiatan yang diidentifikasi meliputi industri (yang terdiri dari aneka industri dan industri kecil), perumahan (komplek maupun perumahan tradisional), perdagangan dan jasa (pertokoan, pasar) dan fasilitas umum dan pemerintahan.

Upaya penyederhanaan pengaturan pengembangan wilayah Kota Gresik disesuaikan dengan karakteristik yang ada, kriteria homogenitas, pemanfaatan tanah, unsur fisik dan arahan RUTRK maupun struktur tata ruang yang dihasilkan, maka wilayah Kota Gresik dibagi menjadi 7 bagian wilayah kota (BWK) dan 19 unit lingkungan (UL), hal ini didasarkan pada karakteristik yang akan dialokasikan, jaringan jalan yang berhubungan dengan aksesibilitas kawasan, dan karakteristik fisik kawasan. Pembagian wilayah dan arahan kegiatan di wilayah Kota Gresik dapat dilihat pada tabel 4.1. Peta Struktur Kota Gresik dapat dilihat pada gambar 4.5.

Tabel 4.1 Pembagian wilayah dan arahan kegiatan wilayah kota gresik tahun 2004

BWK	Arahan Kegiatan	UL	Pusat UL
I Berpusat di Pusat Perdagangan/pasar Jl. Gubernur Suryo (Pusat Kota)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman ▪ Pusat Pelayanan Kota ▪ Perdagangan, Jasa, Fasum ▪ Pelabuhan, Pergudangan 	<ul style="list-style-type: none"> UL A UL B UL C UL D UL E 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di sekitar Alun-Alun ▪ Sekitar jalan Yos Sudarso (Jalan Masuk ke Pelabuhan) ▪ Pasar Umum Gresik ▪ Di sekitar Lapangan Golf ▪ Pertokoan di Jalan Gub. Suryo
II Berpusat di Kelurahan Roomo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri dan Pergudangan ▪ Permukiman ▪ Perdagangan, jasa dan Fasum ▪ Jalur Hijau 	<ul style="list-style-type: none"> UL A UL B UL C 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelurahan Roomo ▪ Kelurahan Tlogo Bendung ▪ Desa Pongangan
III	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman ▪ Pusat Pemerintahan ▪ Perdagangan, Jasa dan Fasum 	<ul style="list-style-type: none"> UL A UL B 	-
IV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Permukiman ▪ Industri ▪ Konservasi 	<ul style="list-style-type: none"> UL A UL B UL C 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa Kembangan ▪ Gending

³ Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) Kota Gresik Tahun 2002/2003-2006/2007 Hal IV-2

BWK	Arahan Kegiatan	UL	Pusat UL
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata Budaya ▪ Pusat Perkantoran, Pelayanan Umum dan Jasa 		
V	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri dan Pergudangan ▪ Permukiman ▪ RTH 	UL A UL B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kedayang ▪ Desa Gulomantung
VI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri dan Pergudangan ▪ Permukiman ▪ Perdagangan dan Jasa ▪ RTH 	UL A UL B	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Singosari ▪ Desa Segoromadu
VII	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri dan Pergudangan ▪ Permukiman ▪ Pelabuhan ▪ Perdagangan dan Jasa, serta fasilitas skala kota 	UL A UL B	-

Sumber : RTRK Kota Gresik Tahun 2002/2003-2006/2007 Hal IV-2



Gambar 4.5 Peta Struktur Kota Gresik



4.1.3 Kependudukan wilayah kota gresik

A. Penduduk menurut jenis kelamin

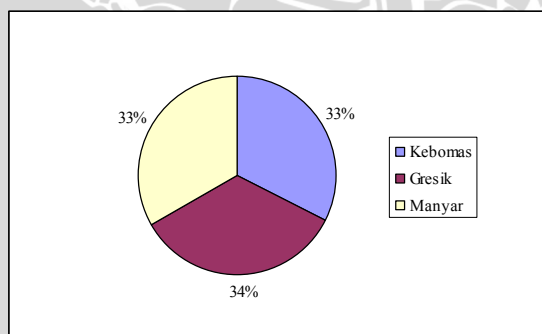
Jumlah penduduk wilayah Kota Gresik pada tahun 2004 berdasarkan hasil dari registrasi penduduk sebesar 237.674 jiwa, terdiri dari 120.230 (50,6%) jiwa laki-laki dan 117.476 (49,4%) jiwa perempuan. Pembagian jumlah penduduk wilayah Kota Gresik pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Pembagian jumlah penduduk menurut jenis kelamin wilayah kota gresik tahun 2004

No.	Kecamatan	Desa	Penduduk		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Kebomas	21	39.098	38.408	77506	102
2.	Gresik	21	41.000	39.920	80975	103
3.	Manyar	23	40.087	39.106	79193	103
Jumlah		65	120.230	117.476	237.674	103

Sumber : Gresik Dalam Angka Tahun 2004

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Gresik sebesar 80.975 jiwa atau 34 % dari jumlah penduduk keseluruhan. Hal ini dikarenakan Kecamatan Gresik memiliki karakteristik permukiman dengan kepadatan tinggi didukung adanya pusat perdagangan berskala kota dan kabupaten. Prosentase jumlah penduduk ketiga kecamatan di wilayah Kota Gresik dapat dilihat pada gambar 4.6.



Sumber : Gresik Dalam Angka Tahun 2004

Gambar 4.6 Pembagian jumlah penduduk wilayah kota gresik tahun 2004

B. Penduduk menurut mata pencaharian

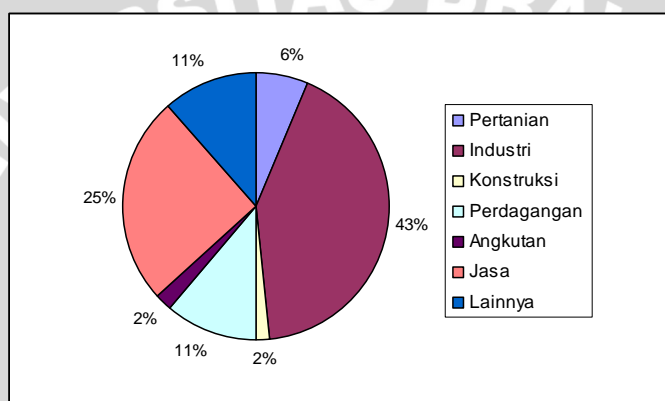
Karakteristik mata pencaharian penduduk wilayah Kota Gresik antara lain adalah dalam bidang pertanian, industri, konstruksi, perdagangan angkutan, jasa, dan lainnya. Sebagian besar penduduk wilayah Kota Gresik bekerja dalam bidang industri yaitu 43 % dari jumlah angkatan kerja keseluruhan. Kemudian diikuti dengan penduduk yang bekerja di bidang jasa (25 %) dan bidang perdagangan (11%). Hal ini sesuai

dengan peruntukan lahan di Wilayah Kota Gresik yang didominasi oleh industri dengan luas sebesar 786,685 Ha dari wilayah Kota Gresik dan perdagangan jasa seluas 17,864 Ha dari wilayah Kota Gresik. Pembagian jumlah penduduk menurut mata pencaharian di wilayah Kota Gresik dapat dilihat pada tabel 4.3 dan gambar 4.7.

Tabel 4.3 Pembagian jumlah penduduk menurut lapangan usaha wilayah kota gresik tahun 2004

No.	Kecamatan	Lapangan Usaha							Jumlah
		Pertanian	Industri	Konstruksi	Perdagangan	Angkutan	Jasa	Lainnya	
1.	Kebomas	1.345	18.836	88	2.396	432	788	2.212	26.097
2.	Gresik	-	3.433	63	2.736	35	13.590	4.352	24.209
3.	Manyar	4.035	4.201	994	1.897	873	1.602	662	14.264
Jumlah		4.035	26.470	1.145	7.029	1.340	15.980	7.226	64.570

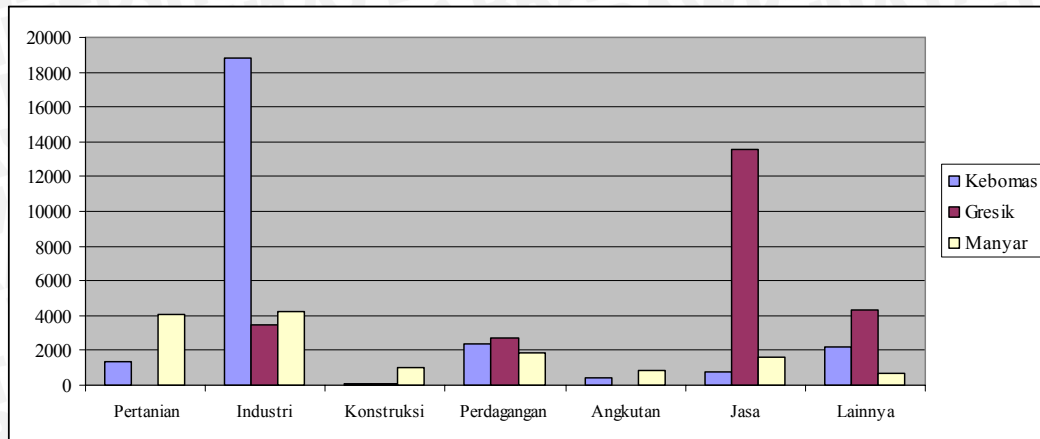
Sumber : Gresik Dalam Angka Tahun 2004



Sumber : Gresik Dalam Angka Tahun 2004

Gambar 4.7 Pembagian jumlah penduduk menurut lapangan usaha wilayah kota gresik tahun 2004

Penduduk yang bekerja dalam bidang industri sebagian besar terdapat di Kecamatan Kebomas dengan jumlah sebesar 18.938 jiwa atau 71,2 % dari jumlah penduduk bermata pencaharian di bidang industri secara keseluruhan. Sedangkan untuk penduduk yang bekerja di bidang perdagangan dan jasa sebagian besar terdapat di Kecamatan Gresik dengan jumlah sebesar 2.736 jiwa atau 38,9 % dari dan 13.590 jiwa atau 85 % dari jumlah penduduk bermata pencaharian di bidang perdagangan jasa secara keseluruhan. Pembagian jumlah penduduk menurut mata pencaharian di ketiga kecamatan dapat dilihat pada gambar 4.8.



Sumber : Gresik Dalam Angka Tahun 2004

Gambar 4.8 Pembagian jumlah penduduk menurut lapangan usaha per kecamatan di wilayah kota Gresik tahun 2004

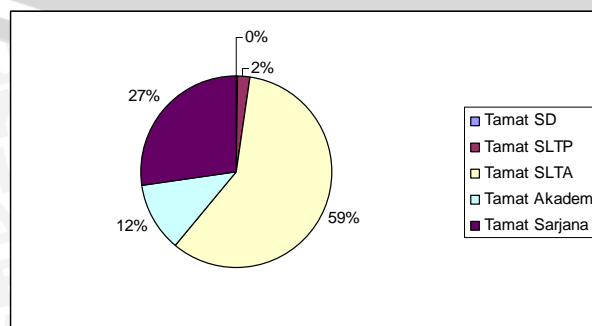
C. Tenaga kerja

Jumlah pencari kerja yang masuk catatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2004 sebanyak 6.098 laki-laki dan 6.213 perempuan. Presentase terbesar adalah tamatan SLTA, berikutnya 27,18 persen tamatan sarjana dan terbesar ketiga 11,74 persen tamat akademi. Dari jumlah itu pencari kerja yang ditempatkan sebesar 1.444 orang, 48,48% laki-laki dan 51,52% perempuan. Pembagian jumlah pencari kerja Kabupaten Gresik pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

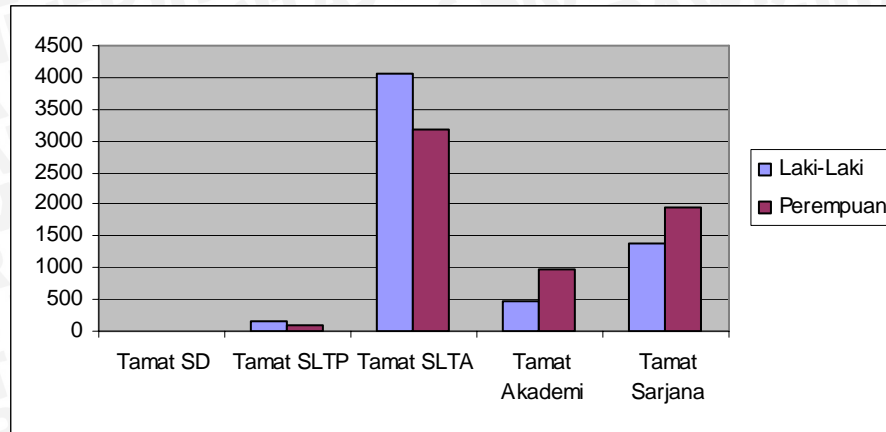
Tabel 4.4 Pembagian jumlah pencari kerja wilayah kota Gresik tahun 2004

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Belum Tamat SD	-	-	-
2.	Tamat SD	14	9	23
3.	Tamat SLTP	172	79	251
4.	Tamat SLTA			
	a. Umum	2.031	2.133	4.167
	b. Kejuruan	2.021	1.058	3.079
5.	Tamat Akademi	465	980	1.445
6.	Tamat Sarjana	1.392	1.954	3.346
Jumlah		6.098	6.213	12.311
Prosentase		50 %	50 %	100 %

Sumber : Gresik Dalam Angka Tahun 2004



Gambar 4.9 Pembagian jumlah pencari kerja wilayah kota Gresik tahun 2004



Gambar 4.10 Pembagian jumlah pencari kerja per jenis kelamin di wilayah kota gresik tahun 2004

4.1.4 Penggunaan tanah

Sebaran penggunaan tanah di wilayah Kota Gresik mengacu pada fungsi kawasan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Kota Gresik 2002-2012⁴ yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi perumahan, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, tanah belum terbangun, dan RTH/makam. Eksisting penggunaan lahan/ daratan di wilayah Kota Gresik dapat dirinci sebagai berikut :

- Perumahan

Kawasan perumahan berkembang secara linier mengikuti pola jaringan jalan yang ada. Perumahan kepadatan tinggi terdapat di pusat Kota Gresik yaitu sepanjang Jl. Usman Badar, Jl. Gubernur Suryo, Jl. KH. Kholil, Jl. Wahid Hasyim, Jl. Fikih Usman, Jl. Pasar Baru, Jl. Kyai Arem-Arem, Jl. Abdul Karim, Jl. Snatri, Jl. Hakim Kayat, Jl. Thamrin, Jl. Malik Ibrahim, Jl. AK. S. Tubun, Jl. Pahlawan dan Jl. Harun Tohir. Jenis perumahan di wilayah Kota Gresik berupa perumahan permanen, dan permukiman baru banyak berkembang di luar pusat kota yang menempati lahan kering maupun bekas galian indistri semen Gresik, antara lain misalnya di Kelurahan Kembangan Perumahan Griya Kembangan, Perumahan Graha Kembangan Asri Yosowilangun, Perumahan GKB, Perumahan Bakti Pertiwi, Perumahan Sidorukun Indah, Kelurahan Suci Perumahan Suci Permai, Kelurahan Sidomukti dan Kelurahan Kedanyang Perumahan Kedanyang Giri. Luas dari guna lahan perumahan ini adalah 1.049,988 Ha dari wilayah Kota Gresik.

⁴ Rencana Tata Ruang Kota Gresik 2002/2003-2006/2007 Hal II-16

- **Perdagangan dan Jasa**

Kegiatan perdagangan dan jasa banyak dijumpai di pusat Kota Gresik yaitu di sepanjang Jl. Usman Badar, Jl. Gubernur Suryo, Jl. Sindujoyo, Jl. KH. Kholil, Jl. Snatri, Jl. Malik Ibrahim, Jl. Pahlawan, Jl. JA. Suprpto (sepanjang jalan kolektor primer), diantaranya adalah pertokoan, toko, warung, bengkel, pasar, plasa pedagang kaki lima, perdagangan barang bekas, dan wartel. Perdagangan dan jasa mulai berkembang di sepanjang Jl. Veteran, Jl. Kartini, Jl. Wahid Hasyim, Jl. Wahidin Sudirohusodo. Luas dari guna lahan perdagangan dan jasa adalah 17,864 Ha.

- **Industri dan Pergudangan**

Kegiatan ini membentuk kawasan/kelompok tersendiri seperti kompleks industri Semen Gresik, Petrokimia Gresik, Maspion. Perusahaan baru yang relatif besar tersebar di daerah selatan dan barat seperti PT. Nusantara Plywood, Perusahaan Nippon Paint, Pabrik Baja Barata, Pabrik Sepatu New Era, Pabrik Spare Part Kendaraan, Sumber Mas Plywood, dll. Luas guna lahan industri dan pergudangan seluruhnya adalah 786,685 Ha dari wilayah Kota Gresik.

- **Tanah Belum Terbangun**

Tanah belum terbangun terbagi menjadi 2 yaitu tanah produktif dan tanah tidak produktif. Tanah produktif berupa sawah pertanian di Kecamatan Kebomas Desa Prambangan, Desa Kedanyang, Desa Banjarsari, Desa Kembangan, Desa Dahan Rejo, dan Desa Suci. Tanah tidak produktif berupa tanah kering yang ada di hampir seluruh Kelurahan Randuagung, Kelurahan Segoromadu, Kelurahan Ngargosari, Kelurahan Gulomantung, Kelurahan Sidomukti, Desa Sekar Kuning, Desa Klangonan, dan Kelurahan Yosowilangun. Rawa-rawa banyak terdapat di Desa Bunder dekat terminal Bunder. Luas guna lahan tanah belum terbangun adalah 2.249,278 Ha.

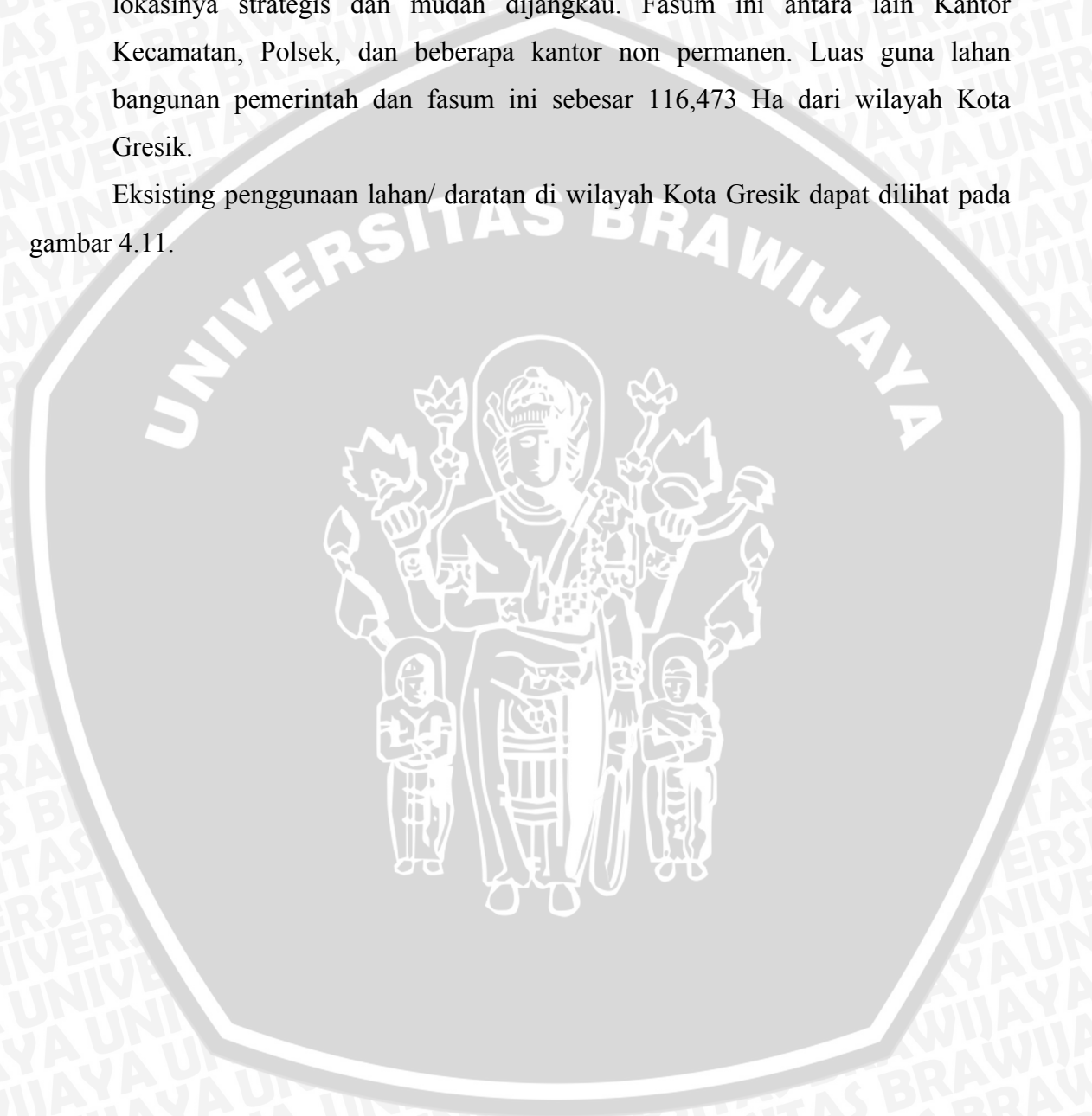
- **RTH dan Makam**

Ruang terbuka hijau yang ada di wilayah Kota Gresik berupa taman, lapangan olah raga (sepakbola, golf di Petrokimia Gresik, Lapangan sepakbola di Semen Gresik), lapangan non permanen di hampir seluruh Kelurahan di Kota Gresik. Makam berupa Taman Makam Pahlawan di Desa Kembangan, Desa Gapurosusilo, dan pemakaman umum di seluruh Kelurahan di Kota Gresik. Luas RTH dan makam di wilayah Kota Gresik adalah 268,552 Ha.

- **Bangunan Pemerintah dan Fasum**

Bangunan pemerintah dahulu banyak terdapat di pusat Kota Gresik, tetapi setelah ada rencana pemindahan pusat pemerintahan, bangunan ini banyak dipindah di sepanjang jalan Dr. Wahidin Sudirohusudo. Sedangkan fasum sebagian besar terdapat di sepanjang jalan-jalan utama wilayah Kota Gresik, lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Fasum ini antara lain Kantor Kecamatan, Polsek, dan beberapa kantor non permanen. Luas guna lahan bangunan pemerintah dan fasum ini sebesar 116,473 Ha dari wilayah Kota Gresik.

Eksisting penggunaan lahan/ daratan di wilayah Kota Gresik dapat dilihat pada gambar 4.11.



gambar 4.11. Eksisting penggunaan lahan/ daratan di wilayah Kota Gresik



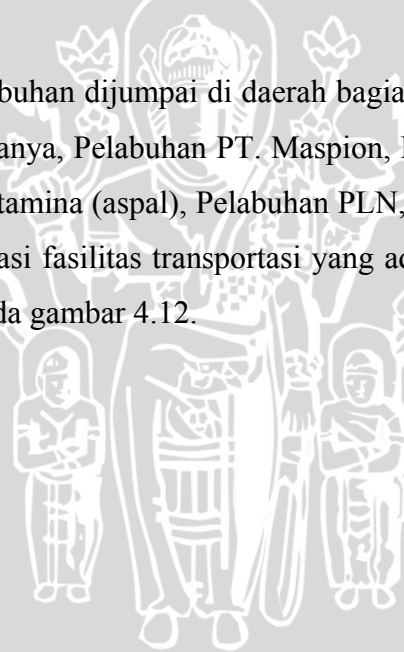
4.1.5 Fasilitas perkotaan

A. Fasilitas transportasi

Fasilitas Transportasi yang ada di wilayah perencanaan ini antara lain : terminal, sub terminal, halte, tempat parkir, dan pelabuhan. Terminal penumpang di Bunder merupakan terminal bertipe B, dimana terminal ini melayani penumpang antar dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan. Terminal tipe C (sub terminal) diantaranya adalah Terminal Gubernur Suryo (di Jalan Gubernur Suryo), terminal Randuagung (di Jalan Wahidin Sudirohusudo), dan Terminal Segoromadu (di Jalan Darmo Sugondo).

Tempat pemberhentian angkutan umum (halte) terdapat di sepanjang Jalan Veteran, Jalan Kartini, dan Jalan Wahidin Sudirohusudo. Selain terminal, sub terminal dan halte dijumpai juga adanya terminal bayangan di dekat lokasi terminal resmi (di Buder dan Randuagung). Di dekat terminal penumpang Bunder, terdapat juga areal parkir kendaraan.

Sedangkan lokasi pelabuhan dijumpai di daerah bagian timur (sepanjang pantai) wilayah perencanaan. Diantaranya, Pelabuhan PT. Maspion, PT. Petrokimia, Pelabuhan Umum Gresik, Pelabuhan Pertamina (aspal), Pelabuhan PLN, Pelabuhan Semen Gresik, dan Pelabuhan Plywood. Lokasi fasilitas transportasi yang ada di wilayah perencanaan selengkapny dapat dilihat pada gambar 4.12.



Gambar 4.12. Lokasi fasilitas transportasi yang ada di wilayah perencanaan selengkapanya



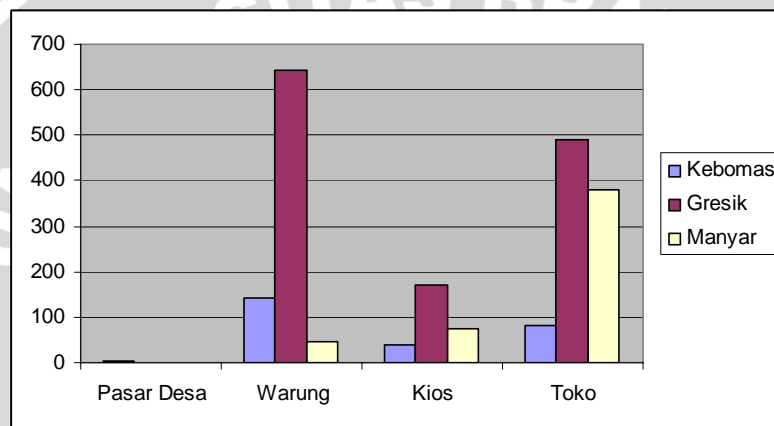
B. Fasilitas perdagangan

Wilayah pusat Kota Gresik yang memiliki potensi perkembangan perdagangan, telah didukung oleh banyaknya fasilitas perdagangan pada masing-masing kecamatan antara lain berupa pasar desa, warung, kios dan toko. Jumlah fasilitas perdagangan di wilayah Kota Gresik dapat dilihat pada tabel 4.5 dan gambar 4.13.

Tabel 4.5 Fasilitas perdagangan kota gresik tahun 2002

No.	Kecamatan	Pasar Desa	Warung	Kios	Toko	Jumlah
1.	Kebomas	2	143	39	82	266
2.	Gresik	1	644	169	490	1304
3.	Manyar	0	45	75	379	500
Jumlah		3	832	283	951	2070

Sumber : Rencana Tata Ruang Kota Gresik Tahun 2002-2006 IV-27



Sumber : Rencana Tata Ruang Kota Gresik Tahun 2002-2006 Hal IV-27

Gambar 4.13 Grafik fasilitas perkotaan kota gresik tahun 2002

Berdasarkan data tabel 4.5 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa di wilayah Kota Gresik memiliki sarana perdagangan terbanyak berupa toko dan warung yaitu 951 dan 832 buah. Pada setiap kecamatan juga telah memiliki pasar tradisional (pasar desa) dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Kebomas yaitu 2 buah, Pasar Baru Gresik dan Pasar Kota Gresik.

Gambar 4.14. Lokasi fasilitas Perdagangan dan jasa



4.1.6 Perekonomian wilayah kota gresik

Menurut RTRW Jawa Timur Tahun 2004⁵, perekonomian Kabupaten Gresik mulai recovery pada tahun 1999, dan telah mulai mengalami pertumbuhan positif sejak mengalami kontraksi karena krisis ekonomi yang dimulai pertengahan tahun 1997. Pada tahun 1999 tersebut, ekonomi Kabupaten Gresik tumbuh sebesar 3,71% dan terus membaik pada tahun 2000 dan 2001, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar 5,92% dan 10,73%.

PDRB per Kapita per tahun Kabupaten Gresik merupakan tertinggi ketiga diantara seluruh kabupaten/ kota di Jawa Timur setelah Kota Kediri dan Surabaya. Tingginya PDRB per Kapita ini karena didorong oleh sub-sektor perdagangan, industri pengolahan barang dari kayu dan hasil hutan lainnya, serta sub sektor tanaman bahan makanan. Distribusi sektoral yang dominan bagi ekonomi Kabupaten Gresik adalah sub-sektor perdagangan, industri barang dari kayu dan hasil hutan lainnya, serta sub sektor tanaman bahan makanan.

Wilayah Kota Gresik sendiri mempunyai banyak potensi perekonomian, terutama kegiatan ndustri. Selain itu, di kota inimasih terdapat kegiatan-kegiatan lain yaitu pertanian, peternakan dan perdagangan. Kegiatan-kegiatan perekonomian yang terdapat di wilayah Kota Gresik dapat dilihat dalam tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6 Perekonomian kota gresik tahun 2002

No.	Kecamatan	Produksi pertanian (ton)	Produksi perikanan (ton)	Jumlah industri (unit)	Potensi perdagangan (unit)	Produksi ternak (ekor)	Jumlah koperasi (unit)
1.	Manyar	1833	50	45	264	0	38
2.	Kebomas	1891	0	376	1304	6315	106
3.	Gresik	0	32	480	500	2607	141
Jumlah		3724	82	901	2068	8922	285

Sumber : *Revisi Rencana tata Ruang kota Gresik Tahun 2002/2003-2006/2007 Hal III-19*

Kecamatan Manyar dan Kecamatan Kebomas adalah dua kecamatan yang produktif dalam menghasilkan kegiatan pertanian. Sedangkan Kecamatan Gresik sama sekali tidak menghasilkan komoditas pertanian. Untuk komoditas perikanan hanya dihasilkan oleh Kecamatan Manyar dan Kecamatan Gresik. Hasil perikanan di Kota Gresik jumlahnya lebih sedikit dari pada hasil pertanian. Keterbatasan lahan dan adanya fluktuasi untung-rugi yang cukup besar mengakibatkan kegiatan perikanan di kota ini tidak dapat berkembang secara optimal.

⁵ RTRWP Jawa Timur Laporan Fakta Analisa Hal III-38

Data jumlah industri dari tabel 4.6 menunjukkan jumlah industri dalam skala menengah dan kecil, selain industri besar seperti PT. Semen Gresik dan PT. Petrokimia Gresik. Industri-industri menengah dan kecil tersebut adalah industri kerajinan, tekstil, konveksi, dan perabot rumah tangga. Meskipun skala menengah dan kecil, industri jenis ini memiliki ikatan yang lebih erat dengan masyarakat dari pada industri berskala besar.

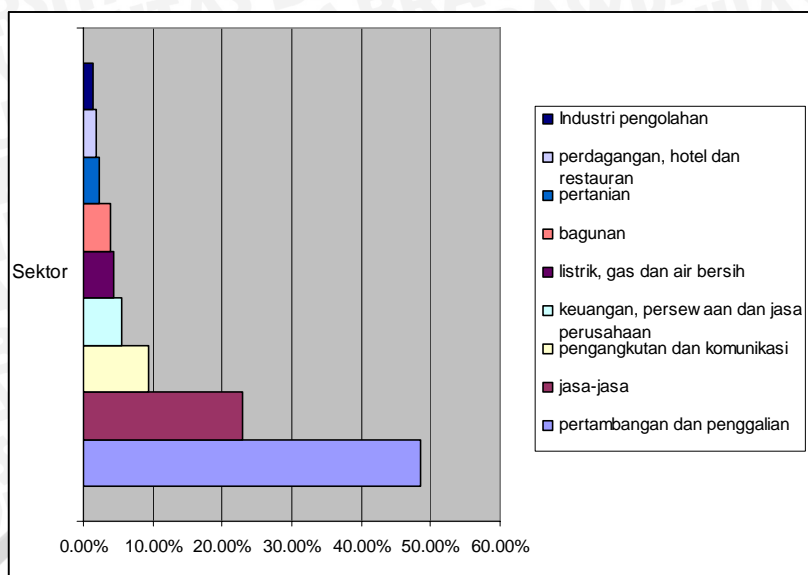
Kota Gresik memiliki cukup banyak potensi perdagangan untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat sehari-hari. Pada tahun 2000, di Kecamatan Manyar terdapat 264 unit potensi perdagangan, di Kecamatan Kebomas terdapat 1304 unit potensi perdagangan, dan di Kecamatan Gresik terdapat 500 unit potensi perdagangan. Kota Gresik juga menghasilkan komoditas ternak. Komoditas ini dihasilkan di kecamatan Kebomas dan di Kecamatan Gresik. Populasi ternak di Kecamatan Kebomas mencapai 2.607 ekor.

Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa Kota Gresik cukup produktif dalam hal kegiatan perekonomian. Kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada di kota ini masih ada yang merupakan kegiatan perekonomian non-perkotaan, yaitu pertanian, perikanan dan peternakan. Kegiatan-kegiatan ini, meskipun merupakan potensi pendapatan daerah, namun tidak sesuai untuk berada di dalam wilayah perkotaan. Oleh karena wilayah studi memiliki status kota, yaitu Kota Gresik, maka penggunaan lahan yang masih merupakan kegiatan-kegiatan non-perkotaan sebaiknya mulai diarahkan untuk berubah menjadi kegiatan perkotaan, seperti barang dan jasa.

Kota Gresik memiliki beberapa industri berskala besar. Banyaknya industri besar yang berlokasi di kota ini disebabkan kota ini pada awalnya dipersiapkan untuk mendukung perkembangan Kota Surabaya. Pada perkembangan selanjutnya, industri di Kota Gresik diarahkan untuk berlokasi di sepanjang pesisir pantai kota. Dengan berkembangnya industri di Kota Gresik, diharapkan pendapatan daerah dan PDRB akan mengalami peningkatan, sehingga kesejahteraan pendudukpun diharapkan meningkat.

Sehingga secara ekonomi, Kabupaten Gresik adalah Kota industri dan perdagangan dengan dukungan pertanian yang cukup⁶ dengan prosentase kontribusi masing-masing sektor dapat dilihat pada gambar 4.15.

⁶ BPS Kabupaten Gresik Tahun 2004.



Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2004

Gambar 4.15 Sektor Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2004

4.2 Tinjauan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap Pedagang Kaki Lima

Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima, telah memiliki beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik. Kebijakan pelaksanaan pembinaan pedagang kaki lima tersebut didukung dan ditunjang secara terpadu oleh sektor-sektor ataupun instansi-instansi vertikal ataupun lembaga-lembaga/asosiasi-asosiasi swasta di daerah. Adapun Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan dengan pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik antara lain adalah Perda No.03 tahun 2003 mengenai ijin penempatan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) dan Perda No.25 Tahun 2004 mengenai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Gresik. Berikut ini adalah penjelasan substansi dan isi dari kedua Peraturan Daerah (Perda).

4.2.1 Peraturan daerah kabupaten gresik nomor 03 tahun 2003 tentang ijin penempatan dan pembinan pedagang kaki lima

Bab I Ketentuan umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Gresik ;
- Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik firma, kongsi, koperasi, dana penisunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

- Pedagang Kaki Lima adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan pada suatu bidang usaha menjual, menjajakan hasil produksi/barang jadi pada tempat-tempat tertentu yang diijinkan, bersifat sementara dan sewaktu-waktu mudah dipindahkan ;

Bab II Ketentuan perijinan

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan penempatan pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati ;
- (2) Setiap pemegang ijin penempatan pedagang kaki lima wajib melakukan pendaftaran ijin baru setiap 3 (tiga) tahun sekali ;
- (3) Ketentuan, tata cara, jenis dan syarat-syarat perijinan diatur lebih dahulu oleh Bupati.

Bab III Pengaturan tempat usaha

Pasal 3

- (1) Dalam menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan serta alur lalu lintas jalan raya di Kabupaten Gresik, dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima tanpa ijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Ijin tersebut pada ayat (1) hanya diberikan untuk penggunaan tempat atau fasilitas umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Kepala Daerah dalam penetapan tempat-tempat atau fasilitas umum sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, ketentraman, dan kebersihan lingkungan di sekitarnya serta keadaan pasar ;
- (4) Untuk kepentingan pengembangan usaha pedagang kaki lima, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberikan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan ;

(5) Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (4) pasal ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Ketentuan-ketentuan lain mengenai pedagang kaki lima (PKL) di dalam Peraturan Daerah (Perda) ini antara lain adalah :

- Bab IV Nama, Obyek dan Subyek,
- Bab V Golongan Retribusi,
- Bab VI Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,
- Bab VII Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif,
- Bab VIII Struktur dan Besarnya Tarif,
- Bab IX Saat Retribusi Terutang,
- Bab X Wilayah Pemungutan,
- Bab XI Tata Cara Pemungutan,
- Bab XII Sanksi Administrasi,
- Bab XIII Tata Cara Pembayaran,
- Bab XIV Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi,
- Bab XV Tata Cara Penagihan,
- Bab XVI Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi,
- Bab XVII Kadaluwarsa,
- Bab XVIII Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa,
- Bab XIX Pengawasan,
- Bab XX Ketentuan Pidana, dan
- Bab XXI Penyidikan.

4.2.2 Peraturan daerah kabupaten gresik nomor 25 tahun 2004 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kabupaten gresik

Bab I Ketentuan umum

Pasal 1

- Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum serta penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya ;
- Ketentraman adalah suatu keadaan aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis;

- Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma sosial, norma susila maupun aturan-aturan yang berlaku ;
- Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tertib dan teratur ;
- Tempat umum adalah tempat-tempat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum yang meliputi : taman, alun-alun, lapangan, ruang terbuka untuk umum, trotoar ;
- Pedagang kaki lima adalah orang yang dalam usahanya mempergunakan sarana dan atau kelengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau menggunakan bagian tepi jalan umum dan tempat umum yang diperuntukkan maupun tidak diperuntukkan sebagai tempat usaha dan tempat lain yang bukan haknya ;
- Pedagang asongan adalah mereka yang menjalankan usahanya dan atau kegiatan yang tidak mempunyai tempat usaha yang tetap.

Bab II Maksud, tujuan dan tanggung jawab

Pasal 2

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi aman, tentram, tertib dan teratur.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban bertujuan untuk :

- a. Menciptakan suatu situasi dan kondisi yang kondusif dan dinamis agar Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi tugas dan pekerjaannya secara aman, tentram, tertib dan teratur ;
- b. Mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum ;
- c. Menanggulangi dan meniadakan adanya gangguan yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan.

Pasal 4

Bupati bertanggungjawab atas terciptanya ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Gresik

Bab III Ketentuan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban**Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. Pemeliharaan keindahan, ketentraman dan ketertiban pada tempat-tempat umum, jalan umum dan trotoar;
 - b. Pengaturan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL), pedagang asongan, anak jalanan, pengamen jalanan, angkutan orang dengan kendaraan bermotor dan tidak bermotor, angkutan barang yang mengganggu ketertiban umum, tempat hiburan, tempat-tempat usaha bangunan, tempat parkir, penjahaj seks komersial, pemabuk, pelanggar norma-norma susila di jalan umum, gelandangan dan pengemis serta kegiatan-kegiatan orang yang dapat mengganggu aktivitas yang dapat membahayakan umum.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menjaga lingkungan masing-masing dan tempat-tempat umum;
- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan secara koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang.

Bab V Pelaksana penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban**Pasal 7**

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Apabila perangkat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya diperkirakan tidak cukup mampu mengatasi timbulnya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, Bupati sesuai kewenangannya dapat meminta bantuan Polri dan/atau TNI;
- (3) Perangkat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bab VI Ketentuan larangan

Pasal 8

Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Gresik siapapun dilarang:

- a. Berjualan, mengamen, meminta-minta, menggunakan dan atau mendirikan bangunan di tepi jalan umum, trotoar, pulau jalan, lampu merah dan fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. Menyimpan atau menjemur barang-barang yang menimbulkan bau busuk dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat maupun barang-barang lain di atas atau di pinggir jalan umum dan fasilitas-fasilitas umum lainnya;
- c. Membuang sampah organik, sampah kimia, kotoran dari pengurusan kakus, bangkai binatang pada saluran air/got, sungai laut atau fasilitas-fasilitas umum lainnya;
- d. Menggunakan tepi jalan umum dan tempat-tempat umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk menempatkan kendaraan, cuci kendaraan, servis dan bongkar muat barang dagangan kecuali di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- e. Mempergunakan tempat-tempat umum, yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, untuk digunakan sebagai tempat tinggal, menginap, berjualan maupun kegiatan-kegiatan lainnya.

Ketentuan-ketentuan lain mengenai pedagang kaki lima (PKL) di dalam Peraturan Daerah (Perda) ini antara lain adalah :

- Bab IV Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
- Bab VII Ketentuan Pidana
- Bab VIII Penyidikan
- Bab IX Penutup

4.3 Karakteristik Pedagang Kaki Lima Wilayah Kota Gresik

Kondisi ekonomi di Indonesia yang masih serba sulit ini ternyata berdampak pada semakin menjamurnya pedagang kaki lima di wilayah Kota Gresik. Terdapat sekitar 651 pedagang kaki lima yang tersebar di wilayah Kota Gresik yang menempati

ruang publik kota seperti trotoar, sebagian badan jalan utama, lapangan/taman, alun-alun dan lain-lain. Berikut ini adalah karakteristik pedagang kaki lima di wilayah Kota Gresik, meliputi karakteristik responden, aktivitas pedagang kaki lima, aspek permodalan dan permasalahan yang dihadapi pedagang kaki lima.

4.3.1 Jumlah pedagang kaki lima kabupaten gresik

Jumlah pedagang kaki lima menurut data yang dihimpun oleh Dinas Pasar dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten Gresik pada tahun 2005 sebanyak 651 pedagang yang tersebar di beberapa lokasi di Kota Gresik. Jumlah tersebut merupakan pedagang yang telah terdata dan sudah memiliki paguyuban/perwakilan. Sedangkan berdasarkan jenisnya, pedagang kaki lima di wilayah Kota Gresik terdiri dari pedagang makanan/minuman, pedagang non makanan/minuman dan pedagang bahan mentah. Data mengenai jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kota Gresik dapat dilihat pada tabel 4.7 dan data jumlah pedagang kaki lima (PKL) menurut jenis dagangan di Timur Alon-Alon Gresik, Lahan Milik PT. Multi Sarana Plaza dan Pasar Kota Gresik, dapat dilihat pada tabel 4.8, tabel 4.9, tabel 4.10. Peta persebaran lokasi PKL di Kota Gresik dapat dilihat pada gambar 4.16.

Tabel 4.7 Jumlah pedagang kaki lima di wilayah kota gresik tahun 2005

No.	Lokasi	Kecamatan	Jumlah
1.	Pasar Kota Gresik	Gresik	200
2.	Pasar Baru Gresik	Gresik	130
3.	Timur Alon-Alon Gresik	Gresik	41
4.	PT. Multi Sarana Plaza	Gresik	110
5.	TPG II Randu Agung	Randu Agung	30
6.	di wilayah perempatan Sidomoro, Jl. Kartini, Jl. Usman Sadar, Jl. Pahlawan	Gresik	140
Jumlah			651

Sumber : Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL Kab. Gresik

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui persebaran pedagang kaki lima terpusat pada Kecamatan Gresik terutama di Jl. Gubernur Suryo yang terletak pada BWK I yang memang memiliki fungsi kawasan sebagai kawasan pusat perdagangan. Jumlah pedagang kaki lima terbanyak berada di daerah Pasar Kota Gresik.

Tabel 4.8 Jumlah pedagang kaki lima di timur alon-alon gresik menurut jenis dagangan tahun 2005

No.	Jenis Dagangan	Jumlah
1.	Makanan/Minuman	34
2.	Non Makanan/Minuman	6
3.	Bahan Mentah	1
Jumlah		41

Sumber : Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL Kab. Gresik

Tabel 4.9 Jumlah pedagang kaki lima di lahan milik pt. multi sarana plaza menurut jenis dagangan tahun 2005

No.	Jenis Dagangan	Jumlah
1.	Makanan/Minuman	7
2.	Non Makanan/Minuman	2
3.	Bahan Mentah	101
Jumlah		110

Sumber : Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL Kab. Gresik

Tabel 4.10 Jumlah pedagang kaki lima di pasar kota gresik menurut jenis dagangan tahun 2005

No.	Jenis Dagangan	Jumlah
1.	Makanan/minuman	7
2.	Non Makanan/Minuman	178
3.	Bahan Mentah	15
Jumlah		200

Sumber : Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL Kab. Gresik

Sedangkan menurut jenis dagangan yang diperjualbelikan, berdasarkan tabel 4.8, tabel 4.9 dan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa menurut data dari Dinas Pasar Kabupaten Gresik, jenis pedagang kaki lima di daerah Timur Alun-Alun Gresik sebagian besar adalah pedagang kaki lima makanan/minuman, di depan PT. Multi Sarana Plaza sebagian besar adalah bahan mentah, dan di daerah Pasar Kota Gresik sebagian besar adalah non makanan/minuman berupa pakaian, kacamata, jam tangan, asesoris dan lain-lain.

4.3.2 Karakteristik responden pedagang kaki lima

Guna mendukung penelitian mengenai urutan aspek-aspek yang diprioritaskan dalam penentuan lokasi pedagang kaki lima di wilayah Kota Gresik, maka dilakukan identifikasi karakteristik dari sejumlah pedagang yang telah dijadikan obyek penelitian/responden. Berdasarkan hasil perhitungan sampel pada bab sebelumnya maka didapat jumlah keseluruhan responden adalah sebanyak 87 responden yang tersebar di seluruh lokasi penelitian. Identifikasi karakteristik responden PKL tersebut antara lain adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status, asal daerah, tempat tinggal dan pekerjaan sebelum menjadi PKL. Karakteristik responden pedagang kaki lima dapat dilihat pada tabel 4.11 – tabel 4.17.

Gambar 4.16 Peta persebaran lokasi PKL di Kota Gresik

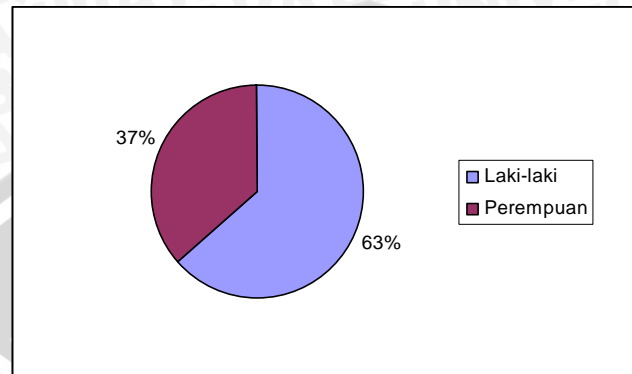


A. Jenis kelamin pedagang kaki lima

Tabel 4.11 Jenis kelamin pedagang kaki lima

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	54	63
2.	Perempuan	32	37
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.17 Jenis Kelamin Pedagang Kaki Lima

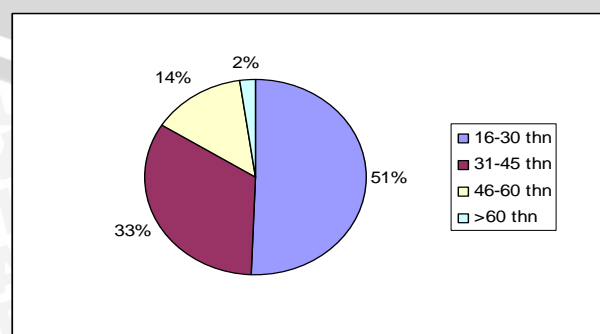
Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dijelaskan bahwa jenis kelamin dari 87 pedagang kaki lima yang dijadikan responden, sebanyak 54 orang (63%) laki-laki dan 32 orang lainnya (37%) perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa profesi sebagai pedagang kaki lima lebih banyak diminati oleh kaum laki-laki dibandingkan perempuan.

B. Usia pedagang kaki lima

Tabel 4.12 Usia pedagang kaki lima

No.	Usia	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0-15 thn	-	0
2.	16-30 thn	44	50.6
3.	31-45 thn	29	33.3
4.	46-60 thn	12	13.8
5.	>60 thn	2	2.3
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.18 Usia Pedagang Kaki Lima

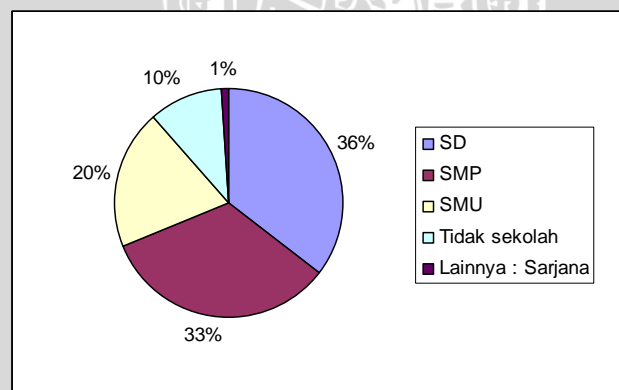
Berdasarkan tabel 4.12 di atas dapat dijelaskan, ternyata dari 87 responden usia pedagang kaki lima yang paling banyak adalah antara 16-30 tahun yakni 44 orang (50,6%) dan pedagang kaki lima yang berusia di atas 60 tahun hanya 2 orang. Sedangkan pedagang yang berusia 31-45 tahun sebanyak 29 orang (33,3%). Sesuai dengan jumlah pencari kerja yang masuk catatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2004 presentase terbesar adalah tamatan SLTA, berikutnya 27,18 persen tamatan sarjana dan terbesar ketiga 11,74 persen tamat akademi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang kaki lima di Kota Gresik adalah dari angkatan kerja yang relatif masih dalam usia produktif (16-30 tahun), dengan kata lain profesi pedagang kaki lima merupakan alternatif mata pencaharian lain bagi angkatan kerja produktif yang tidak tertampung atau tidak memiliki kesempatan untuk bekerja pada lapangan kerja sektor formal di Kabupaten Gresik.

C. Tingkat pendidikan pedagang kaki lima

Tabel 4.13 Tingkatan pendidikan pedagang kaki lima

No.	Usia	Jumlah	Prosentase (%)
1.	SD	31	36
2.	SMP	29	33
3.	SMU	17	20
4.	Tidak sekolah	9	10
5.	Lainnya :	1	1
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.19 Tingkatan Pendidikan Pedagang Kaki Lima

Tingkat pendidikan yang dimiliki sebagaimana dalam tabel 4.13 di atas dapat dijelaskan bahwa dari 87 responden sebagian besar atau 31 orang (36%) hanya berpendidikan SD dan 29 orang (33%) berpendidikan SMP, bahkan ada 9 orang (10%) responden yang tidak sekolah. Sedangkan responden yang berpendidikan menengah setingkat SMU hanya 17 orang (20%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

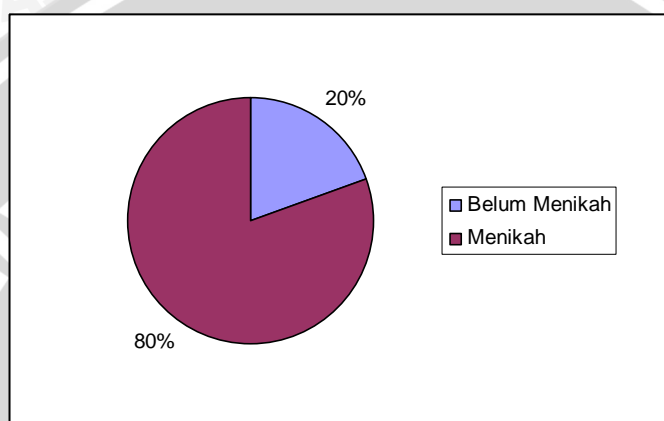
kebanyakan pedagang kaki lima di Kota Gresik memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah (SD, SMP dan tidak sekolah).

D. Status pedagang kaki lima

Tabel 4.14 Status pedagang kaki lima

No.	Status	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Belum Menikah	17	20
2.	Menikah	70	80
3.	Janda / Duda	-	0
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.20 Status Pedagang Kaki Lima

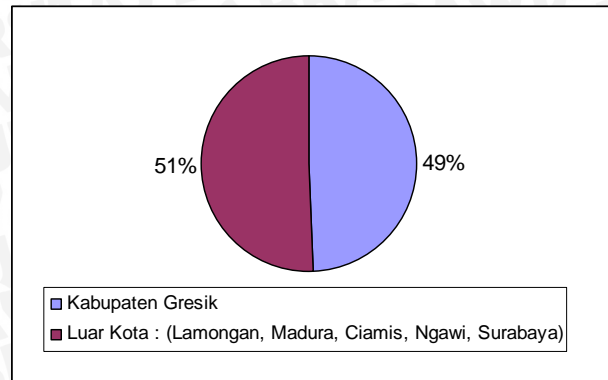
Berdasarkan hasil dari 87 responden ternyata sebagian besar atau 70 orang (80%) pedagang kaki lima telah berstatus menikah dan 17 orang (20%) belum menikah. Hal ini menunjukkan bahwa mata pencaharian sebagai pedagang kaki lima dapat dikatakan sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena sebagian besar mereka telah berstatus menikah atau memiliki keluarga yang harus menjadi tanggungannya.

E. Asal daerah pedagang kaki lima

Tabel 4.15 Asal daerah pedagang kaki lima

No.	Asal Daerah	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Kabupaten Gresik	43	49
2.	Luar Kota : (Lamongan, Madura, Ciamis, Ngawi, Surabaya)	44	51
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.21 Asal Daerah Pedagang Kaki Lima

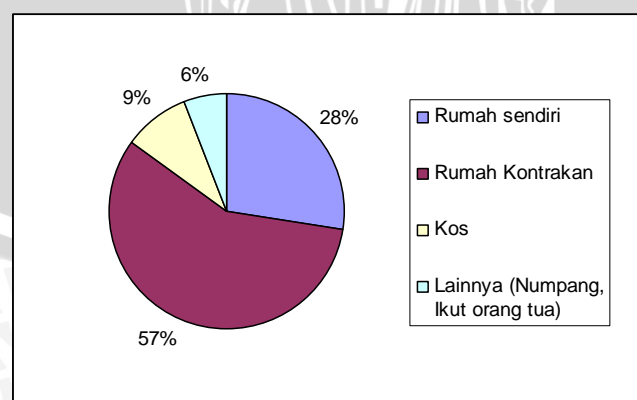
Berdasarkan hasil dari tabel 4.15 di atas dapat dijelaskan bahwa ternyata sebagian besar atau 44 orang (51%) responden pedagang kaki lima yang menjadi responden penelitian berasal dari luar kota Gresik yakni berasal dari Lamongan, Madura, Ciamis, Ngawi, dan Surabaya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Gresik merupakan warga pendatang atau migran dari berbagai daerah di luar wilayah Kabupaten Gresik yang berdomisili di Kabupaten Gresik.

F. Status tempat tinggal pedagang kaki lima

Tabel 4.16 Status tempat tinggal pedagang kaki lima

No.	Status Tempat Tinggal	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Rumah sendiri	24	28
2.	Rumah Kontrakan	50	57
3.	Kos	8	9
4.	Lainnya (Numpang, Ikut orang tua)	5	6
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.22 Status Tempat Tinggal Pedagang Kaki Lima

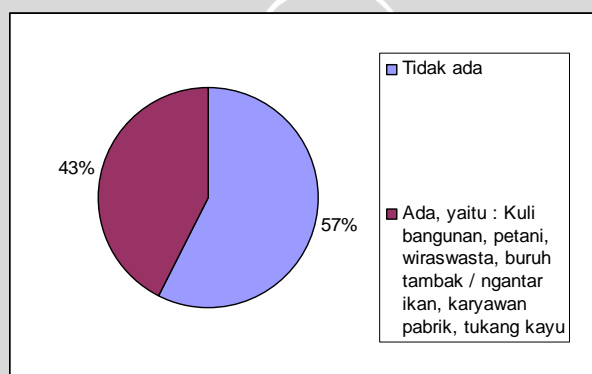
Berdasarkan hasil dari tabel 4.16 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebanyak 50 orang (57%) masih menempati rumah kontrakan, 24 orang (28%) sudah menempati rumah sendiri, 8 orang (9%) kos dan 5 orang (6%) lainnya menumpang atau ikut orang tua. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Gresik masih belum memiliki rumah sendiri yang tetap karena masih tinggal di rumah kontraan, kos maupun menumpang pada keluarga. Namun sebagian besar lainnya telah menempati rumah sendiri.

G. Mata pencaharian pedagang kaki lima

Tabel 4.17 Pekerjaan sebelum menjadi pedagang kaki lima

No.	Pekerjaan Sebelum	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Tidak ada	50	57
2.	Ada	37	43
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.23 Pekerjaan Sebelum Menjadi Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil dari tabel 4.17 di atas, sebagian besar responden pedagang kaki lima ternyata tidak memiliki pekerjaan sebelum memilih menjadi PKL yakni dinyatakan oleh 50 orang (57%). Sedangkan 37 orang (43%) responden lainnya menyatakan pernah bekerja. Hal ini berarti bahwa ternyata sebelum menjadi pedagang kaki lima, sebagian besar dari mereka adalah pengangguran, sebagian lagi pernah memiliki pekerjaan tapi tidak tetap.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap 87 responden pedagang kaki lima pada penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

“Pedagang kaki lima di Kota Gresik sebagian besar adalah seorang laki-laki yang berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun, berpendidikan rendah (SD dan SMP), telah berkeluarga (menikah), berasal dari luar Kabupaten Gresik yang telah memiliki tempat tinggal di Kabupaten Gresik namun tidak tetap (rumah kontrakan, kos dan

menumpang pada keluarga), serta tidak memiliki pekerjaan sebelum menjadi pedagang kaki lima dan lebih menyukai profesi sebagai pedagang kaki lima daripada berpindah mata pencaharian yang lain”.

4.3.3 Karakteristik aktivitas pedagang kaki lima

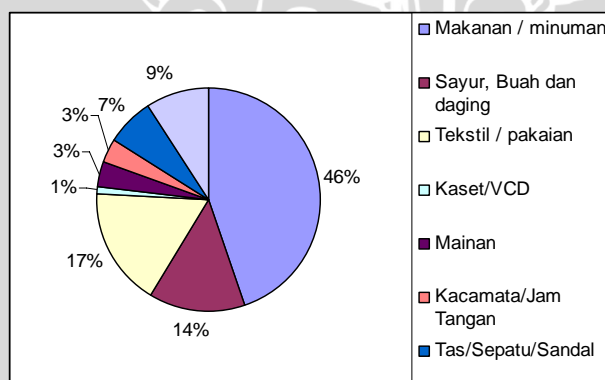
Karakteristik aktivitas pedagang kaki lima dapat dilihat dari berbagai aktivitas/kegiatan yang dilakukan pedagang kaki lima antara lain meliputi jenis barang dagangan, waktu berdagang, berapa lama menjadi pedagang kaki lima, alasan menjalankan usaha pedagang kaki lima, serta bagaimana bentuk kerjasama antar pedagang kaki lima.

A. Jenis dagangan pedagang kaki lima

Tabel 4.18 Jenis barang dagangan pedagang kaki lima

No.	Jenis Barang Dagangan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Makanan / minuman	39	46
2.	Sayur, Buah dan daging	12	14
3.	Tekstil / pakaian	15	17
4.	Kaset/VCD	1	1
5.	Mainan	3	3
6.	Kacamata/Jam Tangan	3	3
7.	Tas/Sepatu/Sandal	6	7
8.	Lainnya (jual bunga, jual aksesoris)	8	9
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.24 Jenis Barang Dagangan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil dari 87 responden ternyata jenis barang dagangan yang paling banyak diajakan oleh pedagang kaki lima (PKL) di Kota Gresik adalah makanan/minuman yakni mencapai 46 %, selanjutnya jenis dagangan pakaian dan bahan mentah (sayur, buah, ikan) sebanyak 17 %, dan 14% kemudian tas, sepatu/sandal sebanyak 7 %. Peta jenis dagangan PKL di Kota Gresik dapat dilihat pada gambar 4.27.

Tabel 4.19 Kesesuaian jenis barang dagangan dengan keinginan pedagang kaki lima

No.	Kesesuaian Jenis Barang Dagangan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Sesuai	75	86,25
2.	Tidak sesuai	12	13,75
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Penelitian Balitbang Tahun 2005

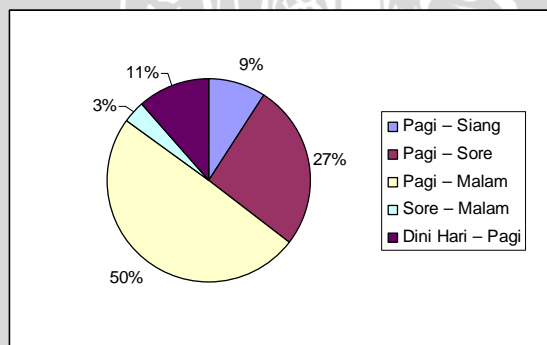
Berdasarkan tabel 4.19 di atas, dapat dijelaskan bahwa jenis barang dagangan yang selama ini dijual sudah sesuai dengan keinginan PKL. Hal ini dapat dilihat dari 87 orang responden ternyata sebagian besar atau 72 orang (86,25%) menyatakan sudah sesuai dan hanya 12 orang (13,75%) yang menyatakan tidak sesuai. Dengan demikian keberadaan jenis dagangan yang selama ini dijual oleh sebagian besar PKL seperti makanan dan minuman dapat dikatakan cukup sesuai dengan keinginan PKL.

B. Waktu dagang pedagang kaki lima

Tabel 4.20 Waktu berdagang pedagang kaki lima

No.	Waktu Berdagang	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Pagi – Siang (jam 06.00 s.d 14.00)	8	9
2.	Pagi – Sore (jam 06.00 s.d 18.00)	23	27
3.	Pagi – Malam (jam 06.00 s.d 21.00)	43	50
4.	Sore – Malam (jam 18.00 s.d >21.00)	3	3
5.	Dini Hari – Pagi (jam 01.00 s.d 10.00)	10	11
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.25 Waktu Berdagang Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan tabel 4.20 diatas, dapat dijelaskan bahwa ternyata sebagian besar atau 43 orang (50%) memilih waktu jualan pagi hari antara jam 06.00 WIB - pukul 21.00 WIB. Hal ini sesuai dengan data sebelumnya bahwa konsentrasi pedagang kaki lima terbanyak berada di lokasi Pasar Baru, Pasar Kota Gresik dan depan pertokoan Multisarana Plaza yang sebagian besar aktivitasnya berlangsung pada pagi hari.

gambar 4.26 Peta jenis dagangan PKL di Kota Gresik



gambar 4. Peta jenis dagangan PKL di Kota Gresik



gambar 4. Peta jenis dagangan PKL di Kota Gresik



gambar 4. Peta jenis dagangan PKL di Kota Gresik

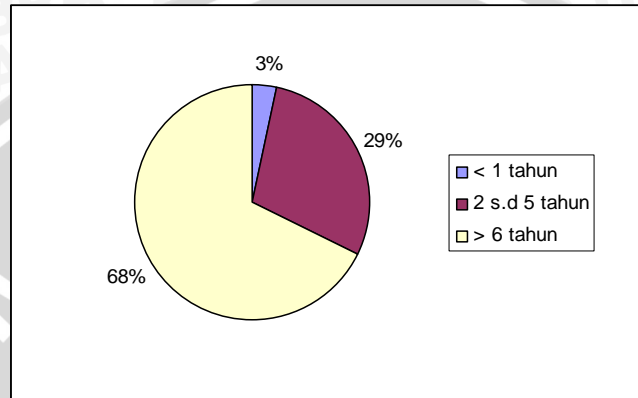


C. Lama menjadi pedagang kaki lima

Tabel 4.21 Lama menjadi pedagang kaki lima

No.	Lama Berdagang	Jumlah	Prosentase (%)
1.	< 1 tahun	3	3
2.	2 s.d 5 tahun	25	29
3.	> 6 tahun	59	68
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.27 Lama Menjadi Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil dari tabel 4.21 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 59 orang (68%) responden ternyata telah menjadi pedagang kaki lima selama lebih dari 6 tahun, dan terdapat 25 orang (29%) responden lainnya antara 2 - 5 tahun menjadi pedagang kaki lima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik rata-rata sudah lebih dari 2 tahun menekuni profesi PKL sebagai mata pencaharian sehari-hari.

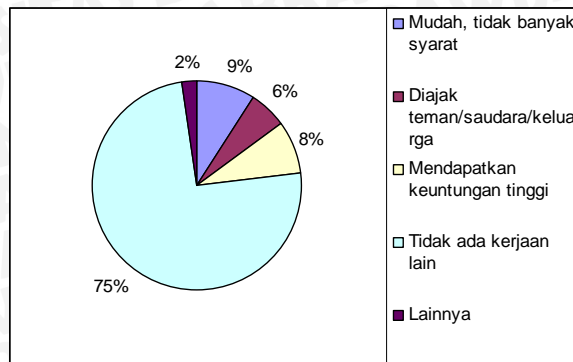
D. Alasan menjalankan usaha

Pedagang kaki lima dalam memilih profesinya sebagai pedagang terdapat berbagai macam alasan. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa alasan dalam memilih profesi pedagang kaki lima sebagaimana disajikan dalam tabel 4.26 berikut ini :

Tabel 4.22 Alasan menjalankan usaha pedagang kaki lima

No.	Alasan Usaha	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Mudah, tidak banyak syarat	8	9
2.	Diajak teman/saudara/keluarga	5	6
3.	Mendapatkan keuntungan tinggi	7	8
4.	Tidak ada kerjaan lain	65	75
5.	Lainnya	2	2
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.28 Alasan Menjalankan Usaha Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil dari 87 responden yang diwawancarai ternyata sebagian besar atau 65 orang (75%) menyatakan telah memilih profesi sebagai pedagang kaki lima karena tidak ada kerjaan lain atau menganggur akibat dari terbatasnya peluang kerja formal. Sedangkan 9% responden mempunyai alasan karena mudah dan tidak terlalu banyak persyaratan untuk usaha menjadi pedagang kaki lima. Alasan lain adalah karena dengan usaha menjadi pedagang kaki lima ternyata mendapatkan keuntungan yang memuaskan, yaitu sebanyak 8% responden. Kemudian ada juga responden yang diajak teman/saudara/tetangga untuk menjadi pedagang kaki lima (6%), dan berbagai alasan lain yang dinyatakan responden antara lain karena membantu suami untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan terpaksa karena terkena PHK.

E. Kerjasama antar pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya dimungkinkan ada kerjasama antar pedagang yang satu dengan yang lain dalam berbagai aktifitasnya. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran tentang kerjasama antar pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik seperti disajikan dalam tabel 4.23 sebagai berikut :

Tabel 4.23 Kerjasama antar pedagang kaki lima

No.	Kerjasama Antar Pedagang Kaki Lima	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Ada, dalam hal : a. Menentukan harga b. Saling membantu menjual c. Mudah dikenal konsumen d. Pembentukan Paguyuban e. Arisan f. Pengaturan berjualan	19	22,6
2.	Tidak Ada	68	77,4
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Berdasarkan hasil dari tabel 4.23 di atas ternyata 65 orang (77,4%) responden menyatakan tidak ada kerjasama antar pedagang kaki lima dalam menjalankan

usahanya. Sedangkan sebanyak 19 responden (22,6%) mengaku melakukan kerjasama antar pedagang kaki lima seperti dalam hal menentukan harga, saling membantu menjual, agar mudah dikenal oleh konsumen, pembentukan paguyuban, arisan maupun pengaturan berjualan lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa diantara pedagang kaki lima sendiri ternyata sebagian besar tidak ada kerjasama karena memang tidak menjadi anggota paguyuban pedagang kaki lima dengan berbagai alasan seperti tidak mengerti adanya paguyuban, tidak ada paguyuban yang sesuai dengan jenis dagangannya, masing-masing dapat bekerja sendiri tanpa adanya paguyuban dan ada yang menjawab karena pedagang kaki lima di lokasi yang ditempatinya masih sedikit. Sehingga patut dipertanyakan bagaimana fungsi dan keberadaan paguyuban pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik.

Kesimpulan dari beberapa gambaran mengenai aktivitas/kegiatan pedagang kaki lima yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa *"Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik sebagian besar memilih jenis dagangan makanan/minuman, melakukan usahanya di pagi - malam hari, sudah lebih dari 2 tahun sebagai pedagang kaki lima, dengan alasan memilih sebagai PKL karena mudahnya persyaratan menjadi pedagang kaki lima akibat terbatasnya bekerja di sektor formal, belum adanya kerjasama yang optimal antar pedagang karena belum mengetahui keberadaan atau bahkan belum menjadi anggota dari paguyuban pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Gresik."*

4.3.4 Kondisi fisik bangunan/tempat usaha pedagang kaki lima

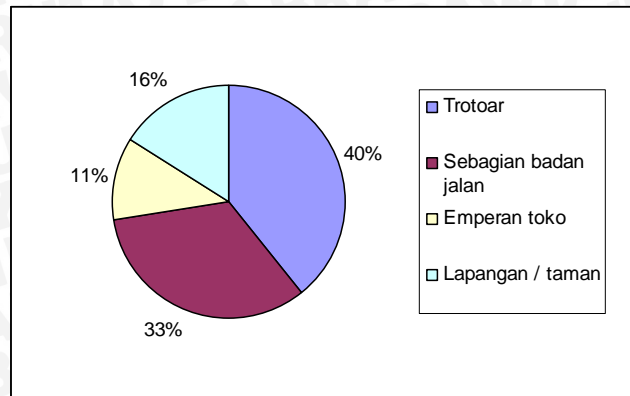
A. Tempat berdagang

Kondisi Fisik bangunan/tempat usaha merupakan salah satu faktor untuk mengetahui karakteristik pedagang kaki lima, yakni dapat dilihat dari pemilihan lokasi berdagang, sarana usaha yang dimiliki dan pola dalam melaksanakan usaha pedagang kaki lima. Fisik bangunan/tempat usaha pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik dapat dideskripsikan dari tabel 4.24 – 4.27.

Tabel 4.24 Pemilihan tempat berdagang

No.	Tempat Berdagang	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Trotoar	34	40
2.	Sebagian badan jalan	29	33
3.	Emperan toko	10	11
4.	Lapangan / taman	14	16
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006
Gambar 4.29 Pemilihan Tempat Berdagang

Berdasarkan hasil dari tabel 4.24 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden PKL atau 34 orang (40%) tempat berjualannya di trotoar, 29 orang (33%) mengambil sebagian badan jalan untuk tempat berjualan, 14 orang (16%) di lapangan/taman dan sebagian kecil yaitu 10 orang (11%) di emperan toko. Hal ini bermakna bahwa sebagian besar pedagang kaki lima menganggap bahwa totoar, badan jalan dan emperan toko merupakan lokasi berjualan yang paling strategis.

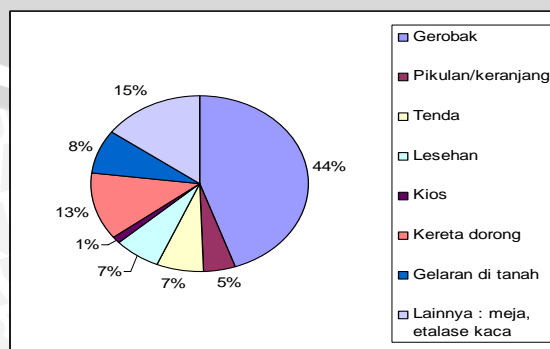
B. Sarana berdagang

Selanjutnya dilihat dari sarana berdagang para pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik, dari hasil penelitian dapat di sajikan secara ringkas dalam tabel 4.25 :

Tabel 4.25 Sarana berdagang

No.	Sarana Berdagang	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Gerobak	39	44
2.	Pikulan/keranjang	4	5
3.	Tenda	6	7
4.	Lesehan	6	7
5.	Kios	1	1
6.	Kereta dorong	11	13
7.	Gelaran di tanah	7	8
8.	Lainnya, berupa meja, etalase kaca	13	15
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006
Gambar 4.30 Sarana Berdagang

Berdasarkan hasil dari tabel 4.25 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 87 responden sebagian besar pedagang kaki lima atau 39 orang (44%) menggunakan sarana gerobak untuk berjualan, 13 orang (15%) menggunakan etalase kaca dan meja, 11 orang (13%) menggunakan kereta dorong, masing-masing 6 orang (7%) menggunakan tenda dan lesehan, 7 orang (8%) menggelarkan dagangannya di tanah, 4 orang (5%) lainnya menggunakan pikulan/keranjang sebagai sarana berdagang dan hanya 1 orang (1%) memiliki kios dalam berjualan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar pedagang kaki lima di Kota Gresik menggunakan gerobak dan kereta dorong sebagai sarana berdagang.

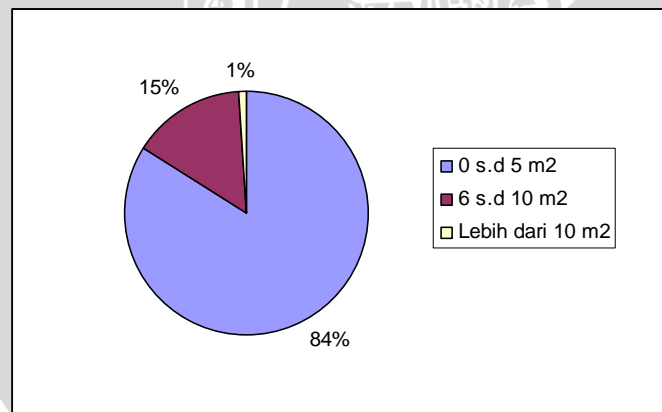
C. Ruang usaha

Sesuai dengan sarana dagang yang digunakan sekarang, maka ruang usaha yang dibutuhkan untuk berdagang memiliki ukuran yang beragam. Dari hasil penelitian, maka dapat digambarkan ukuran ruang usaha pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik seperti disajikan dalam tabel 4.26 berikut ini :

Tabel 4.26 Ukuran ruang usaha (sarana berdagang)

No.	Ukuran Ruang Usaha	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 s.d 5 m ²	73	84
2.	6 s.d 10 m ²	13	15
3.	Lebih dari 10 m ²	1	1
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.31 Ukuran Ruang Usaha (Sarana Berdagang)

Berdasarkan hasil dari tabel 4.26 di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa dari 87 responden ternyata sebagian besar pedagang kaki lima atau 73 orang (84%) memiliki ruang usaha antara 0-5 m². Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagai sarana usaha pedagang kaki lima di Kota Gresik pada umumnya membutuhkan ruang sebagai tempat usaha yang luasnya tidak lebih dari 5 m².

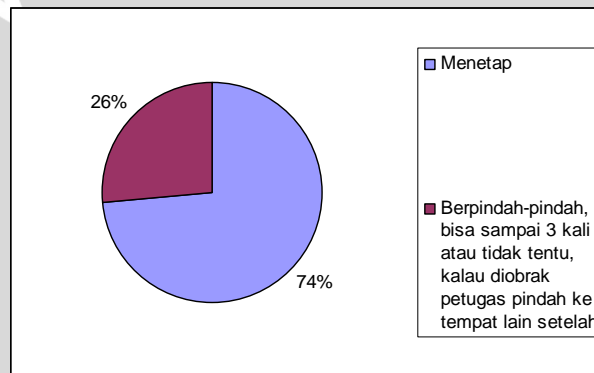
D. Pola melakukan usaha dagang

Pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya di Kota Gresik ada yang menetap dan ada yang berpindah-pindah, berikut hasil penelitian tentang pola pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 4.27 berikut ini :

Tabel 4.27 Pola melakukan usaha berdagang

No.	Pola Usaha Berdagang	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Menetap	64	74
2.	Berpindah-pindah, bisa sampai 3 kali atau tidak tentu, kalau diobrak petugas pindah ke tempat lain setelah aman kembali lagi.	23	26
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.32 Pola Melakukan Usaha Berdagang

Berdasarkan hasil dari tabel 4.27 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 87 orang responden, terdapat 64 orang (74%) diantaranya melakukan pola usaha yang menetap, mereka yang walaupun diobrak oleh petugas razia tidak pindah ke tempat lain dengan alasan sudah mendapatkan tempat yang enak, strategis dan ramai selalu dilihat pengunjung. Sedangkan 23 orang (26%) lainnya menyatakan berpindah-pindah bisa sampai 3 kali jika dengan alasan diobrak petugas atau mencari tempat yang lebih aman dari obrakan petugas.

Gambaran yang telah diuraikan mengenai kondisi fisik bangunan/tempat usaha pedagang kaki lima di atas, maka dapat diperoleh secara jelas tentang kondisi fisik/tempat usaha pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik yaitu bahwa: *"sebagian besar memilih trotoar dan sebagian badan jalan sebagai lokasi berjualan yang dianggap cukup strategis dan ramai pembeli dengan menggunakan gerobak dan kereta dorong sebagai sarana untuk usaha dan ukuran ruang usaha yang luasnya*

tidak lebih dari 5 meter persegi, serta cenderung menetap pada lokasi tertentu dan berpindah apabila terkena razia petugas”.

4.3.5 Aspek permodalan pedagang kaki lima

Aspek permodalan juga merupakan ukuran untuk melihat bagaimana karakteristik pedagang kaki lima guna pengembangannya mendatang. Aspek permodalan tersebut antara lain meliputi besarnya modal usaha, asal modal, jumlah keluarga yang ditopang/menjadi tanggungan, jumlah keluarga yang sudah bekerja, pendapatan yang diperoleh, serta kecukupan dari pendataan tersebut. Dengan menggunakan ukuran-ukuran tersebut, maka dari hasil penelitian diperoleh gambaran sebagaimana disajikan dalam tabel-tabel dan sebagai berikut :

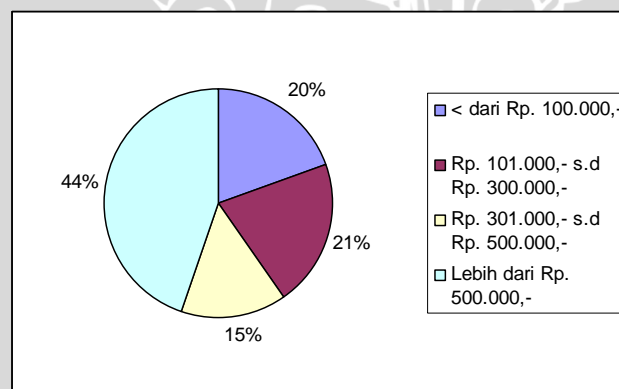
A. Modal usaha

Modal usaha yang digunakan oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik berdasarkan hasil penelitian dapat disajikan dapat tabel 4.28 berikut ini :

Tabel 4.28 Modal usaha pedagang kaki lima

No.	Modal Usaha	Jumlah	Prosentase (%)
1.	< dari Rp. 100.000,-	17	20
2.	Rp. 101.000,- s.d Rp. 300.000,-	18	21
3.	Rp. 301.000,- s.d Rp. 500.000,-	13	15
4.	Lebih dari Rp. 500.000,-	39	44
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.33 Modal Usaha Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil dari tabel 4.28 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pedagang kaki lima atau dinyatakan oleh 39 orang (44%) responden menggunakan modal usaha lebih dari Rp.500.000, 18 pedagang kaki lima (21%) menggunakan modal antara Rp.101.000, sampai dengan Rp.300.000, 17 orang (20%) dari responden

memerlukan modal kurang dari Rp.100.000, dan 13 orang memerlukan modal antara Rp.301.000, sampai dengan Rp.500.000.

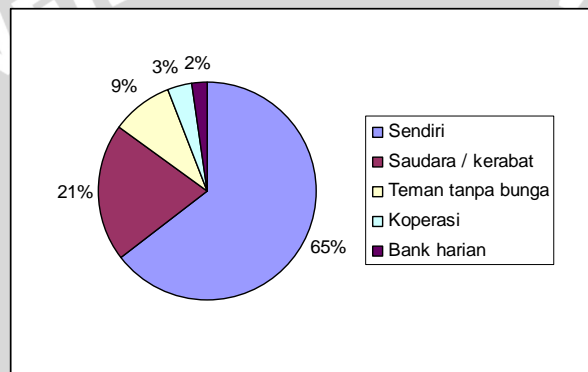
B. Asal modal usaha

Selanjutnya darimana asal modal untuk melakukan usaha pedagang kaki lima, dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran seperti pada tabel 4.29 sebagai berikut :

Tabel 4.29 Asal modal pedagang kaki lima

No.	Asal Modal	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Sendiri	56	65
2.	Saudara / kerabat	18	21
3.	Teman tanpa bunga	8	9
4.	Koperasi	3	3
5.	Bank harian	2	2
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.34 Asal Modal Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil dari tabel 4.29 di atas, maka dapat diketahui bahwa ternyata sebagian besar atau sebanyak 56 orang (65%) menggunakan modal usaha sendiri, 18 orang (21%) meminjam modal dari saudara/kerabatnya, sedangkan lainnya ada yang mendapatkan modal dari teman, bank harian dan koperasi. Hal ini berarti bahwa modal pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik untuk mengembangkan usahanya berasal dari modal yang dimilikinya sendiri bukan merupakan bantuan dari pihak luar maupun pemerintah daerah.

C. Jumlah keluarga yang ditopang

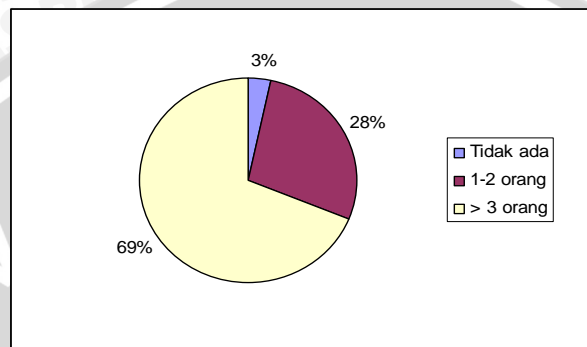
Usaha pedagang kaki lima yang dilakukan pada dasarnya merupakan mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga yang harus ditanggung dalam kehidupan sehari-hari. Semakin besar jumlah keluarga yang menjadi tanggungan, maka akan semakin besar tuntutan bagi pedagang kaki lima untuk mendapatkan hasil dari usahanya. Dari hasil penelitian dapat digambarkan berapa orang anggota keluarga yang

menjadi tanggungan masing-masing pedagang kaki lima sebagaimana disajikan secara ringkas dalam tabel 4.30 berikut ini.

Tabel 4.30 Jumlah keluarga yang ditopang

No.	Jumlah Keluarga yang Ditopang	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Tidak ada	3	3
2.	1-2 orang	24	28
3.	> 3 orang	60	69
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.35 Jumlah Keluarga Yang Ditopang

Berdasarkan dari hasil tabel 4.30 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar jumlah anggota keluarga yang harus ditopang atau menjadi tanggungannya adalah lebih dari 3 orang yang dinyatakan oleh 60 orang (69%) responden. Hal ini menunjukkan bahwa dari hasil berjualan sehari-harinya sebagai pedagang kaki lima, mereka harus menanggung lebih dari 3 orang anggota keluarganya dengan berbagai tuntutan kebutuhan hidupnya.

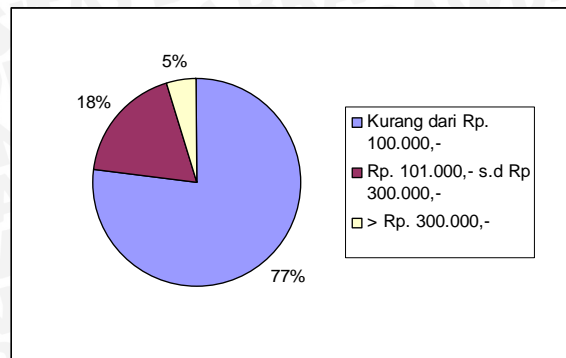
D. Jumlah pendapatan yang diperoleh per hari

Berdasarkan dari hasil penelitian juga diperoleh gambaran jumlah pendapatan yang diperoleh pedagang kaki lima dalam setiap harinya seperti disajikan dalam tabel 4.31 berikut ini :

Tabel 4.31 Jumlah pendapatan yang diperoleh per hari

No.	Pendapatan/Hari	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Kurang dari Rp. 100.000,-	67	77
2.	Rp. 101.000,- s.d Rp 300.000,-	16	18
3.	> Rp. 300.000,-	4	5
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.36 Jumlah Pendapatan Yang Diperoleh Per Hari

Berdasarkan hasil dari tabel 4.31 tersebut, dapat diperoleh gambaran bahwa jumlah pendapatan pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik sebagian besar atau dinyatakan oleh 67 orang (77%) adalah kurang dari Rp. 100.000,-. Hal ini bermakna bahwa dengan pendapatan kurang dari Rp. 100.000,- tersebut mereka harus menanggung beban keluarganya untuk dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Beberapa pedagang 62 orang (71%) ada yang merasa pendapatannya cukup untuk menopang hidup keluarga mengacu pada kebutuhan hidup yang apa adanya saja, sedangkan 25 pedagang (29%) yang lain merasa tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup di masa yang serba mahal saat ini. Gambaran kecukupan jumlah pendapatan yang diperoleh pedagang kaki lima dalam menopang kebutuhan hidup sehari-hari seperti disajikan dalam tabel 4.32.

Tabel 4.32 Kecukupan jumlah pendapatan yang diperoleh per bulan

No.	Kecukupan Pendapatan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Cukup	62	71
2.	Tidak cukup	25	29
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Kesimpulan dari gambaran mengenai aspek permodalan di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa, pedagang kaki lima di Kota Gresik memiliki karakteristik yaitu *"sebagian besar PKL menggunakan modal kerja sendiri yang besarnya lebih dari Rp.500.000, dengan rata-rata pendapatan setiap harinya kurang dari Rp. 100.000,-, digunakan untuk menopang kehidupan keluarga yang berjumlah sebanyak lebih dari 3 orang, namun dengan pendapatan yang tidak seberapa mereka sudah merasa cukup dengan mengacu pada pola hidup yang apa adanya"*

4.3.6 Permasalahan pedagang kaki lima di kabupaten gresik

Permasalahan dasar yang dialami oleh pedagang kaki lima harus dipahami dalam membuat kebijakan penataan sektor informal pedagang kaki lima selain karakteristik pedagang kaki lima, bukan hanya semata-mata permasalahan yang ditimbulkan akibat pertumbuhan pedagang kaki lima dari sudut pandang pemerintah daerah. Permasalahan pedagang kaki lima tersebut berdasarkan penelitian Balitbang (Badan Penelitian Pembangunan) Kabupaten Gresik mengenai “Kajian Penataan dan Pembinaan Pedagang kaki Lima Kabupaten Gresik” yang dilakukan pada tahun 2005 di lokasi yang sama, dimana mereka memiliki informasi dari instansi pembina pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik seperti Kantor Pasar & Pedagang Kaki Lima, Dinas Perhubungan, Dinas PU dan Kantor Satpol PP serta Paguyuban Pedagang Kaki Lima Gresik, dan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang mendasar diperlukan informasi langsung dari pelaku atau pedagang kaki lima itu sendiri.

Berdasarkan hasil dari survei primer penelitian Balitbang dengan 80 orang anggota pedagang kaki lima baik yang terdaftar dan yang belum terdaftar dan dipilih secara *random sampling* pada lokasi penelitian di wilayah Kota Gresik dapat diperoleh gambaran permasalahan yang dihadapi pedagang kaki lima di Kabupaten yang disajikan dalam tabel-tabel dan penjelasan sebagai berikut :

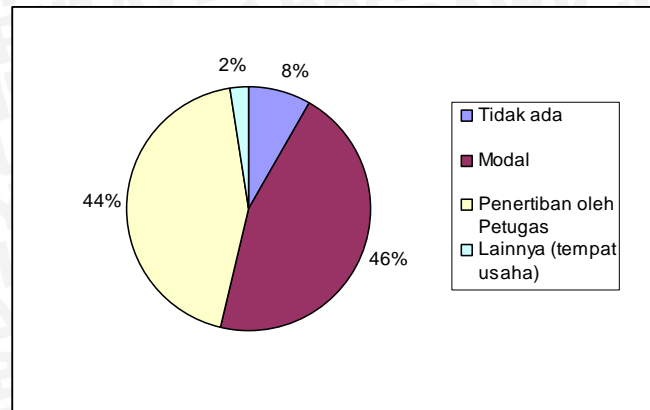
A. Kesulitan/kendala yang dihadapi dalam aktivitas pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya, mengalami berbagai hambatan atau kendala yang dirasakan atau dialaminya. Dari hasil penelitian kendala atau kesulitan yang dirasakan atau dialami oleh pedagang kaki lima di Kota Gresik dapat dilihat dalam tabel 4.33 sebagai berikut :

Tabel 4.33 Kesulitan/kendala yang dihadapi dalam aktivitas pedagang kaki lima

No.	Kendala	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Tidak ada	7	8,75
2.	Modal	36	45,00
3.	Penertiban oleh Petugas	35	43,75
4.	Lainnya (tempat usaha)	2	2,50
Total		80	100

Sumber Data : Survey primer Proyek Balitbang "Kajian Penertiban dan Penataan PKL Kabupaten Gresik Tahun 2005"



Sumber Data : Survey primer Proyek Balitbang "Kajian Penertiban dan Penataan PKL Kabupaten Gresik Tahun 2005".

Gambar 4.37 Kesulitan/kendala yang dihadapi dalam aktivitas pedagang kaki lima

Berdasarkan hasil dari survey primer proyek Balitbang "Kajian Penertiban dan Penataan PKL Kabupaten Gresik Tahun 2005" di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar kendala kesulitan yang dirasakan atau dialami oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik adalah mengenai modal yang dirasakan masih belum memadai seperti dinyatakan oleh 36 orang (45%) responden. Kendala/kesulitan lain yang menonjol adalah penertiban oleh petugas. Hal ini berarti bahwa modal yang dipergunakan untuk usaha pedagang kaki lima masih dirasakan belum mencukupi atau masih pas-pasan. Selain itu penertiban atau yang dikenal dengan obrakan yang dilakukan oleh petugas menjadi kendala tersendiri bagi pedagang kaki lima untuk dapat menjual barang dagangannya secara aman dan tidak terganggu.

Operasi penertiban atau obrakan yang dilakukan oleh petugas pada dasarnya dilakukan sebagai upaya untuk menertibkan keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya atau berjualan pada lokasi-lokasi yang dilarang oleh pemerintah daerah. Meskipun berulang kali dilakukan penertiban ternyata belum membuat jera pedagang kaki lima. Hal ini tentunya tidak hanya disebabkan dari kurangnya pembinaan oleh instansi terkait, namun perlu juga dilihat bagaimana pemahaman pedagang kaki lima itu sendiri tentang aturan atau Perda yang berlaku.

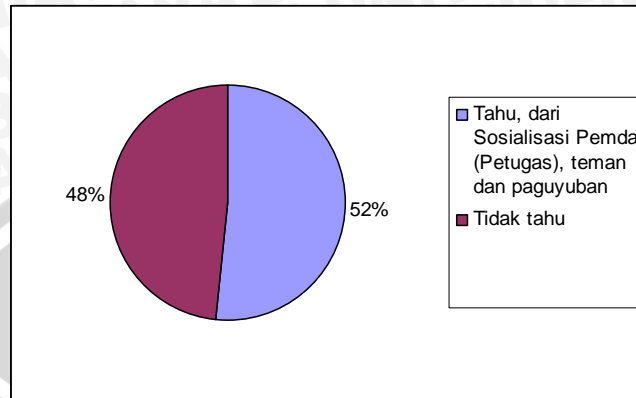
B. Pengetahuan tentang perda pengaturan pedagang kaki lima

Tingkat pengetahuan pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik terhadap Perda pengaturan pedagang kaki lima yang ada sebagaimana disajikan dalam tabel 4.34 berikut :

Tabel 4.34 Pengetahuan tentang perda pengaturan pedagang kaki lima

No.	Pengetahuan tentang Perda	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Tahu, dari Sosialisasi Pemda (Petugas), teman dan paguyuban	45	52
2.	Tidak tahu	42	48
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006.



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.38 Pengetahuan Tentang Perda Pengaturan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil dari tabel 4.34 di atas dapat dijelaskan bahwa ternyata sebagian besar pedagang kaki lima mengetahui keberadaan Perda tentang pengaturan pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik yang dinyatakan oleh 45 orang (52%) responden. Pedagang kaki lima tersebut mengetahui hanya sebatas mengenai peraturan di lokasi tempat mereka berjualan tidak diperbolehkan melakukan usaha dagang apapun, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya sikap berani dari pedagang kaki lima karena mereka tetap mempertahankan mata pencahariannya. Sedangkan 42 orang (48%) belum mengetahui keberadaan Perda tentang pengaturan pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik Hal ini dapat berarti bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima selama ini sebagian besar disebabkan oleh karena belum adanya pengetahuan pedagang kaki lima terhadap aturan tentang pedagang kaki lima.

C. Bantuan, penyuluhan (pembinaan) untuk mengembangkan usaha pedagang kaki lima

Belum adanya pemahaman tentang pengaturan pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain intensitas bantuan atau penyuluhan bagi pedagang kaki lima yang dilakukan oleh instansi pembina pedagang kaki lima. Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran tentang bantuan penyuluhan atau pembinaan yang dilakukan instansi pemerintah daerah yang dapat dilihat pada tabel 4.35.

Tabel 4.35 Bantuan, penyuluhan (pembinaan) untuk mengembangkan usaha pedagang kaki lima

No.	Bantuan/Penyuluhan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Ada	17	20
2.	Tidak Ada	70	80
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Berdasarkan hasil dari tabel 4.35 di atas, menurut pendapat responden dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar atau 70 orang (80%) menyatakan tidak ada atau tidak pernah menerima bantuan pembinaan atau penyuluhan tentang Perda pengaturan pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik. Hal ini berarti bahwa bantuan pembinaan atau penyuluhan yang selama ini dilakukan oleh instansi pembina pedagang kaki lima terutama Dinas Pasar dan pedagang kaki lima maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum efektif dan belum di ketahui oleh setiap pedagang kaki lima yang ada di Kota Gresik.

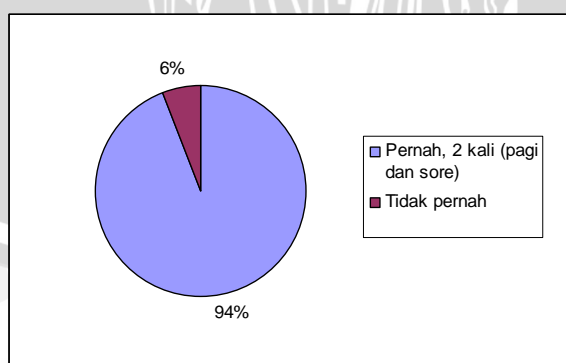
D. Penertiban pedagang kaki lima

Pedagang dapat mengetahui atau memahami pengaturan tentang pedagang kaki lima ditunjukkan dengan seringnya mereka diobrak oleh petugas razia, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka sebagian besar pernah mengalami razia pedagang kaki lima yang dilakukan petugas sebagaimana secara jelas disajikan dalam tabel 4.40 sebagai berikut:

Tabel 4.36 Pernah/tidak mengalami razia penertiban pedagang kaki lima

No.	Pengalaman Diobrak	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Pernah, 2 kali (pagi dan sore)	82	94
2.	Tidak pernah	5	6
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.39 Pernah/Tidak Mengalami Razia Penertiban Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil dari tabel 4.36 di atas, ternyata sebagian besar responden atau 82 orang (94%) menyatakan pernah terkena razia oleh petugas sebanyak 2 kali dalam

setiap harinya yaitu setiap pagi dan sore hari. Hal ini bermakna bahwa sebagian besar pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik cenderung sering melakukan pelanggaran terhadap aturan pedagang kaki lima yang berlaku dengan menempati lokasi/tempat yang dilarang berjualan, sehingga ditindak oleh aparat penegak aturan yaitu Polisi Pamong Praja.

E. Kesan terhadap kebijakan penertiban

Upaya penertiban pedagang kaki lima oleh Petugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik banyak menimbulkan kesan baik yang keberatan maupun yang tidak keberatan dengan berbagai macam alasan. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran tentang sikap pedagang kaki lima terhadap kebijakan penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan di Kabupaten Gresik sebagaimana disajikan dalam tabel 4.37.

Tabel 4. 37 Kesan terhadap kebijakan penertiban oleh pemerintah daerah

No.	Kesan	Alasan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Keberatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak memihak rakyat kecil, ▪ susah nyari tempat yg strategis malah diusir, ▪ hanya bisa ngobrak tetapi tidak memikirkan nasib pedagang kaki lima, ▪ repot waktu membersihkan dagangan, ▪ hanya diobrak saja tapi tidak diberi apa – apa (fasilitas) yang lebih baik, ▪ kerja susah tapi malah diusir, ▪ pedagang kaki lima dijadikan kucing – kucingan, ▪ berjualan tidak tenang, ▪ sakit hati karena tidak punya pekerjaan tetap diobrak, ▪ mengurangi rejeki tidak tenang, ▪ karena penjual ingin tetap jualan di trotoar, ▪ tidak punya pelanggan 	46	57,50
2.	Tidak Keberatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diterima saja dan sambil menunggu kebijakan Pemerintah, ▪ biasa saja kalau diobrak ngalah, ▪ sudah kebal/menter kalau ada penertiban siap menyelamatkan dagangan, ▪ yang diobrak yang di trotoar, ▪ sudah tugasnya 	34	42,50
Total			80	100

Sumber Data : Survey primer proyek Balitbang "Kajian Penertiban dan Penataan PKL Kabupaten Gresik Tahun 2005".

Berdasarkan hasil dari survey primer proyek Balitbang "Kajian Penertiban dan Penataan PKL Kabupaten Gresik Tahun 2005" di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar atau 46 orang (57,5%) menyatakan keberatan dengan alasan tindakan penertiban tidak memihak rakyat kecil, susah nyari tempat yang strategis malah diusir, hanya bisa ngobrak tetapi tidak memikirkan nasib pedagang kaki lima dan hanya

diobrak saja tapi tidak diberi apa – apa (fasilitas) yang lebih baik, saat diobrak repot waktu membersihkan dagangan, kerja susah tapi malah diusir, pedagang kaki lima dijadikan kucing – kucingan, berjualan tidak tenang, sakit hati karena tidak punya pekerjaan tapi tetap diobrak, dapat mengurangi rejeki sehingga tidak tenang, karena penjual ingin tetap berjualan di trotoar karena ramai pembeli namun diusir, dan akibat dari seringnya diobrak menjadi kehilangan pelanggan. Sedangkan 34 orang (42,50%) tidak keberatan dengan adanya kebijakan penertiban karena memang harus diterima saja sambil menunggu kebijakan pemerintah selanjutnya, ada juga yang mengalah kalau diobrak, sudah kebal/menter kalau ada penertiban dan siap menyelamatkan dagangan, tidak khawatir karena yang diobrak yang di trotoar saja, dan ada juga yang menerima hal tersebut karena sudah menjadi tugas Satpol PP. Hal ini berarti bahwa ternyata kebijakan penertiban yang dilakukan oleh Petugas Satpol PP lebih banyak mendapatkan kesan atau respon yang negatif dimata pedagang kaki lima.

Kesan atau respon positif atau negatif tentang kebijakan penertiban pedagang kaki lima sebenarnya sangat tergantung dari sikap yang ditunjukkan oleh petugas Satpol PP saat melakukan razia penertiban. Berikut beberapa sikap petugas yang dirasakan oleh pedagang kaki lima saat dilakukan razia, antara lain :

- a. Kesan positif : biasa saja sudah tidak ambil pusing, biasa sama – sama mencari nafkah, ada petugas yang baik dan sabar.
- b. Kesan negatif : terlalu kasar, ingin melawan tapi tidak bisa marah, sedih dan kecewa, sakit hati karena diusir, keberatan dan tidak suka, jengkel masih pagi sudah ditertibkan waktu ramai pembeli dan pernah tempat dagangan diinjak – injak petugas, petugas jangan asal bawa barang dagangan, saat barang dagangan dibawa petugas/diangkat tidak boleh langsung diminta, makin jahat dengan kebiasaan merusak, jengkel, kalau ada petugas/penertiban menyingkir dulu nanti kembali jualan lagi karena tempat berjualan yang strategis tidak ada lagi, sedih dan kesal.

Berdasarkan dari berbagai penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa permasalahan yang secara mendasar dirasakan oleh para pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Gresik adalah ***”kurangnya modal usaha, pedagang kaki lima memiliki pengetahuan tentang Perda Pengaturan namun hanya sebatas tahu dari petugas razia yang sering mengobrak lokasi dagangnya, kesan pedagang yang cenderung keberatan terhadap kebijakan penertiban pedagang kaki lima dan sikap yang kurang***

simpatik atau negatif terhadap petugas Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya saat razia pedagang kaki lima di Kabupaten Gresik.”

4.4 Karakteristik Masyarakat Pengunjung

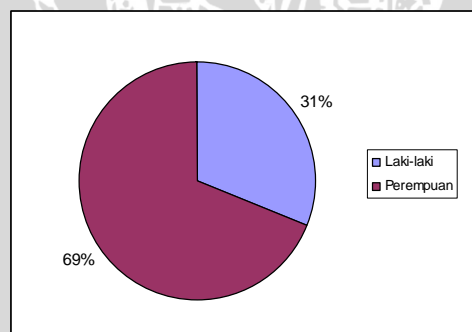
Masyarakat sebagai golongan pengguna jasa pedagang kaki lima pada setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik pengguna jasa PKL ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan aktivitas pedagang kaki lima, karena pola aktivitas PKL menyesuaikan pola hidup masyarakat dalam kesehariannya. Sehingga perlu dilakukan identifikasi karakteristik masyarakat baik sebagai pengunjung dan konsumen, atau yang berada di sekitar lokasi PKL. Berikut ini adalah karakteristik responden masyarakat meliputi jenis kelamin, usia, asal daerah, status, tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan frekwensi belanja.

4.4.1 Jenis kelamin pengunjung

Tabel 4.38 Jenis kelamin pengunjung

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	31	31
2.	Perempuan	69	38,691
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.40 Jenis Kelamin Pengunjung

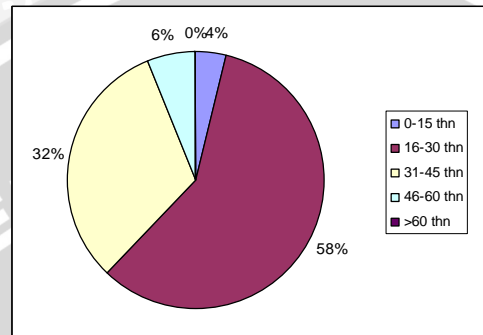
Berdasarkan tabel 4.38 di atas dapat dijelaskan bahwa dari 100 masyarakat di lokasi penelitian yang dijadikan responden, sebanyak 69 orang (69%) laki-laki dan 31 orang lainnya (31%) perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang tertarik untuk mengunjungi dan membeli pada pedagang kaki lima adalah kaum perempuan dibandingkan dengan kaum laki-laki.

4.4.2 Usia pengunjung

Tabel 4.39 Usia pengunjung

No.	Usia	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0-15 thn	4	4
2.	16-30 thn	58	58
3.	31-45 thn	32	32
4.	46-60 thn	6	6
5.	>60 thn	-	0
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.41 Usia Pengunjung

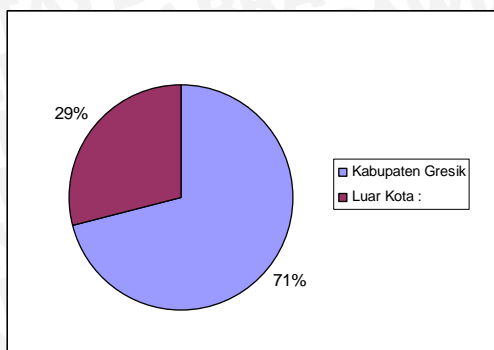
Berdasarkan tabel 4.39 di atas dapat dijelaskan, ternyata dari 100 responden, usia masyarakat pengunjung yang paling banyak adalah antara 16-30 tahun yakni 58 orang (58%) dan usia antara 31-45 tahun sebanyak 32 orang (32%), sedangkan pengunjung yang berusia di atas 45 tahun hanya 6 orang dan yang berusia kurang dari 15 tahun sebanyak 4 orang (4%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung pedagang kaki lima di wilayah Kota Gresik adalah dari penduduk usia produktif (16-30 tahun), dengan kata lain pedagang kaki lima lebih diminati oleh masyarakat yang berusia produktif sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier.

4.4.3 Asal daerah pengunjung

Tabel 4.40 Asal daerah pengunjung

No.	Asal Daerah	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Kabupaten Gresik	71	71
2.	Luar Kota : (Lamongan, Madura, Surabaya, Jember, Magelang, Tuban, Bojonegoro, Malang, Sumatra, Pemalang, Sulawesi Selatan, Ponorogo)	29	29
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.42 Asal Daerah Pengunjung

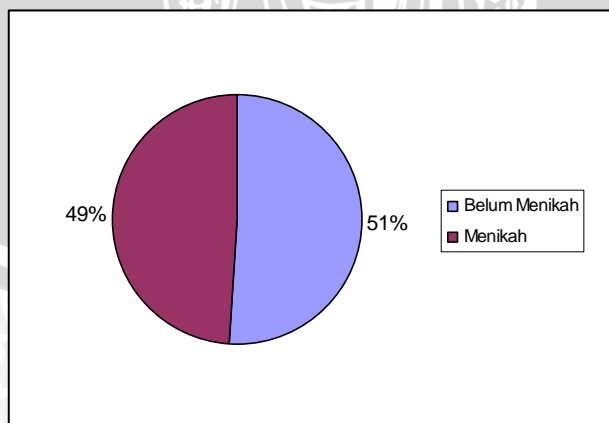
Berdasarkan hasil dari tabel 4.40 di atas dapat dijelaskan bahwa ternyata sebagian besar atau 71 orang (71%) pengunjung yang menjadi responden penelitian berasal dari dalam Kota Gresik, sedangkan 29 orang (29%) berasal dari luar Kab.Gresik yakni berasal dari Lamongan, Madura, Surabaya Jember, Magelang, Tuban, Bojonegoro, Malang, Sumatra, Pemalang, Sulawesi Selatan, dan Ponorogo yang berdomisili di Kabupaten Gresik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden masyarakat yang ada di lokasi penelitian merupakan warga warga asli Kabupaten Gresik.

4.4.4 Status pengunjung

Tabel 4.41 Status pengunjung

No.	Status	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Belum Menikah	51	51
2.	Menikah	49	49
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.43 Status Pengunjung

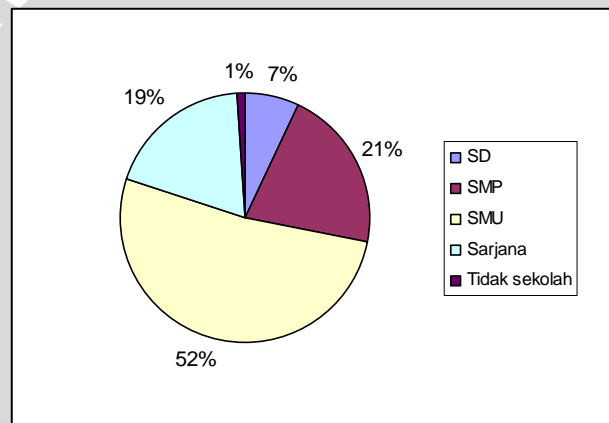
Berdasarkan hasil dari tabel 4.41 diketahui bahwa dari 100 responden ternyata sebagian besar atau 51 orang (51%) masyarakat telah berstatus belum menikah dan 49 orang (49%) sudah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima adalah sebagai pemenuhan kebutuhan hidup individu yang tidak memiliki tanggungan keluarga dan yang berkeluarga.

4.4.5 Tingkat pendidikan pengunjung

Tabel 4.42 Tingkatan pendidikan pengunjung

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	SD	7	7
2.	SMP	21	21
3.	SMU	52	52
4.	Sarjana	19	19
5.	Tidak sekolah	1	1
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.44 Tingkatan Pendidikan Pengunjung

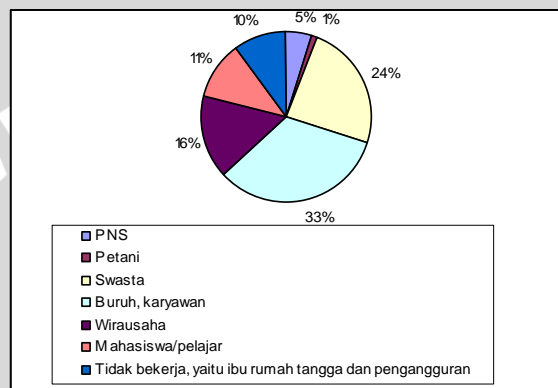
Tingkat pendidikan yang dimiliki sebagaimana dalam tabel 4.42 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden sebagian besar atau 52 orang (52%) dan 21 orang (21%) berpendidikan SMA dan SMP, selain itu juga sebanyak 19 orang (19%) responden berpendidikan sarjana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebanyakan pengunjung pedagang kaki lima di wilayah Kota Gresik merupakan pengunjung yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi yaitu SMA, SMP dan Sarjana.

4.4.6 Mata pencaharian

Tabel 4.43 Mata pencaharian pengunjung

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase (%)
1.	PNS	5	5
2.	Petani	1	1
3.	Swasta	24	24
4.	Buruh, karyawan	33	33
5.	Wirausaha	16	16
6.	Mahasiswa/pelajar	11	11
7.	Tidak bekerja, yaitu ibu rumah tangga dan pengangguran	10	10
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.45 Mata pencaharian pengunjung

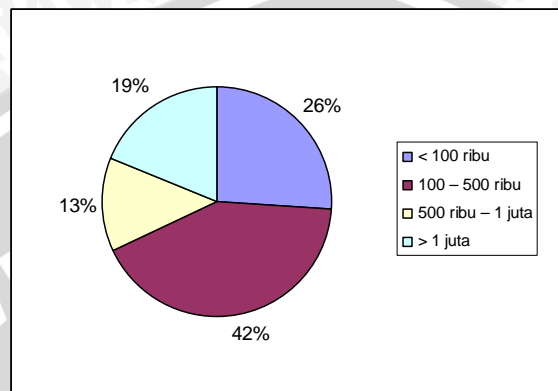
Mata pencaharian yang dimiliki responden masyarakat sebagaimana dalam tabel 4.43 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden sebagian besar yaitu 33 orang (33%) berkerja sebagai buruh/karyawan, 24 orang (24%) berkerja di bidang swasta dan 16 orang (16%) bermata pencaharian sebagai wiraswasta, sedangkan responden lainnya ada yang masih mahasiswa/pelajar sebanyak 11 orang (11%), 10 orang (10%) tidak memiliki pekerjaan (ibu rumah tangga ada yang menganggur), selain itu ada yang berkerja sebagai PNS sebanyak 5 orang (5%) dan petani hanya 1 orang (1%). Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan responden masyarakat pada lokasi penelitian merupakan pengunjung yang rata-rata sudah memiliki pekerjaan walaupun hanya sebagai buruh/karyawan, berwirausaha atau di bidang swasta.

4.4.7 Pendapatan pengunjung

Tabel 4.44 Pendapatan pengunjung

No.	Penghasilan Pengunjung	Jumlah	Prosentase (%)
1.	< 100 ribu	26	26
2.	100 – 500 ribu	42	42
3.	500 ribu – 1 juta	13	13
4.	> 1 juta	19	19
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.46 Penghasilan Pengunjung

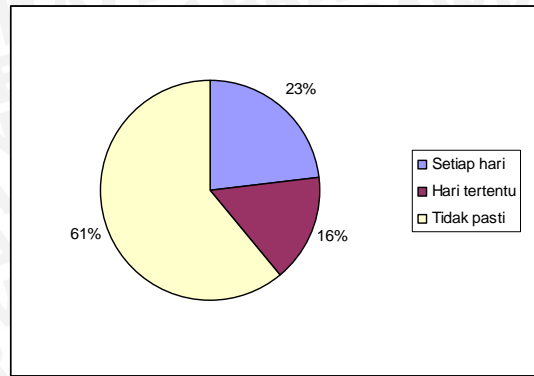
Berdasarkan hasil dari tabel 4.44 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden masyarakat sebanyak 42 orang (42%) memiliki pendapatan antara 100 ribu - 500 ribu rupiah, 26 orang (26%) berpendapatan kurang dari 100 ribu, bahkan ada yang memiliki pendapatan lebih dari 500 ribu yaitu 19 orang (19%) dan 13 orang (13%) memiliki pendapatan lebih dari 1 juta dan antara 500 ribu-1 juta. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden masyarakat pada lokasi penelitian memiliki tingkat pendapatan yang cukup tinggi, yaitu antara 100 ribu - 500 ribu rupiah bahkan ada yang memiliki pendapatan lebih dari 1 juta rupiah.

4.4.8 Frekwensi belanja

Tabel 4.45 Frekwensi belanja pengunjung

No.	Frekwensi Belanja	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Setiap hari	23	23
2.	Hari tertentu	16	16
3.	Tidak pasti	61	61
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.47 Frekwensi Belanja Pengunjung

Berdasarkan hasil dari tabel 4.45 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 100 responden masyarakat sebanyak 61 orang (61%) memiliki frekwensi tidak pasti dalam mengunjungi pedagang kaki lima, dalam hal ini pengunjung menyesuaikan kebutuhan dan keinginan jika akan berkunjung ke lokasi pedagang kaki lima. Sedangkan sebanyak 23 orang (23%) mengunjungi pedagang kaki lima hampir setiap hari, dan selebihnya sebanyak 16 orang (16%) memiliki hari-hari tertentu untuk mengunjungi pedagang kaki lima. Sehingga dapat dikatakan masyarakat wilayah Kota Gresik cenderung menyesuaikan kebutuhan dan keinginan jika akan berkunjung ke pedagang kaki lima.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap 100 responden masyarakat pada lokasi pedagang kaki lima di wilayah Kota Gresik pada penelitian di atas, maka dapat dikatakan bahwa :

“Pengunjung pedagang kaki lima di wilayah Kota Gresik sebagian besar adalah berjenis kelamin perempuan yang berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun, berpendidikan cukup tinggi yaitu (SMP, SMA, dan Sarjana), berasal dari dalam wilayah Kota Gresik, belum memiliki keluarga (belum menikah), memiliki pekerjaan sebagai buruh/karyawan dan swasta dengan pendapatan sebesar 100 ribu - 500 ribu rupiah, mereka membelanjakan uangnya di pedagang kaki lima dengan intensitas yang tidak pasti (sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka)”.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Identifikasi persepsi mengenai lokasi usaha pedagang kaki lima dalam faktor fisik, ekonomi dan sosial menurut pedagang, masyarakat dan pemerintah

Perkembangan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kota Gresik semakin menjamur yang ditandai dengan banyaknya lokasi publik yang ditempati oleh pedagang

kaki lima (PKL). Keberadaan PKL yang kurang tertata sering menimbulkan masalah ruang fisik kota, yaitu menurunkan kualitas lingkungan fisik kota dan aktivitasnya yang terkesan menempati lokasi bukan peruntukannya (lokasi yang dilarang oleh pemerintah Kabupaten Gresik) dengan menyerobot ruang-ruang publik kota seperti trotoar, taman kota, alun-alun, sebagian badan jalan dan emperan toko. Pemanfaatan lahan publik yang tidak sesuai aturan dengan munculnya pedagang kaki lima selalu berkaitan dengan segi estetika yang tidak dapat berkompromi dengan kepentingan ekonomi masyarakat (Jayadiningrat, dalam Hanarti 1999: 40-41).

Problema lokasi bagi usaha pedagang kaki lima di kawasan pusat Kota Gresik, tampaknya menjadi sentra yang melatarbelakangi adanya keluhan dari pedagang kaki lima di wilayah Kota Gresik, seperti yang terlihat sehari-hari dengan adanya razia ketertiban umum oleh Satpol PP pada lokasi penelitian yang selalu membuat pedagang terjebak antara ingin mempertahankan lokasi jualannya untuk menyambung hidup dengan menuruti kemauan Polisi Satpol PP. Jika mereka melawan, maka sanksi yang selalu diberi adalah membawa dan menyita dagangannya dengan kasar seakan-akan tidak mau tahu beban hidup keluarga. Kebutuhan akan lokasi bagi aktivitas sektor informal adalah hal yang logis saja, oleh karena tumpuan aktivitas sektor ini memang lebih banyak kepada perdagangan fisik. Dengan segala keterbatasan kemampuan yang dimilikinya, tidaklah mengherankan bila mereka kemudian mengambil lokasi yang strategis, dalam arti demi kelancaran pemasaran usahanya sebagai akibat dari keinginan mereka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik (Nasution, 1988, dalam Alisjahbana, 2003:159).

Berdasarkan permasalahan yang mengacu pada perbedaan persepsi dan kepentingan di atas maka dapat dijelaskan terlebih dahulu perbedaan persepsi dari masing-masing pelaku kegiatan antara lain pedagang, masyarakat (pengunjung, konsumen dan orang yang berada di sekitar lokasi PKL) dan pemerintah. Identifikasi persepsi tersebut mengacu pada tiga faktor yaitu faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor fisik dalam penentuan lokasi pedagang kaki lima di wilayah Kota Gresik. Identifikasi persepsi pada faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor fisik dapat dilihat pada tabel 4.50, tabel 4.51, dan tabel 4.52.

A. Identifikasi persepsi mengenai aspek ekonomi dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima

Berdasarkan dari penentuan variabel yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka aspek-aspek yang tergabung dalam faktor ekonomi antara lain adalah jenis dagangan, biaya angkutan dan waktu jualan. Berikut ini adalah identifikasi persepsi mengenai aspek-aspek faktor ekonomi menurut pedagang kaki lima, masyarakat dan pemerintah dalam menentukan lokasi jualan PKL.

Tabel 4.46 Identifikasi persepsi aspek ekonomi dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima

No.	Aspek Ekonomi	Kondisi Eksisting	Pihak	Persepsi	Analisis Deskriptif Evaluatif
1.	Jenis Dagangan	Hasil kuisioner : <ul style="list-style-type: none"> • Makanan/minuman (46,4 %) • Pakaian (14,3 %) • Sayuran, buah, ikan (14,3%) • Tas/sepatu/sandal (7,1 %) 	Responden pedagang	Jenis barang dagangan yang selama ini diajakan sudah sesuai dengan keinginan responden PKL. Hal ini dapat dilihat dari 84 orang responden yang sebagian besar atau 86,25% menyatakan sudah sesuai dan hanya 13,75% yang menyatakan tidak sesuai. Dengan demikian keberadaan jenis dagangan yang selama ini diajakan oleh sebagian besar PKL seperti makanan dan minuman sudah dirasakan sesuai dengan keinginan PKL.	Pedagang kaki lima yang berkembang di wilayah Kota Gresik adalah PKL makanan/minuman karena banyak masyarakat pengunjung yang membutuhkan dan mencarinya. Dengan demikian, pengunjung selain diuntungkan oleh harga yang rendah, kualitas dagangan yang relatif lebih sama, lebih bebas memilih jenis dagangan yang diminati juga dapat membantu PKL dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari PKL yang secara ekonomi masih lemah dimana pendapatan perhari hanya kurang dari Rp 100.000 namun hampir dapat dipastikan (73,8%) telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
		Hasil kuisioner : <ul style="list-style-type: none"> • Makanan/minuman (45 %) • Pakaian (12 %) • Sayuran, buah, ikan (26%) 	Responden masyarakat	Sebagian besar responden pengunjung menyatakan bahwa jenis dagangan PKL yang paling diminati untuk dibeli adalah makanan/minuman sebanyak 45% pengunjung, peminat jenis dagangan bahan mentah sebanyak 26 % dan pakaian sebanyak 12 % dengan alasan bahwa membeli di PKL lebih murah (45%) dan banyak pilihan jenis dagangan yang diperjualbelikan (31%).	
		Data Sekunder : <ul style="list-style-type: none"> • Makanan/minuman (37,6%) • Non makanan/minuman (37,2%) • Sayuran, buah, ikan (25,2%) 	Responden pemerintah	Pedagang kaki lima (PKL) yang paling banyak di Kabupaten Gresik adalah PKL makanan dan minuman sebanyak (37,6%) yang tersebar di beberapa lokasi strategis di wilayah pusat Kota Gresik.	
2.	Biaya Angkutan	Hasil kuisioner : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mempertimbangkan biaya transportasi (77,4%) • Mempertimbangkan biaya transportasi (22,6%) 	Responden pedagang	Responden pedagang kaki lima dalam memilih lokasi usaha dagangnya sebagian besar (77,4%) tidak mempertimbangkan biaya transportasi dari rumah menuju lokasi jualan dengan alasan dimanapun ada lokasi yang strategis untuk berjualan dan ramai pengunjung maka mereka akan berusaha menempatinya.	Pedagang kaki lima yang termasuk dalam kelompok <i>proletariat</i> , yaitu buruh pada usaha kecil dan usaha sendiri tanpa modal atau dengan modal yang sangat terbatas seharusnya memilih lokasi yang dekat dengan tempat berjualan sehingga dapat memperkecil modal usaha, terutama biaya transportasi. Namun karena sebagian besar (82,1%) mereka menjalankan usaha yang tidak permanen dengan berjalan kaki untuk mencari pembeli, sehingga biaya transportasi kurang mempengaruhi modal usaha mereka.
		Hasil kuisioner : <ul style="list-style-type: none"> • Tidak mempertimbangkan biaya transportasi (47%) • Mempertimbangkan biaya transportasi (53%) 	Responden masyarakat	Sebagian besar responden masyarakat pengunjung (53%) dalam menentukan lokasi PKL yang dikunjungi mempertimbangkan biaya angkutan dari tempat tinggal menuju lokasi demi efisiensi /penghematan.	

No.	Aspek Ekonomi	Kondisi Eksisting	Pihak	Persepsi	Analisis Deskriptif Evaluatif
3.	Waktu Berjualan	Hasil kuisioner : Mempertimbangkan waktu jualan (57%) Tidak mempertimbangkan waktu jualan (43%)	Responden pedagang	Pedagang kaki lima di Kota Gresik mempertimbangkan kesesuaian waktu jualan dengan aktivitas masyarakat dalam arti jam ramai dan sepi pengunjung., dimana ada lokasi yang strategis dan ramai dikunjungi masyarakat maka mereka akan menuju dan mencari tempat pada lokasi tersebut dan berusaha tidak pindah sampai batas waktu ramainya pengunjung dan pindah ke tempat lain yang ramai dan berpotensi untuk menghabiskan barang dagangannya.	Pola aktivitas pedagang kaki lima yang menyesuaikan dengan irama dan ciri-ciri kehidupan masyarakat sehari-hari, membuat waktu aktivitas PKL harus disesuaikan dengan perilaku kegiatan formal masyarakat yaitu aktivitas di sekitar pasar/pusat-pusat perbelanjaan, perkantoran/sekolah, terminal, dan sebagainya. Perilaku keduanya cenderung sejalan, walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antar keduanya (interaksi jual beli), namun kesesuaian waktu jualan dengan aktivitas masyarakat akan dapat mempengaruhi besarnya penghasilan dan terjual habis tidaknya barang dagangan. Hal ini sesuai dengan persepsi pedagang, masyarakat dan pemerintah mengenai waktu berjualan PKL dimana waktu berjualan sama dipertimbangkan dalam menentukan lokasi jualan mereka.
		Hasil kuisioner : Mempertimbangkan waktu jualan PKL (80%) Tidak mempertimbangkan waktu jualan PKL (20%)	Responden masyarakat	Masyarakat sebagai pengunjung dan konsumen untuk memilih lokasi PKL yang dikunjungi cenderung melihat kesesuaian waktu jualan PKL dengan keinginan dan kebutuhannya pada saat itu.	
		Hasil kuisioner : Mempertimbangkan waktu jualan PKL (100%)	Responden pemerintah	Menurut responden pemerintah, perlu dilakukan pengaturan waktu jualan untuk masing-masing jenis pedagang dengan menyesuaikan sebagian besar aktivitas dan kebutuhan masyarakat.	

Sumber : Hasil Pembahasan Tahun 2006

B. Identifikasi persepsi mengenai aspek sosial dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima

Kegiatan sektor informal perdagangan kaki lima di wilayah Kota Gresik berkembang dengan pesat. Keadaan ini disalah satu sisi dianggap sebagai salah satu alternatif bagi upaya pemecahan masalah ketenagakerjaan (Kadir dan Biantoro, 2000 dalam Alisjahbana, 2003:123) hal ini terlihat dari besarnya jumlah pencari kerja yang masuk catatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2004 yaitu sebanyak 6.098 laki-laki dan 6.213 perempuan dengan presentase terbesar adalah tamatan SLTA, berikutnya 27,18 persen tamatan sarjana dan terbesar ketiga 11,74 persen tamat akademi. Namun, di sisi lain terdapat beberapa permasalahan lingkungan yang timbul akibat kegiatan perdagangan kaki lima antara lain : masalah kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Pedagang kaki lima dianggap mengganggu ketertiban dan keindahan kota karena pertumbuhan dan perkembangannya tidak teratur, tampak liar, kumuh, melebar dan ada yang menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berdagang misalnya di trotoar jalan (Kadir dan Biantoro, 2000 dalam Alisjahbana, 2003:124). Dapat dipahami bila pelaksanaan kebijakan tersebut bertitik berat pada ketertiban, karena persepsi dasar pemerintah (kota) terhadap kehadiran kegiatan sektor informal ialah menyelamatkan sarana dan fasilitas umum yang diduduki secara tidak sah, mencegah usaha yang mengganggu ketertiban umum, keindahan, kebersihan dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan Perda Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 tertulis pada Bab III pasal 3 ayat 1 tentang pengaturan tempat usaha, bahwa dalam menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan serta alur lalu lintas di Kabupaten Gresik, dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima tanpa ijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Definisi mengenai keempat aspek sosial tersebut dicantumkan dalam Perda Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2004 Bab I tentang ketentuan umum. Sebelum membahas mengenai persepsi antara pedagang, masyarakat dan pemerintah pada faktor sosial dalam menentukan lokasi jualan PKL, akan diulas terlebih dahulu gambaran mengenai keempat aspek sosial yaitu keamanan, kenyamanan, ketertiban, dan kebersihan di lokasi-lokasi PKL tersebut.

a. Keamanan

Keamanan yang dimaksud disini adalah menyangkut keamanan dari para pelaku kegiatan dalam melakukan aktivitas, seperti keamanan bagi pengguna jalan,

harapan pedagang aman dari razia petugas ketertiban umum saat berjualan, dan kebebasan dari hal-hal yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan umum seperti pencopetan, pencurian, gangguan preman, dan sebagainya.



Sumber : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.48

Penertiban yang cenderung represif ternyata tidak menyelesaikan masalah, karena memunculkan perlawanan dan kemarahan baik pedagang maupun petugas razia, sehingga memungkinkan terjadinya disintegrasi sosial antar masyarakat (keamanan terganggu). Namun, kondisi tersebut tidak menjadikan suatu penghalang bagi PKL, karena saat petugas pergi PKL bisa kembali lagi.

Keterangan : PKL depan Pasar Kota Gresik

Sektor informal sebagai satu-satunya mata pencaharian utama penyambung kebutuhan hidup sehari-hari membuat para pedagang mengharapkan adanya perlindungan dan diberi hak untuk mengelola, mengatur dan menertibkan sendiri segala aktivitas tanpa mengganggu ketertiban umum, sedangkan pemerintah hanya menyediakan lokasi yang ditempati dan bersifat pasif (Alisjahbana, 2003:124) sehingga pedagang aman dari adanya razia, pengguna jalan juga merasa nyaman.

b. Kenyamanan

Kenyamanan menurut Perda Kabupaten Gresik no 25 Tahun 2004 adalah suatu keadaan yang aman, damai, dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan baik fisik maupun psikis. Kaitannya dengan aktivitas PKL adalah kenyamanan masyarakat terutama pengguna jalan yang berada di sekitar lokasi PKL.



Sumber : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.49

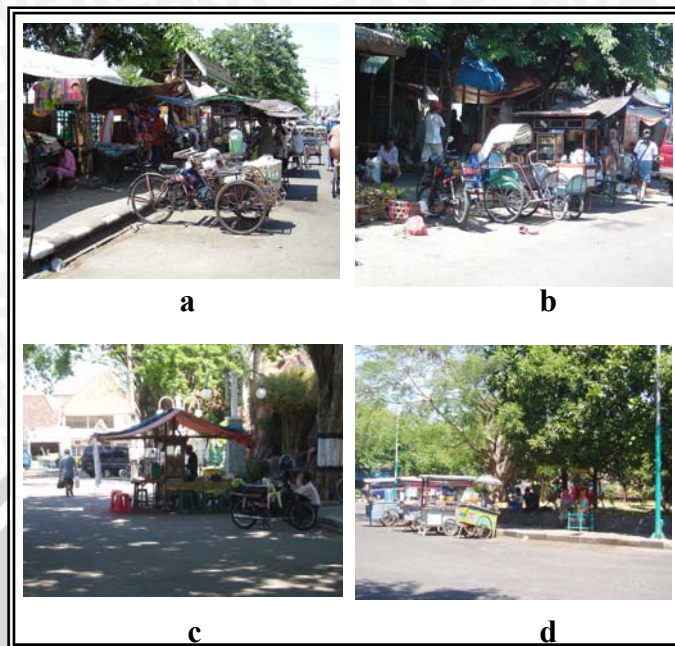
Pengguna jalan tidak lagi merasakan kenyamanan saat berjalan karena PKL yang tidak menyisakan trotoar untuk pejalan kaki, bahkan pengunjung sampai berjalan di badan jalan.

Keterangan : a dan b : PKL depan Pasar Kota Gresik

c : PKL depan Pasar Baru Gresik

c. Ketertiban

Ketertiban menurut Perda Kabupaten Gresik No. 25 Tahun 2004 adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma agama, norma sosial, norma susila, maupun aturan-aturan yang berlaku. Berkaitan dengan ketertiban PKL adalah pertumbuhan PKL yang tidak teratur, semrawut, tampak liar, melebar, menyebabkan kemacetan dan kegiatannya seringkali menempati wilayah-wilayah yang secara hukum dilarang, seperti taman kota, di halaman toko lain, di trotoar, di badan jalan atau di tanah kosong milik orang lain. Pelaksanaan kebijakan yang menitikberatkan pada ketertiban ini dalam rangka menyelamatkan sarana dan fasilitas umum yang diduduki secara tidak sah dari kegiatan apapun apalagi sampai mengganggu kelancaran lalu lintas.



Sumber : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.50

Self employed atau sektor informal sebagai salah satu katup penyelamat penduduk kelas bawah pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan dengan menempati ruang-ruang strategis seperti di trotoar, taman, kota, alun-alun kota dan sebagian badan jalan

Keterangan :

- a : PKL depan PT. Multi Sarana Plaza
- b : PKL depan Pasar Baru Gresik
- c : PKL depan Alun-Alun Gresik
- d : PKL TPG Randu Agung

d. Kebersihan

Kebersihan yang dimaksud adalah dilihat dari segi estetika lingkungan yang tidak menimbulkan kekumuhan yaitu tidak menghasilkan sampah baik sampah basah dan sampah kering. Jenis PKL yang paling menimbulkan kekumuhan adalah PKL yang menghasilkan sampah basah yaitu jenis makanan. Pada lokasi yang biasanya digunakan PKL makanan/minuman, trotoarnya terlihat kusam dan banyak sampah berserakan di sekitarnya.



Sumber : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.51

PKL makanan/minuman dan PKL bahan mentah yang menghasilkan sampah basah dan kering disekitarnya bahkan kadang sampah tersebut dibiarkan di lokasi.

- Keterangan : a : PKL depan Pasar Kota Gresik b : PKL depan Pasar Baru Gresik

Persepsi mengenai aspek-aspek sosial yang berupa keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kebersihan kaitannya dengan aktivitas pedagang kaki lima di kawasan pusat Kota Gresik berbeda-beda antara kepentingan pedagang, masyarakat dan pemerintah. Perbedaan kepentingan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.47.

Tabel 4.47 Identifikasi persepsi aspek sosial dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima

Aspek Faktor Sosial	Kondisi Eksisting	Pihak	Persepsi	Analisis Deskriptif Evaluatif
Keamanan Kenyamanan Ketertiban Kebersihan	Hasil kuisioner : Responden PKL dalam melakukan aktivitas usahanya mempertimbangkan : Keamanan (52,4%) Kebersihan 22,6%) Kenyamanan (15,5%) Ketertiban (9,5%)	Responden pedagang	Sebagian besar responden pedagang dalam menjalankan usahanya sangat mempertimbangkan keamanan dalam beraktivitas, keamanan ini berkaitan dengan kekhawatiran mereka terhadap adanya razia yang dilakukan oleh Petugas Satpol PP. Kebersihan juga dipertimbangkan dalam rangka tanggung jawab mereka menggunakan tempat umum dalam berjualan.	Pedagang kaki lima tidak membutuhkan dan tidak menginginkan fasilitas atau infrastruktur yang lengkap dan mahal dari Pemerintah, namun merasa sudah merasa beruntung bila diberi keamanan dalam berusaha, penurunan gangguan petugas razia dan mereka dilibatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup serta kesadaran mereka terhadap lingkungan.
	Hasil kuisioner : Responden masyarakat dalam mengunjungi PKL mempertimbangkan : Kenyamanan (48%) Kebersihan (32%) Keamanan (18%) Ketertiban (1%) Lainnya/keindahan (1%)	Responden masyarakat	Responden masyarakat sebagai pengunjung PKL lebih mengutamakan kenyamanan (48%) dan kebersihan (32%) saat membeli atau sekedar mengunjungi PKL.	Sesuai dengan preferensinya sebagai pengunjung tempat/lokasi aktivitas PKL, masyarakat cenderung melihat kenyamanan dan kebersihan dari PKL baik dilihat dari tempat/lokasi berjualan, cara berjualan, jenis dagangan, dan sebagainya.
	Hasil kuisioner : Responden pemerintah dalam menentukan lokasi jualan PKL mempertimbangkan : Ketertiban dan ketertiban (60%) Kenyamanan dan kebersihan (40%)	Responden pemerintah	Pemerintah sangat memperhatikan keamanan dan ketertiban (60%) dalam melakukan pembinaan dan penataan PKL, selain itu juga memperhatikan kenyamanan dan kebersihan lokasi usaha (40%).	Dapat dipahami apabila pemerintah lebih mementingkan keeamanan ruang publik dan ketertiban PKL karena sesuai dengan persepsi dasar pemerintah (kota) terhadap kehadiran kegiatan sektor informal ialah menyelamatkan sarana dan fasilitas umum yang diduduki secara tidak sah, mencegah usaha yang mengganggu ketertiban umum, keindahan, kebersihan dan kelancaran lalu lintas.

Sumber : Hasil Pembahasan Tahun 2006

C. Identifikasi persepsi mengenai aspek fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima

Persepsi mengenai aspek-aspek fisik yang berupa kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi, kedekatan dengan pusat keramaian/kegiatan masyarakat, dan kedekatan lokasi usaha PKL dengan tempat tinggal PKL kaitannya dengan aktivitas pedagang kaki lima di kawasan pusat Kota Gresik berbeda-beda antara kepentingan pedagang, masyarakat dan pemerintah. Perbedaan kepentingan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.48.

Tabel 4.48 Identifikasi persepsi aspek fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima

No.	Aspek dalam Faktor Fisik	Kondisi Eksisting	Pihak	Persepsi	Analisis Deskriptif Evaluatif
1.	Kemudahan Aksesibilitas/sarana transportasi	Hasil kuisioner : <ul style="list-style-type: none"> Tidak mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi (59,5%) Mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi (40,5%) 	Responden pedagang	Pedagang cenderung tidak begitu mempertimbangkan kemudahan sarana transportasi (59,5%) menuju lokasi jualan karena karakteristik pedagang yang sanggup berjualan dimanapun asalkan ramai pengunjung dan kebanyakan mereka berjualan dengan jalan kaki (82,1%).	Kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi baik bagi PKL bersangkutan maupun pembeli/konsumen perlu dipertimbangkan karena aktivitas perekonomian kota umumnya merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku kegiatan. Persebaran lokasi sektor informal PKL cenderung menyesuaikan jaringan transportasi, dimana sektor informal tumbuh pesat di sepanjang jalan besar dan di ruang publik dengan lokasi strategis sehingga memerlukan sarana dan prasarana transportasi untuk melayani penduduk.
		Hasil kuisioner : <ul style="list-style-type: none"> Tidak mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi (25%) Mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi (75%) 	Responden masyarakat	Masyarakat responden dalam memilih lokasi PKL ternyata mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi (75%) dan sebagian besar masyarakat pengunjung menuju lokasi PKL dengan menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor (39%), jalan kaki (37%) dan menggunakan angkutan umum (20%).	
		Hasil kuisioner : <ul style="list-style-type: none"> Mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi (100%) 	Responden pemerintah	Menurut responden pemerintah bahwa dalam memilih lokasi jualan PKL perlu mempertimbangkan kemudahan sarana transportasi menuju lokasi.	

No.	Aspek dalam Faktor Fisik	Kondisi Eksisting	Pihak	Persepsi	Analisis Deskriptif Evaluatif
2.	Kedekatan dengan Pusat Keramaian /Kegiatan Masyarakat	<p>Hasil kuisioner :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempertimbangkan kedekatan jarak antara lokasi jualan dengan pusat keramaian/kegiatan masyarakat (92,9%) ▪ Tidak mempertimbangkan kedekatan jarak antara lokasi jualan dengan pusat keramaian/kegiatan masyarakat (7,1%) 	Responden pedagang	Sebagian besar (92,9%) pedagang dalam memilih lokasi jualan sangat mempertimbangkan kedekatan dengan pusat keramaian/kegiatan masyarakat, walaupun jarang ada yang membeli tetapi paling tidak banyak pengunjung yang melihat dagangan mereka.	Kedekatan antara PKL dengan pusat kegiatan/keramaian kota ditunjukkan dengan lokasi aktivitas mereka yang cenderung menempati kawasan perdagangan, sekolah, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Hal ini menjelaskan bahwa PKL mempunyai kecenderungan untuk memasarkan barang dagangannya sedekat mungkin dengan calon pembeli. Kecenderungan ini berkaitan dengan salah satu fungsi pemasaran yakni mendekati komoditi kepada konsumen (<i>place utility</i>). Mereka akan berusaha agar barang atau jasa yang dijual terlihat oleh pembeli. Oleh karena itu mereka akan memilih lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau di suatu lokasi yang merupakan lokasi aktivitas masyarakat.
		<p>Hasil kuisioner :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempertimbangkan kedekatan jarak antara lokasi jualan dengan pusat keramaian/kegiatan masyarakat (75%) ▪ Tidak mempertimbangkan kedekatan jarak antara lokasi jualan dengan pusat keramaian/kegiatan masyarakat (25%) 	Responden masyarakat	Sebagian besar masyarakat pengunjung (75%) dalam memilih lokasi PKL mempertimbangkan kedekatan antara lokasi PKL dengan pusat keramaian/kegiatan masyarakat.	
		<p>Hasil kuisioner :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempertimbangkan kedekatan jarak antara lokasi jualan dengan pusat keramaian/kegiatan masyarakat (80%) ▪ Tidak mempertimbangkan kedekatan jarak antara lokasi jualan dengan pusat keramaian/kegiatan masyarakat (20%) 	Responden pemerintah	Menurut pemerintah (80%), PKL dalam memilih lokasi jualan memang seharusnya mempertimbangkan kedekatan lokasi jualan dengan pusat keramaian/kegiatan masyarakat.	

No.	Aspek dalam Faktor Fisik	Kondisi Eksisting	Pihak	Persepsi	Analisis Deskriptif Evaluatif
3.	Kedekatan Lokasi Usaha PKL dengan Tempat Tinggal PKL	Hasil kuisioner : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempertimbangkan kedekatan lokasi usaha dengan tempat tinggal (92,9%) ▪ Tidak mempertimbangkan kedekatan lokasi dengan tempat tinggal (7,1%) 	Responden pedagang	Sebagian besar pedagang (92,9%) mempertimbangkan jarak dengan tempat tinggal mereka dalam memilih lokasi jualan.	PKL sebagai kelompok masyarakat yang dominan berpenghasilan rendah, akan berusaha memilih lokasi usaha sedekat mungkin dengan tempat tinggal mereka hal ini berkaitan dengan salah satu faktor yang memperkecil modal adalah faktor jarak tempat kerja dengan tempat tinggal. Mereka harus dekat dengan lokasi usaha, apabila tidak ingin dililit besarnya ongkos transportasi.
		Hasil kuisioner : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempertimbangkan kedekatan lokasi usaha dengan tempat tinggal (60%) ▪ Tidak mempertimbangkan kedekatan lokasi dengan tempat tinggal (40%) 	Responden pemerintah	Sebagian besar instansi (60%) mengemukakan bahwa PKL dalam memilih lokasi jualan juga mempertimbangkan kedekatan lokasi jualan dengan tempat tinggal mereka.	

Sumber : Hasil Pembahasan Tahun 2006

4.5.2 Identifikasi urutan prioritas dari aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima

Bentrok yang sering terjadi antara pedagang dengan petugas razia menyangkut ketidaksesuaian lokasi berdagang adalah karena adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan cara pandang dari kedua pihak. Penentuan lokasi pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal ini memiliki tanggapan yang berbeda-beda dari berbagai pihak dengan beragam kepentingan, antara lain kepentingan pedagang sebagai pelaku kegiatan, kepentingan masyarakat sebagai pengunjung dan pengguna ruang aktivitas jualan pedagang kaki lima (PKL), dan kepentingan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Sehingga diperlukan identifikasi kepentingan dari masing-masing pihak dengan menentukan prioritas dari aspek-aspek ekonomi, sosial serta fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.

A. Identifikasi urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima menurut pedagang

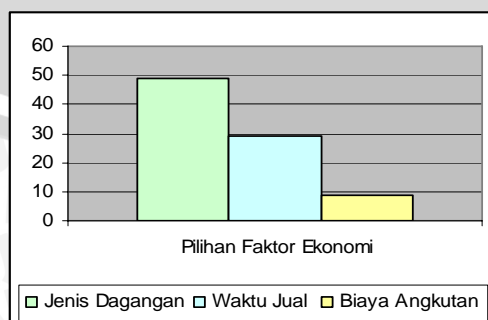
a) Identifikasi urutan prioritas aspek ekonomi dalam menentukan lokasi jualan pedagang kaki lima

Pedagang dalam menentukan lokasi jualan mempertimbangkan beberapa aspek-aspek ekonomi, antara lain yaitu jenis dagangan, waktu jualan dan biaya angkutan menuju ke lokasi jualan. Berdasarkan survei primer tahun 2006, maka prioritas aspek-aspek ekonomi menurut responden pedagang kaki lima (PKL) dapat dilihat pada tabel 4.49.

Tabel 4.49 Urutan prioritas aspek ekonomi menurut responden pedagang kaki lima

Prioritas	Pilihan Faktor Ekonomi	Jumlah	Prosentase (%)
1	Jenis Dagangan	49	56
2	Waktu Jual	29	33,3
3	Biaya Angkutan	9	10,7
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.52 Urutan Prioritas Aspek Ekonomi Menurut Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan tabel 4.49 dapat dijelaskan bahwa prioritas pertama sebagian besar responden pedagang (56%) dalam menentukan lokasi jualannya adalah menyesuaikan antara lokasi dan jenis dagangan, baik itu jenis dagangan makanan/minuman, non makanan/minuman maupun bahan mentah (sayuran, buah, daging, ikan dan sebagainya). Terdapat juga responden pedagang (33,3%) yang memikirkan waktu jualan strategis sebagai prioritas utama. Dan hanya sebagian kecil (10,7%) yang mempertimbangkan biaya angkutan menuju lokasi jualan sebagai prioritas pertama. Perlu dipahami bahwa dalam menentukan lokasi jualan, pedagang secara langsung menentukan target sasaran konsumen dengan aktivitas dan ruang aktivitas tertentu. Penjabaran penentuan lokasi usaha menurut aspek-aspek dalam faktor ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut.

- **Jenis dagangan**

Tabel 4.50 Urutan prioritas jenis dagangan pedagang kaki lima responden

Prioritas	Jenis Barang Dagangan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Makanan / minuman	39	44,8
2	Tekstil / pakaian	15	17,2
3	Sayur, Buah dan daging	12	13,8
4	Lainnya (jual Bunga, jual Asesoris)	8	9,3
5	Tas/Sepatu/Sandal	6	6,9
6	Mainan	3	3,4
7	Kacamata/Jam Tangan	3	3,4
8	Kaset/VCD	1	1,2
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Gresik terutama di wilayah kota sebagian besar adalah makanan/minuman (44,8%). Pedagang makanan/minuman ini tersebar di beberapa lokasi yaitu di depan Pasar Baru Gresik, di depan Pasar Kota Gresik, di depan lahan milik PT. Multi Sarana Plaza, di Timur Alon-Alon Gresik, dan di sekitar TPG II Randu Agung.

Pedagang kaki lima sebagaimana yang disebutkan pada tabel 4.50 di atas, berperan membantu sekaligus menyediakan berbagai keperluan terutama kebutuhan dasar makanan/minuman orang-orang yang berada di sekitar lokasi PKL dengan berbagai aktivitasnya karena lebih murah (45%) dan banyak pilihan jenis dagangan yang diperjualbelikan (31%). Mereka yang membutuhkan PKL tersebut antara lain : buruh/karyawan (toko di pasar, supir angkot) sebanyak 33%, swasta sebanyak 24%, wirausahawan (pemilik toko di pasar) sebanyak 16%, mahasiswa/pelajar dan ibu rumah tangga sebanyak 11% dan 10%, dan PNS sebanyak 5%. Sehingga dapat

dipahami bahwa banyak orang yang membutuhkan kehadiran PKL, terutama yang berada di sekitar lokasi PKL.

Pedagang dalam melakukan aktivitasnya cenderung memasarkan barang dagangan dengan berusaha mendekatkan diri dengan pembeli. Seperti yang dikemukakan oleh Bromly, dalam Manning dan Effendi (1996 : 236) bahwa dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya, PKL akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli. Mereka akan berusaha agar barang atau jasa yang dijual terlihat oleh pembeli. Oleh karena itu mereka akan memilih lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau di suatu lokasi yang merupakan lokasi aktivitas masyarakat. Sehingga kehadiran PKL banyak dijumpai di sekitar lokasi aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya. Dilihat dari tata guna lahan yang ada di sekitar lokasi-lokasi PKL di wilayah Kota Gresik adalah berupa kawasan perdagangan, perkantoran dan sekolah, dan perumahan. Penggunaan lahan pada masing-masing lokasi PKL di wilayah Kota Gresik dapat dilihat pada tabel 4.51 dan gambar 4.53.

Penggunaan lahan di sekitar lokasi PKL yang sebagian besar berupa perdagangan, perumahan, perkantoran dan sekolah, fasum dan ruang terbuka hijau memiliki potensi adanya keramaian masyarakat yang merupakan sasaran sektor informal (PKL) mulai dari lapisan masyarakat terbawah, menengah sampai lapisan atas, sehingga hal ini menjadikan pertimbangan utama pedagang kaki lima dalam menentukan lokasi jualan.

Secara lebih mendalam, dalam menentukan lokasi jualan pedagang melihat jenis peruntukan bangunan dalam guna lahan tersebut. Para pelaku kegiatan sektor informal ini akan selalu “menginduk” pada bangunan yang menjadi daya tarik masyarakat untuk datang. Misalnya: pedagang yang berjualan di depan Pasar Baru dan Pasar Kota Gresik. Pedagang sangat senang berjualan di depan pasar, karena dalam setiap harinya terdapat pengunjung yang datang walaupun hanya sekedar melihat, sehingga harapan memperoleh pendapatan yang memuaskan bisa tercapai. Jenis aktivitas dan bangunan yang ada di sekitar lokasi PKL dapat dilihat pada gambar 4.53.

gambar 4.53.a Guna Lahan dan Aktivitas



gambar .b Guna Lahan dan Aktivitas



gambar .c Guna Lahan dan Aktivitas



gambar .d Guna Lahan dan Aktivitas PKL



Tabel 4.51 Penggunaan lahan dan jenis aktivitas di sekitar lokasi pkL di wilayah kota gresik

No.	Lokasi	Eksisting Guna Lahan Sekitar	Eksisting Jenis Aktivitas	Teori	Analisis
1.	Depan Pasar Baru Gresik	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Perumahan Fasum 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar Baru Gresik Terminal Gub. Suryo Pertokoan Perumahan Mall Ramayana 	<p>Ruang aktivitas adalah suatu wadah atau ruang yang terbentuk oleh elemen arsitektural, yang didalamnya terkandung dan terdapat fungsi, maksud, tujuan dan kehendak manusia</p> <p><i>Sumber : Ashihara (1983) dalam Devitasari (2003 : 38)</i></p>	<p>Ruang aktivitas yang terbentuk di sekitar lokasi jualan PKL dapat dilihat dari fungsi guna lahan sekitar yang sebagian besar berupa perdagangan, perumahan, perkantoran/sekolah, taman kota, dan fasum (terminal) yang terdiri dari elemen-elemen arsitektural berupa macam jenis bangunan yang didalamnya dengan berbagai macam maksud, tujuan dan kehendak manusia. Misalnya jenis Bangunan Pasar Baru dan Pasar Kota Gresik yang merupakan tempat berkumpulnya orang untuk melakukan aktivitas jual beli atau hanya sekedar berkunjung, sesuai dengan kehendak individunya.</p> <p>Terdapat daya tarik dan daya dorong (<i>pull and push</i>) antara pedagang kaki lima dengan ruang aktivitas jualan, dimana daya tarik ruang aktivitas yang memiliki tingkat intensitas aktivitas tinggi (banyaknya pengunjung yang datang) mendorong pedagang memilih berjualan di lokasi seperti di dekat pasar, dekat terminal, dekat kantor/sekolah dan dekat taman kota.</p> <p>Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pedagang kaki lima di perkotaan merupakan pendukung aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang ada (<i>activity support</i>).</p>
2.	Depan Pasar Kota Gresik	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar Kota Gresik Pertokoan Perumahan Hotel 	<p>Pedagang kaki lima pada umumnya cenderung untuk beraktivitas secara berkelompok pada suatu area yang memiliki tingkat intensitas aktivitas yang tinggi, seperti pusat-pusat hiburan, pasar, taman, maupun pada simpul-simpul jalur transportasi</p> <p><i>Sumber : Mc. Gee dan Yeung (1977: 61) dalam Devitasari (2003 : 38)</i></p>	
3.	Depan lahan milik PT. Multi Sarana Plaza	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Perumahan Fasum 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar Baru Gresik Terminal Gub. Suryo Pertokoan Perumahan Mall Ramayana 	<p>Ruang umum atau disebut juga ruang publik merupakan tempat berkumpulnya warga kota untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperkuat ikatan sebagai suatu komunitas</p> <p><i>Sumber : Devitasari, 2003 : 39</i></p>	
4.	Timur Alon-Alon Gresik	<ul style="list-style-type: none"> Perkantoran Sekolah Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor Pemerintahan (Balitbang, DPRD Kab. Gresik, Pendopo Kab. Gresik) Kantor Telkom Alun-Alun Kota Taman Kanan-Kanak Masjid Warung, pertokoan Perumahan 	<p>Pedagang kaki lima selalu berusaha agar barang dagangannya terjual, untuk itu memilih tempat berjualan yang umum dan banyak di datangi pengunjung seperti jalan raya, emper-emper toko dan pasar-pasar.</p> <p><i>Sumber : Ramli (1992 : 38) dalam Devitasari (2003 : 38)</i></p>	
5.	TPG II Randuagung	<ul style="list-style-type: none"> Perumahan Ruang terbuka Hijau (Lapangan, Taman Kota) 	<ul style="list-style-type: none"> Perumahan Pertokoan Kantor Pemerintahan Taman Kota 		

No.	Lokasi	Eksisting Guna Lahan Sekitar	Eksisting Jenis Aktivitas	Teori	Analisis
6.	di wilayah perempatan Sidomoro, Jl. Kartini, Jl. Usman Sadar, Jl. Pahlawan	<ul style="list-style-type: none"> ● Perumahan ● Perdagangan ● Perkantoran ● Industri ● Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perumahan ● Pertokoan, warung ● SD Semen Gresik ● Taman Kanak-Kanak ● Pabrik Semen Gresik ● Lapangan Olahraga ● Perumahan Semen Gresik ● Kantor Pemerintahan ● Kantor Swasta ● Mc Donald 	<p>Aktivitas pedagang kaki lima di perkotaan merupakan pendukung aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang ada (<i>activity support</i>).</p> <p>Sumber : Shirvani (1985 : 37) dalam Devitasari (2003 : 38)</p>	

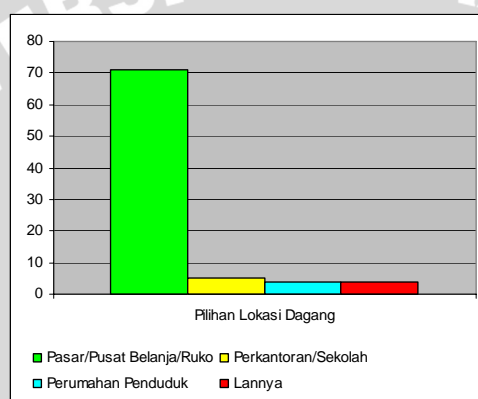
Sumber : Analisis Tahun 2006

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diketahui persepsi mengenai prioritas pilihan pedagang dalam menentukan lokasi jualan pada lokasi penelitian. Hasil survei prioritas lokasi jualan pilihan responden pedagang kaki lima di wilayah Kota Gresik dapat dilihat pada tabel 4.52.

Tabel 4.52 Urutan prioritas pilihan lokasi responden pedagang kaki lima

Prioritas	Pilihan Lokasi Dagang	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pasar/Pusat Belanja/Ruko	74	84,5
2	Perkantoran/Sekolah	5	6
3	Perumahan Penduduk dan Lainnya (tempat khusus)	4 dan 4	4,8 dan 4,8
Total		87	100

Sumber : Survei Primer Tahun 2006



Sumber : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.54 Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Responden

Berdasarkan tabel 4.52 dan gambar 4.54, menunjukkan bahwa prioritas lokasi berjualan pilihan responden pedagang kaki lima di wilayah Kota Gresik adalah di sekitar pasar/pusat belanja/ruko. Seperti yang dikatakan Ramli (1992 : 38) dalam Devitasari (2003 : 38) pedagang kaki lima selalu berusaha agar barang dagangannya terjual, untuk itu memilih tempat berjualan yang umum dan banyak di datangi pengunjung seperti jalan raya, emper-emper toko dan pasar-pasar. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Joedo (1997) dalam Widjajanti (2000 : 35) juga disebutkan bahwa penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar.

Berdasarkan pendapat Joedo, dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima cenderung memilih ruang tempat beraktivitasnya pada lokasi-lokasi strategis yang tingkat kunjungannya tinggi seperti pusat-pusat aktivitas di suatu kota. Kecenderungan

ini berkaitan dengan salah satu fungsi pemasaran yakni mendekatkan komoditi kepada konsumen (*place utility*).

- **Biaya Angkutan**

Menurut Sugiono (1998 : 10), menyatakan bahwa faktor-faktor yang memperkecil modal adalah faktor jarak tempat kerja dengan tempat tinggal. Dalam kaitannya dengan penentuan aktivitas pedagang kaki lima, bahwa semakin dekat tempat berjualan dari tempat tinggal maka dapat memperkecil modal usaha terutama biaya transportasinya. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar pedagang kaki lima (52,4%) berasal dari luar kota seperti Lamongan, Madura, Ciamis, Ngawi dan Surabaya, yang berdomisili di Kabupaten Gresik. Jarak antara tempat berjualan dengan tempat tinggal pedagang dapat dilihat pada gambar 4.56 peta asal tempat tinggal atau domisili dari pedagang kaki lima.

- **Waktu Berjualan**

Menurut Mc Gee dan Yeung (1977 : 76), pola aktivitas pedagang kaki lima (PKL) menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan pedagang kaki lima (PKL) didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Joedo (1997) dalam Widjajanti (2000 : 35) disebutkan bahwa penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari. Prioritas waktu berdagang pilihan pedagang kaki lima dalam kesehariannya dapat dilihat pada tabel 4.53.

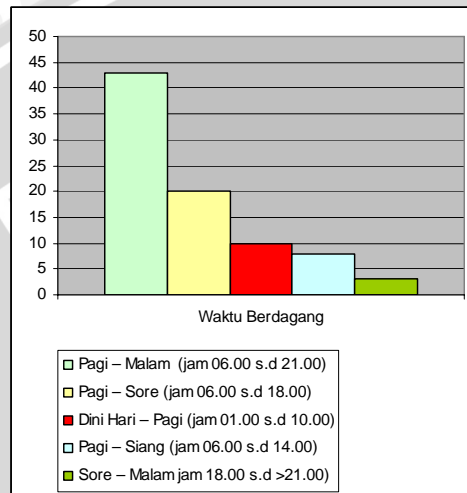
Tabel 4.53 Urutan prioritas waktu jual pedagang kaki lima responden

Prioritas	Waktu Berdagang	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pagi – Malam (jam 06.00 s.d 21.00)	44	51,2
2	Pagi – Sore (jam 06.00 s.d 18.00)	21	23,8
3	Dini Hari – Pagi (jam 01.00 s.d 10.00)	10	11,9
4	Pagi – Siang (jam 06.00 s.d 14.00)	8	9,5
5	Sore – Malam jam 18.00 s.d >21.00)	3	3,6
Total		87	100

Sumber : Survei Primer Tahun 2006

Berdasarkan tabel 4.53 dan gambar 4.55 menunjukkan bahwa sebagian besar responden pedagang (51,2%) mengutamakan berjualan pada waktu pagi-malam dari jam 06.00 – 21.00 WIB untuk mencari penghasilan yang memuaskan. Jika disesuaikan dengan aktivitas di sekitar lokasi PKL berupa pasar yang selalu ramai sampai jam

21.00, perumahan yang ramai sampai jam 21.00, dan Alun-Alun yang ramai dari siang-malam, memang sangat mendukung pilihan waktu jualan PKL, walaupun ada saat-saat tertentu aktivitas pedagang kaki lima itu melemah karena sedikitnya pengunjung. Frekwensi belanja dan berkunjung responden masyarakat yang sebagian besar (61%) menyesuaikan dengan kebutuhan dan setiap hari (23%) juga membuat pedagang memiliki harapan untuk berjualan kembali pada waktu dan lokasi tersebut.



Sumber : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.55 Urutan Prioritas Waktu Jual Pedagang Kaki Lima Responden

Pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima juga sesuai dengan ciri-ciri kehidupan masyarakat, yang dibuktikan dengan adanya kesesuaian antara pilihan waktu berjualan responden pedagang dengan pilihan waktu berkunjung PKL yang telah dijelaskan pada analisis sebelumnya mengenai identifikasi persepsi mengenai aspek ekonomi dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima.

Gambar 4.56 Peta asal/domisili PKL



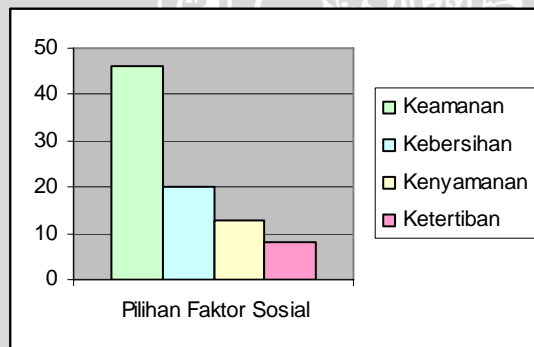
b) Identifikasi urutan prioritas aspek sosial dalam menentukan lokasi jualan pedagang kaki lima

Pedagang dalam menentukan lokasi jualan juga harus mempertimbangkan beberapa aspek sosial, antara lain yaitu keamanan, kebersihan, kenyamanan dan ketertiban lokasi jualan. Hal ini dikarenakan ruang aktivitas yang dipakai berjualan merupakan ruang publik atau ruang umum. Ruang umum atau disebut juga ruang publik merupakan tempat berkumpulnya warga kota untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperkuat ikatan sebagai suatu komunitas (Devitasari, 2003 : 39). Ruang umum merupakan ruang milik pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Aspek sosial ini juga mengacu pada Perda Kabupaten Gresik No. 03 Tahun 2003 pada Bab III pasal 3 yang membahas tentang pengaturan tempat usaha. Berdasarkan survei primer tahun 2006, maka prioritas pertimbangan aspek-aspek dalam faktor sosial dalam menentukan lokasi jualan menurut pedagang kaki lima (PKL) dapat dilihat pada tabel 4.54.

Tabel 4.54 Urutan prioritas aspek sosial menurut pedagang kaki lima responden

Prioritas	Pilihan Faktor Sosial	Jumlah	Prosentase (%)
1	Keamanan	46	52,4
2	Kebersihan	20	22,6
3	Kenyamanan	13	15,5
4	Ketertiban	8	9,5
Total		87	100

Sumber : Survei Primer Tahun 2006



Sumber : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.57 Urutan Prioritas Aspek Sosial Menurut Pedagang Kaki Lima Responden

Berdasarkan tabel 4.54 dan gambar 4.57 terlihat bahwa sebagian besar (52,4%) responden pedagang mengutamakan keamanan mereka dalam berjualan. Keamanan yang dimaksud disini adalah aman dari perasaan khawatir dan takut digusur dan di usir secara paksa saat razia yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, karena 94% pedagang kaki lima pernah mengalami razia. Oleh karena itu kepastian lokasi berdagang akan menimbulkan perasaan aman dan nyaman pedagang dalam beraktivitas. Terdapat juga responden pedagang

(22,6%) yang memprioritas kebersihan dalam berjualan, hal ini sebagai wujud tanggung jawab mereka dalam penggunaan tempat jualan dan untuk menjaga *image* terhadap konsumen.

Dapat dipahami bila pelaksanaan razia yang dilakukan oleh petugas Satpol PP tersebut bertitik berat pada ketertiban. Menurut (Alisjahbana, 2003:87) hal itu karena persepsi dasar pemerintah (kota) terhadap kehadiran kegiatan sektor informal ialah menyelamatkan sarana dan fasilitas umum yang diduduki secara tidak sah, mencegah usaha yang mengganggu ketertiban umum, keindahan, kebersihan dan kelancaran lalu lintas.

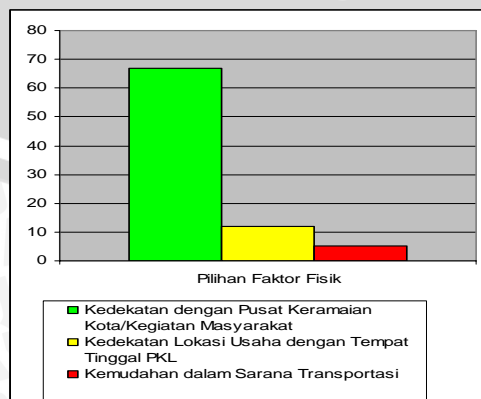
c) Identifikasi urutan prioritas aspek fisik dalam menentukan lokasi jualan pedagang kaki lima

Selain aspek ekonomi dan aspek sosial, pedagang juga mempertimbangkan aspek fisik dalam menentukan lokasi jualan. Aspek-aspek fisik tersebut antara lain yaitu kedekatan dengan pusat keramaian kota/kegiatan masyarakat, kedekatan lokasi usaha dengan tempat tinggal PKL dan kemudahan dalam sarana transportasi. Urutan prioritas pertimbangan aspek-aspek fisik dalam menentukan lokasi jualan menurut pedagang kaki lima (PKL) dapat dilihat pada tabel 4.55.

Tabel 4.55 Urutan prioritas aspek dalam faktor fisik menurut pedagang kaki lima responden

Prioritas	Pilihan Faktor Fisik	Jumlah	Prosentase (%)
1	Kedekatan dengan Pusat Keramaian Kota/Kegiatan Masyarakat	69	79,8
2	Kedekatan Lokasi Usaha dengan Tempat Tinggal PKL	12	14,2
3	Kemudahan dalam Sarana Transportasi	5	6
Total		87	100

Sumber : Survei Primer Tahun 2006



Sumber : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.58 Urutan Prioritas Aspek Fisik Menurut Pedagang Kaki Lima Responden

Berdasarkan tabel 4.55 dan gambar 4.58 menunjukkan bahwa dalam aspek fisik, sebagian besar responden pedagang (79,8%) memprioritaskan kedekatan lokasi jualan dengan pusat keramaian kota/pusat kegiatan masyarakat dalam menentukan lokasi jualan. Hal ini dikarenakan pedagang yang memasarkan dagangannya cenderung mencari dan mendekati pembeli, sehingga PKL tidak dicari oleh pembeli akibat dari keterbatasan ketrampilan dan persaingan individu. Sehingga kehadiran PKL banyak dijumpai di sekitar lokasi aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya. Dalam teori lokasi juga disebutkan bahwa bagi pedagang terdapat kecenderungan untuk berorientasi kepada konsentrasi konsumen dalam menentukan lokasi tempat usaha (Djojodipuro, 1992 : 30). Terdapat juga responden pedagang (14,2%) yang mengutamakan kedekatan dengan tempat tinggal dalam memilih lokasi jualan untuk memperkecil modal dan tenaga. Sedangkan pedagang yang memprioritaskan aspek kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi menuju lokasi jualan hanya sebesar 6%.

- **Kemudahan dalam sarana transportasi**

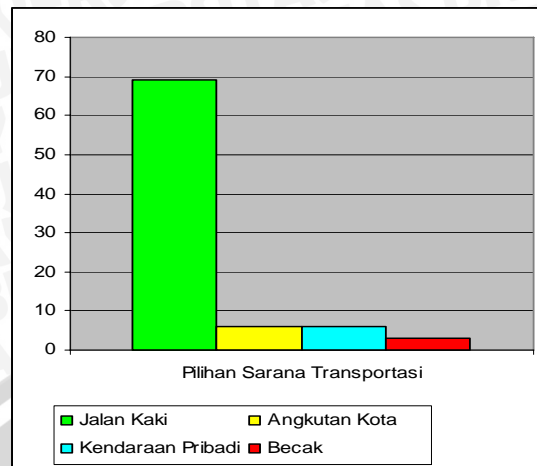
Kemudahan dan kedekatan dalam wilayah suatu kota berfungsi memperlancar aktivitas pertukaran barang dan jasa. Berbagai macam kegiatan ekonomi yang berada dalam suatu wilayah, apabila didukung dengan sistem sarana transportasi yang baik dan mudah, maka kegiatan ekonomi akan menjadi lancar. Hal ini dikarenakan mobilitas masyarakat yang sangat mengandalkan kemudahan dan kelancaran aksesibilitas.

Teori lokasi yang mengemukakan tentang transportasi juga disebutkan bahwa penting untuk menentukan lokasi sedemikian rupa sehingga diperoleh biaya angkutan yang minimum (Djojodipuro, 1992 : 30). Hal ini berkaitan pula dengan ketersediaan sarana transportasi, baik bagi PKL yang bersangkutan maupun pembeli/konsumen. Kemudahan mendapatkan sarana transportasi ini dapat dilihat dari bagaimana cara pedagang menuju ke lokasi jualan. Prioritas sarana transportasi pilihan pedagang dapat dilihat pada tabel 4.56.

Tabel 4.56 Urutan prioritas sarana transportasi pilihan pedagang kaki lima responden

Prioritas	Pilihan Sarana Transportasi	Jumlah	Prosentase (%)
1	Jalan Kaki	69	82,1
2	Angkutan Kota atau Kendaraan Pribadi	6 dan 6	7,1 dan 7,1
3	Becak	3	3,6
Total		87	100

Sumber : Survei Primer Tahun 2006



Sumber : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.59 Urutan Prioritas Sarana Transportasi Pilihan Pedagang Kaki Lima Responden

Berdasarkan tabel 4.56 dan gambar 4.59, menunjukkan bahwa sebagian besar responden pedagang kaki lima menuju lokasi jualan memilih dengan berjalan kaki (82,1%), hal ini sesuai dengan sarana dagang yang dipakai berjualan sebagian besar responden pedagang (42,9%) adalah gerobak, sehingga biaya transportasi tidak terlalu berpengaruh dan tidak menghambat modal usaha pedagang.

- **Kedekatan dengan pusat keramaian kota/pusat kegiatan masyarakat**

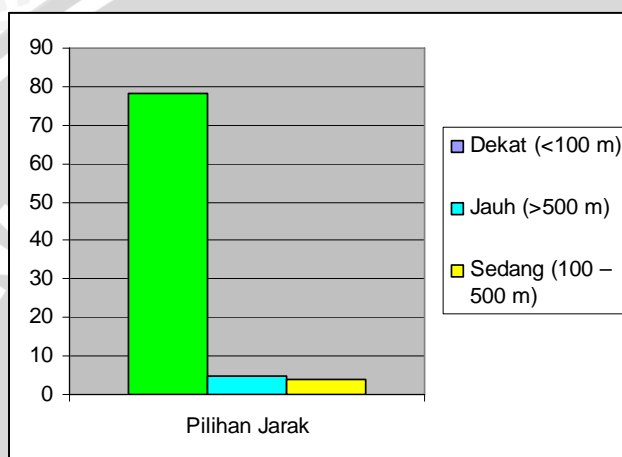
Aspek kedekatan (*proximity*) antara PKL dengan pusat kegiatan/keramaian kota ditunjukkan dengan lokasi aktivitas mereka yang cenderung menempati kawasan perdagangan, rekreasi, perkantoran, rumah sakit, sekolah, dan tempat-tempat keramaian lainnya yang bersifat temporer. Hal ini menjelaskan bahwa PKL mempunyai kecenderungan untuk memasarkan barang dagangannya sedekat mungkin dengan calon pembeli. Seperti yang dikemukakan oleh Bromly, dalam Manning dan Effendi (1996 : 236) bahwa dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya, PKL akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli. Mereka akan berusaha agar barang atau jasa yang dijual terlihat oleh pembeli. Oleh karena itu mereka akan memilih lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau di suatu lokasi yang merupakan lokasi aktivitas masyarakat. Sehingga kehadiran PKL banyak dijumpai di sekitar lokasi aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya. Prioritas jarak lokasi berjualan pedagang kaki lima (PKL) dengan pusat keramaian kota/pusat kegiatan masyarakat yang antara lain

berupa pasar/pusat perbelanjaan/ruko, terminal, perkantoran/sekolah, dan perumahan dapat dilihat pada tabel 4.57 sampai dengan tabel 4.60.

Tabel 4.57 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan pasar/pusat perbelanjaan menurut pedagang kaki lima responden

Prioritas	Pilihan Jarak	Jumlah	Prosentase (%)
1	Dekat (<100 m)	78	89,2
2	Jauh (>500 m)	5	6
3	Sedang (100 – 500 m)	4	4,8
Total		87	100

Sumber : Survei Primer Tahun 2006



Sumber : Survei Primer Tahun 2006

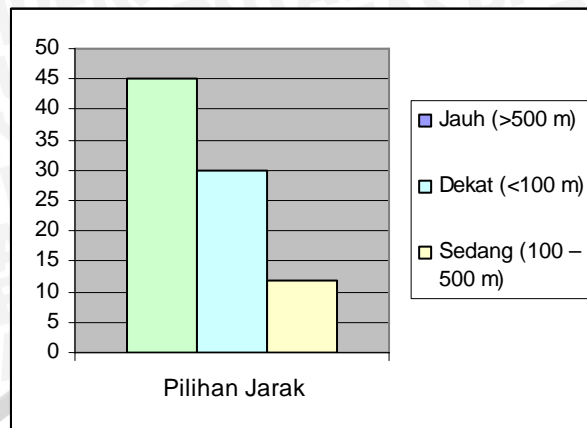
Gambar 4.60 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha PKL dengan Pasar/Pusat Perbelanjaan Menurut Pedagang Kaki Lima Responden

Berdasarkan tabel 4.57 dan gambar 4.60, menunjukkan bahwa jarak lokasi berjualan menurut sebagian besar responden pedagang kaki lima (89,2%) dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko adalah dekat (<100 m), sehingga mereka dapat memperoleh pendapatan yang cukup bahkan memuaskan. Keadaan ini seperti pedagang kaki lima (PKL) yang berlokasi di Pasar Baru Gresik, di Pasar Kota Gresik dan di lahan penampungan sementara milik PT. Multi Sarana Plaza, dimana lokasi tersebut merupakan kawasan perdagangan dengan skala kota yang memiliki intensitas dan frekwensi kegiatan tinggi.

Tabel 4.58 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perkantoran/sekolah menurut pedagang kaki lima responden

Prioritas	Pilihan Jarak	Jumlah	Prosentase (%)
1	Jauh (>500 m)	45	51,2
2	Dekat (<100 m)	30	34,5
3	Sedang (100 – 500 m)	12	14,3
Total		87	100

Sumber : Survei Primer Tahun 2006



Sumber : Survei Primer Tahun 2006

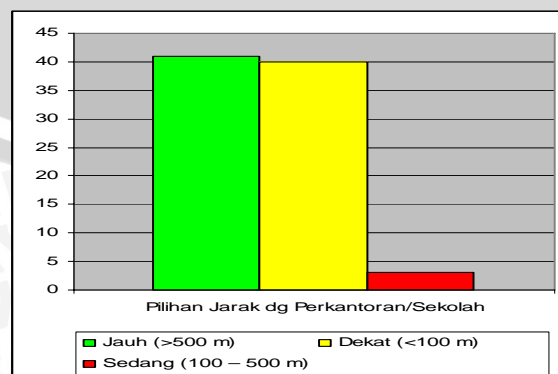
Gambar 4.61 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima Dengan Perkantoran/Sekolah Menurut Pedagang Kaki Lima Responden

Berdasarkan tabel 4.58 dan gambar 4.61, menunjukkan bahwa jarak lokasi jualan menurut sebagian besar responden pedagang (51,2%) dengan perkantoran/sekolah adalah jauh (>500 m). Hal ini karena terjadi persaingan tinggi untuk merebut lokasi di depan perkantoran/sekolah, sehingga mereka memilih menjauhi perkantoran dan sekolah. Lain halnya dengan responden pedagang (34,5%) yang ingin mempunyai lokasi tetap di sekolah/perkantoran untuk memenuhi kebutuhan karyawan, pegawai dan anak sekolah, terutama untuk PKL jenis makanan/minuman, seperti pedagang yang ada di Timur Alun-Alun Gresik.

Tabel 4.59 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan terminal Menurut pedagang kaki lima responden

Prioritas	Pilihan Jarak	Jumlah	Prosentase (%)
1	Jauh (>500 m)	43	48,8
2	Dekat (<100 m)	41	47,6
3	Sedang (100 – 500 m)	3	3,6
Total		87	100

Sumber : Survei Primer Tahun 2006



Sumber : Survei Primer Tahun 2006

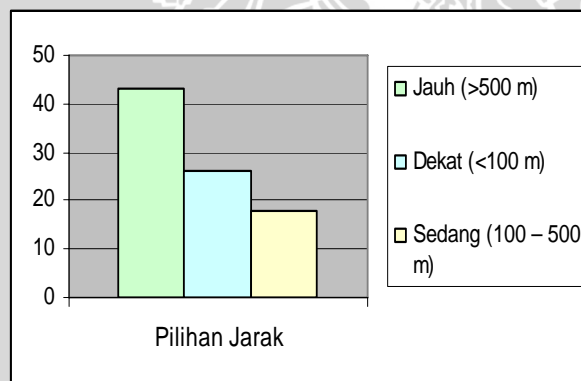
Gambar 4.62 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Terminal Menurut Pedagang Kaki Lima Responden

Berdasarkan tabel 4.59 dan gambar 4.62, menunjukkan bahwa jarak lokasi berjualan menurut sebagian besar responden pedagang kaki lima (48,8%) dengan terminal adalah jauh (>500 m). Hal ini terjadi karena tidak terlalu banyak pengunjung, yang biasa membutuhkan hanya supir atau kernet angkutan umum itupun tidak terlalu banyak. Lain halnya dengan beberapa responden pedagang kaki lima (47,6%) yang ingin mempunyai lokasi dekat dengan terminal karena mereka telah memiliki pelanggan di lokasi tersebut, terutama untuk PKL jenis makanan/minuman. Keadaan ini seperti pedagang kaki lima (PKL) yang berlokasi di lahan penampungan sementara milik PT. Multi sarana Plaza.

Tabel 4.60 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perumahan menurut pedagang kaki lima responden

Prioritas	Pilihan Jarak	Jumlah	Prosentase (%)
1	Jauh (>500 m)	43	48,8
2	Dekat (<100 m)	26	29,8
3	Sedang (100 – 500 m)	18	21,4
Total		87	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.63 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima Dengan Perumahan Menurut Pedagang Kaki Lima Responden

Berdasarkan tabel 4.60 dan gambar 4.63, menunjukkan bahwa jarak lokasi berjualan menurut sebagian besar responden pedagang kaki lima (48,8%) dengan perumahan adalah jauh (>500 m). Hal ini dikarenakan pada daerah perumahan tidak terlalu banyak pengunjung dan pembeli, jika ingin berjualan dekat dengan daerah perumahan harus keliling mencari pembeli. Lain halnya dengan beberapa responden pedagang kaki lima (29,8%) yang ingin mempunyai lokasi dekat dengan perumahan karena mereka telah memiliki pelanggan di lokasi tersebut, terutama untuk PKL jenis

sayuran/buah-buahan dan makanan/minuman. Keadaan ini seperti pedagang kaki lima (PKL) yang berlokasi di TPG II Randuagung.

- **Kedekatan lokasi usaha pedagang kaki lima dengan tempat tinggal**

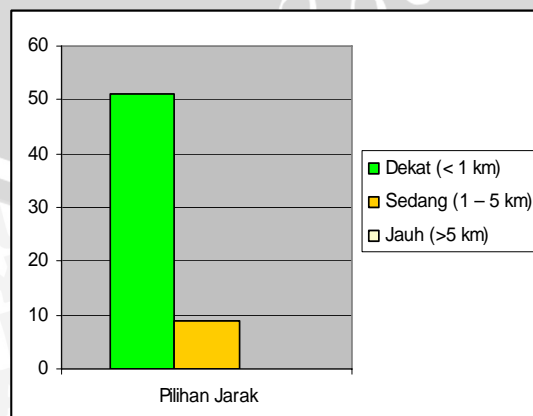
Menurut Turner, dalam Widodo (2000 : 98) membedakan preferensi pemilihan rumah tinggal berdasarkan tingkat penghasilan masyarakat. Masyarakat berpenghasilan rendah lebih memilih rumah tinggal yang dekat dengan tempat kerja, berbeda dengan golongan masyarakat berpenghasilan tinggi yang lebih mementingkan aspek kenyamanan dan ketersediaan fasilitas sosial sebagai prioritas utama dalam memilih lokasi tempat tinggal.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka PKL sebagai kelompok masyarakat yang dominan berpenghasilan rendah, tentunya akan berusaha memilih lokasi usaha sedekat mungkin dengan tempat tinggal mereka. Sehingga jarak lokasi berjualan sebisa mungkin dekat dengan tempat tinggal mereka. Sehingga jarak lokasi berjualan sebisa mungkin dekat dengan tempat tinggal mereka. Dari seluruh responden PKL (87 orang) terdapat 60 pedagang yang mempertimbangkan jarak dengan tempat tinggal mereka dalam menentukan lokasi jualan karena sangat mempengaruhi besar kecil modal yang dikeluarkan dan tenaga karena sebagian besar pedagang berjalan kaki (82,1%).

Tabel 4.61 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan tempat tinggal menurut pedagang kaki lima responden

Prioritas	Pilihan Jarak	Jumlah	Prosentase (%)
1	Dekat (< 1 km)	51	85 %
2	Sedang (1 – 5 km)	9	15 %
3	Jauh (>5 km)	0	0
Total		60	100 %

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.64 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Tempat Tinggal Menurut Pedagang Kaki Lima Responden

Berdasarkan prioritas aspek-aspek penentuan lokasi dalam faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor fisik menurut pedagang kaki lima di wilayah Kota Gresik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prioritas aspek penentuan lokasi berjualan pedagang kaki lima menurut pilihan PKL dapat dilihat pada tabel 4.62.

Tabel 4.62 Kesimpulan urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima pilihan pedagang kaki lima responden

Prioritas	Urutan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut PKL		
	Faktor Ekonomi	Faktor Sosial	Faktor Fisik
1.	Jenis Dagangan	Keamanan	Kedekatan dengan Pusat Keramaian Kota/Kegiatan Masyarakat
2.	Waktu Jual	Kebersihan	Kedekatan Lokasi Usaha dengan Tempat Tinggal PKL
3.	Biaya Angkutan	Kenyamanan	Kemudahan dalam Sarana Transportasi
4.		Ketertiban	

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

B. Identifikasi urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima menurut responden pemerintah

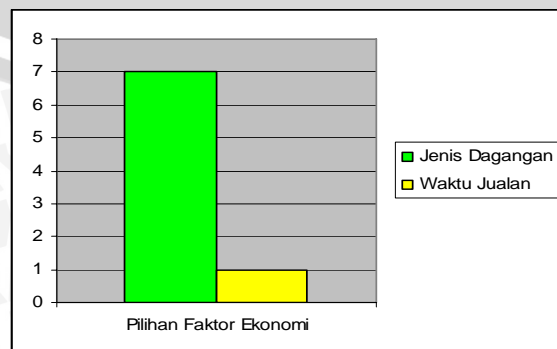
a) Identifikasi urutan prioritas aspek ekonomi dalam menentukan lokasi jualan pedagang kaki lima

Pemerintah dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima yang diperbolehkan melakukan aktivitasnya juga mempertimbangkan beberapa aspek ekonomi, antara lain jenis dagangan dan waktu jualan pedagang kaki lima. Berdasarkan survei primer tahun 2006, maka prioritas aspek-aspek ekonomi menurut pemerintah dapat dilihat pada tabel 4.63.

Tabel 4.63 Urutan prioritas aspek ekonomi menurut responden pemerintah kabupaten Gresik

Prioritas	Pilihan Faktor Ekonomi	Jumlah	Prosentase (%)
1	Jenis Dagangan	7	87
2	Waktu Jualan	1	13
Total		8	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.65 Urutan Prioritas Aspek Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik

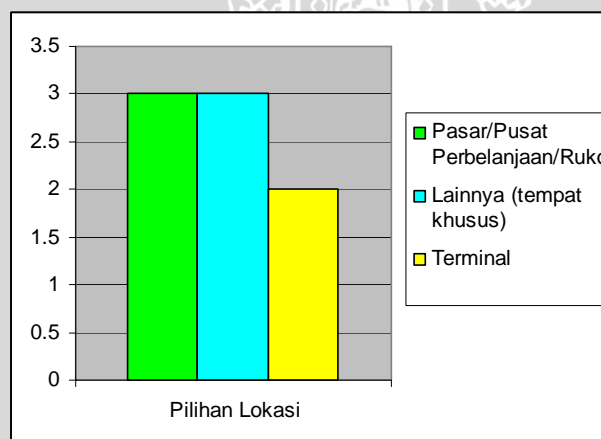
Berdasarkan tabel 4.63 dan gambar 4.65 dapat dijelaskan bahwa prioritas pertama sebagian besar responden pemerintah (87%) dalam menentukan lokasi jualan PKL adalah dengan menyesuaikan antara lokasi dan jenis dagangan, baik itu jenis dagangan makanan/minuman, non makanan/minuman maupun bahan mentah (sayuran, buah, daging, ikan dan sebagainya). Terdapat juga responden pemerintah (13%) yang mempertimbangkan waktu jualan sebagai prioritas utama dalam menentukan lokasi jualan PKL.

- **Jenis dagangan**

Tabel 4.64 Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha makanan menurut responden pemerintah kabupaten gresik

Prioritas	Pilihan Lokasi	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko atau Lainnya (tempat khusus)	3 dan 3	38 dan 38
2	Terminal	2	24
Total		8	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.66 Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Makanan/minuman Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel 4.64 dan gambar 4.66, menunjukkan bahwa menurut responden pemerintah (38%), prioritas utama lokasi berjualan dari pedagang kaki lima makanan/minuman di wilayah Kota Gresik lebih sesuai di sekitar pasar/pusat belanja/ruko atau di tempat khusus berupa lapangan yang tidak dekat dengan ruang publik karena dapat merugikan kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan kenyamanan pengguna jalan dan pengguna ruang publik (yang dimaksud dalam penelitian adalah pasar, alun-alun dan taman kota) serta kepentingan ketertiban, keamanan dan kebersihan dari ruang publik tersebut. Karena pada umumnya, PKL yang paling menimbulkan kekumuhan adalah PKL yang

menghasilkan sampah basah yaitu jenis makanan (Alisjahbana, 2003:126). Selain itu juga dapat memecah konsentrasi pusat keramaian sehingga terjadi pemerataan keramaian masyarakat. Sedangkan prioritas utama yang lain adalah pedagang kaki lima seharusnya berlokasi di terminal (24%).

Tabel 4.65 Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha non makanan/minuman menurut responden pemerintah kabupaten gresik

Prioritas	Pilihan Lokasi	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	8	100
Total		8	100

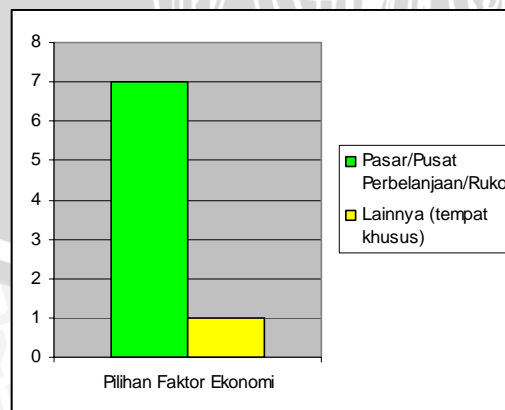
Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Berdasarkan tabel 4.65 dapat dijelaskan bahwa prioritas lokasi PKL jenis non makanan/minuman (tekstil/pakaian, vcd/kaset, mainan, kacamata, jam tangan, tas, seaptu/sandal, asesoris dan bunga) menurut responden pemerintah adalah dilokasikan di dekat pasar/pusat perbelanjaan/ruko. Sehingga terdapat kesesuaian lokasi dengan jenis dagangan, dan barang dagangan yang dipilih menjadi bervariasi. Pertimbangan ini juga didukung karena pedagang jenis non makanan/minuman dapat menjaga kebersihan lokasi, namun kelemahannya terdapat pada aspek ketertiban karena PKL dalam menempati lokasinya terlihat tidak teratur dan semrawut.

Tabel 4.66 Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha bahan mentah menurut responden pemerintah kabupaten gresik

Prioritas	Pilihan Lokasi	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	7	87
2	Lainnya (tempat khusus)	1	13
Total		8	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.67 Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Usaha Bahan Mentah Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik

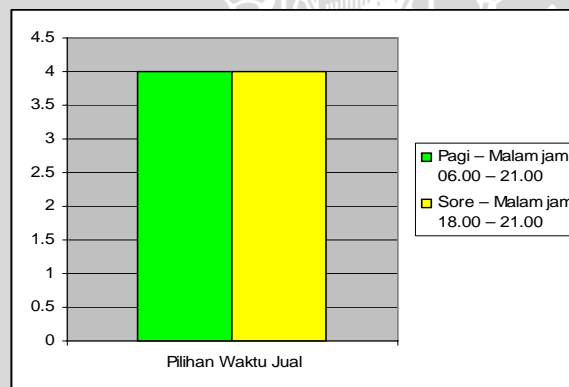
Berdasarkan tabel 4.66 dapat dijelaskan bahwa prioritas lokasi PKL jenis bahan mentah menurut responden pemerintah adalah dilokasikan di dekat pasar. Sehingga terdapat kesesuaian lokasi dengan jenis dagangan, dan barang dagangan yang dipilih dapat bervariasi, namun kelemahannya terdapat pada ketertiban dan kebersihan mereka dalam beraktivitas yang terlihat tidak teratur, semrawut dan kumuh karena menghasilkan banyak sampah basah. Disamping itu juga terjadi penghematan biaya dalam penyediaan lokasi tempat usaha sektor informal di sekitar pasar.

- **Waktu jualan**

Tabel 4.67 Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima makanan/minuman menurut responden pemerintah kabupaten Gresik

Prioritas	Pilihan Waktu Jualan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pagi – Malam jam 06.00 – 21.00	4	50
2	Sore – Malam jam 18.00 – 21.00	4	50
Total		8	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

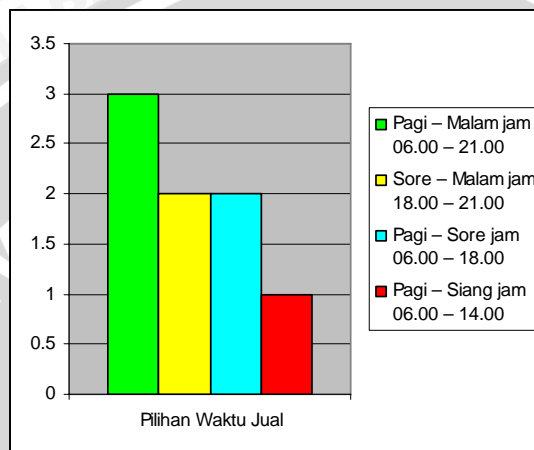
Gambar 4.68 Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Makanan/Minuman Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel 4.67 dan gambar 4.68, dapat dijelaskan bahwa prioritas waktu berjualan untuk PKL jenis makanan/minuman menurut sebagian besar responden pemerintah (50%) adalah pada waktu pagi – malam jam 06.00 – 21.00, karena kebutuhan makanan/minuman masyarakat yang insidental dan sesuai dengan kebutuhan/keinginan, maka jika sewaktu-waktu memerlukannya masyarakat dapat membeli pada PKL. Selain itu ada juga yang memprioritaskan waktu berjualan PKL pada waktu sore – malam hari (50%), karena pada pagi – sore aktivitas ruang publik diamankan dari aktivitas PKL, kemudian baru sore – malamnya penempatan PKL dapat diatur sesuai dengan ketertiban dan kebersihan sehingga tidak terkesan semrawut dan kumuh.

Tabel 4.68 Urutan prioritas pilihan waktu berjalan pedagang kaki lima non makanan/minuman menurut responden pemerintah kabupaten Gresik

Prioritas	Pilihan Waktu Jualan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pagi – Malam jam 06.00 – 21.00	3	37
2	Sore – Malam jam 18.00 – 21.00 atau Pagi – Sore jam 06.00 – 18.00	2 dan 2	25 dan 25
3	Pagi – Siang jam 06.00 – 14.00	1	13
Total		8	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

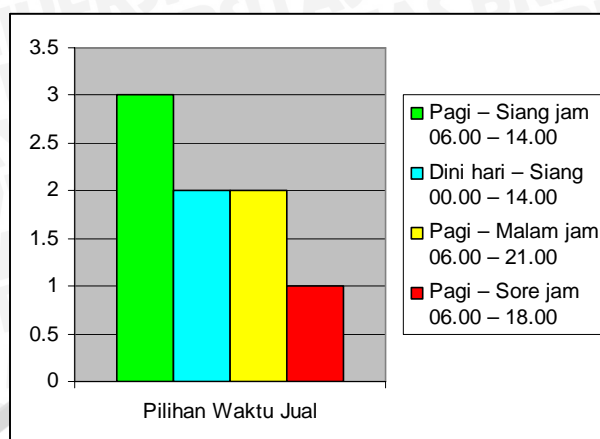
Gambar 4.69 Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Non Makanan/Minuman Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel 4.68 dan gambar 4.69, dapat dijelaskan bahwa prioritas waktu jualan PKL jenis non makanan/minuman (tekstil/pakaian, vcd/kaset, mainan, kacamata, jam tangan, tas, sepatu/sandal, asesoris dan bunga) menurut sebagian besar responden pemerintah (37%) adalah pagi – malam jam 06.00 – 21.00, karena pedagang jenis non makanan/minuman tidak terlalu menimbulkan kekumuhan dan sampah terutama sampah basah, selain itu waktu berjualan PKL dapat disesuaikan dengan jam buka tutupnya pasar/pusat perbelanjaan/ruko. Responden pemerintah yang lain (25%) memprioritaskan waktu jualan sore – malam hari atau pagi – sore hari, agar aktivitas dapat bergantian dan tidak mengganggu aktivitas formal (pasar, alun-alun dan taman kota).

Tabel 4.69 Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima bahan mentah menurut responden pemerintah kabupaten Gresik

Prioritas	Pilihan Waktu Jualan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pagi – Siang jam 06.00 – 14.00	3	37
2	Pagi – Malam jam 06.00 – 21.00 atau Dini hari – Siang 00.00 – 14.00	2 dan 2	25 dan 25
3	Pagi – Sore jam 06.00 – 18.00	1	13
Total		8	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.70 Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Bahan Mentah Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel 4.69 dan gambar 4.70 dapat dijelaskan bahwa prioritas waktu berjualan untuk PKL jenis bahan mentah menurut sebagian besar responden pemerintah (37%) adalah pada waktu pagi – siang jam 06.00 – 14.00, karena sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan belanja sebagian besar masyarakat (47%) sehari-hari.

b) Identifikasi urutan prioritas aspek sosial dalam menentukan lokasi jualan pedagang kaki lima

Ruang umum merupakan ruang milik pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Seperti trotoar, taman kota, ruang terbuka termasuk fasilitas atau sarana kota seperti halte, jembatan penyeberangan dan lain sebagainya. Ruang privat adalah ruang yang dimiliki oleh pemilik toko, perkantoran, dan lain-lain. Penggunaan ruang-ruang ini kemudian menjadi *conflict of interest* atau permasalahan-permasalahan yang timbul akibat keberadaan pedagang kaki lima mulai dari pemanfaatan ruang publik sampai kepada kemerosotan fisik kota.

Kenyataan bahwa selama ini keberadaan sektor informal tersebut kurang dikehendaki keberadaannya oleh pengambil kebijakan (pemerintah pusat/pemerintah daerah). Kehadiran mereka dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki ketertiban, kenyamanan, keamanan dan keindahan. Pola operasi mereka yang menempati lokasi usaha seandainya dan membuang sisa dagangan di sembarang tempat, di mata pemerintah sangat mengganggu bagi tujuan kebersihan dan keteraturan kota. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 tentang ijin penempatan dan pembinaan pedagang

kaki lima, pada Bab III yang membahas tentang pengaturan tempat usaha pada Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa:

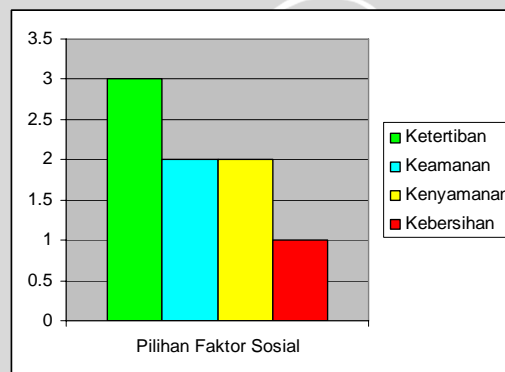
Dalam menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan serta alur lalu lintas jalan raya di Kabupaten Gresik, dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima tanpa ijin Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Prioritas aspek sosial menurut Pemerintah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 4.70.

Tabel 4.70 Urutan prioritas aspek sosial menurut responden pemerintah kabupaten gresik

Prioritas	Pilihan Faktor Sosial	Jumlah	Prosentase (%)
1	Ketertiban	3	37
2	Keamanan dan Kenyamanan	2 dan 2	25 dan 25
3	Kebersihan	1	13
Total		8	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.71 Urutan Prioritas Aspek Sosial Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel 4.70 dan gambar 4.71 dapat dijelaskan bahwa dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima, sebagian besar responden pemerintah (37%) memprioritaskan pertimbangan ketertiban. Hal ini karena persepsi dasar pemerintah (kota) terhadap kehadiran kegiatan sektor informal ialah menyelamatkan sarana dan fasilitas umum yang diduduki secara tidak sah, mencegah usaha yang mengganggu ketertiban umum, keindahan, kebersihan dan kelancaran lalu lintas. Dengan pertimbangan itulah banyak pemerintah pusat/daerah yang mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelaku sektor informal, yakni dengan jalan mengusir atau menyingkirkan usahanya untuk mendukung tindakan tegas tersebut, akhirnya setiap pemerintah daerah memiliki satuan khusus yang bertugas untuk merazia dan menertibkan pedagang-pedagang yang melanggar, yang dikenal dalam operasi “tibus”/ketertiban umum. Namun tindakan tegas pemerintah tersebut, tidak menjadikan

penghalang bagi PKL karena terbukti seluruh responden pedagang kembali menempati lokasi jika razia telah selesai.

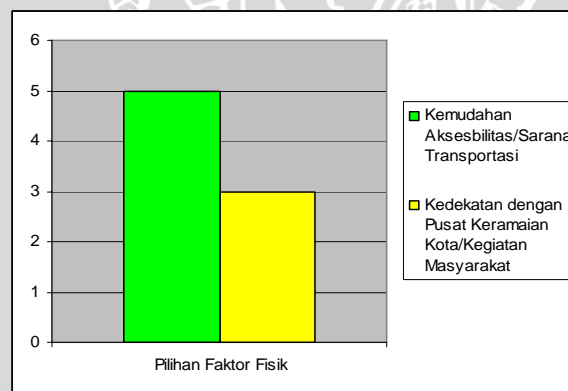
c) Identifikasi urutan prioritas aspek fisik dalam menentukan lokasi jualan pedagang kaki lima

Pemerintah dalam menentukan lokasi jualan juga harus mempertimbangkan beberapa aspek fisik, antara lain yaitu kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi, kedekatan dengan pusat keramaian kota/kegiatan masyarakat dan kedekatan lokasi jualan dengan tempat tinggal PKL. Berdasarkan survei primer tahun 2006, maka prioritas aspek-aspek dalam faktor fisik menurut pemerintah dapat dilihat pada tabel 4.71.

Tabel 4.71 Urutan prioritas aspek fisik menurut responden pemerintah kabupaten Gresik

Prioritas	Pilihan Faktor Fisik	Jumlah	Prosentase (%)
1	Kemudahan Aksesibilitas/Sarana Transportasi	5	62
2	Kedekatan dengan Pusat Keramaian Kota/Kegiatan Masyarakat	3	38
Total		8	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.72 Urutan Prioritas Aspek Fisik Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel 4.71 dan gambar 4.72 menunjukkan bahwa pertimbangan aspek fisik yang diprioritaskan dalam menentukan lokasi jualan PKL menurut sebagian besar responden pemerintah (62%) adalah aspek kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi menuju lokasi jualan. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian perkotaan umumnya merupakan lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku kegiatan. Sehingga aksesibilitas dalam hal ini kemudahan sarana angkutan umum sangat diperlukan untuk kemudahan pedagang dan pengunjung dalam menjangkau lokasi. Terdapat juga responden pemerintah

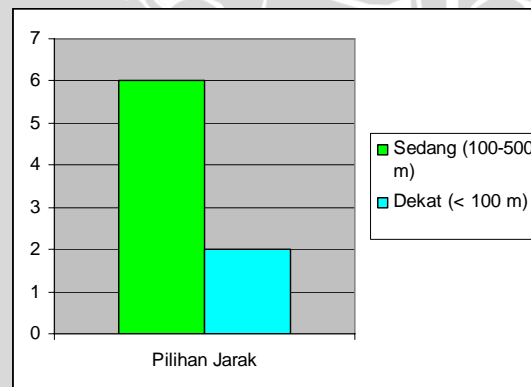
(38%) yang mengutamakan kedekatan dengan pusat keramaian kota/pusat kegiatan masyarakat karena terjadi konsentrasi masyarakat, sehingga berpotensi bagi PKL untuk melakukan aktivitas berjualan.

Kebutuhan pedagang kaki lima akan lokasi berjualan yang strategis adalah hal yang logis, karena dengan kemampuan dan ketrampilan yang terbatas pedagang kaki lima (PKL) cenderung mencari lokasi yang terdapat keramaian masyarakat demi kelancaran usaha dagangnya sehingga mendapatkan penghasilan yang memuaskan. Oleh karena itu pedagang kaki lima memilih lokasi seperti di dekat pasar/pusat perbelanjaan/pertokoan, di dekat perkantoran/sekolah, di dekat terminal dan ada juga yang memilih di daerah perumahan. Sehingga para penentu kebijakan perlu memperhatikan faktor lokasi aktivitas PKL. Pilihan lokasi yang tidak tepat, akan membuyarkan rencana yang digariskan (Alisjahbana, 2003:149). Prioritas jarak lokasi usaha PKL dengan pasar/pusat perbelanjaan/pertokoan, perkantoran/sekolah, terminal dan perumahan dapat dilihat pada tabel 4.72 – tabel 4.75.

Tabel 4. 72 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan pasar/pusat perbelanjaan menurut responden pemerintah kabupaten gresik

Prioritas	Pilihan Jarak	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sedang (100-500 m)	6	75
2	Dekat (< 100 m)	2	25
Total		8	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.73 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Pasar/Pusat Perbelanjaan Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik

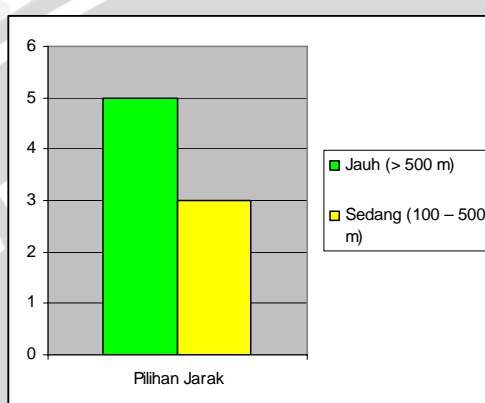
Berdasarkan tabel 4.72 dan gambar 4.73, menunjukkan bahwa jarak lokasi berjualan menurut sebagian besar responden pemerintah (75%) dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko adalah sedang (100–500 m), sehingga mengurangi resiko kesemrawutan dan kekumuhan di sekitar pasar/pusat perbelanjaan/pertokoan. Keadaan ini seperti yang terlihat pada pedagang kaki lima (PKL) yang berlokasi di Pasar Baru Gresik, di Pasar Kota Gresik dan di lahan

penampungan sementara milik PT. Multi Sarana Plaza, dimana lokasi tersebut merupakan pusat perdagangan dengan skala Kabupaten.

Tabel 4.73 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perkantoran/sekolah menurut responden pemerintah kabupaten Gresik

Prioritas	Pilihan Jarak	Jumlah	Prosentase (%)
1	Jauh (> 500 m)	5	62
2	Sedang (100 – 500 m)	3	38
Total		8	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

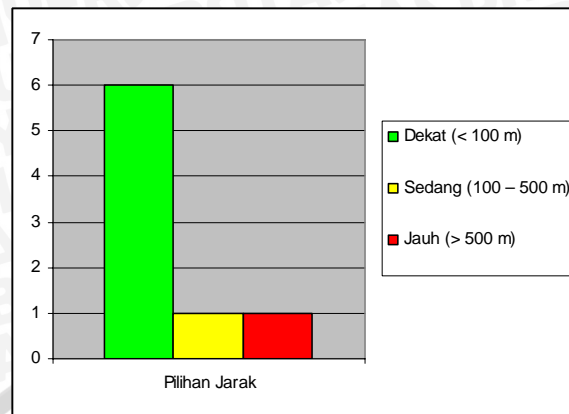
Gambar 4.74 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Perkantoran/Sekolah Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel 4.73 dan gambar 4.74, menunjukkan bahwa jarak lokasi jualan dengan perkantoran/sekolah menurut sebagian besar responden pemerintah (62%) adalah jauh (>500 m). Hal ini karena dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan kawasan pendidikan. Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di depan perkantoran dan sekolah dapat mengakibatkan menurunnya citra dan estetika kawasan pendidikan karena kehadirannya yang tidak selaras dan menyebabkan kondisi lingkungan menjadi semrawut dan kumuh. Terdapat juga responden pemerintah (38%) yang mengemukakan bahwa jarak lokasi PKL dengan perkantoran/sekolah adalah sedang yaitu 100 – 500 m, sehingga lokasi masih bisa dijangkau baik dengan berjalan maupun berkendara dan tidak mengganggu citra dan estetika kawasan pendidikan.

Tabel 4.74 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan terminal menurut responden pemerintah kabupaten Gresik

Prioritas	Pilihan Jarak	Jumlah	Prosentase (%)
1	Dekat (< 100 m)	6	75
2	Sedang (100 – 500 m) atau Jauh (> 500 m)	1 dan 1	12,5 dan 12,5
Total		8	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

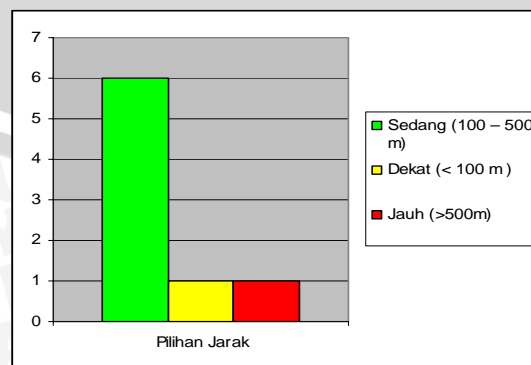
Gambar 4.75 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Terminal Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel 4.74 dan gambar 4.75, menunjukkan bahwa jarak lokasi berjualan menurut sebagian besar responden pemerintah (75%) dengan terminal adalah dekat (<100 m). Hal ini dikarenakan banyak pelaku kegiatan yang membutuhkan kehadiran PKL, seperti penumpang, supir, kernet, karyawan yang bertugas di terminal dan lain-lain sehingga mereka tidak kesulitan mencari segala macam kebutuhan terutama makanan/minuman dengan jenis yang bervariasi. Lain halnya dengan beberapa pemerintah (masing-masing 12,5%) yang mengemukakan bahwa jarak lokasi jualan PKL dengan terminal adalah sedang dan jauh, karena dapat menyebabkan lingkungan terminal bertambah kumuh.

Tabel 4.75 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perumahan penduduk menurut responden pemerintah kabupaten Gresik

Prioritas	Pilihan Jarak	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sedang (100 – 500 m)	6	75
2	Dekat (< 100 m) atau Jauh (>500m)	1 dan 1	12,5 dan 12,5
Total		8	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.76 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Perumahan Penduduk Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel 4.75 dan gambar 4.76, menunjukkan bahwa jarak lokasi berjualan menurut sebagian besar pemerintah (75%) dengan perumahan adalah sedang (100-500 m). Pemerintah memperbolehkan pedagang kaki lima berjualan pada daerah perumahan dengan syarat telah mendapat perijinan dari pihak pemerintah/*developer* dan menempati lokasi yang telah disediakan. Lain halnya dengan beberapa pemerintah (masing-masing 12,5%) yang ingin mempunyai lokasi dekat dan jauh dengan perumahan, sehingga terdapat kemudahan bagi masyarakat perumahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama jenis dagangan bahan mentah (sayuran, buah-buahan, ikan, dll) dan maknan/minuman. Keadaan ini seperti pedagang kaki lima (PKL) yang berlokasi di TPG II Randuagung yang berada di depan Gerbang Perumahan Gresik Kota Baru (GKB). Sebagian lagi ada yang menyatakan antara pedagang kaki lima dengan perumahan harus dijauhkan, karena kebutuhan sehari-hari telah disediakan oleh pihak pengembang dengan memberikan fasilitas toko, supermarket, dll, sehingga kondisi lingkungan menjadi teratur, tidak terganggu oleh pedagang kaki lima yang terkesan memberikan nuansa kekumuhan.

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai aspek-aspek yang dipertimbangkan pemerintah dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima pada faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor fisik di atas, maka dapat diambil kesimpulan aspek-aspek yang diprioritaskan dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima. Kesimpulan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima menurut pilihan pemerintah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel 4.76.

Tabel 4.76 Kesimpulan urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima pilihan responden pemerintah kabupaten gresik

Prioritas	Urutan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Pemerintah		
	Faktor Ekonomi	Faktor Sosial	Faktor Fisik
1	Jenis Dagangan	Ketertiban	Kemudahan Aksesibilitas/Sarana Transportasi
2	Waktu Jual	Keamanan dan Kenyamanan	Kedekatan dengan Pusat Keramaian Kota/Kegiatan Masyarakat
3		Kebersihan	

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

C. Identifikasi urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima menurut responden masyarakat

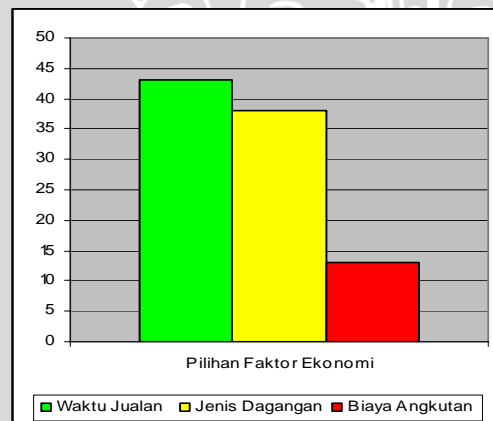
a) Identifikasi prioritas aspek ekonomi dalam menentukan lokasi jualan pedagang kaki lima

Masyarakat sebagai sasaran pedagang kaki lima selaku pengunjung maupun konsumen, memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima (PKL) sesuai dengan kebutuhan dan perilakunya sehari-hari. Sesuai dengan pendapat Mc Gee dan Yeung (1977 : 76), bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Aspek-aspek yang dipertimbangkan sama dengan pertimbangan pedagang kaki lima (PKL), yang tergabung dalam faktor ekonomi, yaitu jenis dagangan, biaya angkutan, dan waktu jualan pedagang kaki lima (PKL). Berdasarkan survei primer tahun 2006, maka prioritas aspek-aspek dalam faktor ekonomi menurut masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.77.

Tabel 4.77 Urutan prioritas aspek ekonomi menurut masyarakat responden

Prioritas	Pilihan Faktor Ekonomi	Jumlah	Prosentase (%)
1	Waktu Jualan	43	43
2	Jenis Dagangan	38	38
3	Biaya Angkutan	19	13
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.77 Prioritas Aspek Ekonomi Menurut Masyarakat Responden

Berdasarkan tabel 4.77 dan gambar 4.77 dapat dijelaskan bahwa prioritas pertama sebagian besar responden masyarakat (43%) dalam menentukan lokasi jualannya adalah dengan menyesuaikan antara lokasi dan waktu jualannya. Sesuai dengan pendapat Mc Gee dan Yeung (1977 : 76), bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini dikarenakan aktivitas pedagang kaki lima (PKL)

yang masih ”mencari pembeli” bukan ”dicari pembeli”, akibat dari persaingan yang tinggi antar individu dalam melaksanakan aktivitas dagang. Sehingga dengan ketrampilan dan kualitas yang terbatas, mereka berusaha untuk menyesuaikan dengan permintaan dan kehidupan masyarakat sehari-harinya.

- **Jenis dagangan**

Golongan pengguna jasa PKL yang dilayani oleh aktivitas jasa PKL pada umumnya terdiri dari golongan pendapatan menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena harga barang dagangan yang ditawarkan oleh pedagang sektor informal relatif lebih rendah sehingga terjangkau bagi golongan pendapatan rendah sekalipun.

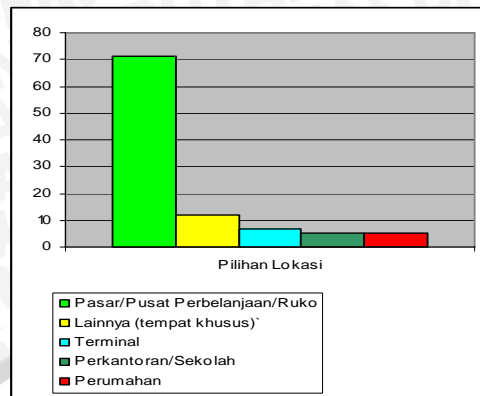
Sedangkan bagi golongan berpendapatan tinggi ada kecenderungan untuk tidak mengunjungi lokasi aktivitas PKL, terutama untuk jenis barang dagangan bukan makanan. Pertimbangannya adalah segi kualitas barang yang biasanya lebih rendah, adanya kemungkinan penipuan dalam hal kualitas barang yang biasanya lebih rendah, adanya kemungkinan penipuan dalam hal kualitas barang, dan sebagainya. Sehingga golongan ini lebih memilih untuk berbelanja di toko atau supermarket.

Selain alasan tersebut, dari sisi psikologis ada kecenderungan gaya hidup masyarakat kota yang selalu menjaga gengsi, sehingga mereka lebih percaya diri apabila berbelanja di tempat-tempat yang dapat mewakili status mereka. Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa masyarakat berpendapatan menengah ke atas mendatangi lokasi aktivitas perdagangan sektor informal, tetapi ini terjadi sekali waktu atau bersifat insidental. Ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat khususnya para konsumen, dikatakan oleh Nelson (1958 : 40) ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam merencanakan lokasi perdagangan eceran, antara lain adalah berada pada pusat perdagangan. Prioritas pilihan lokasi PKL usaha makanan/minuman menurut masyarakat responden dapat dilihat pada tabel 4.78.

Tabel 4.78 Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha makanan/minuman menurut masyarakat responden

Prioritas	Pilihan Lokasi	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	71	71
2	Lainnya (tempat khusus)	12	12
3	Terminal	7	7
4	Perrkantoran/Sekolah dan Perumahan	5 dan 5	10
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

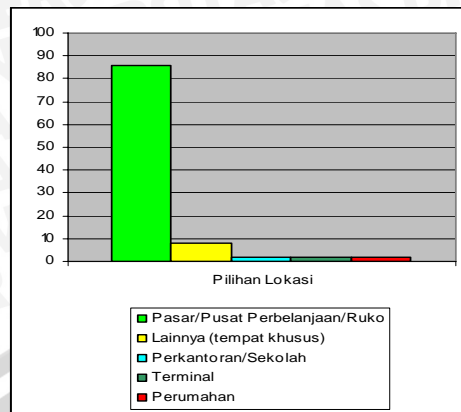
Gambar 4.78 Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Usaha Makanan Menurut Masyarakat Responden

Berdasarkan tabel 4.78 dan gambar 4.78, menunjukkan bahwa menurut prioritas masyarakat responden (71%) prioritas utama lokasi berjualan dari pedagang kaki lima makanan/minuman di wilayah Kota Gresik lebih sesuai di daerah sekitar pasar/pusat belanja/ruko. Sedangkan prioritas lain dari masyarakat responden (12%) adalah pedagang kaki lima seharusnya ditempatkan di lokasi khusus, tidak di daerah pinggir jalan agar tertata dan tidak terkesan kumuh, sehingga pembeli dapat merasakan kenyamanan dalam bertransaksi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nelson (1958 : 40), bahwa ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat khususnya konsumen, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam merencanakan lokasi perdagangan eceran, antara lain kenyamanan tempat jualan. Kehadiran PKL makanan/minuman di dekat pasar/pusat perbelanjaan/ruko menjadikan masyarakat dapat melakukan penghematan, karena besarnya selisih harga makanan (untuk makan pagi, siang, sore) antara harga di restoran/warung dengan harga makanan PKL.

Tabel 4.79 Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha non makanan/minuman menurut masyarakat responden

Prioritas	Pilihan Lokasi	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	86	86
2	Lainnya (tempat khusus)	8	8
3	Perkantoran/Sekolah	2	6
	Terminal	2	
	Perumahan	2	
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

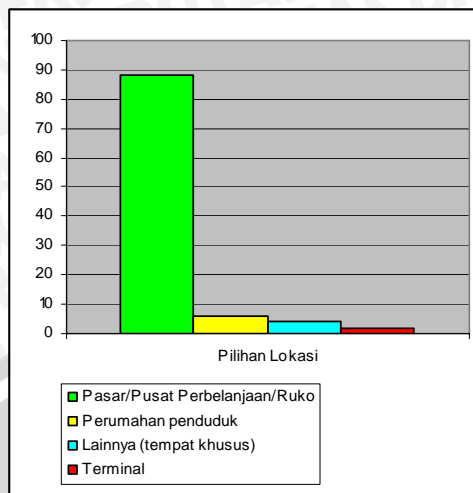
Gambar 4.79 Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Usaha Non Makanan/Minuman Menurut Masyarakat Responden

Berdasarkan tabel 4.79 dan gambar 4.79 dapat dijelaskan bahwa prioritas lokasi PKL jenis non makanan/minuman (tekstil/pakaian, vcd/kaset, mainan, kacamata, jam tangan, tas, sepatu/sandal, aksesoris dan bunga) menurut sebagian besar masyarakat responden (86%) adalah ditempatkan di dekat pasar/pusat perbelanjaan/ruko. Sehingga terdapat kemudahan dalam memilih variasi barang dagangan dan membandingkan harga dengan barang yang berada di pusat perbelanjaan. Selain itu masyarakat dapat melakukan penghematan, karena besarnya selisih harga berbagai barang konsumsi antara harga di toko-toko resmi dengan harga-harga di PKL yang hanya mengambil *margin/* keuntungan kecil. Selain itu karena lokasi PKL yang dekat dengan kawasan perdagangan maka masyarakat juga dapat melakukan penghematan dalam hal waktu dan biaya apabila barang-barang yang dibutuhkan dan dicari di toko-toko resmi/formal tidak disediakan.

Tabel 4.80 Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha bahan mentah menurut masyarakat responden

Prioritas	Pilihan Lokasi	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	88	88
2	Perumahan penduduk	6	6
3	Lainnya (tempat khusus)	4	4
4	Terminal	2	2
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.80 Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Usaha Bahan Mentah Menurut Masyarakat Responden

Berdasarkan tabel 4.80 dan gambar 4.80 dapat dijelaskan bahwa prioritas lokasi PKL jenis bahan mentah menurut sebagian besar masyarakat responden (88%) adalah dilokasikan di dekat pasar. Sehingga terdapat kesesuaian lokasi dengan jenis dagangan, dan barang dagangan yang dipilih dapat bervariasi, namun kelemahannya dalam hal kebersihan, karena pedagang bahan mentah sering menghasilkan sampah terutama sampah basah.

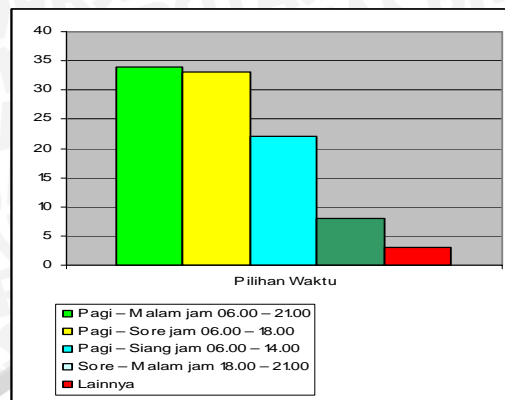
- **Waktu jualan**

Menurut Mc Gee dan Yeung (1977 : 76), pola aktivitas pedagang kaki lima (PKL) menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan pedagang kaki lima (PKL) didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Prioritas waktu berdagang pilihan pedagang kaki lima dalam kesehariannya dapat dilihat pada tabel 4.81.

Tabel 4.81 Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima makanan/minuman menurut masyarakat responden

Prioritas	Pilihan Waktu Jualan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pagi – Malam jam 06.00 – 21.00	34	34
2	Pagi – Sore jam 06.00 – 18.00	33	33
3	Pagi – Siang jam 06.00 – 14.00	22	22
4	Sore – Malam jam 18.00 – 21.00	8	8
5	Lainnya	3	3
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

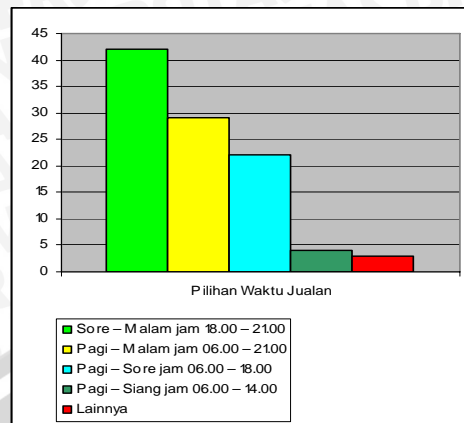
Gambar 4.81 Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Makanan/Minuman Menurut Masyarakat Responden

Berdasarkan tabel 4.81 dan gambar 4.81 menunjukkan bahwa sesuai dengan kebiasaan sehari-harinya maka persepsi sebagian besar masyarakat (34%) mengutamakan waktu jualan PKL pagi sampai malam dari sekitar jam 06.00 – 21.00 WIB dan pagi – sore hari jam 06.00 – 18.00 sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan sewaktu-waktu. Hal ini dapat diketahui dari frekwensi belanja dan berkunjung masyarakat yang sebagian besar (61%) menyesuaikan dengan kebutuhan dan ada juga yang setiap hari (23%) sehingga membuat masyarakat berharap PKL dapat terus berjualan. Sebagian besar (22%), masyarakat memilih waktu jualan PKL pagi – siang hari jam 06.00 – 14.00 sesuai dengan waktu kesibukan aktivitas mereka yang rata-rata bekerja sebagai buruh/karyawan (33%) dan swasta (22%), wirausahawan (16%) dan mahasiswa/pelajar (11%).

Tabel 4.82 Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima non makanan/minuman menurut masyarakat responden

Prioritas	Pilihan Waktu Jualan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sore – Malam jam 18.00 – 21.00	42	42
2	Pagi – Malam jam 06.00 – 21.00	29	29
3	Pagi – Sore jam 06.00 – 18.00	22	22
4	Pagi – Siang jam 06.00 – 14.00	4	4
5	Lainnya	3	3
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

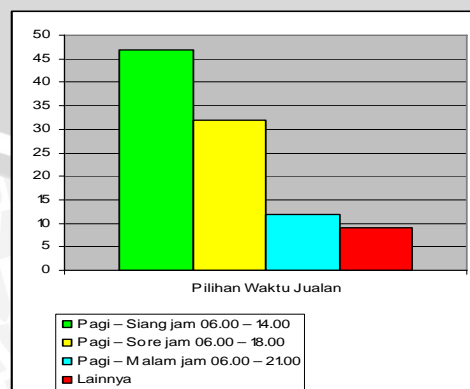
Gambar 4.82 Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Non Makanan/Minuman Menurut Masyarakat Responden

Berdasarkan tabel 4.82 dan gambar 4.82 dapat dijelaskan bahwa prioritas waktu berjualan untuk PKL jenis non makanan/minuman (tekstil/pakaian, vcd/kaset, mainan, kacamata, jam tangan, tas, seaptu/sandal, asesoris dan bunga) menurut sebagian besar responden masyarakat (42%) adalah pada waktu pagi - malam jam 06.00 - 21.00, alasan sama dengan pedagang makanan/minuman di atas yaitu agar sewaktu-waktu dapat menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan frekwensi dan motivasi belanja sehari-harinya.

Tabel 4.83 Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima bahan mentah menurut masyarakat responden

Prioritas	Pilihan Waktu Jualan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pagi - Siang jam 06.00 - 14.00	47	47
2	Pagi - Sore jam 06.00 - 18.00	32	32
3	Pagi - Malam jam 06.00 - 21.00	12	12
4	Lainnya	9	9
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.83 Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Bahan Mentah Menurut Masyarakat Responden

Berdasarkan tabel 4.83 dan gambar 4.83 dapat dijelaskan bahwa prioritas waktu berjualan untuk PKL jenis bahan mentah menurut sebagian besar responden masyarakat (47%) adalah pada waktu pagi – siang jam 06.00 – 14.00 dan pada waktu pagi – sore hari (32%), sehingga waktu kehadiran PKL bahan mentah sesuai dengan kebutuhan belanja bahan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Disamping dapat memberikan kemudahan dalam variasi jenis dagangan, dapat juga menjadi pertimbangan selisih harga karena PKL biasanya mengambil keuntungan kecil.

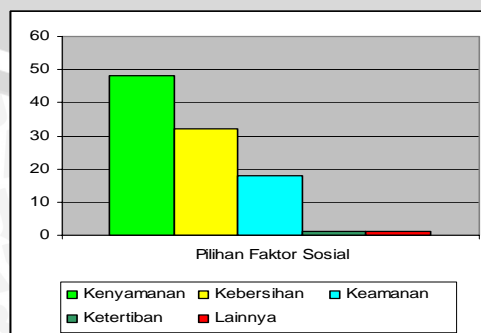
b) Identifikasi prioritas aspek sosial dalam menentukan lokasi jualan pedagang kaki lima

Masyarakat dalam menentukan lokasi jualan juga harus mempertimbangkan beberapa aspek sosial, antara lain yaitu keamanan, kebersihan, kenyamanan dan ketertiban lokasi jualan. Sesuai yang dikatakan oleh Nelson (1958 : 40) bahwa ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat khususnya para konsumen, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam merencanakan lokasi perdagangan eceran, antara lain adalah kenyamanan tempat penjualan. Aspek sosial ini juga mengacu pada Perda Kabupaten Gresik No. 03 Tahun 2003 pada Bab III yang membahas tentang pengaturan tempat usaha. Berdasarkan survei primer tahun 2006, maka prioritas pertimbangan aspek-aspek dalam faktor sosial dalam menentukan lokasi jualan menurut masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.84.

Tabel 4.84 Urutan prioritas aspek sosial menurut masyarakat responden

Prioritas	Pilihan Faktor Sosial	Jumlah	Prosentase (%)
1	Kenyamanan	48	48
2	Kebersihan	32	32
3	Keamanan	18	18
4	Ketertiban	1	1
	Lainnya (Keindahan)	1	1
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.84 Urutan Prioritas Aspek Sosial Menurut Masyarakat Responden

Berdasarkan tabel 4.84 dan gambar 4.84 dapat dijelaskan bahwa dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima, sebagian besar responden masyarakat (48%) memprioritaskan kenyamanan dan kebersihan (32%) baik dilihat dari tempat berjualan maupun jenis dagangan PKL, sehingga disamping kelebihan berupa variasi makanan, harga terjangkau, masyarakat yang sebagian besar buruh/karyawan (33%) dan swasta (24%) dengan tingkat pendidikan SMU (52%), SMP (21%), dan Sarjana 19%) ternyata tetap menjaga *prestise* dengan melihat kenyamanan dan kebersihan dari pedagang kaki lima secara keseluruhan.

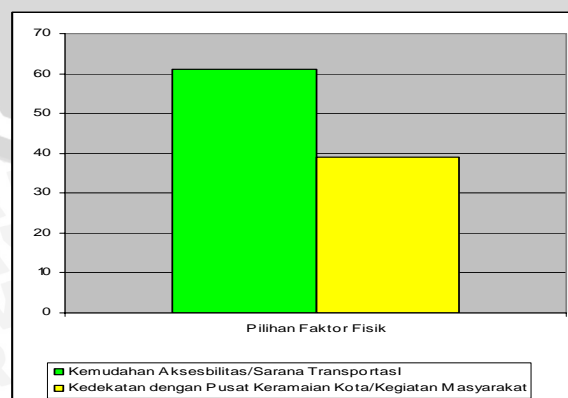
c) Identifikasi prioritas aspek fisik dalam menentukan lokasi jualan pedagang kaki lima

Masyarakat dalam menentukan lokasi jualan juga mempertimbangkan beberapa aspek yang tergabung dalam faktor fisik, antara lain yaitu kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi dan kedekatan dengan pusat keramaian kota/kegiatan masyarakat. Ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat khususnya para konsumen, dikatakan oleh Nelson (1958 : 40, dalam Purnama, 2003:60) ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam merencanakan lokasi perdagangan eceran, antara lain adalah kemudahan aksesibilitas (sarana transportasi). Berdasarkan survei primer tahun 2006, maka prioritas aspek-aspek dalam faktor fisik menurut pemerintah dapat dilihat pada tabel 4.85.

Tabel 4.85 Urutan prioritas aspek fisik menurut masyarakat responden

Prioritas	Pilihan Faktor Fisik	Jumlah	Prosentase (%)
1	Kemudahan Aksesibilitas/Sarana Transportasi	61	61
2	Kedekatan Lokasi PKL dengan Pusat Keramaian Kota/Kegiatan Masyarakat	39	39
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.85 Urutan Prioritas Aspek Fisik Menurut Pemerintah Kabupaten Gresik

Berdasarkan tabel 4.85 dan gambar 4.85 menunjukkan bahwa pertimbangan aspek dalam faktor fisik yang diprioritaskan dalam menentukan lokasi jualan PKL menurut sebagian besar responden masyarakat (61%) adalah aspek kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi menuju lokasi jualan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Nelson (1958, dalam Purnama, 2003:60) bahwa daya tarik pada suatu fasilitas perdagangan bagi konsumen (pembeli) adalah adanya faktor kemudahan yaitu baik transportasi umum (biaya, waktu dan frekwensi) maupun transportasi pribadi (parkir, aksesibilitas, kondisi lalu lintas, jalan parkir). Oleh karena itu lokasi PKL harus mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku kegiatan. Sehingga aksesibilitas dalam hal ini kemudahan sarana angkutan umum sangat diperlukan untuk kemudahan pedagang dan masyarakat sebagai pengunjung dalam menjangkau lokasi. Terdapat juga masyarakat (39%) yang mengutamakan kedekatan dengan pusat keramaian kota/pusat kegiatan masyarakat karena terjadi konsentrasi masyarakat.

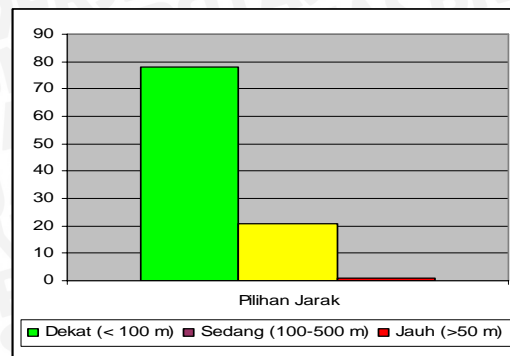
- **Kedekatan lokasi pedagang kaki lima dengan pusat keramaian kota/kegiatan masyarakat**

Kecenderungan PKL dalam memasarkan barang dagangan dengan berusaha untuk mendekati pembeli, menjadikan PKL mencari lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat keramaian kota/pusat kegiatan masyarakat seperti pasar/pusat perbelanjaan/pertokoan, perkantoran/sekolah, terminal, maupun perumahan penduduk. Aspek kedekatan tersebut dapat diketahui dari jarak lokasi usaha PKL dengan pusat keramaian kota/kegiatan masyarakat. Prioritas jarak lokasi usaha PKL dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko menurut masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.86.

Tabel 4.86 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan pasar/pusat perbelanjaan menurut masyarakat responden

Prioritas	Pilihan Jarak	Jumlah	Prosentase (%)
1	Dekat (< 100 m)	78	78
2	Sedang (100-500 m)	21	21
3	Jauh (>50 m)	1	1
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

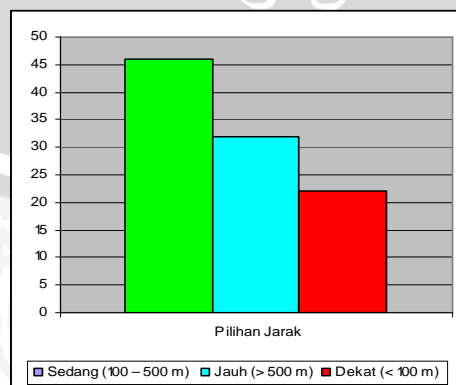
Gambar 4.86 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Pasar/Pusat Perbelanjaan Menurut Masyarakat Responden

Berdasarkan tabel 4.86 dan gambar 4.86, menunjukkan bahwa jarak lokasi berjualan menurut sebagian besar responden masyarakat (78%) dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko adalah dekat (<100), hal ini menguntungkan masyarakat karena kehadiran PKL di sekitar pusat perbelanjaan dapat menimbulkan variasi terutama jenis dan harga barang dagangan. Masyarakat juga dapat melakukan penghematan biaya transportasi, jika barang dagangan yang dibutuhkan tidak tersedia di toko-toko resmi. Kondisi ini terlihat pada pedagang kaki lima (PKL) yang berlokasi di Pasar Baru Gresik, di Pasar Kota Gresik dan di lahan penampungan sementara milik PT. Multi Sarana Plaza, dimana lokasi tersebut merupakan pusat perdagangan skala Kabupaten.

Tabel 4.87 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perkantoran/sekolah menurut masyarakat responden

Prioritas	Pilihan Jarak	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sedang (100 – 500 m)	46	46
2	Jauh (> 500 m)	32	32
3	Dekat (< 100 m)	22	22
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

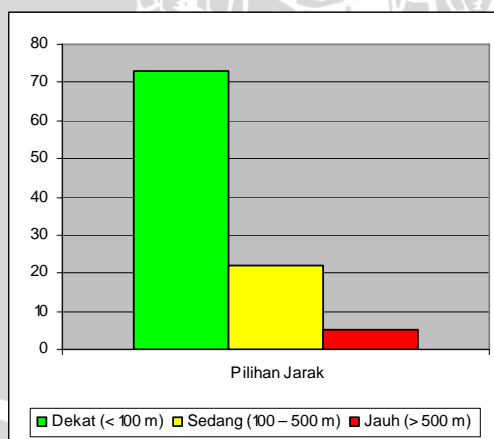
Gambar 4.87 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Perkantoran/Sekolah Menurut Masyarakat Responden

Berdasarkan tabel 4.87 dan gambar 4.87, menunjukkan bahwa jarak lokasi berjualan menurut sebagian besar responden masyarakat (46%) dengan perkantoran/sekolah adalah sedang (100 – 500 m) atau jauh yaitu (>500 m). Hal ini dikarenakan kehadiran PKL dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan kawasan pendidikan. Kehadiran PKL di sekitar kawasan pendidikan juga dapat merusak citra dan estetika kawasan pendidikan karena terkesan semrawut dan kumuh. Namun tidak dapat dipungkiri, terdapat juga pihak yang membutuhkan kehadiran PKL dalam kesehariannya yaitu para pegawai, karyawan, dan pelajar yang melakukan aktivitas di perkantoran/sekolah, karena selain tertarik dengan banyaknya variasi jenis barang dagangan yang diperjualbelikan dan harga yang relatif terjangkau juga terjadi penghematan biaya dan waktu untuk mencari barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga dengan jarak yang sedang (100-500 m) para pegawai, karyawan maupun pelajar masih dapat menjangkau lokasi PKL.

Tabel 4.88 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan terminal menurut masyarakat responden

Prioritas	Pilihan Jarak	Jumlah	Prosentase (%)
1	Dekat (< 100 m)	73	73
2	Sedang (100 – 500 m)	22	22
3	Jauh (> 500 m)	5	5
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.88 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Terminal Menurut Masyarakat Responden

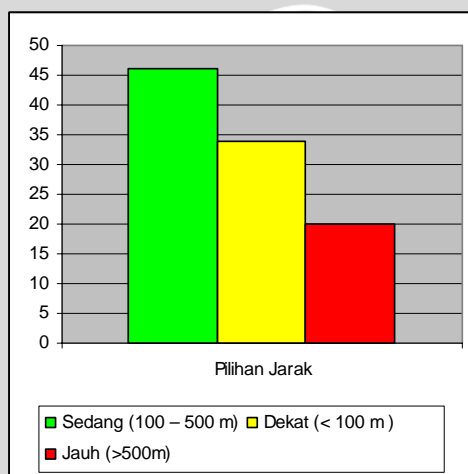
Berdasarkan tabel 4.88 dan gambar 4.88, menunjukkan bahwa jarak lokasi berjualan menurut sebagian besar responden masyarakat (73%) dengan terminal adalah dekat (<100 m). Hal ini dikarenakan banyak masyarakat di sekitar terminal

yang membutuhkan kehadiran PKL, seperti penumpang, supir, kernet, karyawan dan lain-lain yang bertugas atau berada di sekitar terminal sehingga mereka tidak kesulitan mencari segala macam kebutuhan terutama makanan/minuman dengan jenis yang bervariasi dan harga yang relatif murah. Terdapat juga beberapa responden masyarakat (22%) yang mengemukakan bahwa jarak lokasi jualan PKL dengan terminal adalah sedang, sehingga lingkungan terminal tetap terjaga kebersihan dan kenyamanannya.

Tabel 4.89 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perumahan penduduk menurut masyarakat responden

Prioritas	Pilihan Jarak	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sedang (100 – 500 m)	46	46
2	Dekat (< 100 m)	34	34
3	Jauh (>500m)	20	20
Total		100	100

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006



Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

Gambar 4.89 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Perumahan Penduduk Menurut Masyarakat Responden

Berdasarkan tabel 4.89 dan gambar 4.89, menunjukkan bahwa jarak lokasi berjualan menurut sebagian besar masyarakat (46%) dengan perumahan adalah sedang (100-500 m), sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat terutama penghuni perumahan selain dapat menjangkau lokasi PKL, namun juga tidak mengganggu kebersihan dan kenyamanan lingkungan perumahan. Lain halnya dengan beberapa masyarakat (34%) yang ingin mempunyai lokasi dekat (<100 m) dari perumahan, sehingga mempermudah masyarakat perumahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama jenis dagangan bahan mentah (sayuran, buah-buahan, ikan, dll) dan makanan/minuman. Keadaan ini seperti pedagang kaki lima (PKL) yang berlokasi di TPG II Randuagung yang berada di depan gerbang perumahan Gresik

Kota Baru (GKB). Sebagian lagi (20%) ada yang menyatakan antara pedagang kaki lima dengan perumahan harus dijauhkan, karena kebutuhan sehari-hari telah disediakan oleh pihak pengembang dengan memberikan fasilitas toko, supermarket, dll bahkan banyak rumah yang sekaligus berfungsi sebagai toko/warung.

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai aspek-aspek yang dipertimbangkan pemerintah dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima pada faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor fisik di atas, maka dapat diambil kesimpulan aspek-aspek yang diprioritaskan dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima. Kesimpulan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima menurut pilihan masyarakat responden dapat dilihat pada tabel 4.90.

Tabel 4.90 Urutan kesimpulan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima pilihan masyarakat responden

Prioritas	Urutan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Menurut Masyarakat		
	Faktor Ekonomi	Faktor Sosial	Faktor Fisik
1	Waktu Jualan	Kenyamanan	Kemudahan Aksesibilitas/Sarana Transportasi
2	Jenis Dagangan	Kebersihan	Kedekatan dengan Pusat Keramaian Kota/Kegiatan Masyarakat
3	Biaya Angkutan	Ketertiban	
4		Keamanan Keindahan	

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

D. Identifikasi urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima menurut para ahli

Peran pedagang kaki lima sebagai sektor informal mendapat tanggapan yang berbeda-beda dari para ahli. Minimal ada dua pihak dalam menyikapi terjadinya sektor informal, yaitu pihak yang setuju dan tidak setuju. Dari berbagai argumen yang dikemukakan, pihak yang tidak setuju cenderung berorientasi pada aspek keindahan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keamanan. Sedangkan pihak yang setuju lebih berorientasi pada aspek ketenagakerjaan, dimana dengan adanya sektor informal, maka membuka peluang kesempatan berusaha demi mendapatkan kesejahteraan akibat dari terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Poeba (Soto, 1991: vii) bahwa dalam keadaan dimana sektor modern belum mampu menciptakan lapangan kerja secepat

pertumbuhan angkatan kerja (tapi sebaliknya juga dalam keadaan dimana tingkat kualitas angkatan kerja masih terlalu rendah untuk dapat diserap semuanya dalam sektor modern) maka sektor informal merupakan bidang kegiatan yang memberi harapan untuk mencari penghidupan.

Adanya permasalahan baru yang ditimbulkan oleh kehadiran PKL di perkotaan akibat pertumbuhan dan perkembangannya yang tidak teratur, tampak kumuh, dan menggunakan ruang publik dengan sewenang-wenang dalam melakukan aktivitas usaha dagang, menyebabkan keberadaan PKL menjadi “obyek” penggusuran oleh pemerintah, hal ini terlihat dari sebagian besar (94%) PKL di wilayah Kota Gresik selalu mengalami razia yang dilakukan oleh Satpol PP terkait dengan lokasi aktivitas PKL. Seluruh sektor informal yang ada di wilayah Kota Gresik sangat rawan dengan adanya penertiban dan penggusuran, kecuali pedagang makanan/minuman, karena adanya usaha pemerintah dengan menyediakan lokasi dan melakukan penataan untuk pedagang makanan minuman yaitu di Pasar Senggol, namun untuk sektor informal lain seperti non makanan dan bahan mentah sebagian besar masih “menginduk” pada sektor formal, seperti pedagang kaki lima di daerah pasar/pusat perbelanjaan/ruko (PKL Pasar Baru dan Pasar Kota Gresik), terminal (PKL PT. Multi Sarana Plaza), maupun perkantoran/sekolah dan perumahan penduduk (PKL Timur Alun-Alun Gresik, PKL TPG II Randuagung dan PKL di wilayah perempatan Sidomoro, Jl. Kartini, Jl. Usman Sadar, Jl. Pahlawan) dengan memanfaatkan trotoar, sebagian badan jalan maupun taman kota dalam melakukan usaha dagang. Sesuai dengan Perda Kabupaten Gresik Nomor 03 Tahun 2003 tertulis pada Bab III pasal 3 ayat 1 tentang pengaturan tempat usaha, bahwa dalam menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan serta alur lalu lintas di Kabupaten Gresik, dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan usaha pedagang kaki lima tanpa ijin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Namun jika memandang permasalahan pedagang kaki lima dalam konteks yang lebih hakiki, yaitu dalam hal masalah pemenuhan dan penyambung kebutuhan hidup sehari-hari bagi rakyat kecil, dimana hal ini sudah pasti menjadi fenomena setiap kota, sehingga kehadiran PKL perlu diperhatikan terkait pemberian peluang kesempatan berusaha dengan menentukan lokasi yang sesuai menurut pihak-pihak terkait, yaitu pelaku kegiatan (PKL), sasaran konsumen/pengunjung (masyarakat) dan pemerintah sebagai penentu kebijakan. Penentuan lokasi PKL ini didasarkan atas penentuan urutan prioritas aspek-aspek dalam faktor ekonomi, sosial dan fisik, dengan alasan yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya

dalam penelitian ini⁷. Oleh karena itu dengan menggunakan metode Delphi, yaitu melalui suatu serangkaian pertanyaan (kuisoner), akan dihasilkan berbagai pendapat/pemikiran para ahli (pihak-pihak yang menangani PKL di Kabupaten Gresik, akademisi dan pedagang kaki lima itu sendiri) mengenai urutan prioritas dalam faktor ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi PKL.

1) Identifikasi urutan prioritas aspek ekonomi dalam menentukan lokasi jualan pedagang kaki lima

Hasil dari penjarangan persepsi perorangan dengan tujuan mengumpulkan opini kelompok secara formal melalui serangkaian pertanyaan (kuisoner) mengenai aspek-aspek yang diprioritaskan dalam faktor ekonomi (jenis dagangan, waktu jualan dan biaya angkutan) dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima dapat dijelaskan pada bagian berikutnya.

▪ Jenis dagangan

Seperti yang dikemukakan oleh Bromly, dalam Manning dan Effendi (1996 : 236) bahwa dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya, PKL akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli. Mereka akan berusaha agar barang atau jasa yang dijual terlihat oleh pembeli. Oleh karena itu mereka akan memilih lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau di suatu lokasi yang merupakan lokasi aktivitas masyarakat. Sehingga kehadiran PKL banyak dijumpai di sekitar lokasi aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya.

Berdasarkan aspek ekonomi jenis dagangan, maka urutan prioritas lokasi yang sesuai untuk pedagang kaki lima makanan/minuman menurut jawaban para ahli⁸ dapat dilihat pada tabel 4.91, dengan keterangan mengenai keselarasan jawaban responden menggunakan teknik analisis Kendall West dengan perhitungan manual dan menggunakan bantuan SPSS, untuk hasil tabel output dapat dilihat pada lampiran.

⁷ Lihat Bab III, halaman 57

⁸ Tim Penanganan PKL dari Pemerintah yaitu Bappeda, Dinas Pasar dan Pengelolaan PKL, Dinas Kebersihan, Kantor Satpol PP, Dinas PU, dan Balitbang. Akademisi yaitu Dosen Universitas Muhammadiyah Gresik dan PKL.

Tabel 4.91 Urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima makanan/minuman jawaban responden ahli

No.	Pilihan Lokasi Putaran Ahli	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko			Perkantoran /sekolah			Terminal			Perumahan/ tempat tinggal			Lainnya (Tempat Khusus)		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
		Prioritas (Angka 5 prioritas tertinggi, 0 tidak menyetujui)														
1.	Balitbang	1	1	5	4	4	3	3	3	2	2	2	1	0	0	4
2.	Satpol PP	4	4	4	0	0	0	2	1	1	3	2	2	0	3	3
3.	Dinas PU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	3	3	3
4.	Dinas Kebersihan	4	5	5	3	1	1	2	3	3	1	2	2	0	4	4
5.	Dinas Pasar	4	5	5	3	1	1	1	3	3	2	2	2	0	4	4
6.	Bappeda	3	3	3	0	0	0	4	2	2	2	1	1	0	4	4
7.	Deperindag	3	4	4	0	0	0	4	3	3	2	1	1	0	2	2
8.	Dinas Koperasi&UKM	4	4	5	2	0	2	3	1	3	0	2	1	0	3	4
9.	Dosen Ekonomi	3	3	3	0	0	0	4	2	2	2	1	1	0	4	4
10.	Paguyuban PKL	4	4	4	3	2	2	1	1	1	2	3	3	0	0	0
Σ Ri		30	33	37	15	8	8	24	19	19	20	20	17	3	27	31
Rata-rata (Mean)		3,00	3,30	3,70	1,50	0,80	0,80	2,40	1,90	1,90	2,00	2,00	1,70	0,30	2,70	3,10
PRIORITAS		I	I	I	IV	V	V	II	IV	III	III	III	IV	V	II	II

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

- I** : Jawaban urutan responden pada Putaran I
II : Jawaban urutan responden pada Putaran II
III : Jawaban urutan responden pada Putaran III

Keselarasan jawaban responden pada putaran I:

1. Proses perhitungan Kendall

- Pertama, membuat tabel yang berisi Ri atau jumlah per kolom masing-masing variabel seperti pada tabel 4.91 di atas. Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap lokasi aktivitas pedagang kaki lima makanan/minuman
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)}$$

Dimana :

W : Nilai Keselarasan (Nilai W berkisar 0 – 1, semakin mendekati 1 semakin selaras)

k : Jumlah variabel, dalam kasus ini adalah 5 alternatif lokasi PKL makanan/minuman

n : Jumlah penilai, dalam kasus ini adalah 10 responden ahli

ΣRi : Jumlah tiap kolom

Dengan demikian angka W adalah :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,377$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap kelima alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima makanan/minuman

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap kelima alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima makanan/minuman

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 15,099$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (berarti tingkat signifikansi/alfa adalah 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 5-1 = 4, didapat nilai chi square tabel adalah 7,7794.

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak Ho dan menerima Hi, atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap 5 alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima makanan/minuman*. Dalam artian jika seorang responden ahli menempatkan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai prioritas pertama, maka responden yang lain secara rata-rata juga memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai prioritas pertama.

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,004 < 0,05$, maka Ho ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselarasan jawaban responden pada putaran II:

1. Proses perhitungan Kendall

- Proses sama dengan analisis putaran I, dimana rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap lokasi aktivitas pedagang kaki lima makanan/minuman

- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,353$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap kelima alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima makanan/minuman

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap kelima alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima makanan/minuman

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Chi square hitung : $X^2 = n(k-1)W = 14,122$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (berarti tingkat signifikansi/alfa adalah 10%) dan derajat kebebasan = $k-1$ atau $5-1 = 4$, didapat nilai chi square tabel adalah 7,7794.

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak Ho dan menerima Hi, atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap 5 alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima makanan/minuman.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,007 < 0,05$, maka Ho ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselarasan jawaban responden pada putaran III:

1. Proses perhitungan Kendall

- Proses sama dengan analisis putaran I, dimana rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap lokasi aktivitas pedagang kaki lima makanan/minuman

- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,541$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap kelima alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima makanan/minuman

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap kelima alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima makanan/minuman

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Chi square hitung : $X^2 = n(k-1)W = 21,633$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (berarti tingkat signifikansi adalah 10%) dan derajat kebebasan = $k-1$ atau $5-1 = 4$, didapat nilai chi square tabel = 7,7794.

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak Ho dan menerima Hi, atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap 5 alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima makanan/minuman.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,000 < 0,05$, maka Ho ditolak.

Tabel 4.92 Kesimpulan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima makanan/minuman menurut responden ahli

Prioritas	Urutan Prioritas lokasi PKL Makanan/Minuman		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko
2	Terminal	Tempat khusus (lapangan)	Tempat khusus (lapangan)
3	Perumahan/tempat tinggal	Perumahan/tempat tinggal	Terminal
4	Perkantoran/sekolah	Terminal	Perumahan/tempat tinggal
5	Tempat khusus	Perkantoran/sekolah	Perkantoran/sekolah
Nilai Keselarasan (W)	0,377	0,353	0,541
Tingkat Keselarasan	Rendah	Rendah	Cukup

Sumber : Hasil Delphi 2006

Keterangan :

Berdasarkan perhitungan di atas terdapat kesimpulan bahwa responden lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi aktivitas pedagang kaki lima makanan/minuman dan jawaban responden dari putaran I, II sampai III semakin selaras.

Nilai W berkisar 0 – 1, maka semakin mendekati 1 menunjukkan semakin selarasnya jawaban responden.

Keterangan mengenai urutan prioritas lokasi PKL makanan/minuman menurut para responden ahli pada putaran I, putaran II, dan putaran III, akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel 4.93.

Tabel 4.93 Keterangan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima makanan/minuman menurut responden ahli

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Balitbang	Lebih memprioritaskan perkantoran/sekolah sebagai lokasi aktivitas PKL makanan/minuman dengan penataan yang sesuai dengan kebijakan setempat karena cukup strategis dan menguntungkan bagi pedagang oleh karena adanya hubungan saling membutuhkan antara karyawan/pegawai/siswa dengan pedagang. Sedangkan di daerah pasar/pusat perbelanjaan/ruko biasanya sudah terdapat pedagang formal sehingga memungkinkan timbulnya konflik.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Balitbang merubah urutan jawaban dengan mengikuti hasil konsensus putaran II.
Satpol PP	Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi PKL makanan/minuman karena fungsinya yang sebagai pusat perekonomian, namun dengan penataan/ditempatkan pada lokasi khusus agar tidak berserakan. Sebaiknya juga tidak menempatkan pedagang kaki lima di kawasan perkantoran/sekolah karena mengganggu aktivitas perkantoran/belajar mengajar serta tidak enak dipandang.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP merubah urutan jawaban, yaitu menyetujui pedagang kaki lima diberi tempat khusus yang sesuai dengan persyaratan dan kebijakan pemerintah yang dapat menjembatani baik kepentingan pedagang, pemerintah maupun pengunjung.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.
Dinas PU	Lebih memprioritaskan perumahan/tempat tinggal di tanah terbuka atau tempat khusus sebagai lokasi PKL makanan/minuman, karena lokasi pedagang kaki lima harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut : bukan terletak di dekat jalan arteri, tidak berhubungan langsung dengan jalan, berada di arus lalu lintas yang lambat/tidak rame, dan terletak di lahan yang tidak bermasalah. Sedangkan sebagai penataan juga dipertimbangkan jumlah PKL sesuai dengan kapasitas ruang kosong di lokasi tersebut.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Kebersihan	Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi PKL makanan/minuman karena memiliki tingkat	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Kebersihan merubah urutan jawaban,	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban.

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
	keramaian masyarakat pengunjung yang tinggi, namun juga harus dilakukan penataan untuk meminimalisasi masalah kekumuhan dan kebersihan. Sedangkan untuk perumahan/tempat sebagai prioritas terakhir karena biasanya di sekitar perumahan sudah terdapat sarana toko, warung/supermarket untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.	yaitu menyetujui pedagang kaki lima diberi tempat khusus yang telah dilakukan penataan dan pastinya sesuai dengan prinsip keteraturan dan kebersihan lokasi.	
Dinas Pasar	Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi aktivitas PKL makanan/minuman karena banyak pengunjung sehingga dapat memberikan jaminan keuntungan bagi pedagang. Sedangkan sebaiknya terminal sebagai alternatif terakhir karena menghindari adanya kesemrawutan dan kekumuhan dalam terminal sebagai tempat arus pulang pergi penumpang, biasanya juga sudah terdapat pedagang formal di dalam terminal.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Pasar merubah urutan jawaban, yaitu menyetujui pedagang kaki lima diberi tempat khusus yang telah dilakukan pembinaan dan penataan sesuai dengan kebijakan pemerintah dimana dalam prosesnya juga melibatkan pihak dari pedagang.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Pasar tidak merubah urutan jawaban.
Bappeda	Lebih memprioritaskan terminal sebagai lokasi aktivitas PKL makanan/minuman karena untuk memudahkan penumpang sebagai konsumen dalam memenuhi kebutuhan yang insidental atau dapat juga di daerah pasar/pusat perbelanjaan/ruko agar pendapatan pedagang meningkat akibat dari ramainya pengunjung. Sebaiknya tidak menempatkan PKL di daerah perkantoran/sekolah karena mengganggu fungsinya sebagai tempat kerja dan belajar mengajar.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Bappeda merubah urutan jawaban, yaitu lebih memprioritaskan tempat khusus sebagai lokasi PKL dengan syarat telah dilakukan penataan dan pembinaan kepada pihak pedagang.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.
Deperindag	Lebih memprioritaskan terminal sebagai lokasi aktivitas PKL makanan/minuman karena banyak orang lalu lalang bepergian yang membutuhkan kehadiran PKL atau dapat juga di daerah pasar/pusat perbelanjaan/ruko agar pedagang mendapatkan keuntungan	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Deperindag merubah urutan jawaban mengikuti hasil konsensus dengan memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko karena disana	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Deperindag tidak merubah urutan jawaban.

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
	akibat dari ramainya pengunjung. Sebaiknya tidak menempatkan PKL di daerah perkantoran/sekolah karena mengganggu fungsinya sebagai tempat kerja dan belajar mengajar.	memang pusat aktivitas dan keramaian masyarakat, serta menyetujui PKL ditempatkan di lokasi khusus yang telah dilakukan penataan oleh pihak/Dinas yang berwenang.	
Dinas Koperasi&UKM	Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi aktivitas PKL makanan/minuman karena merupakan tempat berkumpulnya orang, sehingga pedagang dapat mencari kesempatan mendapatkan keuntungan dari barang dagangannya. Sebaiknya tidak menempatkan PKL di perumahan/tempat tinggal sehingga jika penduduk ingin mencari kebutuhan harus keluar dari daerahnya (terkait dengan pemerataan pusat keramaian masyarakat).	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Koperasi&UKM menyetujui adanya tempat khusus bagi pedagang sehingga tidak menimbulkan kesemrawutan dan kekumuhan di daerah pusat kota.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Koperasi&UKM merubah urutan jawaban dengan mengikuti hasil konsensus putaran II.
Dosen Ekonomi	Lebih memprioritaskan terminal sebagai lokasi aktivitas PKL makanan/minuman karena untuk memberikan kemudahan akses pada fasilitas ekonomi bagi penumpang dalam memenuhi kebutuhannya baik secara biasa atau insidental/sewaktu-waktu memerlukan atau dapat juga di daerah pasar/pusat perbelanjaan/ruko akibat dari tingkat keramaian yang tinggi. Sebaiknya tidak menempatkan PKL di daerah perkantoran/sekolah karena mengganggu fungsinya sebagai tempat kerja dan belajar mengajar.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Bappeda merubah urutan jawaban, yaitu lebih memprioritaskan tempat khusus sebagai lokasi PKL dengan syarat telah dilakukan pembinaan/sosialisasi lebih lanjut dengan pedagang sehingga dapat terealisasi dengan baik dan dapat menghindarkan konflik antara pedagang dengan pemerintah.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.
Paguyuban PKL	Bersedia ditempatkan dimanapun dengan syarat adanya jaminan kesejahteraan berupa keuntungan yang cukup. Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi jualan karena banyaknya pengunjung sehingga mudah mendapatkan keuntungan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak pedagang merubah urutan jawaban dengan lebih memprioritaskan perumahan/tempat tinggal daripada perkantoran/sekolah sesuai dengan keputusan hasil konsensus.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak pedagang tidak merubah urutan jawaban.

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

Urutan prioritas lokasi yang sesuai untuk pedagang kaki lima non makanan/minuman menurut pendapat para ahli dapat dilihat pada tabel 4.94 dengan keterangan mengenai keselarasan jawaban responden menggunakan teknik analisis Kendall West dengan perhitungan manual dan menggunakan bantuan SPSS, untuk hasil tabel output dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.94 Urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima non makanan/minuman jawaban responden ahli

No.	Pilihan Lokasi Putaran Ahli	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko			Perkantoran /sekolah			Terminal			Perumahan/ tempat tinggal			Lainnya (Tempat khusus)		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Prioritas (Angka 4 prioritas tertinggi, 0 tidak menyetujui)																
1.	Balitbang	4	4	4	2	2	2	1	1	1	3	3	3	0	0	0
2.	Satpol PP	4	4	4	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0
3.	Dinas PU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
4.	Dinas Kebersihan	4	4	4	1	1	1	3	3	3	2	2	2	0	0	0
5.	Dinas Pasar	4	4	4	2	1	0	3	3	3	1	2	2	0	0	0
6.	Bappeda	4	4	4	0	0	0	3	3	3	2	2	2	0	0	0
7.	Deperindag	4	4	4	0	0	0	3	1	1	2	2	2	0	3	3
8.	Dinas Koperasi&UKM	4	4	4	0	0	0	2	1	1	3	2	2	0	3	3
9.	Dosen Ekonomi	4	4	4	0	0	0	3	3	3	2	2	2	0	0	0
10.	Paguyuban PKL	4	4	4	1	1	1	3	3	3	2	2	2	0	0	0
$\sum Ri$		36	36	36	7	5	5	22	18	18	19	20	20	4	10	10
Rata-rata (Mean)		3,60	3,60	3,60	0,70	0,50	0,50	2,20	1,80	1,80	1,90	2,00	2,00	0,40	1,00	1,00
PRIORITAS		I	I	I	IV	V	V	II	III	III	III	II	II	V	IV	IV

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

- I** : Jawaban urutan responden pada Putaran I
II : Jawaban urutan responden pada Putaran II
III : Jawaban urutan responden pada Putaran III

Keselarasan jawaban responden pada putaran I:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap lokasi aktivitas pedagang kaki lima non makanan/minuman
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,645$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap kelima alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima non makanan/minuman

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap kelima alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima non makanan/minuman

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 25,792$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 5-1 = 4 adalah 7,7794.

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak Ho dan menerima Hi, atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap 5 alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima non makanan/minuman.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,000 < 0,05$, maka Ho ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselarasan jawaban responden pada putaran II:

1. Proses perhitungan Kendall

- Proses sama dengan analisis putaran I, dimana rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap lokasi aktivitas pedagang kaki lima non makanan/minuman
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,549$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap kelima alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima non makanan/minuman

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap kelima alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima non makanan/minuman

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Chi square hitung : $X^2 = n(k-1)W = 21,857$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% adalah 7,7794.

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap 5 alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima non makanan/minuman.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselarasan jawaban responden pada putaran III:

Untuk analisis putaran III, mengenai proses perhitungan Kendall dan proses pengambilan keputusan sama dengan analisis putaran III, disebabkan responden ahli tidak merubah jawaban urutan dari putaran sebelumnya (putaran II). Dimana keputusannya adalah maka keputusan adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap 5 alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima non makanan/minuman.*

Tabel 4.95 Kesimpulan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima non makanan/minuman menurut ahli

Prioritas	Urutan Prioritas lokasi PKL Non Makanan/Minuman		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko
2	Terminal	Perumahan/tempat tinggal	Perumahan/tempat tinggal
3	Perumahan/tempat tinggal	Terminal	Terminal
4	Perkantoran/sekolah	Tempat khusus	Tempat khusus
5	Lainnya (tempat khusus)	Perkantoran/sekolah	Perkantoran/sekolah
Nilai Keselarasan (W)	0,645	0,549	0,549
Tingkat Keselarasan	Tinggi	Cukup	Cukup

Sumber : Hasil Delphi 2006

Keterangan :

Berdasarkan perhitungan di atas terdapat kesimpulan bahwa responden lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi aktivitas pedagang kaki lima non makanan/minuman dan jawaban responden dari putaran I, II sampai III tersebut selaras dengan jawaban responden yang lain,

Nilai W berkisar 0 – 1, maka semakin mendekati 1 menunjukkan semakin selarasnya jawaban responden.

Berdasarkan tabel 4.95 dapat diketahui urutan prioritas lokasi untuk PKL non makanan/minuman menurut persepsi para ahli melalui kuisioner sebanyak tiga putaran. Keterangan mengenai urutan prioritas lokasi menurut para ahli pada putaran I, putaran II, dan putaran III, akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel 4.96.

Tabel 4.96 Keterangan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima non makanan/minuman menurut ahli

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Balitbang	Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi aktivitas PKL non makanan/minuman dengan penataan yang sesuai dengan kebijakan setempat karena cukup strategis dan menguntungkan bagi pedagang serta memberikan alternatif pilihan barang dagangan bagi pengunjung. Sedangkan di daerah perkantoran/sekolah dan terminal kebutuhan pengunjung dengan jenis dagangan non makanan/minuman sangat terbatas.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.
Satpol PP	Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi PKL non makanan/minuman karena fungsinya yang sebagai pusat perdagangan dengan penawaran barang dagangan beraneka macam termasuk non makanan/minuman (pakaian, asesoris, sandal/sepatu,dll) sehingga pedagang juga bisa ikut mengambil kesempatan, namun dengan syarat adanya penataan/ditempatkan pada lokasi khusus sebagai pasar kering agar tidak berserakan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.
Dinas PU	Lebih memprioritaskan tempat khusus yang sesuai kriteria untuk lokasi PKL sebagai lokasi aktivitas PKL non makanan/minuman sehingga dapat menciptakan sentra baru da tidak mematikan pedagang formal yang ada di pasar/pusat perbelanjaan/ruko barang dagangan yang sejenis.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Kebersihan	Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi PKL karena memiliki tingkat keramaian masyarakat pengunjung yang tinggi, namun juga harus dilakukan penataan untuk meminimalisasi masalah kekumuhan dan kebersihan. Sedangkan untuk perumahan/tempat sebagai prioritas terakhir karena biasanya di sekitar	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Kebersihan merubah urutan jawaban, yaitu lebih memprioritaskan perumahan/tempat tinggal dari pada perkantoran karena penduduk perumahan lebih membutuhkan jenis barang dagangan non	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban.

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
	perumahan sudah terdapat sarana toko, warung/supermarket untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.	makanan/minuman sebagai kebutuhan biasa atau insidental.	
Dinas Pasar	Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi aktivitas PKL non makanan/minuman karena banyak pengunjung sehingga dapat memberikan jaminan keuntungan bagi pedagang.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Pasar merubah urutan jawaban, yaitu menyetujui pedagang kaki lima diberi tempat khusus yang telah dilakukan pembinaan dan penataan sesuai dengan kebijakan pemerintah dimana dalam prosesnya juga melibatkan pihak dari pedagang.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Pasar tidak merubah urutan jawaban.
Bappeda	Lebih memprioritaskan terminal sebagai lokasi aktivitas PKL karena untuk memudahkan penumpang sebagai konsumen dalam memenuhi kebutuhan yang insidental atau dapat juga di daerah pasar/pusat perbelanjaan/ruko agar pedagang mendapatkan keuntungan akibat dari ramainya pengunjung. Sebaiknya tidak menempatkan PKL di daerah perkantoran/sekolah karena mengganggu fungsinya sebagai tempat kerja dan belajar mengajar.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.
Deperindag	Lebih memprioritaskan terminal sebagai lokasi aktivitas PKL karena banyak orang lalu lalang bepergian yang membutuhkan kehadiran PKL atau dapat juga di daerah pasar/pusat perbelanjaan/ruko agar pedagang mendapatkan keuntungan akibat dari ramainya pengunjung. Sebaiknya tidak menempatkan PKL di daerah perkantoran/sekolah karena mengganggu fungsinya sebagai tempat kerja dan belajar mengajar.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Deperindag merubah urutan jawaban dengan menyetujui tempat khusus bagi PKL non makanan/minuman sehingga dapat menciptakan tempat dengan image baru sebagai pusat penjualan dagangan non makanan/minuman.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Deperindag tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Koperasi&UKM	Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi aktivitas PKL karena merupakan tempat berkumpulnya orang, sehingga pedagang dapat mencari	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Koperasi&UKM merubah urutan jawaban dengan menyetujui tempat	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Koperasi&UKM merubah urutan jawaban dengan mengikuti hasil konsensus putaran II.

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
	kesempatan mendapatkan keuntungan dari barang dagangannya. Sebaiknya tidak menempatkan PKL di perumahan/tempat tinggal sehingga jika penduduk ingin mencari kebutuhan harus keluar dari daerahnya (terkait dengan pemerataan pusat keramaian masyarakat).	khusus bagi PKL non makanan/minuman yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kesepakatan dengan pihak pedagang.	
Dosen Ekonomi	Lebih memprioritaskan terminal sebagai lokasi aktivitas PKL karena untuk memberikan kemudahan akses pada fasilitas ekonomi bagi penumpang dalam memenuhi kebutuhannya baik secara biasa atau insidental/sewaktu-waktu memerlukan atau dapat juga di daerah pasar/pusat perbelanjaan/ruko akibat dari tingkat keramaian yang tinggi. Sebaiknya tidak menempatkan PKL di daerah perkantoran/sekolah karena mengganggu fungsinya sebagai tempat kerja dan belajar mengajar.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.
Paguyuban PKL	Bersedia ditempatkan dimanapun dengan syarat adanya jaminan kesejahteraan berupa keuntungan yang cukup. Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi jualan karena banyaknya pengunjung sehingga mudah mendapatkan keuntungan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak pedagang tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak pedagang tidak merubah urutan jawaban.

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

Urutan prioritas lokasi yang sesuai untuk pedagang kaki lima bahan mentah menurut pendapat para ahli dapat dilihat pada tabel 4.97 dengan keterangan mengenai keselarasan jawaban responden menggunakan teknik analisis Kendall West dengan perhitungan manual dan menggunakan bantuan SPSS, untuk hasil tabel output dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.97 Urutan prioritas lokasi pkl bahan mentah jawaban para ahli

No.	Pilihan Lokasi	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko			Perkantoran /sekolah			Terminal			Perumahan/ tempat tinggal			Lainnya (Tempat Khusus)		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	Ahli	Prioritas (Angka 4 prioritas tertinggi, 0 tidak menyetujui)														
1.	Balitbang	4	4	4	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0
2.	Satpol PP	4	4	4	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0
3.	Dinas PU	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dinas Kebersihan	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Dinas Pasar	4	4	4	0	0	0	3	2	2	0	3	3	0	0	0
6.	Bappeda	3	3	3	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	4	4
7.	Deperindag	4	4	4	0	0	0	2	2	2	3	3	3	0	0	0
8.	Dinas Koperasi&UKM	3	4	4	0	0	0	2	2	2	4	3	3	0	0	0
9.	Dosen Ekonomi	3	3	3	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	4	4
10.	Paguyuban PKL	4	4	4	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0
	$\sum Ri$	37	38	38	0	0	0	7	6	6	20	22	22	8	8	8
	Rata-rata (Mean)	3,70	3,80	3,80	0	0	0	0,70	0,60	0,60	2,00	2,20	2,20	0,80	0,80	0,80
	PRIORITAS	1	1	1	-	-	-	4	4	4	2	2	2	3	3	3

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

- I** : Jawaban urutan responden pada Putaran I
II : Jawaban urutan responden pada Putaran II
III : Jawaban urutan responden pada Putaran III

Keselarasan jawaban responden pada putaran I:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap lokasi aktivitas pedagang kaki lima bahan mentah.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,597$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap kelima alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima bahan mentah

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap kelima alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima bahan mentah

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 23,900$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 5-1 = 4 adalah 7,7794.

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak Ho dan menerima Hi, atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap 5 alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima bahan mentah.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,000 < 0,05$, maka Ho ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselarasan jawaban responden pada putaran II:

1. Proses perhitungan Kendall

- Proses sama dengan analisis putaran I, dimana rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap lokasi aktivitas pedagang kaki lima bahan mentah
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,675$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap kelima alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima bahan mentah

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap kelima alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima bahan mentah

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Chi square hitung : $X^2 = n(k-1)W = 27,018$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% untuk k=4 adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung $>$ chi square tabel, maka keputusan adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima bahan mentah.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselarasan jawaban responden pada putaran III:

Untuk analisis putaran III, mengenai proses perhitungan Kendall dan proses pengambilan keputusan sama dengan analisis putaran II, disebabkan responden ahli tidak merubah jawaban urutan dari putaran sebelumnya (putaran II). Dimana keputusannya adalah maka keputusan adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima bahan mentah.*

Tabel 4.98 Kesimpulan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima bahan mentah menurut ahli

Prioritas	Urutan Prioritas lokasi PKL Bahan Mentah		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko
2	Perumahan/tempat tinggal	Perumahan/tempat tinggal	Perumahan/tempat tinggal
3	Lainnya (Tempat khusus)	Lainnya (Tempat khusus)	Lainnya (Tempat khusus)
4	Terminal	Terminal	Terminal
Nilai Keselarasan (W)	0,597	0,675	0,675
Tingkat Keselarasan	Cukup	Tinggi	Tinggi

Sumber : Hasil Delphi 2006

Keterangan :

Berdasarkan perhitungan di atas terdapat kesimpulan bahwa responden lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi aktivitas pedagang kaki lima bahan mentah dan jawaban responden dari putaran I, II sampai III semakin selaras dengan jawaban responden yang lain,

Nilai W berkisar 0 – 1, maka semakin mendekati 1 menunjukkan semakin selarasnya jawaban responden

Berdasarkan tabel 4.98 dapat diketahui urutan prioritas lokasi untuk PKL bahan mentah menurut persepsi para ahli melalui kuisioner sebanyak tiga putaran. Keterangan mengenai urutan prioritas lokasi menurut para ahli pada putaran I, putaran II, dan putaran III, akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel 4.99.

Tabel 4.99 Keterangan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima bahan mentah menurut ahli

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Balitbang	Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi aktivitas PKL bahan mentah dengan penataan yang sesuai dengan kebijakan setempat karena cukup strategis dan menguntungkan bagi pedagang serta memberikan alternatif pilihan barang dagangan bagi pengunjung. Sedangkan di daerah perumahan/tempat tinggal juga diperlukan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari penduduk, namun telah dilakukan penataan dari pihak/Dinas setempat.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.
Satpol PP	Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi bahan mentah karena fungsinya yang sebagai pusat perdagangan dengan syarat adanya penataan/ditempatkan pada lokasi khusus dan dikelompokkan sebagai pasar basah.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.
Dinas PU	Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi bahan mentah karena sesuai dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan dengan syarat adanya penataan/ditempatkan pada lokasi khusus.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Kebersihan	Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi bahan mentah karena sesuai dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan dan merupakan tempat berkumpulnya pengunjung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan syarat adanya penataan/ditempatkan pada lokasi khusus.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Pasar	Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi aktivitas PKL bahan mentah karena banyak pengunjung sehingga dapat memberikan jaminan keuntungan bagi pedagang. Sedangkan karena lokasi pasar yang dekat dengan terminal dapat memudahkan	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Pasar merubah urutan jawaban mengikuti hasil konsensus, yaitu lebih memprioritaskan perumahan/tempat tinggal daripada terminal sebagai lokasi aktivitas PKL bahan mentah karena dalam	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Pasar tidak merubah urutan jawaban.

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
	aksesibilitas masyarakat menuju ke tempat lokasi PKL.	kehidupan sehari-hari penduduk perumahan lebih membutuhkan kehadiran PKL tersebut.	
Bappeda	Lebih memprioritaskan terminal sebagai lokasi aktivitas PKL karena untuk memudahkan penumpang sebagai konsumen dalam memenuhi kebutuhan yang insidental atau dapat juga di daerah pasar/pusat perbelanjaan/ruko agar pedagang mendapatkan keuntungan akibat dari ramainya pengunjung. Sebaiknya tidak menempatkan PKL di daerah perkantoran/sekolah karena mengganggu fungsinya sebagai tempat kerja dan belajar mengajar.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.
Deperindag	Lebih memprioritaskan terminal sebagai lokasi aktivitas PKL karena banyak orang lalu lalang bepergian yang membutuhkan kehadiran PKL atau dapat juga di daerah pasar/pusat perbelanjaan/ruko agar pedagang mendapatkan keuntungan akibat dari ramainya pengunjung. Sebaiknya tidak menempatkan PKL di daerah perkantoran/sekolah karena mengganggu fungsinya sebagai tempat kerja dan belajar mengajar.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Deperindag tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Deperindag tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Koperasi&UKM	Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi aktivitas PKL karena merupakan tempat berkumpulnya orang, sehingga pedagang dapat mencari kesempatan mendapatkan keuntungan dari barang dagangannya. Sebaiknya tidak menempatkan PKL di perumahan/tempat tinggal sehingga jika penduduk ingin mencari kebutuhan harus keluar dari daerahnya (terkait dengan pemerataan pusat keramaian masyarakat).	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Koperasi&UKM merubah urutan mengikuti hasil konsensus dengan menyetujui perumahan/tempat tinggal sebagai lokasi aktivitas PKL bahan mentah dengan pertimbangan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup penduduk sehari-hari dan aktivitas PKL ini dijadikan salah satu pemenuhan fasilitas perdagangan berupa pasar kecil skala perumahan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Koperasi&UKM tidak merubah urutan jawaban.

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Dosen Ekonomi	Lebih memprioritaskan terminal sebagai lokasi aktivitas PKL karena untuk memberikan kemudahan akses pada fasilitas ekonomi bagi penumpang dalam memenuhi kebutuhannya baik secara biasa atau insidental/sewaktu-waktu memerlukan atau dapat juga di daerah pasar/pusat perbelanjaan/ruko akibat dari tingkat keramaian yang tinggi. Sebaiknya tidak menempatkan PKL di daerah perkantoran/sekolah karena mengganggu fungsinya sebagai tempat kerja dan belajar mengajar.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.
Paguyuban PKL	Bersedia ditempatkan dimanapun dengan syarat adanya jaminan kesejahteraan berupa keuntungan yang cukup. Lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai lokasi jualan karena banyaknya pengunjung sehingga mudah mendapatkan keuntungan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak pedagang tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak pedagang tidak merubah urutan jawaban.

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

▪ Waktu jual

Menurut Mc Gee dan Yeung (1977 : 76), pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Adapun perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan, walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antar keduanya. Temuan ini didasarkan pada penelitiannya terhadap “hawkers” di kota-kota Asia Tenggara.


Saat teramai pada suatu waktu pelayanan dipengaruhi oleh orientasi jasa terhadap pusat-pusat kegiatan di sekitarnya. Saat teramai bagi aktivitas pedagang sektor informal di dekat pusat-pusat perbelanjaan akan berbeda dengan saat-saat ramai di dekat kawasan wisata, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, dan sebagainya.

Berdasarkan aspek waktu jualan, maka waktu jualan yang sesuai untuk pedagang kaki lima makanan/minuman menurut pendapat para ahli dapat dilihat pada tabel 4.105, sedangkan hasil prioritas secara keseluruhan melalui teknis analisis Kendall West dengan menggunakan bantuan SPSS dapat dilihat tabel 4.100. Tabel output dari SPSS dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.100 Urutan prioritas waktu jual pedagang kaki lima makanan/minuman jawaban para ahli

No.	Pilihan Waktu Putaran Ahli	Pagi – Siang (jam 06.00 – 14.00)			Pagi – Sore (jam 06.00 – 18.00)			Pagi – Malam (jam 06.00 – 21.00)			Sore – Malam (jam 18.00 – 21.00)		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Prioritas (Angka 4 prioritas tertinggi, 0 tidak menyetujui)													
1.	Balitbang	1	1	1	2	2	3	3	3	2	4	4	4
2.	Satpol PP	2	1	1	3	4	4	4	2	2	1	3	3
3.	Dinas PU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
4.	Dinas Kebersihan	0	0	0	0	0	0	4	4	3	0	0	4
5.	Dinas Pasar	3	3	2	4	4	4	2	2	1	1	1	3
6.	Bappeda	2	2	2	3	3	3	0	0	0	4	4	4
7.	Deperindag	2	1	1	3	2	2	4	4	3	0	3	4
8.	Dinas Koperasi&UKM	3	2	2	2	3	3	0	0	0	4	4	4
9.	Dosen Ekonomi	2	2	2	3	3	3	0	0	0	4	4	4
10.	Paguyuban PKL	2	2	2	4	4	4	1	1	3	3	3	3
$\sum Ri^2$		17	14	14	24	25	25	18	16	15	25	30	31
Rata-rata (Mean)		1,70	1,40	1,40	2,40	2,50	2,50	1,80	1,60	1,50	2,50	3,00	3,10
PRIORITAS		IV	IV	IV	II	II	II	III	III	III	I	I	I

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

- 

 I : Jawaban urutan responden pada Putaran I

 II : Jawaban urutan responden pada Putaran II

 III : Jawaban urutan responden pada Putaran III

Keselarasan jawaban responden pada putaran I:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,083$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 2,478$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 4-1 = 3 adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung < chi square tabel, maka keputusan adalah menerima Ho dan menolak Hi, atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman..*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah 0,479 > 0,05, maka Ho diterima, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselarasan jawaban responden pada putaran II:

1. Proses perhitungan Kendall

- Proses sama dengan analisis putaran I, dimana rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman

- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,283$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Chi square hitung : $X^2 = n(k-1)W = 8,478$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% dan untuk $k=4$ maka df adalah $k-1=3$ adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung $>$ chi square tabel, maka keputusan adalah menolak Ho dan menerima Hi, atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,037 < 0,05$, maka Ho ditolak.

Keselarasan jawaban responden pada putaran III:

1. Proses perhitungan Kendall

- Proses sama dengan analisis putaran I, dimana rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman

- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,335$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Chi square hitung : $X^2 = n(k-1)W = 10,043$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% dan $df = 3$ adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman*.

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,018 < 0,05$, maka H_0 ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Tabel 4.101 Kesimpulan urutan prioritas waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman menurut ahli

Prioritas	Urutan Prioritas Waktu Jual PKL Makanan/Minuman		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1	Sore – Malam (jam 18.00 – 21.00)	Sore – Malam (jam 18.00 – 21.00)	Sore – Malam (jam 18.00 – 21.00)
2	Pagi – Sore (jam 06.00 – 18.00)	Pagi – Sore (jam 06.00 – 18.00)	Pagi – Sore (jam 06.00 – 18.00)
3	Pagi – Malam (jam 06.00 – 21.00)	Pagi – Malam (jam 06.00 – 21.00)	Pagi – Malam (jam 06.00 – 21.00)
4	Pagi – Siang (jam 06.00 – 14.00)	Pagi – Siang (jam 06.00 – 14.00)	Pagi – Siang (jam 06.00 – 14.00)
Nilai Keselarasan (W)	0,083	0,283	0,335
Tingkat Keselarasan	Sangat Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : Hasil Delphi 2006

Keterangan :

Berdasarkan perhitungan di atas terdapat kesimpulan bahwa responden lebih memprioritaskan waktu sore – malam hari (jam 18.00 – 21.00) sebagai waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minum dan jawaban responden dari putaran I, II sampai III semakin selaras dengan jawaban responden yang lain,

Nilai W berkisar 0 – 1, maka semakin mendekati 1 menunjukkan semakin selarasnya jawaban responden

Berdasarkan tabel 4.101 dapat diketahui urutan prioritas waktu jualan untuk PKL makanan/minuman menurut persepsi para responden ahli melalui kuisioner sebanyak tiga putaran. Keterangan mengenai urutan prioritas waktu jualan PKL makanan/minuman menurut para responden ahli pada putaran I, putaran II, dan putaran III, akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel 4.102.

Tabel 4.102 Keterangan urutan prioritas waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman menurut ahli

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Balitbang	Lebih memprioritaskan antara sore-malam hari jam 18.00 – 21.00 sebagai waktu jualan PKL makanan/minuman karena dapat bergantian dengan aktivitas sibuk pada pagi – sore hari. Adanya pembagian waktu bagi masing-masing jenis PKL ini harus disesuaikan dengan lokasi dan aturan dimana diperbolehkan berjualan menurut kebijakan pemerintah setempat.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Balitbang merubah urutan jawaban mengikuti hasil konsensus yaitu lebih memprioritaskan pagi-sore hari dari pada pagi-malam hari sebagai waktu jualan PKL makanan/minuman dengan pertimbangan di waktu sibuk pagi-sore hari ini kehadiran PKL makanan/minuman banyak dibutuhkan.
Satpol PP	Lebih memprioritaskan pagi-malam hari mulai jam 06.00 – 21.00 sebagai waktu jualan PKL makanan/minuman karena fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia namun dengan syarat terdapat lokasi khusus di dekat pusat keramaian yang sesuai dengan penetapan lokasi dari pemerintah.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.
Dinas PU	Dinas PU hanya menyetujui PKL makanan/minuman berada pada waktu sore-malam hari sehingga tidak menimbulkan kekumuhan dan kesemrawutan lingkungan pada jam-jam aktivitas sibuk pagi-sore hari.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Kebersihan	Lebih menyetujui jangka waktu panjang dari pagi – malam hari untuk waktu jualan PKL makanan/minuman karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sewaktu-waktu selalu dibutuhkan, namun penataan lokasi yang baik sehingga masalah kekumuhan dan kebersihan selama rentang waktu jualan itu dapat diminimalisasi.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Kebersihan merubah urutan jawaban dengan menyetujui dan memilih waktu sore – malam hari sebagai prioritas waktu jualan utama dengan pertimbangan adanya pembagian dan pergantian waktu dengan aktivitas tinggi//sibuk pada pagi - sore hari.
Dinas Pasar	Lebih memprioritaskan pagi- sore hari sebagai waktu jualan PKL makanan/minuman karena aktivitas tertinggi masyarakat berada pada waktu tersebut sehingga kehadiran PKL dapat sekaligus memenuhi kebutuhan makan/minum masyarakat.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Pasar tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Pasar merubah urutan jawaban mengikuti hasil konsensus dengan lebih memprioritaskan waktu sore – malam hari dari pada pagi – siang dengan syarat dikondisikan penataannya seperti pasar malam.

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Bappeda	Lebih memprioritaskan sore – malam hari sebagai waktu jualan PKL makanan/minuman dengan lokasi/tempat khusus sehingga dapat menciptakan sentra PKL makanan/minuman seperti pasar malam. Selain itu juga dapat berjualan pada pagi – sore hari di lokasi yang dekat pusat keramaian yang sering dikunjungi masyarakat seperti terminal, pusat perbelanjaan sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makan/minumnya.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.
Deperindag	Lebih memprioritaskan pagi-malam hari sebagai waktu jualan PKL makanan/minuman sehingga kapanpun masyarakat membutuhkan makanan/minuman akan selalu dapat terpenuhi.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Deperindag merubah urutan jawaban. Lebih memprioritaskan sore – malam hari daripada pagi – siang hari agar tidak terjadi penumpukan aktivitas pada jam-jam sibuk.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Deperindag merubah urutan jawaban mengikuti hasil konsensus dengan memprioritaskan sore-malam hari sebagai waktu jualan PKL makanan/minuman karena dapat bergantian dengan aktivitas pada pagi – siang harinya.
Dinas Koperasi&UKM	Lebih memprioritaskan sore – malam hari sebagai waktu jualan PKL makanan/minuman karena dapat bergantian dengan aktivitas pada jam sibuk pagi – sore harinya.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Koperasi&UKM merubah urutan mengikuti hasil konsensus dengan lebih memprioritaskan pagi – sore hari dari pada pagi siang hari karena jangka waktu lebih panjang.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Koperasi&UKM tidak merubah urutan jawaban.
Dosen Ekonomi	Lebih memprioritaskan sore – malam hari sebagai waktu jualan PKL makanan/minuman dengan penataan yang dikondisikan sebagai pasar malam di lokasi strategis sehingga dapat menciptakan sentra PKL makanan/minuman yang baru.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.
Paguyuban PKL	Lebih memprioritaskan waktu jualan pada pagi – sore hari karena pada waktu tersebut banyak masyarakat beraktivitas sehingga bisa memperoleh kesempatan mendapatkan penghasilan dan keuntungan tinggi.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak pedagang tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak pedagang tidak merubah urutan jawaban.

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

Berdasarkan aspek waktu jualan, maka waktu jualan yang sesuai untuk pedagang kaki lima non makanan/minuman menurut pendapat para ahli dapat dilihat pada tabel 4.103, sedangkan hasil prioritas secara keseluruhan melalui teknis analisis Kendall West dengan menggunakan bantuan SPSS, dan untuk hasil tabel output dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.103 Urutan prioritas waktu jual pedagang kaki lima non makanan/minuman jawaban para ahli

No.	Pilihan Waktu Putaran Ahli	Pagi – Siang (jam 06.00 – 14.00)			Pagi – Sore (jam 06.00 – 18.00)			Pagi – Malam (jam 06.00 – 21.00)			Sore – Malam (jam 18.00 – 21.00)		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Prioritas (Angka 4 prioritas tertinggi, 0 tidak menyetujui)													
1.	Balitbang	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4
2.	Satpol PP	4	4	4	3	3	2	2	2	1	1	1	3
3.	Dinas PU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
4.	Dinas Kebersihan	0	0	1	0	0	2	4	4	3	0	0	4
5.	Dinas Pasar	3	3	3	4	4	4	2	2	1	1	1	2
6.	Bappeda	3	3	3	2	2	2	0	0	0	4	4	4
7.	Deperindag	4	3	3	2	2	2	0	0	0	3	4	4
8.	Dinas Koperasi&UKM	1	1	1	2	2	2	4	3	3	3	4	4
9.	Dosen Ekonomi	3	3	3	2	2	2	0	0	0	4	4	4
10.	Paguyuban PKL	2	1	2	3	4	3	4	2	1	1	3	4
$\sum Ri^2$		21	19	21	20	21	21	19	16	12	25	29	37
Rata-rata (Mean)		2,10	1,90	2,10	2,00	2,10	2,10	1,90	1,60	1,20	2,50	2,90	3,70
PRIORITAS		III	III	II	III	II	II	IV	IV	III	I	I	I

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

- I** : Jawaban urutan responden pada Putaran I
II : Jawaban urutan responden pada Putaran II
III : Jawaban urutan responden pada Putaran III

Keselarasan jawaban responden pada putaran I:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap waktu jualan pedagang kaki lima non makanan/minuman.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,013$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima non makanan/minuman

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima non makanan/minuman

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 0,391$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 4-1 = 3 adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung < chi square tabel, maka keputusan adalah menerima H_0 dan menolak H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima non makanan/minuman.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah 0,942 > 0,05, maka H_0 diterima, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselarasan jawaban responden pada putaran II:

1. Proses perhitungan Kendall

- Proses sama dengan analisis putaran I, dimana rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,122$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

H_0 : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima non makanan/minuman

H_1 : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima non makanan/minuman

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Chi square hitung : $X^2 = n(k-1)W = 3,652$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% dan df = 3 adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung < chi square tabel, maka keputusan adalah menerima H_0 dan menolak H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima non makanan/minuman.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,302 > 0,05$, maka H_0 diterima, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselarasan jawaban responden pada putaran III:

1. Proses perhitungan Kendall

- Proses sama dengan analisis putaran I, dimana rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap waktu jualan pedagang kaki lima non makanan/minuman

- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,450$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

H_0 : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima non makanan/minuman

H_1 : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima non makanan/minuman

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Chi square hitung : $X^2 = n(k-1)W = 13,500$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% dan $df = 3$ adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima non makanan/minuman.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,004 < 0,05$, maka H_0 ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Tabel 4.104 Kesimpulan urutan prioritas waktu jualan pedagang kaki lima non makanan/minuman menurut ahli

Prioritas	Urutan Prioritas Waktu Jual PKL Non Makanan/Minuman		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1	Sore – Malam (jam 18.00 – 21.00)	Sore – Malam jam 18.00 – 21.00	Sore – Malam (jam 18.00 – 21.00)
2	Pagi – Sore jam 06.00 – 18.00 dan	Pagi – Sore jam 06.00 – 18.00	Pagi – Sore jam 06.00 – 18.00 dan Pagi – Siang jam 06.00 – 14.00
3	Pagi – Siang jam 06.00 – 14.00	Pagi – Siang jam 06.00 – 14.00	Pagi – Malam jam 06.00 – 21.00
4	Pagi – Malam jam 06.00 – 21.00	Pagi – Malam jam 06.00 – 21.00	
Nilai Keselarasan (W)	0,013	0,122	0,450
Tingkat Keselarasan	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Cukup

Sumber : Hasil Delphi 2006

Keterangan :

Berdasarkan perhitungan di atas terdapat kesimpulan bahwa responden lebih memprioritaskan waktu sore – malam hari (jam 18.00 – 21.00) sebagai waktu jualan pedagang kaki lima non makanan/minum dan jawaban responden dari putaran I, II sampai III semakin selaras dengan jawaban responden yang lain, Nilai W berkisar 0 – 1, maka semakin mendekati 1 menunjukkan semakin selarasnya jawaban responden

Keterangan mengenai urutan prioritas waktu jualan PKL non makanan/minuman menurut para responden ahli pada putaran I, putaran II, dan putaran III, akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel 4.105.

Tabel 4.105 Keterangan urutan prioritas waktu jualan pedagang kaki lima non makanan/minuman menurut ahli

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Balitbang	Lebih memprioritaskan antara sore-malam hari jam 18.00 – 21.00 sebagai waktu jualan PKL non makanan/minuman karena dapat bergantian dengan aktivitas sibuk pada pagi – sore hari. Adanya pembagian waktu bagi masing-masing jenis PKL ini harus disesuaikan dengan lokasi dan aturan dimana diperbolehkan berjualan menurut kebijakan pemerintah setempat.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.
Satpol PP	Lebih memprioritaskan pagi-siang hari mulai sebagai waktu jualan PKL non makanan/minuman karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang beraktivitas pada waktu tersebut.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Satpol PP merubah urutan jawaban yaitu lebih memprioritaskan waktu sore – malam hari dari pada pagi – sore hari dengan penataan yang dikondisikan seperti pasar malam.
Dinas PU	Dinas PU hanya menyetujui PKL makanan/minuman berada pada waktu sore-malam hari sehingga tidak menimbulkan kekumuhan dan kesemrawutan lingkungan pada jam-jam aktivitas sibuk pada pagi-sore harinya.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Kebersihan	Lebih menyetujui jangka waktu panjang dari pagi – malam hari untuk waktu jualan PKL non makanan/minuman karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sewaktu-waktu selalu dibutuhkan dan saat beraktivitas PKL non makanan minuman jarang menimbulkan masalah kebersihan karena jenis dagangannya yang kering namun lebih kepada penataan tata letak yang masih tidak teratur.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Kebersihan merubah urutan jawaban mengikuti hasil konsensus karena sudah merupakan kesimpulan berbagai pihak.
Dinas Pasar	Lebih memprioritaskan pagi- sore hari sebagai waktu jualan PKL non makanan/minuman karena aktivitas tertinggi masyarakat berada pada waktu tersebut sehingga kehadiran PKL dapat sekaligus memenuhi kebutuhan makan/minum masyarakat, PKL non makanan minuman	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Pasar tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Pasar merubah urutan dengan lebih memprioritaskan waktu sore – malam hari dari pada pagi – malam hari agar terjadi pembagian waktu dan tidak beraktivitas sepanjang hari.

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Bappeda	Lebih memprioritaskan sore – malam hari sebagai waktu jualan PKL non makanan/minuman dengan lokasi/tempat khusus sehingga dapat menciptakan sentra PKL non makanan/minuman sesuai dengan alokasi tempat dan waktu yang telah disepakati pemerintah.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.
Deperindag	Lebih memprioritaskan pagi-siang hari sebagai waktu jualan PKL non makanan/minuman karena sesuai dengan waktu aktivitas sebagian masyarakat sebagai sasaran konsumen.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Deperindag merubah urutan jawaban mengikuti hasil konsensus yaitu lebih memprioritaskan sore – malam hari dengan pertimbangan pergantian waktu dengan aktivitas pada pagi – sore harinya.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Deperindag tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Koperasi&UKM	Lebih memprioritaskan pagi – malam hari sebagai waktu jualan PKL non makanan/minuman karena memudahkan masyarakat jika sewaktu-waktu membutuhkan dagangan jenis non makanan/minuman.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Koperasi&UKM merubah urutan mengikuti hasil konsensus dengan lebih memprioritaskan sore – malam hari dari pada pagi – malam hari dengan pertimbangan pembagian waktu dengan aktivitas formal yang lebih banyak hidup pada pagi – sore hari.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Koperasi&UKM tidak merubah urutan jawaban.
Dosen Ekonomi	Lebih memprioritaskan sore – malam hari sebagai waktu jualan PKL makanan/minuman dengan lokasi/tempat khusus sehingga dapat menciptakan sentra PKL non makanan/minuman sesuai dengan alokasi tempat dan waktu yang telah disepakati pemerintah dan pedagang. Sehingga tidak mengganggu aktivitas formal.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.
Paguyuban PKL	Lebih memprioritaskan waktu jualan pada pagi – malam hari karena dengan rentang waktu yang panjang kesempatan mendapatkan penghasilan dan keuntungan menjadi semakin tinggi.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak pedagang merubah urutan jawaban dengan lebih memilih waktu pagi – siang hari karena masyarakat selalu beraktivitas pada waktu tersebut..	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak pedagang merubah urutan jawaban bersedia mengikuti hasil konsensus yaitu pada waktu sore – malam hari dengan syarat lokasinya ramai pengunjung.

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

Berdasarkan aspek waktu jualan, maka waktu jualan yang sesuai untuk pedagang kaki lima bahan mentah menurut pendapat para ahli dapat dilihat pada tabel 4.106, sedangkan hasil prioritas keseluruhan melalui teknis analisis Kendall West dengan menggunakan bantuan SPSS, untuk hasil tabel output dapat dilihat di lampiran.

Tabel 4.106 Urutan prioritas waktu jual pedagang kaki lima bahan mentah jawaban para ahli

No.	Pilihan Waktu	Pagi – Siang (jam 06.00 – 14.00)			Pagi – Sore (jam 06.00 – 18.00)			Pagi – Malam (jam 06.00 – 21.00)			Lainnya (Dinihari – 10.00)		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	Ahli	Prioritas (Angka 4 prioritas tertinggi, 0 tidak menyetujui)											
1.	Balitbang	3	3	3	4	4	4	2	2	2	0	0	0
2.	Satpol PP	3	3	3	2	2	2	1	1	1	4	4	4
3.	Dinas PU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dinas Kebersihan	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0
5.	Dinas Pasar	4	4	4	3	3	3	2	2	2	0	0	0
6.	Bappeda	4	4	4	3	3	3	0	0	0	0	2	2
7.	Deperindag	4	4	4	3	2	2	0	0	0	0	3	3
8.	Dinas Koperasi&UKM	3	3	3	4	4	4	1	1	1	0	2	2
9.	Dosen Ekonomi	4	4	4	3	3	3	0	0	0	0	2	2
10.	Paguyuban PKL	4	4	4	2	2	2	1	1	1	3	3	3
	$\sum Ri^2$	29	29	29	24	23	23	11	11	11	7	16	16
	Rata-rata (Mean)	2,90	2,90	2,90	2,40	2,30	2,30	1,10	1,10	1,10	0,70	1,60	1,60
	PRIORITAS	I	I	I	II	II	II	III	IV	IV	IV	III	III

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

- I** : Jawaban urutan responden pada Putaran I
II : Jawaban urutan responden pada Putaran II
III : Jawaban urutan responden pada Putaran III

Keselarasan jawaban responden pada putaran I:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap waktu jualan pedagang kaki lima bahan mentah.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,377$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima bahan mentah

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima bahan mentah

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 11,313$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 4-1 = 3 adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak Ho dan menerima Hi, atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima bahan mentah.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,010 < 0,05$, maka Ho ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselarasan jawaban responden putaran II:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap waktu jualan pedagang kaki lima bahan mentah.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,365$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima bahan mentah

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima bahan mentah

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 10,953$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 4-1 = 3 adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima bahan mentah.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,012 < 0,05$, maka H_0 ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselarasan jawaban responden putaran III:

Untuk analisis putaran III, mengenai proses perhitungan Kendall dan proses pengambilan keputusan sama dengan analisis putaran II, disebabkan responden ahli tidak merubah jawaban urutan dari putaran sebelumnya (putaran II). Dimana keputusannya adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif waktu jualan pedagang kaki lima bahan mentah.*

Tabel 4.107 Kesimpulan urutan prioritas waktu jualan pedagang kaki lima bahan mentah menurut ahli

Prioritas	Urutan Prioritas Waktu Jual PKL Bahan Mentah		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1	Pagi – Siang jam 06.00 – 14.00	Pagi – Siang jam 06.00 – 14.00	Pagi – Siang jam 06.00 – 14.00
2	Pagi – Sore jam 06.00 – 18.00	Pagi – Sore jam 06.00 – 18.00	Pagi – Sore jam 06.00 – 18.00
3	Pagi – Malam jam 06.00 – 21.00	Dinihari – Jam 10.00	Dinihari – jam 10.00
4	Dinihari – Jam 10.00	Pagi – Malam jam 06.00 – 21.00	Pagi – Malam jam 06.00 – 21.00
Nilai Keselarasan (W)	0,377	0,365	0,365
Tingkat Keselarasan	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : Hasil Delphi 2006

Keterangan :

Berdasarkan perhitungan di atas terdapat kesimpulan bahwa responden lebih memprioritaskan waktu pagi –siang hari (jam 06.00 – 14.00) sebagai waktu jualan pedagang kaki lima bahan mentah dan jawaban responden dari putaran I, II sampai III selaras dengan jawaban responden yang lain,

Nilai W berkisar 0 – 1, maka semakin mendekati 1 menunjukkan semakin selarasnya jawaban responden

Keterangan mengenai urutan prioritas waktu jualan PKL bahan mentah menurut para responden ahli pada putaran I, putaran II, dan putaran III, akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel 4.108.

Tabel 4.108 Keterangan urutan prioritas waktu jualan pedagang kaki lima bahan mentah menurut ahli

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Balitbang	Lebih memprioritaskan antara pagi – sore hari sebagai waktu jualan PKL bahan mentah karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat terutama ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup sehari-hari.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.
Satpol PP	Lebih memprioritaskan dini hari – pagi hari jam 10.00 sebagai waktu jualan PKL bahan mentah karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, terdapat juga masyarakat yang datang di waktu dini hari untuk mendapatkan harga lebih murah (bisanya pedagang sayur keliling) namun dengan syarat ditempatkan di tempat khusus agar tidak merugikan pedagang formal.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.
Dinas PU	Dinas PU tidak menyetujui adanya penentuan tempat dan waktu jual bagi PKL bahan mentah di dekat pusat keramaian karena akan dapat mematikan dan merugikan pedagang formal (jika berada di dekat pasar) dan menyebabkan kekumuhan, hal ini juga memungkinkan adanya konflik, sehingga harus dibuatkan lokasi khusus sebagai sentra PKL bahan mentah dengan dikenai biaya sewa dan retribusi dari Dinas Pasar dengan waktu yang menyesuaikan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Kebersihan	Lebih menyetujui jangka waktu panjang dari pagi – malam hari untuk waktu jualan PKL bahan mentah karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sewaktu-waktu selalu dibutuhkan namun dengan syarat sesuai kebijakan pemerintah setempat.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Pasar	Lebih memprioritaskan pagi - siang hari sebagai waktu jualan PKL bahan mentah karena aktivitas tertinggi masyarakat berada pada waktu tersebut sehingga kehadiran PKL dapat sekaligus memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Pasar merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Pasar tidak merubah urutan jawaban.

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Bappeda	Lebih memprioritaskan pagi - siang hari sebagai waktu jualan PKL bahan mentah dengan lokasi/tempat khusus karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat rumah tangga.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.
Deperindag	Lebih memprioritaskan pagi-siang hari sebagai waktu jualan PKL bahan mentah karena sesuai dengan waktu aktivitas sebagian masyarakat sebagai sasaran konsumen.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Deperindag merubah urutan jawaban dengan lebih memprioritaskan waktu mulai dari dini hari – pagi hari jam 10.00 dari pada pagi – siang hari karena sama seperti aktivitas pedagang formal.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Deperindag tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Koperasi&UKM	Lebih memprioritaskan pagi – sore hari sebagai waktu jualan PKL bahan mentah karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pengunjung dan konsumen.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Koperasi&UKM merubah urutan dengan menyetujui waktu dini hari – pagi hari jam 10.00 menjadi alternatif waktu jualan PKL bahan mentah.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Koperasi&UKM tidak merubah urutan jawaban.
Dosen Ekonomi	Lebih memprioritaskan pagi - siang hari sebagai waktu jualan PKL bahan mentah dengan dibuatkan lokasi/tempat khusus yang strategis karena sesuai dengan kebiasaan masyarakat rumah tangga.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.
Paguyuban PKL	Lebih memprioritaskan waktu jualan pada pagi – siang hari karena ramainya pengunjung ada pada waktu tersebut.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Paguyuban PKL tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Paguyuban PKL tidak merubah urutan jawaban.

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

Berdasarkan aspek di atas, maka prioritas aspek-aspek ekonomi menurut pendapat para ahli dapat dilihat pada tabel 4.109, sedangkan hasil prioritas aspek ekonomi secara keseluruhan melalui teknis analisis Kendall West dengan menggunakan bantuan SPSS, dan untuk hasil tabel output dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.109 Urutan prioritas aspek ekonomi jawaban para ahli

No.	Pilihan Lokasi Putaran Ahli	Jenis Dagangan			Waktu Jualan			Biaya Angkutan			Lainnya (Biaya Sewa)			Lainnya (Daya beli masyarakat)		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
Prioritas (Angka 4 prioritas tertinggi, 0 tidak menyetujui)																
1.	Balitbang	4	4	4	2	2	2	3	3	3	0	0	0	1	1	1
2.	Satpol PP	4	4	4	3	3	3	2	2	2	0	1	1	0	0	0
3.	Dinas PU	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1	0	0	0
4.	Dinas Kebersihan	3	3	3	4	4	4	2	2	2	0	1	1	0	0	0
5.	Dinas Pasar	4	4	4	2	3	3	3	2	2	0	1	1	0	0	0
6.	Bappeda	4	4	4	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0
7.	Deperindag	4	4	4	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0
8.	Dinas Koperasi&UKM	4	4	4	2	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0
9.	Dosen Ekonomi	4	4	4	3	3	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0
10.	Paguyuban PKL	4	4	4	3	3	3	2	1	1	0	2	2	0	0	0
$\sum Ri$		39	39	39	28	28	28	23	22	22	1	6	6	1	1	1
Rata-rata (Mean)		3,90	3,90	3,90	2,80	2,80	2,80	2,30	2,20	2,20	0,10	0,60	0,60	0,10	0,10	0,10
PRIORITAS		I	I	I	II	II	II	III	III	III	IV	IV	IV	IV	V	V

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

- I** : Jawaban urutan responden pada Putaran I
II : Jawaban urutan responden pada Putaran II
III : Jawaban urutan responden pada Putaran III

Keselarasan jawaban responden pada putaran I:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap aspek-aspek ekonomi dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,921$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap aspek-aspek ekonomi dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap aspek-aspek ekonomi dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 36,833$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 5-1 = 4 adalah 7,7794

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak Ho dan menerima Hi, atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap aspek-aspek ekonomi dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,000 < 0,05$, maka Ho ditolak.

Keselarasan jawaban responden pada putaran II:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap aspek-aspek ekonomi dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,880$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap aspek-aspek ekonomi dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap aspek-aspek ekonomi dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 35,184$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% ($\alpha = 10\%$) dan derajat kebebasan = $k-1$ atau $5-1 = 3$ adalah 7,7794

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung $>$ chi square tabel, maka keputusan adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap aspek-aspek ekonomi dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak.

Keselarasan jawaban responden pada putaran III:

Untuk analisis putaran III, mengenai proses perhitungan Kendall dan proses pengambilan keputusan sama dengan analisis putaran II, disebabkan responden ahli tidak merubah jawaban urutan dari putaran sebelumnya (putaran II). Dimana keputusannya adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap aspek-aspek ekonomi dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.*

Tabel 4.110 Kesimpulan urutan prioritas aspek ekonomi menurut ahli

Prioritas	Urutan Prioritas Aspek Ekonomi		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1	Jenis Dagangan	Jenis Dagangan	Jenis Dagangan
2	Waktu Jualan	Waktu Jualan	Waktu Jualan
3	Biaya Angkutan	Biaya Angkutan	Biaya Angkutan
4	Daya beli masyarakat Dan biaya sewa	Biaya sewa	Biaya sewa
5		Daya beli masyarakat	Daya beli masyarakat
Nilai Keselarasan (W)	0,921	0,880	0,880
Tingkat Keselarasan	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Delphi 2006

Keterangan :

Berdasarkan perhitungan di atas terdapat kesimpulan bahwa responden lebih memprioritaskan jenis dagangan sebagai aspek ekonomi yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima dan jawaban responden dari putaran I, II sampai III selaras dengan jawaban responden yang lain.

Nilai W berkisar 0 – 1, maka semakin mendekati 1 menunjukkan semakin selarasnya jawaban responden

Berdasarkan tabel 4.110 dapat dijelaskan bahwa urutan prioritas aspek ekonomi menurut para ahli sampai pada putaran III sebagai hasil akhir adalah jenis dagangan, waktu jualan dan biaya angkutan PKL.

Tabel 4.111 Keterangan urutan prioritas aspek ekonomi dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima menurut ahli

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Balitbang	Lebih memprioritaskan jenis dagangan, karena lokasi jualan dapat mempengaruhi besar kecilnya omset pedagang, sehingga berakibat juga pada keuntungan yang dihasilkan. Pihak Balitbang juga memberikan usulan lain yaitu pertimbangan daya beli masyarakat dalam suatu lokasi yang akan mempengaruhi besarnya konsumen.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.
Satpol PP	Lebih memprioritaskan jenis dagangan, karena biasanya pedagang mencari lokasi strategis yang sekiranya dapat membuat barang dagangannya cepat terjual habis.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban. Menyetujui jika biaya sewa tempat dipertimbangkan dalam menentukan lokasi PKL yang nantinya dapat dihubungkan dengan besar retribusi bagi PKL sehingga dapat diperlakukan sama dengan pedagang formal.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.
Dinas PU	Lebih memprioritaskan jenis dagangan, karena pedagang harus jeli melihat daya beli dan ketertarikan masyarakat pada suatu lokasi yang sesuai dengan barang dagangannya sehingga mendapatkan jaminan kesejahteraan berupa keuntungan. Dinas PU memberikan usulan lain yaitu pertimbangan biaya sewa tempat untuk berjualan karena mempengaruhi legalitas lokasi usaha, sehingga tidak terkena obrakan dan terkait dengan kesesuaian program dengan anggaran daerah.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Kebersihan	Lebih memprioritaskan waktu jualan, karena pedagang harus pintar melihat lokasi strategis untuk berjualan sesuai dengan jam ramai sepiunya pengunjung.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban. Menyetujui biaya sewa tempat PKL sebagai pertimbangan menentukan lokasi jualan karena segala program pemerintah akan berjalan dengan baik jika anggaran pelaksanaan tercukupi.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Pasar	Lebih memprioritaskan jenis dagangan, karena biasanya pedagang mencari lokasi	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Pasar tidak merubah urutan	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
	yang berpotensi masyarakatnya membutuhkan barang dagangannya sehingga dapat cepat terjual.	jawaban. Menyetujui biaya sewa tempat PKL sebagai pertimbangan menentukan lokasi PKL karena terlaksananya setiap program pemerintah tergantung besarnya anggaran.	Dinas Pasar tidak merubah urutan jawaban.
Bappeda	Lebih memprioritaskan jenis dagangan, karena pedagang harus jeli melihat pangsa pasar pada suatu lokasi yang sesuai dengan jenis dagangan yang diperjual belikan sehingga mendapatkan keuntungan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.
Deperindag	Lebih memprioritaskan jenis dagangan, karena disamping memudahkan pengaturan PKL juga harus menyesuaikan lokasi dengan jenis dagangan yang sekiranya dapat menarik konsumen untuk membeli barang dagangan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Deperindag tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Deperindag tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Koperasi&UKM	Lebih memprioritaskan jenis dagangan, karena pedagang harus jeli melihat pangsa pasar pada suatu lokasi yang sesuai dengan jenis dagangan yang diperjual belikan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Koperasi&UKM merubah urutan mengikuti hasil konsensus dengan lebih memprioritaskan waktu jualan dari pada biaya angkutan dengan pertimbangan selain disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat juha harus sesuai dengan waktu jualan yang diperbolehkan bagi PKL.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Koperasi&UKM tidak merubah urutan jawaban.
Dosen Ekonomi	Lebih memprioritaskan jenis dagangan, karena pedagang harus bisa melihat pangsa pasar pada suatu lokasi yang sesuai dengan jenis dagangan yang diperjual belikan sehingga mendapatkan keuntungan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.
Paguyuban PKL	Lebih memprioritaskan jenis dagangan karena tujuan utama adalah bagaimana barang dagangannya terjual dengan cepat dalam suatu lokasi.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Paguyuban PKL merubah urutan jawaban dengan lebih memprioritaskan pertimbangan sewa tempat yang berimbang pada penarikan retribusi namun dengan syarat lokasi tersebut harus dapat menjamin kesejahteraan pedagang (lokasi ramai pengunjung).	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Paguyuban PKL tidak merubah urutan jawaban.

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

2) Identifikasi urutan prioritas aspek sosial dalam menentukan lokasi jualan pedagang kaki lima

Ruang umum merupakan ruang milik pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Seperti trotoar, taman kota, ruang terbuka termasuk fasilitas atau sarana kota seperti halte, jembatan penyeberangan dan lain sebagainya. Ruang privat adalah ruang yang dimiliki oleh pemilik toko, perkantoran, dan lain-lain. Penggunaan ruang-ruang ini kemudian menjadi *conflict of interest* atau permasalahan-permasalahan yang timbul akibat keberadaan pedagang kaki lima mulai dari pemanfaatan ruang publik sampai kepada kemerosotan fisik kota (Purnama).

Beberapa kriteria sebagai tolak ukur kesesuaian ruang aktivitas PKL pada suatu kawasan pusat kota, antara lain :

- a. Lokasi tersebut memiliki ruang untuk aktivitas PKL dengan ukuran lebar minimal ruang usaha yang dipakai PKL di kawasan ditambah 2 meter ruang untuk pejalan.
- b. Lokasi PKL mudah dilihat dan berada pada lokasi yang sering dikunjungi orang (tingkat kunjungan tinggi).
- c. Ruang aktivitas PKL yang dikembangkan harus sesuai dengan guna lahan yang telah ditentukan pemerintah.
- d. Ruang aktivitas PKL keberadaannya tidak melanggar ketentuan-ketentuan teknis dalam pembangunan.
- e. Aktivitas PKL pada suatu ruang mempunyai interaksi dengan aktivitas formal di sekitarnya (memiliki hubungan yang saling mendukung).
- f. Keberadaan PKL diterima oleh masyarakat sekitar (rasa aman masyarakat tidak terganggu) dan memiliki batas sosial dengan jarak minimal 1,2 meter dari bangunan tempat masyarakat tinggal.
- g. Ruang aktivitas PKL mendapat dukungan masyarakat (terutama masyarakat sekitar lokasi PKL).

Hasil dari penjarangan persepsi para ahli dengan tujuan mengumpulkan opini kelompok secara formal melalui serangkaian pertanyaan (kuisoner) mengenai aspek-aspek sosial (keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan) dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima dapat dilihat pada tabel 4.112, untuk hasil tabel output dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.112 Jawaban urutan prioritas aspek sosial jawaban para ahli

No.	Pilihan Aspek Sosial Putaran	Keamanan			Kenyamanan			Ketertiban			Kebersihan			Lainnya (Keindahan)		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	Ahli	Prioritas (Angka 5 prioritas tertinggi, 0 tidak menyetujui)														
1.	Balitbang	3	3	3	2	2	2	5	5	5	4	4	4	1	1	1
2.	Satpol PP	1	1	1	3	3	3	4	4	4	2	2	2	0	0	0
3.	Dinas PU	2	2	2	1	1	1	3	3	3	4	4	4	0	0	0
4.	Dinas Kebersihan	1	1	1	2	2	2	4	4	4	3	3	3	0	0	0
5.	Dinas Pasar	2	2	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	0	0	0
6.	Bappeda	2	2	2	1	1	1	4	4	4	3	3	3	0	0	0
7.	Deperindag	4	3	3	1	1	1	2	4	4	3	2	2	0	0	0
8.	Dinas Koperasi&UKM	5	5	5	2	2	2	4	4	4	3	3	3	1	1	1
9.	Dosen Ekonomi	2	2	2	1	1	1	4	4	4	3	3	3	0	0	0
10.	Paguyuban PKL	4	4	4	3	3	3	1	1	1	2	2	2	0	0	0
	∑Ri	26	25	25	19	19	19	35	37	37	28	27	27	2	2	2
	Rata-rata (Mean)	2,60	2,50	2,50	1,90	1,90	1,90	3,50	3,70	3,70	2,80	2,70	2,70	0,20	0,20	0,20
	PRIORITAS	III	III	III	IV	IV	IV	I	I	I	II	II	II	V	V	V

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

- I** : Jawaban urutan responden pada Putaran I
II : Jawaban urutan responden pada Putaran II
III : Jawaban urutan responden pada Putaran III

Keselarasan jawaban responden pada putaran I:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap aspek-aspek sosial dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,630$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap aspek-aspek sosial dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap aspek-aspek sosial dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 25,200$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = $k-1$ atau $5-1 = 4$ adalah 7,7794

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap aspek-aspek sosial dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselarasan jawaban responden pada putaran II:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap aspek-aspek sosial dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,668$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

H_0 : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap aspek-aspek sosial dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima

H_1 : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap aspek-aspek sosial dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 26,720$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = $k-1$ atau $5-1 = 4$ adalah 7,7794

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap aspek-aspek sosial dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselarasan jawaban responden pada putaran III:

Untuk analisis putaran III, mengenai proses perhitungan Kendall dan proses pengambilan keputusan sama dengan analisis putaran II, disebabkan responden ahli tidak merubah jawaban urutan dari putaran sebelumnya (putaran II). Dimana keputusannya adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap aspek-aspek sosial dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima*.

Tabel 4.113 Kesimpulan urutan prioritas aspek sosial menurut ahli

Prioritas	Urutan Prioritas Aspek Sosial		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1	Ketertiban	Ketertiban	Ketertiban
2	Kebersihan	Kebersihan	Kebersihan
3	Keamanan	Keamanan	Keamanan
4	Kenyamanan	Kenyamanan	Kenyamanan
5	Keindahan	Keindahan	Keindahan
Nilai Keselarasan (W)	0,630	0,668	0,668
Tingkat Keselarasan	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : Hasil Delphi 2006

Keterangan :

Berdasarkan perhitungan di atas terdapat kesimpulan bahwa responden lebih memprioritaskan ketertiban sebagai aspek sosial yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima dan jawaban responden dari putaran I, II sampai III semakin selaras dengan jawaban responden yang lain.

Nilai W berkisar 0 – 1, maka semakin mendekati 1 menunjukkan semakin selarasnya jawaban responden

Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan PKL yang bertitik berat pada kebersihan dan ketertiban tersebut karena kepentingan dasar pemerintah (kota) terhadap kehadiran kegiatan sektor informal ialah menyelamatkan sarana dan fasilitas umum yang diduduki secara tidak sah, mencegah usaha yang mengganggu ketertiban umum, keindahan, kebersihan dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan tabel 4.113 dapat dijelaskan bahwa urutan prioritas aspek sosial menurut para ahli sampai pada putaran III sebagai hasil akhir adalah kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan. sebagai tambahan, pihak Balitbang juga mempertimbangkan aspek keindahan/estetika lokasi agar lokasi PKL yang merupakan bagian dari kota memiliki kualitas lingkungan yang bagus dan menarik.

Tabel 4.114 Keterangan urutan prioritas aspek sosial dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima menurut ahli

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Balitbang	Lebih memprioritaskan ketertiban, sehingga tidak memberikan kesan semrawut/tidak teratur pada bagian wajah kota. Balitbang memberikan usulan lain yaitu pertimbangan keindahan agar lokasi PKL dapat menjadi aset yang memiliki daya tarik khas bagi Kabupaten Gresik.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.
Satpol PP	Lebih memprioritaskan ketertiban, karena sesuai dengan Perda Kabupaten Gresik No.25 Tahun 2003 dengan maksud penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi aman, tenram, tertib dan teratur di Kabupaten Gresik.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.
Dinas PU	Lebih memprioritaskan kebersihan, karena masalah ini selalu ada di segala lokasi yang terdapat PKL. Sehingga secara sadar PKL harus menjaga kebersihan sekitar lokasi agar tidak ada kesan kumuh dan kotor.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Kebersihan	Lebih memprioritaskan ketertiban dengan adanya penataan PKL sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat, sehingga tidak memberikan kesan semrawut/tidak teratur pada bagian wajah kota.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Pasar	Lebih memprioritaskan ketertiban dengan adanya penataan dan pembinaan PKL sesuai dengan Peraturan PKL di Kabupaten Gresik.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Pasar tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Pasar tidak merubah urutan jawaban.
Bappeda	Lebih memprioritaskan ketertiban dengan melakukan penataan PKL oleh pihak Dinas Pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Deperindag	Lebih memprioritaskan keamanan bagi pedagang dengan tidak adanya gangguan razia, pencopetan, dan sebagainya yang juga mempengaruhi kenyamanan masyarakat sebagai pengunjung. Oleh karena itu PKL harus berjualan di lokasi yang dilegalkan atau diperbolehkan oleh pemerintah setempat.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Deperindag merubah urutan jawaban mengikuti hasil konsensus dengan lebih memprioritaskan ketertiban PKL sehingga sehingga lokasi tidak terlihat berserakan/tidak teratur.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Deperindag tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Koperasi&UKM	Lebih memprioritaskan keamanan bagi pedagang dengan tidak adanya gangguan razia dan bagi masyarakat pengunjung dari aktivitas kriminal seperti pencopetan, gangguan preman, dan sebagainya.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Koperasi&UKM tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Koperasi&UKM tidak merubah urutan jawaban.
Dosen Ekonomi	Lebih memprioritaskan ketertiban dengan melakukan penataan PKL oleh pihak Dinas Pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.
Paguyuban PKL	Lebih memprioritaskan keamanan dalam berdagang dari gangguan razia kasar pihak Satpol PP, pencopetan maupun gangguan preman yang membuat takut pengunjung.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Paguyuban PKL tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Paguyuban PKL tidak merubah urutan jawaban.

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

3) Identifikasi urutan prioritas aspek fisik dalam menentukan lokasi jualan pedagang kaki lima

Hasil dari penjarangan persepsi para ahli dengan tujuan mengumpulkan opini kelompok secara formal melalui serangkaian pertanyaan (kuisoner) mengenai aspek-aspek fisik (kemudahan aksesibilitas/sarana, angkutan, kedekatan dengan pusat keramaian kota/kegiatan masyarakat, kedekatan lokasi PKL dengan tempat tinggal) dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

▪ Kedekatan dengan pusat keramaian kota/kegiatan masyarakat

Berdasarkan aspek kedekatan dengan pusat keramaian kota/kegiatan masyarakat, maka lokasi dalam jarak dekat, sedang dan jauh yang sesuai untuk pedagang kaki lima (PKL) menurut pendapat para ahli dapat dilihat pada tabel 4.115, 4.118, 4.121 sedangkan hasil prioritas secara keseluruhan melalui teknis analisis Kendall West dengan menggunakan bantuan SPSS, untuk hasil tabel output dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.115 Jawaban urutan prioritas pusat keramaian berjarak dekat (<100m) dengan lokasi pedagang kaki lima menurut para ahli

No.	Pilihan Pusat Keramaian	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko			Perkantoran /sekolah			Terminal			Perumahan/ tempat tinggal		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	Ahli	Prioritas (Angka 4 prioritas tertinggi, 0 tidak menyetujui)											
1.	Balitbang	4	4	4	1	1	1	3	3	3	2	2	2
2.	Satpol PP	4	4	4	1	1	1	2	2	3	3	3	2
3.	Dinas PU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dinas Kebersihan	4	4	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0
5.	Dinas Pasar	4	4	4	1	1	1	3	3	3	2	2	2
6.	Bappeda	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0
7.	Deperindag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Dinas Koperasi&UKM	4	4	4	1	1	1	3	3	3	2	2	2
9.	Dosen Ekonomi	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0
10.	Paguyuban PKL	4	4	4	3	3	3	1	2	2	2	1	1
$\sum Ri$		24	24	24	7	7	7	20	21	25	11	10	9
Rata-rata (Mean)		2,40	2,40	2,40	0,70	0,70	0,70	2,00	2,10	2,50	1,10	1,00	0,90
PRIORITAS		I	I	I	IV	IV	IV	II	II	II	III	III	III

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

- I : Jawaban urutan responden pada Putaran I
II : Jawaban urutan responden pada Putaran II
III : Jawaban urutan responden pada Putaran III

Keselarasan jawaban responden pada putaran I:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak dekat dengan lokasi pedagang kaki lima.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,371$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak dekat dengan lokasi pedagang kaki lima

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak dekat dengan lokasi pedagang kaki lima

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 11,118$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 4-1 = 3 adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak Ho dan menerima Hi, atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak dekat dengan lokasi pedagang kaki lima.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,011 < 0,05$, maka Ho ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselrasan jawaban responden pada putaran II:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak dekat dengan lokasi pedagang kaki lima.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,406$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak dekat dengan lokasi pedagang kaki lima

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak dekat dengan lokasi pedagang kaki lima

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 12,176$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 5-1 = 4 adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak Ho dan menerima Hi, atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak dekat dengan lokasi pedagang kaki lima.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,007 < 0,05$, maka Ho ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselrasan jawaban responden pada putaran III:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak dekat dengan lokasi pedagang kaki lima.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,494$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak dekat dengan lokasi pedagang kaki lima

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak dekat dengan lokasi pedagang kaki lima

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 14,831$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 4-1 = 3 adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak Ho dan menerima Hi, atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak dekat dengan lokasi pedagang kaki lima.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,002 < 0,05$, maka Ho ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Tabel 4.116 Kesimpulan urutan prioritas pusat keramaian berjarak dekat (<100m) dengan lokasi pedagang kaki lima menurut ahli

Prioritas	Urutan Prioritas Pusat Keramaian Berjarak Dekat dengan PKL		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1.	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko
2.	Terminal	Terminal	Terminal
3.	Perumahan/tempat tinggal	Perumahan/tempat tinggal	Perumahan/tempat tinggal
4.	Perkantoran/sekolah	Perkantoran/sekolah	Perkantoran/sekolah
Nilai Keselarasan (W)	0,371	0,406	0,494
Tingkat Keselarasan	Rendah	Cukup	Cukup

Sumber : Hasil Delphi 2006

Keterangan :

Berdasarkan perhitungan di atas terdapat kesimpulan bahwa responden lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai pusat keramaian masyarakat yang dipertimbangkan berjarak dekat (<100 m) dengan lokasi aktivitas pedagang kaki lima dan jawaban responden dari putaran I, II sampai III semakin selaras dengan jawaban responden yang lain,

Nilai W berkisar 0 – 1, maka semakin mendekati 1 menunjukkan semakin selarasnya jawaban responden

Keterangan mengenai urutan prioritas pusat keramaian masyarakat yang berjarak dekat (<100 m) dengan lokasi aktivitas pedagang, menurut para responden ahli pada putaran I, putaran II, dan putaran III, akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel 4.117.



Tabel 4.117 Keterangan urutan prioritas pusat keramaian berjarak dekat (<100m) dengan lokasi pedagang kaki lima menurut ahli

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Balitbang	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak dekat (<100 m) dari pusat perbelanjaan/pasar/ruko karena tingkat keramaian masyarakatnya tinggi.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.
Satpol PP	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak dekat (<100 m) dari pasar/pusat perbelanjaan/ruko karena disana merupakan pusat kegiatan ekonomi dan keramaian masyarakat.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP merubah urutan jawaban dengan lebih memprioritaskan lokasi berjarak dekat (<100 m) dengan terminal daripada perumahan/tempat tinggal karena dapat memudahkan penumpang/karyawan/sopir dalam memenuhi kebutuhannya.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.
Dinas PU	Dinas PU tidak menyetujui lokasi PKL dekat pusat keramaian dengan jarak dekat (<100 m) karena aka sangat mengganggu aktivitas formal dan arus lalu lintas.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Kebersihan	Lebih memprioritaskan lokasi PKL dekat (<100 m) dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko karena merupakan pusat kegiatan perdagangan yang banyak dikunjungi.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Kebersihan merubah urutan jawaban dengan menyetujui lokasi PKL berjarak dekat (<100 m) dengan terminal karena banyak masyarakat yang membutuhkan seperti penumpang, sopir, karyawan dan sebagainya.
Dinas Pasar	Lebih memprioritaskan lokasi PKL dekat (<100 m) dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko karena lokasinya sangat strategis dengan tingkat keramaian yang tinggi, selain itu juga disana tersedia lahan kosong untuk dapat dilakukan pengaturan PKL.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Pasar tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Pasar tidak merubah urutan jawaban.
Bappeda	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak dekat dengan terminal untuk memudahkan pelayanan masyarakat	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Bappeda tidak merubah urutan

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
	(karyawan, sopir, penumpang, dll) sebagai konsumen.		jawaban.
Deperindag	Deperindag tidak menyetujui lokasi PKL dekat pusat keramaian dengan jarak dekat (<100 m) karena sangat mengganggu aktivitas formal, menambah kesemrawutan pusat keramaian dan menjadi rawan kemacetan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Deperindag tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Deperindag tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Koperasi&UKM	Lebih memprioritaskan keamanan bagi pedagang dengan tidak adanya gangguan razia dan bagi masyarakat pengunjung dari aktivitas kriminal seperti pencopetan, gangguan preman, dan sebagainya.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Koperasi&UKM tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Koperasi&UKM tidak merubah urutan jawaban.
Dosen Ekonomi	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak dekat dengan terminal untuk memberikan kemudahan pelayanan masyarakat bagi konsumen.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dosen tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.
Paguyuban PKL	Lebih memprioritaskan berjualan dengan berjarak dekat (<100 m) dengan pusat perbelanjaan/pasar/ruko karena merupakan lokasi yang strategis dengan banyak pengujung sehingga banyak yang melihat bahkan membeli dagangannya.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Paguyuban PKL merubah urutan jawaban mengikuti hasil konsensus dengan lebih menyetujui lokasi jualan berjarak dekat dengan terminal daripada dengan perumahan karena yang membutuhkan kehadiran PKL lebih banyak di terminal seperti para sopir, penumpang, kernet dan lain-lain.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Paguyuban PKL tidak merubah urutan jawaban.

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

Tabel 4.118 Jawaban urutan prioritas pusat keramaian berjarak sedang (100 – 500 m) dengan lokasi pedagang kaki lima menurut ahli

No.	Pilihan Pusat Keramaian Putaran Ahli	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko			Perkantoran /sekolah			Terminal			Perumahan/ tempat tinggal		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
		Prioritas (Angka 4 prioritas tertinggi, 0 tidak menyetujui)											
1.	Balitbang	4	4	4	1	2	2	3	3	3	2	1	1
2.	Satpol PP	0	3	3	0	4	4	0	0	0	4	2	2
3.	Dinas PU	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3
4.	Dinas Kebersihan	0	0	3	4	4	4	0	3	2	0	2	1
5.	Dinas Pasar	4	4	4	3	3	3	2	2	2	1	1	1
6.	Bappeda	4	4	4	1	1	2	2	2	1	3	3	3
7.	Deperindag	4	4	4	1	1	1	3	2	2	2	3	3
8.	Dinas Koerasi&UKM	4	4	4	3	3	3	0	0	2	0	0	1
9.	Dosen Ekonomi	4	4	4	1	1	2	2	2	1	3	3	3
10.	Paguyuban PKL	2	2	2	4	4	4	3	3	3	1	1	1
$\sum Ri$		26	29	32	18	23	25	15	17	20	16	16	19
Rata-rata (Mean)		2,60	2,90	3,20	1,80	2,30	2,50	1,50	1,70	2,00	1,60	1,60	1,90
PRIORITAS		I	I	I	II	II	II	IV	III	III	III	IV	IV

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

- I : Jawaban urutan responden pada Putaran I
II : Jawaban urutan responden pada Putaran II
III : Jawaban urutan responden pada Putaran III

Keselarasan jawaban responden pada putaran I:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak sedang dengan lokasi pedagang kaki lima.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,186$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak sedang dengan lokasi pedagang kaki lima

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak sedang dengan lokasi pedagang kaki lima

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 5,593$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 4-1 = 3 adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung < chi square tabel, maka keputusan adalah menerima Ho dan menolak Hi, atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak sedang dengan lokasi pedagang kaki lima.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah 0,133 > 0,05, maka Ho diterima, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselarasan jawaban responden pada putaran II:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak sedang dengan lokasi pedagang kaki lima.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,203$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak sedang dengan lokasi pedagang kaki lima

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak sedang dengan lokasi pedagang kaki lima

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 6,101$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 4-1 = 3 adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung < chi square tabel, maka keputusan adalah menerima H_0 dan menolak H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak sedang dengan lokasi pedagang kaki lima.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah 0,107 > 0,05, maka H_0 diterima, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselarasan jawaban responden pada putaran III:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak sedang dengan lokasi pedagang kaki lima.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,256$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

H_0 : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak sedang dengan lokasi pedagang kaki lima

H_1 : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak sedang dengan lokasi pedagang kaki lima

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 7,667$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% ($\alpha = 10\%$) dan derajat kebebasan = $k-1$ atau $5-1 = 4$ adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung $>$ chi square tabel, maka keputusan adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak sedang dengan lokasi pedagang kaki lima.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,049 < 0,05$, maka H_0 ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Tabel 4.119 Kesimpulan urutan prioritas pusat keramaian berjarak sedang (100 – 500 m) dengan lokasi pedagang kaki lima menurut ahli

Prioritas	Urutan Prioritas Pusat Keramaian berjarak Sedang dengan PKL		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko
2	Perkantoran/sekolah	Perkantoran/sekolah	Perkantoran/sekolah
3	Perumahan/tempat tinggal	Terminal	Terminal
4	Terminal	Perumahan/tempat tinggal	Perumahan/tempat tinggal
Nilai Keselarasan (W)	0,186	0,203	0,256
Tingkat Keselrasan	Sangat rendah	Rendah	Rendah

Sumber : Hasil Delphi 2006

Keterangan :

Berdasarkan perhitungan di atas terdapat kesimpulan bahwa responden lebih memprioritaskan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sebagai pusat keramaian masyarakat yang bisa juga dipertimbangkan berjarak sedang (100-500 m) dengan lokasi aktivitas pedagang kaki lima dan jawaban responden dari putaran I, II sampai III semakin selaras dengan jawaban responden yang lain, walaupun tingkat keselarasan rendah.

Nilai W berkisar 0 – 1, maka semakin mendekati 1 menunjukkan semakin selarasnya jawaban responden

Keterangan mengenai urutan prioritas pusat keramaian masyarakat berjarak sedang (100-500m) dengan lokasi aktivitas PKL, menurut para responden ahli pada putaran I, putaran II, dan putaran III, akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel 4.120.

Tabel 4.120 Keterangan urutan prioritas pusat keramaian berjarak sedang (100 – 500 m) dengan lokasi pedagang kaki lima menurut ahli

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Balitbang	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak sedang (100-500 m) dari pusat perbelanjaan/pasar/ruko karena tingkat keramaian masyarakatnya tinggi dan masih dapat dilakukan pengaturan agar tidak mengganggu arus lalu lintas.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang merubah urutan jawaban dengan lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak sedang dengan perkantoran/sekolah daripada dengan perumahan/tempat tinggal karena memudahkan karyawan/pegawai/siswa memenuhi kebutuhannya terutama makanan/minuman.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.
Satpol PP	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak sedang (100-500 m) dengan perumahan/tempat tinggal untuk kemudahan pelayanan masyarakat perumahan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP merubah urutan jawaban dengan lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak sedang dengan perkantoran/sekolah karena memudahkan karyawan/pegawai/siswa memenuhi kebutuhannya terutama makanan/minuman.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.
Dinas PU	Dinas PU tidak menyetujui lokasi PKL berjarak sedang (100-500 m) karena masih dapat mengganggu aktivitas formal dan arus lalu lintas.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas PU merubah urutan jawaban dengan lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak sedang dengan perkantoran/sekolah karena memudahkan karyawan/pegawai/siswa namun dengan disediakan tempat khusus yang telah dilakukan penataan.
Dinas Kebersihan	Lebih memprioritaskan lokasi PKL sedang (100-500 m) dengan perkantoran/sekolah sehingga para karyawan/pegawai/siswa masih dapat mengesk PKL namun tidak mengakibatkan kemacetan dan tidak mengganggu aktivitas perkantoran/belajar mengajar.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Kebersihan merubah urutan jawaban dengan menyetujui lokasi PKL berjarak sedang dengan terminal dengan dilakukan penataan sehingga tidak menambah kesemrawutan aktivitas di terminal.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Kebersihan merubah urutan jawaban dengan lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak sedang dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko daripada terminal agar tidak mengganggu arus lalu lintas akibat keramaian pusat perbelanjaan.
Dinas Pasar	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak sedang (100-500 m) dengan pasar/pusat	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Pasar tidak merubah urutan

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
	perbelanjaan/ruko karena lokasinya sangat strategis dengan tingkat keramaian yang tinggi, selain itu juga disana tersedia lahan kosong untuk dapat dilakukan pengaturan PKL.	Pasar tidak merubah urutan jawaban.	jawaban.
Bappeda	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak sedang dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sehingga dapat dilakukan pengaturan agar tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan pengunjung.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Bappeda merubah urutan jawaban dengan lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak sedang dengan perkantoran/sekolah daripada perumahan karena untuk pelayanan konsumen seperti karyawan/pegawai/siswa.
Deperindag	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak sedang dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sehingga pedagang masih diberi kesempatan mencari penghasilan di lokasi startegis namun tidak terlalu dekat dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Deperindag merubah urutan jawaban dengan lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak sedang dengan perumahan/tempat tinggal daripada terminal untuk memudahkan pelayanan penduduk daerah perumahan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Deperindag tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Koperasi&UKM	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak sedang dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sehingga agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Koperasi&UKM tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Koperasi&UKM merubah urutan jawaban dengan menyetujui lokasi PKL berjarak sedang dengan terminal dengan pertimbangan pelayanan terhadap masyarakat di terminal yang membutuhkan.
Dosen Ekonomi	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak sedang dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sehingga dengan pertimbangan kebersihan, keteraturan dan kenyamanan pengunjung di daerah sekitar pasar/pusat perbelanjaan/ruko.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dosen Ekonomi merubah urutan jawaban dengan lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak sedang dengan perkantoran/sekolah daripada perumahan karena untuk pelayanan konsumen seperti karyawan/pegawai/siswa.
Paguyuban PKL	Lebih memprioritaskan berjualan dengan berjarak sedang dengan perkantoran/sekolah karena jika terlalu dekat biasanya ditegur karena mengganggu ketertiban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Paguyuban PKL tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Paguyuban PKL tidak merubah urutan jawaban.

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

Tabel 4.121 Jawaban urutan prioritas pusat keramaian berjarak jauh (>500 m) dengan lokasi pedagang kaki lima menurut ahli

No.	Pilihan Pusat Keramaian Putaran Ahli	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko			Perkantoran /sekolah			Terminal			Perumahan/ tempat tinggal		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
		Prioritas (Angka 4 prioritas tertinggi, 0 tidak menyetujui)											
1.	Balitbang	3	3	3	4	4	4	2	2	2	1	1	1
2.	Satpol PP	0	0	3	4	4	4	0	0	0	0	0	0
3.	Dinas PU	4	4	4	3	3	3	0	0	0	0	0	0
4.	Dinas Kebersihan	0	1	1	0	4	4	0	3	3	0	2	2
5.	Dinas Pasar	1	1	1	4	4	4	2	2	2	3	3	3
6.	Bappeda	4	3	3	1	4	4	2	2	2	3	1	1
7.	Deperindag	4	4	4	2	2	2	3	3	3	1	1	1
8.	Dinas Koperasi&UKM	4	4	4	2	2	2	3	3	3	1	1	1
9.	Dosen Ekonomi	4	3	3	1	4	4	2	2	2	3	1	1
10.	Paguyuban PKL	1	0	0	2	0	0	3	3	3	4	4	4
ΣRi		21	23	26	20	31	31	17	20	20	16	14	14
Rata-rata (Mean)		2,10	2,30	2,60	2,00	3,10	3,10	1,70	2,00	2,00	1,60	1,40	1,40
PRIORITAS		1	2	2	2	1	1	3	3	3	4	4	4

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

- I** : Jawaban urutan responden pada Putaran I
II : Jawaban urutan responden pada Putaran II
III : Jawaban urutan responden pada Putaran III

Keselarasan jawaban responden pada putaran I:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak jauh dengan lokasi pedagang kaki lima.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,037$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak jauh dengan lokasi pedagang kaki lima

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak jauh dengan lokasi pedagang kaki lima

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 1,105$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 4-1 = 3 adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung < chi square tabel, maka keputusan adalah menerima H_0 dan menolak H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak jauh dengan lokasi pedagang kaki lima.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah 0,776 > 0,05, maka H_0 diterima, sama dengan keputusan sebelumnya.

Keselarasan jawaban responden pada putaran II:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak jauh dengan lokasi pedagang kaki lima.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,249$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

H_0 : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak jauh dengan lokasi pedagang kaki lima

H_1 : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak jauh dengan lokasi pedagang kaki lima

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 7,468$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 4-1 = 3 adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak jauh dengan lokasi pedagang kaki lima.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,048 < 0,05$, maka H_0 ditolak.

Keselarasan jawaban responden pada putaran III:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak jauh dengan lokasi pedagang kaki lima.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,269$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

H_0 : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak jauh dengan lokasi pedagang kaki lima

H_1 : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak jauh dengan lokasi pedagang kaki lima

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 8,072$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 5-1 = 4 adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif pusat keramaian masyarakat yang berjarak jauh dengan lokasi pedagang kaki lima.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,045 < 0,05$, maka H_0 ditolak, sama dengan keputusan sebelumnya.

Tabel 4.122 Kesimpulan urutan prioritas pusat keramaian berjarak jauh (>500 m) dengan lokasi pedagang kaki lima menurut ahli

Prioritas	Urutan Prioritas Pusat Keramaian berjarak Jauh dengan PKL		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1	Perkantoran/sekolah dan Perumahan/tempat tinggal	Perkantoran/sekolah	Perkantoran/sekolah
2	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko	Pasar/Pusat Perbelanjaan/Ruko
3	Terminal	Perumahan/tempat tinggal	Perumahan/tempat tinggal
4		Terminal	Terminal
Nilai Keselarasan (W)	0,079	0,249	0,269
Tingkat keselarasan	Sangat Rendah	Rendah	Rendah

Sumber : Hasil Delphi 2006

Keterangan :

Berdasarkan perhitungan di atas terdapat kesimpulan bahwa responden lebih memprioritaskan perkantoran/sekolah sebagai pusat keramaian masyarakat yang dipertimbangkan berjarak jauh (>500 m) dengan lokasi aktivitas pedagang kaki lima dan jawaban responden dari putaran I, II sampai III semakin selaras dengan jawaban responden yang lain, walaupun tingkat keselarasan rendah.

Nilai W berkisar 0 – 1, maka semakin mendekati 1 menunjukkan semakin selarasnya jawaban responden

Keterangan mengenai urutan prioritas pusat keramaian masyarakat berjarak jauh (>500 m) dengan lokasi aktivitas pedagang, menurut para responden ahli pada putaran I, putaran II, dan putaran III, akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel 4.123.

Tabel 4.123 Keterangan urutan prioritas pusat keramaian berjarak jauh (>500 m) dengan lokasi pedagang kaki lima menurut ahli

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Balitbang	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak jauh (>500 m) dengan perkantoran/sekolah agar tidak menimbulkan kekumuhan di lingkungan perkantoran/sekolah.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang merubah tidak urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.
Satpol PP	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak jauh (>500 m) dengan perkantoran/sekolah sehingga tidak mengganggu aktivitas perkantoran dan belajar mengajar.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP merubah tidak urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP merubah urutan jawaban dengan menyetujui lokasi PKL berjarak jauh dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko agar tercipta ketertiban dan tidak menambah kepadatan aktivitas di pusat perdagangan.
Dinas PU	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak jauh dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko agar tidak menambah kesemrawutan aktivitas yang akibatnya menjadi rawan kemacetan di pusat perdagangan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Kebersihan	Tidak menyetujui lokasi PKL berjarak jauh >500m dengan pusat keramaian karena pusat keramaian memiliki daya magnet besar bagi masyarakat sehingga memberikan kesempatan pedagang mencari penghasilan dengan pentaan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Kebersihan merubah urutan jawaban dengan menyetujui lokasi PKL berjarak jauh dengan perkantoran/sekolah agar tidak mengganggu kenyamanan kegiatan kantor dan belajar mengajar.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Pasar	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak jauh dengan perkantoran/sekolah agar tidak mengganggu ketertiban dan menyebabkan kekumuhan di sekitar perkantoran/sekolah.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Pasar tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Pasar tidak merubah urutan jawaban.
Bappeda	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak jauh dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sehingga dapat dilakukan pengaturan agar tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan pengunjung.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Bappeda merubah urutan jawaban dengan lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak jauh dengan perkantoran/sekolah agar tidak menimbulkan kekumuhan kawasan formal tersebut.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Bappeda merubah tidak urutan jawaban.

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Deperindag	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak jauh dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sehingga pedagang masih diberi kesempatan mencari penghasilan di lokasi startegis namun tidak terlalu dekat dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko dan untuk pemeratakan pusat keramaian.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Deperindag tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Deperindag tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Koperasi&UKM	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak jauh dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sehingga agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di pusat keramaian.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Koperasi&UKM tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Koperasi&UKM tidak merubah urutan jawaban.
Dosen Ekonomi	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak jauh dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko sehingga PKL diberi kesempatan berada di sekitar pasar/pusat perbelanjaan/ruko dengan jarak jauh (>500 m) dengan dilakukan pengaturan agar tidak terjadi penumpukan aktivitas, selain itu juga kebersihan dan kenyamanan dapat tetap terjaga.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.
Paguyuban PKL	Lebih memprioritaskan berjualan dengan berjarak jauh dengan perumahan/tempat tinggal karena biasanya di dalam perumahan sudah banyak terdapat warung, toko dan tidak terlalu banyak konsumen.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Paguyuban PKL merubah urutan jawaban dengan tidak menyetujui lokasi PKL berjarak jauh dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko karena lokasinya yang sangat strategis dapat menjamin penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Paguyuban PKL tidak merubah urutan jawaban.

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

▪ **Kedekatan dengan tempat tinggal pedagang kaki lima**

Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat berpenghasilan rendah lebih memilih rumah tinggal yang dekat dengan tempat kerja, berbeda dengan golongan masyarakat atas yang lebih mementingkan aspek kenyamanan dan ketersediaan fasilitas sosial sebagai prioritas utama dalam memilih lokasi tempat tinggal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka PKL sebagai kelompok masyarakat yang dominan berpenghasilan rendah, tentunya akan berusaha memilih lokasi usaha sedekat mungkin dengan tempat tinggal mereka. Jarak lokasi usaha sedekat mungkin dengan tempat tinggal mereka. Jawaban para ahli mengenai jarak lokasi PKL dengan tempat tinggal pedagang dapat dilihat pada 4.124, untuk tabel output dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.124 Jawaban urutan prioritas jarak lokasi pedagang kaki lima dengan tempat tinggalnya menurut ahli

No.	Pilihan Jarak Putaran Ahli	Dekat (< 1 km)			Sedang (1 - 5 km)			Jauh (> 5 km)		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III
Prioritas (Angka 4 prioritas tertinggi, 0 tidak menyetujui)										
1.	Balitbang	4	4	4	3	3	3	2	2	2
2.	Satpol PP	0	0	0	4	4	4	0	0	0
3.	Dinas PU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dinas Kebersihan	4	4	4	0	0	0	0	0	0
5.	Dinas Pasar	4	4	4	2	3	3	3	2	2
6.	Bappeda	4	4	4	3	3	3	2	2	2
7.	Deperindag	4	4	4	3	3	3	2	2	2
8.	Dinas Koperasi&UKM	4	4	4	3	3	3	0	0	0
9.	Dosen Ekonomi	4	4	4	3	3	3	2	2	2
10.	Paguyuban PKL	4	4	4	3	3	3	2	2	2
ΣRi		32	32	32	24	25	25	13	12	12
Rata-rata (Mean)		3,20	3,20	3,20	2,40	2,50	2,50	1,30	1,20	1,20
PRIORITAS		4	4	4	3	3	3	2	2	2

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

- I** : Jawaban urutan responden pada Putaran I
II : Jawaban urutan responden pada Putaran II
III : Jawaban urutan responden pada Putaran III

Keselarasan jawaban responden pada putaran I:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap keempat alternatif jarak antara tempat tinggal pedagang dengan lokasi jualannya.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,621$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif jarak antara tempat tinggal pedagang dengan lokasi jualannya.

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif jarak antara tempat tinggal pedagang dengan lokasi jualannya.

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 12,412$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 3-1 = 2 adalah 4,6052

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak Ho dan menerima Hi, atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap jarak antara tempat tinggal pedagang dengan lokasi jualannya.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan : Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,002 < 0,05$, maka Ho ditolak.

Keselarasan jawaban responden pada putaran II:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap keempat alternatif jarak antara tempat tinggal pedagang dengan lokasi jualannya.

- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,709$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap keempat alternatif jarak antara tempat tinggal pedagang dengan lokasi jualannya.

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat alternatif jarak antara tempat tinggal pedagang dengan lokasi jualannya.

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$X^2 = n(k-1)W = 14,176$. Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = $k-1$ atau $3-1 = 2$ adalah 4,6052

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung $>$ chi square tabel, maka keputusan adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat jarak antara tempat tinggal pedagang dengan lokasi jualannya.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan : Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,001 < 0,05$, maka H_0 ditolak.

Keselarasan jawaban responden pada putaran III:

Untuk analisis putaran III, mengenai proses perhitungan Kendall dan proses pengambilan keputusan sama dengan analisis putaran II, disebabkan responden ahli tidak merubah jawaban urutan dari putaran sebelumnya (putaran II). Dimana keputusannya adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap keempat jarak antara tempat tinggal pedagang dengan lokasi jualannya.*

Tabel 4.125 Kesimpulan urutan prioritas jarak lokasi pedagang kaki lima dengan tempat tinggalnya menurut ahli

Prioritas	Urutan Prioritas Jarak Lokasi Aktivitas Pedagang dan Tempat Tinggalnya		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1	Dekat (< 1 km)	Dekat (< 1 km)	Dekat (< 1 km)
2	Sedang (1 - 5 km)	Sedang (1 - 5 km)	Sedang (1 - 5 km)
3	Jauh (> 5 km)	Jauh (> 5 km)	Jauh (> 5 km)
Nilai Keselarasan (W)	0,621	0,709	0,709
Tingkat Keselarasan	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : Hasil Delphi 2006

Keterangan :

Berdasarkan perhitungan di atas terdapat kesimpulan bahwa responden lebih memprioritaskan jarak lokasi aktivitas pedagang kaki lima dengan tempat tinggalnya adalah dekat (< 1km) dan jawaban responden dari putaran I, II sampai III t semakin selaras dengan jawaban responden yang lain,

Nilai W berkisar 0 – 1, maka semakin mendekati 1 menunjukkan semakin selarasnya jawaban responden

Keterangan mengenai urutan prioritas jarak lokasi aktivitas pedagang kaki lima dengan tempat tinggal pedagang, menurut para responden ahli pada putaran I, putaran II, dan putaran III, akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel 4.126.

Tabel 4.126 Keterangan urutan jarak prioritas lokasi pedagang kaki lima dengan tempat tinggalnya menurut ahli

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Balitbang	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak dekat (<1 km) dengan tempat tinggalnya agar memudahkan pencapaian lokasi jualan terkait dengan kemudahan aksesibilitas dan kemudahan sarana angkutan yang digunakan PKL.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang merubah tidak urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.
Satpol PP	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak sedang (1-5 km) dengan tempat tinggalnya agar memudahkan PKL menuju lokasi jualan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP merubah tidak urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.
Dinas PU	Tidak menyetujui jarak tempat tinggal PKL dengan lokasi jualan dijadikan pertimbangan penentuan lokasi PKL, karena pedagang seharusnya mencari pendapatan tidak tergantung jarak namun potensi lokasi untuk mendapatkan keuntungan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Kebersihan	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak dekat (<1 km) dengan tempat tinggalnya agar memudahkan pencapaian lokasi jualan terkait sehingga dapat meminimalisasi biaya angkutan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Pasar	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak dekat (<1 km) dengan tempat tinggalnya agar tidak kesulitan biaya dalam mencapai lokasi jualan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Pasar merubah urutan jawaban mengikuti hasil konsensus dengan lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak sedang daripada berjarak jauh dengan tempat tinggalnya untuk kemudahan aksesibilitas pedagang.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Pasar tidak merubah urutan jawaban.
Bappeda	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak dekat (<1 km) dengan tempat tinggalnya untuk kemudahan PKL dalam pencapaian lokasi jualan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Bappeda merubah tidak urutan jawaban.
Deperindag	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak dekat (<1 km) dengan tempat tinggalnya untuk meringankan biaya transportasi	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Deperindag tidak merubah urutan	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Deperindag tidak merubah urutan jawaban.

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
	pedagang.	jawaban.	
Dinas Koperasi&UKM	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak dekat (<1 km) dengan tempat tinggalnya untuk kemudahan PKL menuju lokasi jualan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Koperasi&UKM tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Koperasi&UKM tidak merubah urutan jawaban.
Dosen Ekonomi	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak dekat (<1 km) dengan tempat tinggalnya untuk kemudahan PKL dalam pencapaian lokasi jualan terkait tenaga dan biaya.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dosen Ekonomi merubah tidak urutan jawaban.
Paguyuban PKL	Lebih memprioritaskan lokasi PKL berjarak dekat (<1 km) dengan tempat tinggalnya untuk dapat menghemat tenaga, waktu dan biaya.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Paguyuban PKL tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Paguyuban PKL tidak merubah urutan jawaban.

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

Berdasarkan aspek-aspek di atas, maka prioritas aspek-aspek fisik menurut pendapat para ahli dapat dilihat pada tabel 4.127, sedangkan hasil prioritas aspek fisik secara keseluruhan melalui teknis analisis Kendall West dengan menggunakan bantuan SPSS, untuk tabel output dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.127 Jawaban urutan prioritas aspek fisik menurut ahli

No.	Pilihan Aspek Fisik	Kemudahan Aksesibilitas/Sarana Angkutan			Kedekatan Dengan Pusat Keramaian Kota/Kegiatan Masyarakat			Kedekatan Lokasi PKL dengan Tempat Tinggal			Lainnya (Terdapat lahan kosong)		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	Putaran Ahli	Prioritas (Angka 4 prioritas tertinggi, 0 tidak menyetujui)											
1.	Balitbang	4	4	4	3	3	3	2	1	1	0	2	2
2.	Satpol PP	4	3	3	3	4	4	2	1	1	0	2	2
3.	Dinas PU	3	3	3	2	2	2	1	1	1	4	4	4
4.	Dinas Kebersihan	4	4	4	3	3	3	2	1	1	0	2	2
5.	Dinas Pasar	3	3	3	4	4	4	2	1	1	0	2	2
6.	Bappeda	3	3	3	4	4	4	2	1	1	0	2	2
7.	Deperindag	3	3	3	4	4	4	2	1	1	0	2	2
8.	Dinas Koperasi&UKM	3	3	3	4	4	4	0	0	0	0	2	2
9.	Dosen Ekonomi	3	3	3	4	4	4	2	1	1	0	2	2
10.	Paguyuban PKL	2	2	2	4	4	4	3	3	3	0	0	0
	$\sum Ri$	32	31	31	35	36	36	18	11	11	4	20	20
	Rata-rata (Mean)	3,20	3,10	3,10	3,50	3,60	3,60	1,80	1,10	1,10	0,40	2,00	2,00
	PRIORITAS	2	2	2	1	1	1	3	4	4	4	3	3

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

- I** : Jawaban urutan responden pada Putaran I
II : Jawaban urutan responden pada Putaran II
III : Jawaban urutan responden pada Putaran III

Keselarasan jawaban responden pada putaran I:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap aspek fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.
- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,629$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap aspek fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap aspek fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 18,879$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 4-1 = 3 adalah 6,2514

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung > chi square tabel, maka keputusan adalah menolak Ho dan menerima Hi, atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap aspek fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom asymp.sig adalah $0,000 < 0,05$, maka Ho ditolak.

Keselarasan jawaban responden pada putaran II:

1. Proses perhitungan Kendall

- Rata-rata didapat dengan membagi total dengan jumlah responden untuk rata-rata persamaan urutan responden terhadap aspek fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.

- Nilai Kondordansi Kendall (Kendall W) bisa dicari dengan rumus :

$$W = \frac{12 \sum Ri^2 - 3n^2k(k+1)}{n^2k(k^2-1)} = 0,684$$

2. Proses pengambilan keputusan

a) Hipotesis

Ho : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang berbeda terhadap aspek fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.

Hi : Responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap aspek fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.

b) Dasar Pengambilan Keputusan

Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel, dengan rumus :

$$X^2 = n(k-1)W = 20,520$$

Chi square tabel untuk tingkat kepercayaan 90% (alfa = 10%) dan derajat kebebasan = k-1 atau 4-1 = 3 adalah 6,2514.

c) Keputusan

Oleh karena chi square hitung $>$ chi square tabel, maka keputusan adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap aspek fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.*

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan :

Oleh karena angka pada kolom $asympt.sig$ adalah $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak.

Keselarasan jawaban responden pada putaran III:

Untuk analisis putaran III, mengenai proses perhitungan Kendall dan proses pengambilan keputusan sama dengan analisis putaran II, disebabkan responden ahli tidak merubah jawaban urutan dari putaran sebelumnya (putaran II). Dimana keputusannya adalah menolak H_0 dan menerima H_1 , atau *responden ahli mempunyai urutan prioritas yang sama terhadap aspek fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima.*

Tabel 4.128 Kesimpulan urutan prioritas aspek fisik menurut ahli

Prioritas	Urutan Prioritas Aspek Fisik		
	Putaran I	Putaran II	Putaran III
1.	Kedekatan Dengan Pusat Keramaian Kota/Kegiatan Masyarakat	Kedekatan Dengan Pusat Keramaian Kota/Kegiatan Masyarakat	Kedekatan Dengan Pusat Keramaian Kota/Kegiatan Masyarakat
2.	Kemudahan Aksesibilitas/Sarana Angkutan	Kemudahan Aksesibilitas/Sarana Angkutan	Kemudahan Aksesibilitas/Sarana Angkutan
3.	Kedekatan Lokasi PKL dengan Tempat Tinggal	Terdapat lahan kosong	Terdapat lahan kosong
4.	Terdapat lahan kosong	Kedekatan Lokasi PKL dengan Tempat Tinggal	Kedekatan Lokasi PKL dengan Tempat Tinggal
Nilai Keselarasan (W)	0,629	0,684	0,684
Tingkat Keselarasan	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : Hasil Delphi 2006

Keterangan :

Berdasarkan perhitungan di atas terdapat kesimpulan bahwa responden lebih memprioritaskan kedekatan dengan pusat keramaian kota/masyarakat sebagai aspek fisik yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima dan jawaban responden dari putaran I, II sampai III semakin selaras dengan jawaban responden yang lain.

Nilai W berkisar 0 – 1, maka semakin mendekati 1 menunjukkan semakin selarasnya jawaban responden

Berdasarkan tabel 4.128 dapat dijelaskan bahwa urutan prioritas aspek-aspek dalam faktor fisik menurut para ahli sampai pada putaran III sebagai hasil akhir adalah kemudahan aksesibilitas/sarana angkutan, kedekatan dengan pusat keramaian kota/kegiatan masyarakat, dan kedekatan lokasi PKL dengan tempat tinggalnya.

Tabel 4.129 Keterangan urutan prioritas aspek fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima menurut ahli

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Balitbang	Lebih memprioritaskan lokasi yang memiliki kemudahan aksesibilitas/sarana angkutan karena merupakan lokasi strategis dan pasti ramai pengunjung.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang merubah urutan jawaban dengan menyetujui adanya lahan kosong untuk ditempatkan PKL agar tidak mengganggu aktivitas formal yang sudah berjalan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Balitbang tidak merubah urutan jawaban.
Satpol PP	Lebih memprioritaskan lokasi yang memiliki kemudahan aksesibilitas/sarana angkutan karena PKL sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan bagi konsumen harus mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas terutama bagi konsumen maupun pedagang.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP merubah urutan jawaban dengan lebih memprioritaskan lokasi yang memiliki kedekatan dengan pusat keramaian sebagai faktor penarik kunjungan masyarakat yang mudah dijangkau dan merupakan lokasi yang strategis untuk mencari penghasilan. Menyetujui adanya lahan kosong untuk aktivitas PKL agar tidak mengganggu ketertiban di sekitar lokasi.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Satpol PP tidak merubah urutan jawaban.
Dinas PU	Lebih memprioritaskan lokasi yang memiliki lahan kosong dan tidak bermasalah serta terpisah dari pusat kegiatan kota namun strategis agar tidak mengganggu aktivitas formal dan menimbulkan resiko kekumuhan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas PU tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Kebersihan	Lebih memprioritaskan lokasi yang memiliki kemudahan aksesibilitas karena masyarakat selalu memilih lokasi yang dikunjungi yang mudah dijangkau oleh sarana angkutan darimana saja.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Kebersihan merubah urutan jawaban. Menyetujui lokasi strategis dan terdapat lahan kosong agar dapat dilakukan penataan terhadap PKL.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Kebersihan tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Pasar	Lebih memprioritaskan lokasi yang memiliki kedekatan dengan pusat keramaian karena inilah yang dapat menarik konsumen dari manapun.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Pasar merubah urutan jawaban. Menyetujui lahan kosong di lokasi yang diperbolehkan pemerintah agar mudah melakukan penataan PKL.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Pasar tidak merubah urutan jawaban.
Bappeda	Lebih memprioritaskan lokasi yang memiliki kedekatan dengan pusat keramaian karena merupakan faktor penarik minat masyarakat untuk mengunjungi lokasi PKL.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Bappeda merubah urutan jawaban. Menyetujui lahan kosong di lokasi yang diperbolehkan pemerintah agar dapat dilakukan penataan PKL sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan antara pemerintah	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Bappeda tidak merubah urutan jawaban.

Responden Ahli	Putaran I	Putaran II	Putaran III
Deperindag	Lebih memprioritaskan lokasi yang memiliki kedekatan dengan pusat keramaian karena pedagang selalu mencari kesempatan di lokasi yang ramai pengunjung.	dan PKL. Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Deperindag merubah urutan jawaban. Menyetujui lahan kosong di lokasi yang diperbolehkan pemerintah agar dapat dilakukan penataan PKL sesuai dengan kebijakan pemerintah dan PKL.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Deperindag tidak merubah urutan jawaban.
Dinas Koperasi&UKM	Lebih memprioritaskan lokasi yang memiliki kedekatan dengan pusat keramaian karena pedagang selalu mencari lokasi yang ramai pengunjung.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dinas Koperasi&UKM merubah urutan jawaban. Menyetujui lahan kosong di lokasi yang diperbolehkan pemerintah agar dapat dilakukan penataan PKL sesuai dengan kebijakan pemerintah.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dinas Koperasi&UKM tidak merubah urutan jawaban.
Dosen Ekonomi	Lebih memprioritaskan lokasi yang memiliki kedekatan dengan pusat keramaian untuk memudahkan pelayanan terhadap konsumen.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Dosen Ekonomi merubah urutan jawaban. Menyetujui lahan kosong di lokasi yang diperbolehkan pemerintah agar dapat dilakukan penataan PKL sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan antara pemerintah dan PKL.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran II, pihak Dosen Ekonomi tidak merubah urutan jawaban.
Paguyuban PKL	Lebih memprioritaskan lokasi yang memiliki kedekatan dengan pusat keramaian karena lokasinya selalu ramai sehingga mudah mencari keuntungan.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Paguyuban PKL tidak merubah urutan jawaban.	Setelah melihat hasil konsensus urutan prioritas pada putaran I, pihak Paguyuban PKL tidak merubah urutan jawaban.

Sumber Data : Survei Primer Tahun 2006

4) Kesimpulan urutan prioritas aspek penentuan lokasi pkl menurut pedagang, masyarakat, pemerintah dan ahli

Berdasarkan hasil dari penyebaran kuisioner kepada para yaitu pedagang, masyarakat dan pemerintah antara lain adalah Balitbang, Satpol PP, Dinas PU, Dinas Kebersihan, Dinas Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Bappeda sehingga dihasilkan urutan prioritas aspek-aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam kaitannya dengan penentuan lokasi PKL. Urutan priotitas aspek-aspek pada masing-masing faktor menurut pedagang, masyarakat dan pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Aspek ekonomi

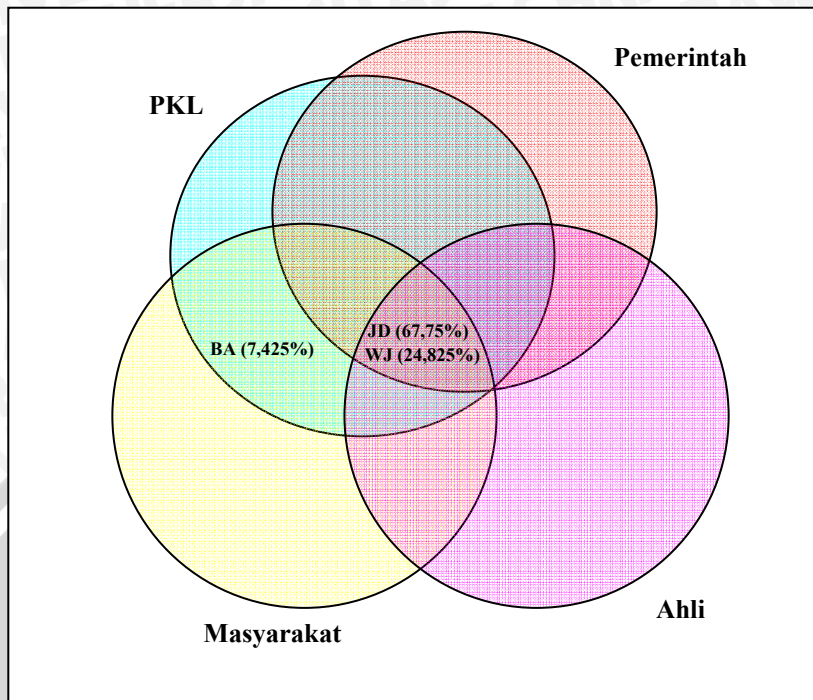
Berikut ini adalah hasil kesimpulan mengenai urutan prioritas aspek ekonomi yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik berdasarkan pembahasan sebelumnya.

Tabel 4.130 Kesimpulan prioritas aspek ekonomi penentuan lokasi pedagang kaki lima di kota gresik

No.	Urutan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Dalam Faktor Ekonomi			
	Pedagang	Pemerintah	Masyarakat	Ahli
1.	Jenis dagangan	Jenis dagangan	Waktu jualan	Jenis dagangan
2.	Waktu jual	Waktu jual	Jenis dagangan	Waktu jualan
3.	Biaya angkutan		Biaya angkutan	Biaya angkutan
4.				Lainnya (Biaya Sewa)
5.				Lainnya (Daya Beli Masyarakat)

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

Berdasarkan kesimpulan pada aspek ekonomi di atas, pasti akan menimbulkan kebingungan bagi pemegang keputusan untuk dapat mengetahui mengenai urutan prioritas aspek ekonomi mana yang dapat dijadikan acuan/dipilih dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima tersebut. Sehingga untuk memudahkannya, maka urutan prioritas dari pihak pedagang, pemerintah dan masyarakat (yang didapat dari metode deskriptif kualitatif dengan tabel frekwensi) diperkecil menjadi satu konsensus dengan menggunakan “teknik gabungan dalam diagram venn” karena tidak memungkinkan mencapai konsensus dengan metode delphi (mengingat banyaknya sampel), adapun hasil kesimpulan urutan dari pedagang, pemerintah dan masyarakat jika dibuat dalam diagram venn dapat dilihat pada gambar 4.90.



Gambar 4.90 Diagram Venn Aspek Ekonomi

Keterangan :

JD = Jenis Dagangan

WJ = Waktu Jualan

BA = Biaya Angkutan

Rumus gabungan Aspek Ekonomi = (Jumlah prosentase aspek ekonomi sejenis dari masing-masing responden : prosentase total aspek ekonomi keempat responden) x 100%

Dari rumus di atas akan didapatkan hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Jenis dagangan (JD)} &= \{(\%JD^1 \cap \%JD^2 \cap \%JD^3 \cap \%JD^4) : 400\% \} \times 100\% \\ &= \{(56\% + 87\% + 38\% + 90\%) : 400\% \} \times 100\% \\ &= 67,75\% \text{ (Prioritas I)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Waktu Jual (WJ)} &= \{(\%WJ^1 \cap \%WJ^2 \cap \%WJ^3 \cap \%WJ^4) : 400\% \} \times 100\% \\ &= \{(33,3\% + 13\% + 43\% + 10\%) : 400\% \} \times 100\% \\ &= 24,825\% \text{ (Prioritas II)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Biaya Angkutan (BA)} &= \{(\%BA^1 \cap \%BA^2 \cap \%BA^3 \cap \%BA^4) : 400\% \} \times 100\% \\ &= \{(10,7\% + 0 + 19\% + 0) : 400\% \} \times 100\% \\ &= 7,425\% \text{ (Prioritas III)} \end{aligned}$$

Keterangan :

1 = Pedagang Kaki Lima

2 = Pemerintah

3 = Masyarakat

4 = Ahli

Berdasarkan hasil perhitungan dan diagram venn di atas maka dapat diketahui bahwa hasil konsensus urutan prioritas aspek ekonomi menurut pedagang, pemerintah dan masyarakat adalah Jenis Dagangan, Waktu Jualan, Biaya Angkutan.

Sedangkan jika hasil konsensus dibandingkan dengan urutan prioritas aspek ekonomi dari para ahli ternyata terdapat kesamaan pendapat, hanya para ahli menambah aspek lain sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan pula. Sehingga dapat dibuat kesimpulan untuk urutan prioritas aspek ekonomi yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 4.131 Prioritas aspek ekonomi dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima di kota gresik

Prioritas	Aspek Ekonomi
1	Jenis dagangan
2	Waktu jual
3	Biaya angkutan
4	Biaya sewa tempat
5	Daya beli masyarakat sekitar

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

b) Aspek sosial

Berikut di bawah ini adalah hasil kesimpulan mengenai urutan prioritas aspek sosial yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya.

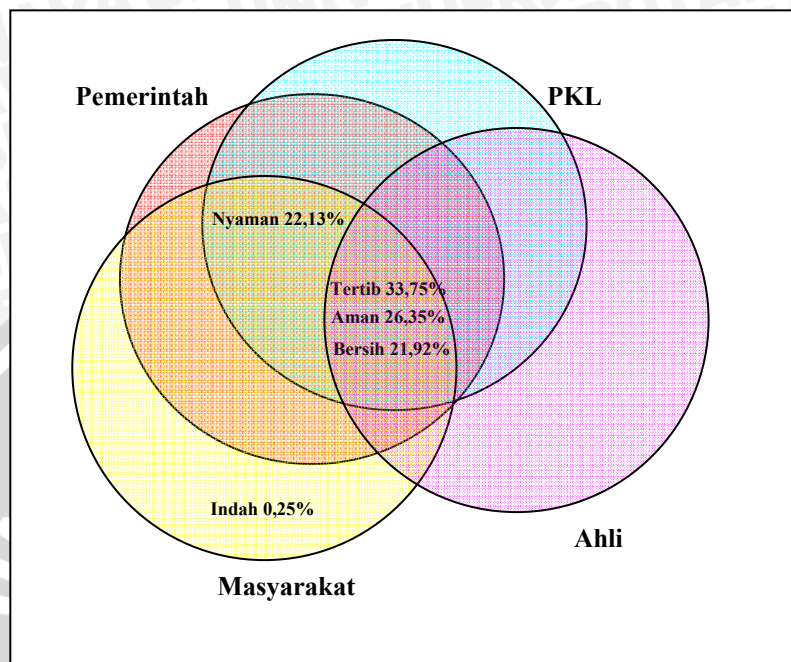
Tabel 4.132 Kesimpulan prioritas aspek sosial penentuan lokasi pedagang kaki lima di kota gresik

No.	Urutan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Dalam Faktor Sosial			
	Pedagang	Pemerintah	Masyarakat	Ahli
1.	Keamanan	Ketertiban	Kenyamanan	Ketertiban
2.	Kebersihan	Keamanan dan Kenyamanan	Kebersihan	Kebersihan
3.	Kenyamanan	Kebersihan	Ketertiban	Keamanan
4.	Ketertiban		Keamanan dan Keindahan	Kenyamanan
5.				Lainnya (Keindahan)

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

Berdasarkan kesimpulan pada aspek sosial di atas, sama dengan aspek sebelumnya bahwa untuk dapat mengetahui urutan prioritas aspek sosial mana yang dapat dijadikan acuan/dipilih dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima, maka urutan prioritas dari pihak pedagang, pemerintah dan masyarakat (yang didapat dari metode deskriptif kualitatif dengan tabel frekwensi) juga diperkecil menjadi satu konsensus dengan menggunakan “teknik gabungan diagram venn”, adapun hasil kesimpulan urutan dari

pedagang, pemerintah dan masyarakat jika dibuat dalam diagram venn dapat dilihat pada gambar 4.91.



Gambar 4.91 Diagram Venn Aspek Sosial

Rumus gabungan Aspek Sosial = (Jumlah prosentase aspek sosial sejenis dari masing-masing responden : prosentase total aspek sosial keempat responden) x 100%

Dari rumus di atas akan didapatkan hasil sebagai berikut :

$$\text{Keamanan} = \{(\%Aman^1 \cap \%Aman^2 \cap \%Aman^3 \cap \%Aman^4) : 400\% \} \\ \times 100\%$$

$$= \{(52,4\% + 25\% + 18\% + 10\%) : 400\% \} \times 100\% \\ = 26,35\% \text{ (Prioritas II)}$$

$$\text{Kenyamanan} = \{(\%Nyaman^1 \cap \%Nyaman^2 \cap \%Nyaman^3 \cap \%Nyaman^4) \\ : 400\% \} \times 100\%$$

$$= \{(15,5\% + 25\% + 48\% + 0) : 400\% \} \times 100\% \\ = 22,13\% \text{ (Prioritas III)}$$

$$\text{Kebersihan} = \{(\%Bersih^1 \cap \%Bersih^2 \cap \%Bersih^3 \cap \%Bersih^4) : 400\% \} \\ \times 100\%$$

$$= \{(22,6\% + 13\% + 32\% + 20\%) : 400\% \} \times 100\% \\ = 21,92\% \text{ (Prioritas IV)}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Ketertiban} &= \{(\%Tertib^1 \cap \%Tertib^2 \cap \%Tertib^3 \cap \%Tertib^4) : 400\% \} \\
 &\quad \times 100\% \\
 &= \{(9,5\% + 37\% + 1\% + 87,5\%) : 400\% \} \times 100\% \\
 &= 33,75\% \text{ (Prioritas I)} \\
 \text{Keindahan} &= \{(\%Indah^1 \cap \%Indah^2 \cap \%Indah^3 \cap \%Indah^4) : 400\% \} \\
 &\quad \times 100\% \\
 &= \{(0 + 0 + 1\% + 0\%) : 400\% \} \times 100\% \\
 &= 0,25\% \text{ (Prioritas V)}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

- 1 = Pedagang Kaki Lima
- 2 = Pemerintah
- 3 = Masyarakat
- 4 = Ahli

Berdasarkan hasil perhitungan dan diagram venn di atas maka dapat diketahui bahwa hasil konsensus urutan prioritas aspek sosial menurut pedagang, pemerintah dan masyarakat adalah Keamanan, Kenyamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan

Sedangkan jika hasil konsensus dibandingkan dengan urutan prioritas aspek ekonomi dari para ahli ternyata terdapat perbedaan pendapat. Sehingga dapat dibuat dua alternatif kesimpulan untuk urutan prioritas aspek sosial yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 4.133 Prioritas aspek sosial dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima di kota gresik

Prioritas	Aspek Sosial
1	Ketertiban
2	Keamanan
3	Kenyamanan
4	Kebersihan
5	Keindahan

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

c) Aspek fisik

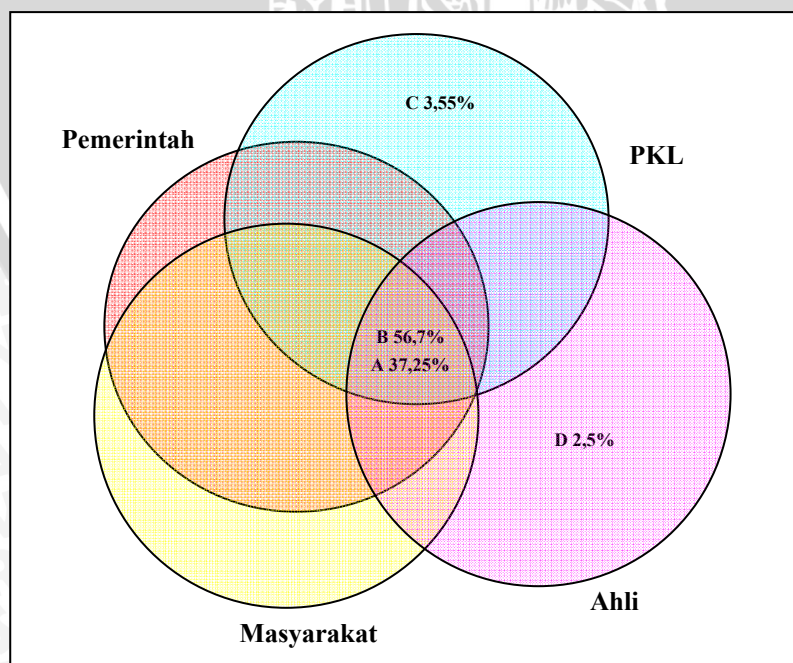
Berikut di bawah ini adalah hasil kesimpulan mengenai urutan prioritas aspek fisik yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya.

Tabel 4.134 Kesimpulan prioritas aspek fisik penentuan lokasi pedagang kaki lima di kota gresik

No.	Urutan Prioritas Aspek Penentuan Lokasi PKL Dalam Faktor Fisik			
	Pedagang	Pemerintah	Masyarakat	Ahli
1.	Kedekatan dengan pusat keramaian kota/kegiatan masyarakat	Kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi	Kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi	Kedekatan dengan pusat keramaian kota/kegiatan masyarakat
2.	Kedekatan lokasi usaha dengan tempat tinggal PKL	Kedekatan dengan pusat keramaian kota/kegiatan masyarakat	Kedekatan dengan pusat keramaian kota/kegiatan masyarakat	Kemudahan aksesibilitas/sarana angkutan
3.	Kemudahan dalam sarana transportasi			Kedekatan lokasi pkl dengan tempat tinggal
4.				Terdapat lahan kosong

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

Berdasarkan kesimpulan pada tabel 4.134, sama dengan aspek-aspek yang sebelumnya bahwa untuk dapat mengetahui urutan prioritas aspek fisik mana yang dapat menjadi acuan/dipilih dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima, maka urutan prioritas dari pihak pedagang, pemerintah dan masyarakat (yang didapat dari metode deskriptif kualitatif dengan tabel frekwensi) juga diperkecil menjadi satu konsensus dengan menggunakan “teknik gabungan dalam diagram venn”, adapun hasil kesimpulan urutan dari pedagang, pemerintah dan masyarakat jika dibuat dalam diagram venn dapat dilihat pada gambar 4.92.



Gambar 4.92 Diagram Venn Aspek Fisik

Rumus gabungan Aspek Fisik = (Jumlah prosentase aspek fisik sejenis dari masing-masing responden : prosentase total aspek fisik keempat responden) x 100%

Dari rumus di atas akan didapatkan hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} A &= \{(\%A^1 \cap \%A^2 \cap \%A^3 \cap \%A^4) : 400\% \} \times 100\% \\ &= \{(6\% + 62\% + 61\% + 20\%) : 400\% \} \times 100\% \\ &= 37,25\% \text{ (Prioritas II)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \{(\%B^1 \cap \%B^2 \cap \%B^3 \cap \%B^4) : 400\% \} \times 100\% \\ &= \{(79,8\% + 38\% + 39\% + 70\%) : 400\% \} \times 100\% \\ &= 56,7\% \text{ (Prioritas I)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= \{(\%C^1 \cap \%C^2 \cap \%C^3 \cap \%C^4) : 400\% \} \times 100\% \\ &= \{(14,2\% + 0 + 0 + 0) : 400\% \} \times 100\% \\ &= 3,55\% \text{ (Prioritas III)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= \{(\%D^1 \cap \%D^2 \cap \%D^3 \cap \%D^4) : 400\% \} \times 100\% \\ &= \{(0 + 0 + 0 + 10) : 400\% \} \times 100\% \\ &= 2,5\% \text{ (Prioritas IV)} \end{aligned}$$

Keterangan :

A = Kemudahan aksesibilitas/ sarana transportasi	1 = Pedagang Kaki Lima
B = Kedekatan dengan pusat keramaian masyarakat	2 = Pemerintah
C = Kedekatan dengan tempat tinggal PKL	3 = Masyarakat
D = Lainnya (Terdapat lahan kosong)	4 = Ahli

Berdasarkan hasil perhitungan dan diagram venn di atas maka dapat diketahui bahwa hasil konsensus urutan prioritas aspek sosial menurut pedagang, pemerintah dan masyarakat adalah Kedekatan Lokasi PKL dengan Pusat Keramaian Masyarakat, Kemudahan Aksesibilitas/Sarana Angkutan, Kedekatan Lokasi PKL dengan Tempat Tinggal.

Sedangkan jika hasil konsensus dibandingkan dengan urutan prioritas aspek ekonomi dari para ahli ternyata terdapat kesamaan pendapat, hanya para ahli menambah aspek fisik lain sebagai masukan yang dapat dipertimbangkan pula. Sehingga dapat dibuat kesimpulan untuk urutan prioritas aspek fisik yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 4.135 Prioritas aspek fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima di kota gresik

Prioritas	Aspek Fisik
1	Kedekatan lokasi PKL dengan pusat keramaian masyarakat
2	Kemudahan Aksesibilitas/Sarana Angkutan
3	Kedekatan lokasi PKL dengan tempat tinggal PKL
4	Terdapat lahan kosong

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

4.5.3 Penentuan lokasi utama aktivitas pedagang kaki lima berdasarkan hasil urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik

Setelah diketahui hasil urutan aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi jualan pedagang kaki lima menurut *Stakeholder* yang berpengaruh, yaitu pedagang, pemerintah, masyarakat baik pengunjung maupun masyarakat daerah sekitar lokasi jualan PKL serta para ahli pemerhati masalah PKL (dalam hal ini pemerintah yang tergabung dalam tim penanganan pedagang kaki lima dan ahli akademik) maka dapat ditentukan lokasi utama yang sesuai dengan hasil urutan tersebut. Adapun lokasi jualan harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada pada tabel 4.136.

Tabel 4.136 Persyaratan lokasi aktivitas utama pedagang kaki lima sesuai hasil urutan prioritas

Responden	Pilihan Lokasi PKL			Waktu Jual PKL			Pusat Keramaian dengan jarak Dekat dengan lokasi PKL
	Makanan/minuman	Non makanan/Minuman	Bahan mentah	Makanan/minuman	Non makanan/minuman	Bahan mentah	
Pedagang	Pasar/Pusat Belanja/Ruko	Pasar/Pusat Belanja/Ruko	Pasar/Pusat Belanja/Ruko	Pagi – Malam (jam 06.00 s.d 21.00)	Pagi – Malam (jam 06.00 s.d 21.00)	Dini Hari – Pagi (jam 01.00 s.d 10.00)	Pasar/Pusat Belanja/Ruko Perumahan
Pemerintah	Pasar/Pusat Belanja/Ruko	Pasar/Pusat Belanja/Ruko	Pasar/Pusat Belanja/Ruko	Pagi – Malam jam 06.00 – 21.00	Pagi – Malam jam 06.00 – 21.00	Pagi – Siang jam 06.00 – 14.00	Pasar/Pusat Belanja/Ruko Terminal
Masyarakat	Pasar/Pusat Belanja/Ruko	Pasar/Pusat Belanja/Ruko	Pasar/Pusat Belanja/Ruko	Pagi – Malam jam 06.00 – 21.00	Sore – Malam jam 18.00 – 21.00	Pagi – Siang jam 06.00 – 14.00	Pasar/Pusat Belanja/Ruko Terminal
Ahli	Pasar/Pusat Belanja/Ruko	Pasar/Pusat Belanja/Ruko	Pasar/Pusat Belanja/Ruko	Sore – Malam jam 18.00 – 21.00	Sore – Malam jam 18.00 – 21.00	Pagi – Siang jam 06.00 – 14.00	Pasar/Pusat Belanja/Ruko

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

Berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diambil terutama mengacu dari pendapat para ahli dan disesuaikan dengan pendapat pedagang, masyarakat dan pemerintah pada tabel di atas maka lokasi jualan utama pedagang kaki lima baik makanan/minuman/non makanan/minuman dan bahan mentah harus **terpusat di daerah sekitar pasar/pusat perbelanjaan/ruko**. Sedangkan pengaturan waktu jualan utama untuk **pedagang kaki lima makanan/minuman adalah pagi – malam (jam 06.00 s.d 21.00)**, waktu jualan **pedagang non makanan/minuman adalah sore – malam jam 18.00 – 21.00**, sedangkan waktu jualan **pedagang kaki lima bahan mentah adalah pagi – siang jam 06.00 – 14.00**.

Sedangkan jika mengacu pada hasil konsensus mengenai urutan prioritas aspek penentuan lokasi PKL maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Langkah yang diprioritaskan dalam menentukan lokasi PKL pada aspek ekonomi adalah mengatur dan mengelompokkan jenis dagangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada lokasi baru melihat waktu berjualan yang tepat di lokasi tersebut untuk masing-masing jenis PKL
2. Langkah yang diprioritaskan dalam menentukan lokasi PKL pada aspek sosial adalah melakukan upaya-upaya yang dapat menjamin ketertiban dan keamanan pedagang kaki lima sehingga tidak menimbulkan masalah kekumuhan dan menjamin kenyamanan masyarakat pengunjung.
3. Langkah yang diprioritaskan dalam menentukan lokasi PKL pada aspek fisik adalah mempertimbangkan kedekatan lokasi PKL dengan pusat keramaian masyarakat terutama pasar/pusat perbelanjaan/ruko yang pastinya juga akan menjamin kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi baik bagi PKL sebagai pelaku kegiatan dan masyarakat sebagai pengguna jasa PKL.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dilihat eksisting penggunaan lahan untuk pasar/pusat perbelanjaan/ruko yang merupakan kawasan perdagangan dan jasa pada gambar 4.93 di Kota Gresik dengan penjelasan arahan kegiatan menurut RTRK Kota Gresik dan eksisting jenis perdagangan dan jasa pada tabel 4.137.

Tabel 4.137 Eksisting lokasi pasar/pusat perbelanjaan/pertokoan di Kota Gresik

No.	Letak	Eksisting Jenis Aktivitas Perdagangan
1.	BWK I	Perdagangan dan jasa di kawasan pusat kota (terdapat Pasar, warung, pertokoan, jasa, dan pusat perbelanjaan)
5.	BWK VI	Perdagangan dan jasa di dekat perumahan dan industri (terdapat pusat perbelanjaan, pertokoan, jasa, warung)
6.	BWK VII	Perdagangan dan jasa di lingkungan permukiman (terdapat pasar senggol, pertokoan, warung, jasa)

Sumber : Hasil Survei 2006

Gambar 4.93. Eksisting lokasi pasar/pusat perbelanjaan/pertokoan di Kota Gresik



Dari ketiga alternatif lokasi untuk pedagang kaki lima tersebut, maka untuk mengetahui prioritas dari lokasi pada masing-masing BWK dilakukan dengan memberi bobot dan memilih salah satu lokasi yang merupakan prioritas pertama untuk mencapai tujuan yang dijelaskan dengan analisis alternatif lokasi pedagang kaki lima dengan menggunakan kriteria aspek penentuan lokasi berdasarkan hasil konsensus urutan prioritas aspek penentuan lokasi. Adapun kriteria yang digunakan antara lain adalah :

A. Prioritas Aspek Ekonomi

I. Jenis Dagangan

- **Kesesuaian antara jenis dagangan PKL dengan kebutuhan masyarakat pengunjung/yang berada di sekitar lokasi.** Semakin sesuai jenis dagangan dengan kebutuhan pengunjung/yang berada di sekitar lokasi semakin tinggi prioritasnya.
- **Indikator : (lihat gambar 4.94)**
 - **Jenis aktivitas di sekitar pasar/pusat perbelanjaan/ruko.** Semakin beraneka macam jenis aktivitas yang berada di kawasan perdagangan dan jasa, semakin tinggi prioritasnya.
 - **Macam barang dagangan yang diperjualbelikan di pasar/pusat perbelanjaan/ruko.** Semakin beraneka macam barang dagangan yang diperjualbelikan oleh pasar/pusat perbelanjaan/ruko, semakin tinggi prioritasnya.

II. Waktu Jualan

- **Kesesuaian ketentuan waktu jualan pedagang kaki lima dengan aktivitas pasar/pusat perbelanjaan/ruko.** Semakin sesuai ketentuan waktu jualan PKL dengan aktivitas pasar/pusat perbelanjaan/ruko, semakin tinggi prioritasnya.
- **Indikator : (lihat gambar 4.95)**
 - **Waktu buka dan tutup dari pasar/pusat perbelanjaan/ruko.** Semakin ketentuan waktu jualan PKL dengan waktu buka dan tutup dari pasar/pusat perbelanjaan/ruko, semakin tinggi prioritasnya.

III. Biaya Angkutan

- **Besar biaya angkutan yang dikeluarkan.** Semakin rendah biaya angkutan menuju lokasi semakin tinggi prioritasnya.
- **Indikator : (lihat gambar 4.96)**
 - **Rute angkutan.** Semakin banyak rute angkutan yang beada di pasar/pusat perbelanjaan/ruko, semakin tinggi prioritasnya.

- **Ketersediaan angkutan informal yang tertata.** Jika di sekitar lokasi tersedia angkutan informal yang tertata, semakin tinggi prioritasnya.

IV. Sewa Lahan

- **Besar biaya sewa lahan pada lokasi.** Semakin rendah biaya sewa lahan pada lokasi semakin tinggi prioritasnya.
- **Indikator : (lihat gambar 4.97)**
 - **Harga lahan pada lokasi.** Semakin rendah harga lahan pada lokasi, semakin tinggi prioritasnya.

V. Daya Beli Masyarakat

- **Kesesuaian daya beli masyarakat yang mengunjungi dan yang berada di sekitar lokasi terhadap pedagang kaki lima.** Semakin besar kemungkinan masyarakat untuk mengunjungi dan membeli semakin tinggi prioritasnya.
- **Indikator : (lihat gambar 4.98)**
 - **Skala pelayanan pasar/pusat perbelanjaan/ruko.** Semakin luas skala pelayanan, semakin tinggi prioritasnya.

B. Prioritas Aspek Sosial

I. Ketertiban

- **Ketertiban pedagang kaki lima pada lokasi** dalam arti kemungkinan PKL dapat diatur pada lokasi yang tidak menyebabkan kemacetan dan tidak menempati wilayah-wilayah yang secara hukum dilarang, seperti di halaman toko lain, di trotoar, di badan jalan atau di tanah kosong milik orang lain. Semakin besar kemungkinan ketertiban pedagang kaki lima pada lokasi semakin tinggi prioritasnya.
- **Indikator : (lihat gambar 4.99)**
 - **Ketersediaan lahan untuk penempatan pedagang kaki lima di sekitar pasar/pusat perbelanjaan/ruko.** Jika tersedia lahan untuk pedagang kaki lima, semakin tinggi prioritasnya.
 - **Luas lahan untuk penempatan pedagang kaki lima.** Semakin luas lahan penempatan pedagang kaki lima, semakin tinggi prioritasnya.
 - **Jarak lahan untuk penempatan pedagang kaki lima dengan jalan utama.** Semakin jauh jarak pasar/pusat perbelanjaan/ruko dengan jalan utama, semakin tinggi prioritasnya.

II. Keamanan

- **Keamanan lokasi baik bagi pedagang dan pengunjung**, yaitu bagi pedagang aktivitas tidak terganggu oleh razia Satpol PP dan bagi pengunjung, aman dari gangguan kriminal seperti pencopetan, gangguan preman dll. Semakin menjamin keamanan bagi pedagang dan pengunjung pada lokasi semakin tinggi prioritasnya.
- **Indikator :**
 - **Ketersediaan petugas keamanan di sekitar pasar/pusat perbelanjaan/ruko.** Jika tersedia petugas keamanan, semakin tinggi prioritasnya.

III. Kenyamanan

- **Kenyamanan bagi masyarakat pengunjung dan yang berada di sekitar lokasi.** Semakin besar kemungkinan kenyamanan pengunjung pada lokasi semakin tinggi prioritasnya.
- **Indikator :**

Sama dengan indikator dari aspek ketertiban, yaitu ketersediaan, luas lahan, dan jarak lahan penempatan pedagang kaki lima terhadap jalan utama. Sehingga nilai prioritas mengikuti aspek ketertiban.

IV. Kebersihan

- **Kebersihan pada lokasi yang diperuntukkan untuk pedagang kaki lima.** Semakin menjamin kebersihan pada lokasi semakin tinggi prioritasnya.
- **Indikator :**
 - **Ketersediaan fasilitas persampahan berupa TPS/kontainer sampah.** Jika terdapat TPS/kontainer sampah di sekitar lokasi, semakin tinggi prioritasnya.
 - **Ketersediaan petugas kebersihan di sekitar lokasi.** Jika tersedia petugas kebersihan pada pasar/pusat perbelanjaan/ruko, semakin tinggi prioritasnya

V. Keindahan

- **Keindahan lokasi yang diperuntukkan untuk pedagang kaki lima.** Semakin menjamin keindahan pada lokasi semakin tinggi prioritasnya.
- **Indikator :**
 - Merupakan gabungan dari ketertiban dan kebersihan, sehingga nilai prioritas mengikuti aspek ketertiban dan kebersihan.

C. Aspek Fisik

I. Kedekatan lokasi dengan pusat keramaian

- **Kedekatan lokasi dengan pusat keramaian masyarakat/kegiatan.** Semakin dekat lokasi dengan pusat keramaian masyarakat semakin tinggi prioritasnya.
- **Indikator : (lihat gambar 4.100)**
 - **Macam pusat keramaian masyarakat pada lokasi.** Semakin beraneka macam pusat keramaian masyarakat, semakin tinggi prioritasnya.
 - **Jarak lokasi dengan pusat keramaian masyarakat.** Semakin dekat dengan pusat keramaian masyarakat, semakin tinggi prioritasnya.

II. Kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi

- **Kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi.** Semakin mudah aksesibilitas/sarana transportasi menuju lokasi semakin tinggi prioritasnya.
- **Indikator : (lihat gambar 4.101)**
 - **Rute angkutan.** Semakin banyak rute angkutan yang ada di sekitar pasar/pusat perbelanjaan/ruko, semakin tinggi prioritasnya.
 - **Ketersediaan fasilitas pendukung transportasi terminal, halte, terminal bayangan.** Jika di sekitar lokasi tersedia fasilitas pendukung transportasi, semakin tinggi prioritasnya

III. Kedekatan lokasi dengan tempat tinggal pedagang

- **Kedekatan lokasi PKL dengan tempat tinggal PKL.** Semakin dekat lokasi dengan tempat tinggal PKL semakin tinggi prioritasnya.
- **Indikator : (lihat gambar 4.102)**
 - **Jarak tempat tinggal PKL dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko.** Semakin dekat jarak lokasi dengan asal tempat tinggal PKL, semakin tinggi prioritasnya.

IV. Lahan Kosong

- **Adanya lahan kosong untuk penempatan pedagang kaki lima.** Semakin banyak lahan kosong pada lokasi pedagang dan jasa semakin tinggi prioritasnya.
- **Indikator :**
 - **Ketersediaan lahan untuk penempatan pedagang kaki lima.** Jika tersedia lahan untuk pedagang kaki lima, semakin tinggi prioritasnya.
 - **Luas lahan untuk penempatan pedagang kaki lima.** Semakin luas lahan penempatan pedagang kaki lima, semakin tinggi prioritasnya.

Gambar 4.94. Penilaian Indikator Prioritas I Aspek Ekonomi : Jenis Dagangan



Gambar 4.95. Penilaian Indikator Prioritas II Aspek Ekonomi : Waktu Jualan



Gambar 4.96. Penilaian Indikator Prioritas III Aspek Ekonomi : Biaya Angkutan



Gambar 4.97. Penilaian Indikator Prioritas IV Aspek Ekonomi : Sewa Lahan



Gambar 4.98. Penilaian Indikator Prioritas V Aspek Ekonomi : Daya Beli Masyarakat



Gambar 4.99. Penilaian Indikator Prioritas I Aspek Sosial : Ketertiban



Gambar 4.100. Penilaian Indikator Prioritas I Aspek Fisik : Kedekatan Lokasi Dengan Pusat Keramaian



Gambar 4.101. Penilaian Indikator Prioritas II Aspek Fisik : Kemudahan Aksesibilitas/Sarana Transportasi



Gambar 4.102. Penilaian Indikator Prioritas III Aspek Fisik : Kedekatan Lokasi dengan Tempat Tinggal PKL



Berdasarkan urutan prioritas aspek penentuan lokasi di atas maka dapat dilakukan perhitungan bobot pada masing-masing aspek sebagai berikut :

- **Bobot tinggi**

Aspek-aspek penentuan lokasi yang nilai bobotnya tinggi adalah yang memiliki urutan prioritas I dan II, yaitu :

- 1) Kesesuaian jenis dagangan pedagang kaki lima dengan kebutuhan masyarakat pengunjung/yang berada di sekitar lokasi
- 2) Kesesuaian waktu jualan pedagang kaki lima dengan aktivitas masyarakat yang mengunjungi dan yang berada di sekitar lokasi
- 3) Ketertiban pedagang kaki lima pada lokasi
- 4) Keamanan lokasi baik bagi pedagang dan pengunjung
- 5) Kedekatan lokasi dengan pusat keramaian masyarakat/kegiatan
- 6) Kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi

- **Bobot sedang**

Aspek-aspek penentuan lokasi yang nilai bobotnya sedang adalah yang memiliki urutan prioritas III dan IV, yaitu :

- 1) Besar biaya angkutan yang dikeluarkan
- 2) Biaya sewa tempat pada lokasi
- 3) Kenyamanan bagi masyarakat pengunjung dan yang berada di sekitar lokasi
- 4) Kebersihan pada lokasi yang diperuntukkan untuk pedagang kaki lima
- 5) Kedekatan lokasi dengan tempat tinggal PKL
- 6) Adanya lahan kosong

- **Bobot rendah**

Aspek-aspek penentuan lokasi yang nilai bobotnya rendah adalah yang memiliki urutan prioritas V, yaitu :

- 1) Keindahan lokasi yang diperuntukkan untuk pedagang kaki lima
- 2) Daya beli masyarakat yang mengunjungi dan yang berada di sekitar lokasi

Setelah diketahui pembagian kategori bobot pada masing-masing aspek, maka perhitungan yang cocok agar masing-masing aspek memiliki nilai bobot yang sesuai urutan dari tertinggi sampai rendah sebagai berikut : total nilai bobot tinggi adalah 50 (nilai bobot masing-masing aspek adalah 8,33), total nilai bobot sedang adalah 40

(nilai bobot masing-masing aspek adalah 6,67) dan total nilai bobot rendah adalah 10 (nilai bobot masing-masing aspek adalah 5).

Sehingga dapat dilakukan perhitungan berdasarkan penilaian kriteria aspek penentuan lokasi pada gambar peta-peta sebelumnya, dapat dibuat matriks analisis alternatif lokasi aktivitas pedagang kaki lima sebagai berikut.

Tabel 4.138 Matriks analisis alternatif lokasi pedagang kaki lima

NO	KRITERIA	TOTAL BOBOT	BOBOT	Lokasi Perdagangan dan Jasa					
				BWK I		BWK VI		BWK VII	
				B	N	N	N	NxB	N
1.	Jenis dagangan pedagang kaki lima dengan kebutuhan masyarakat pengunjung/yang berada di sekitar lokasi.	50	8,33	3	8,33x3 24.99	2	8,33x2 16.66	3	8,33x3
2.	Kesesuaian waktu jualan pedagang kaki lima dengan aktivitas masyarakat yang mengunjungi dan yang berada di sekitar lokasi		8,33	3	8,33x3	2	8,33x2	2	8,33x2
3.	Ketertiban pedagang kaki lima pada lokasi		8,33	3	8,33x3	2	8,33x2	2	8,33x2
4.	Keamanan lokasi baik bagi pedagang dan pengunjung		8,33	3	8,33x3	1	8,33x1	1	8,33x1
5.	Kedekatan lokasi dengan pusat keramaian masyarakat/kegiatan		8,33	3	8,33x3	2	8,33x2	3	8,33x3
6.	Kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi		8,33	3	8,33x3	3	8,33x2	1	8,33x2
7.	Besar biaya angkutan yang dikeluarkan	40	6,67	3	6,67x3 20.01	1	6,67x1	3	6,67x3
8.	Biaya sewa tempat pada lokasi		6,67	1	6,67x1	2	6,67x2 13.34	2	6,67x2
9.	Kenyamanan bagi masyarakat pengunjung dan yang berada di sekitar lokasi		6,67	3	6,67x3	2	6,67x2	2	6,67x2
10.	Kebersihan pada lokasi yang diperuntukkan untuk pedagang kaki lima		6,67	3	6,67x3	2	6,67x2	2	6,67x2
11.	Kedekatan lokasi dengan tempat tinggal PKL		6,67	3	6,67x3	1	6,67x1	2	6,67x2
12.	Adanya lahan kosong		6,67	3	6,67x3	1	6,67x1	1	6,67x1
13.	Daya beli masyarakat yang mengunjungi dan yang berada di sekitar lokasi	10	5	3	5x3	3	5x3	3	5x3
14.	Keindahan lokasi yang diperuntukkan untuk pedagang kaki lima		5	3	5x3	2	5x2	2	5x2
TOTAL		100	100	286,66		184,99		205,5	

Sumber : Hasil Analisa, 2007

Tabel 4.139 Hasil pembobotan alternatif lokasi pedagang kaki lima di kota gresik

Prioritas	Lokasi Pedagang Kaki Lima	Bobot
1	Kawasan Perdagangan dan jasa BWK I	286,66
2	Kawasan Perdagangan dan jasa BWK VII	205,5
3	Kawasan Perdagangan dan jasa BWK VI	184,99

Sumber : Hasil Analisa, 2007



Berdasarkan hasil pembobotan pada tabel 4.139, dapat ditentukan lokasi pedagang kaki lima yang menjadi prioritas dilihat dari aspek-aspek penentuan lokasi PKL. Lokasi utama aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik adalah di Bagian Wilayah Kota BWK I dengan bobot sebesar 286.66, yang berpusat di kawasan pusat perdagangan Jl. Gubernur Suryo dengan fungsi kegiatan antara lain sebagai permukiman, pusat pelayanan kota, perdagangan, jasa dan fasum, pelabuhan serta pergudangan. Kawasan pusat perdagangan Jl. Gubernur Suryo dapat dilihat pada gambar 4.103. Adapun keterangan lokasi jika ditinjau dari hasil urutan aspek ekonomi, sosial dan fisik, maka dapat dijelaskan pada tabel 4.140.









Gambar 4.103. Kawasan pusat perdagangan dan jenis kegiatan ini terpusat di daerah Jl. Gubernur Suryo.













Tabel 4.140 Kawasan pusat perdagangan jl. gubernur suryo dilihat dari urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik

No.	Faktor	Aspek	Penjelasan	Gambar/Lokasi pada peta
A.	Ekonomi	I. Jenis Dagangan	<p>Macam aktivitas di sekitar pasar/pusat perbelanjaan/pertokoan antara lain terminal Gubernur Suryo, industri, perumahan penduduk, perkantoran, sekolah.</p> <p>Kawasan Jl. Gubernur Suryo yang berfungsi sebagai kawasan pusat perdagangan dan pusat keramaian masyarakat dengan tingkat keramaian yang tinggi karena merupakan kawasan yang menawarkan kebutuhan hidup sehari-hari baik makanan/minuman, non makanan/minuman dan bahan mentah menjadi daya tarik kuat bagi pedagang. Pedagang kaki lima dapat bebas memilih jenis dagangan yang akan diperjualbelikan sesuai dengan pertimbangan modal, keuntungan ingin dicapai dan kebutuhan masyarakat yang mengunjungi atau berada di sekitar kawasan tersebut.</p>	<p>Pedagang kaki lima di sepanjang jalan yang menawarkan barang kebutuhan masyarakat seperti :</p>  <p>a : Segala macam asesoris, sandal, sepatu b : Segala macam buah-buahan c : Segala jenis sandang d : Segala jenis bahan mentah</p> <p>Lokasi Terminal Gubernur Suryo (e) Lokasi Industri (f) Lokasi Perumahan penduduk (g) Lokasi Perkantoran (h) Lokasi Sekolah (i)</p>
		II. Waktu Jualan	<p>Waktu jualan untuk berbagai jenis kegiatan yang ada di kawasan pusat perdagangan Jl. Gubernur Suryo ini sebagian besar dari pagi (05.00) – malam hari (21.00). Oleh karena rentang waktu hidupnya aktivitas yang sesuai dengan persyaratan lokasi PKL dari hasil urutan, sehingga pemegang keputusan dapat menyesuaikan dengan bebas antara lokasi dengan waktu jualan baik untuk PKL makanan/minuman, non makanan dan bahan mentah sesuai dengan hasil urutan prioritas.</p>	<p>Aktivitas Pagi Hari (d) Aktivitas Siang Hari (j)</p> 

No.	Faktor	Aspek	Penjelasan	Gambar/Lokasi pada peta
				Aktivitas Malam Hari (a) 
		III. Biaya Angkutan	<p>Biaya angkutan menuju lokasi pusat perdagangan Jl. Gubernur Suryo sangat relatif, dilihat dari rute angkutan menuju lokasi juga sangat banyak yaitu 6 rute dari 7 rute angkutan di Kota Gresik. Adapun biaya angkutan kota di Kota Gresik ini tergantung dari jarak berangkat. Biaya angkutan kota dengan jarak jauh tidak sama dengan jarak dekat. Jika jarak jauh Rp 2.500-Rp3.000) jika jarak dekat (Rp 1.500-Rp 2.000).</p> <p>Selain itu juga terdapat alternatif angkutan yang dapat digunakan untuk individu berupa becak dan delman dengan biaya transportasi yang dapat dinegosiasikan.</p>	<p>Salah satu angkutan yang melewati Jl. Gubernur Suryo (skala kabupaten)</p>  <p>Alternatif delman dan becak menuju Jl. Gubernur Suryo</p> 
		IV. Biaya Sewa Tempat Jualan	<p>Biaya sewa tempat tergantung dari besar anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk terlaksananya program relokasi pedagang lima di kawasan pusat perdagangan Jl. Gbernur Suryo, disamping memang pada kawasan ini masih terdapat lahan kosong milik PT. Multi Sarana Plaza dengan status tidak produktif atau tidak ada kegiatan di atasnya yang dapat dijadikan lokasi penampungan pedagang kaki lima beserta penataannya.</p>	-
		V. Daya beli masyarakat	<p>Kawasan Jl. Gubernur Suryo sebagai pusat perdagangan dengan skala regional yang terletak di pusat kota dan dekat dengan terminal menawarkan berbagai macam jenis dagangan dari partai besar sampai partai kecil dengan harga beragam dan daya saing tinggi antar pedagang, sehingga masyarakat dari seluruh lapisan ekonomi dapat menjangkau membeli barang dagangan.</p>	<p>Lokasi Pusat perbelanjaan skala regional (m) Lokasi Pasar Induk Kota skala regional (j) Lokasi Pertokoan skala regional (n)</p>

No.	Faktor	Aspek	Penjelasan	Gambar/Lokasi pada peta
B.	Sosial	I. Ketertiban	Adanya lahan yang dapat diperuntukkan bagi pedagang kaki lima berupa tanah kosong dengan luas sekitar 1,5 ha serta memiliki jarak dengan jalan utama sekitar 15 m, oleh karena itu penataan pedagang kaki lima dapat diusahakan secara tertib mengingat lokasi yang tidak dekat dengan jalan utama dan lahannya yang luas. Sehingga dampak kesemrawutan dan kemacetan dapat diminimalisasi.	<p>Petugas Satpol melakukan razia mendadak untuk pedagang liar yang berada di sepanjang pasar dan pertokoan.</p> 
		II. Keamanan	<p>Pedagang kaki lima yang memanfaatkan sebagian badan jalan Gubernur Suryo, menjadikan masyarakat pengunjung berjalan di daerah badan jalan, padahal kondisi lalu lintas di depan pasar sangat ramai (merupakan jalan kolektor sekunder).</p> <p>Sedangkan bagi pedagang selalu merasakan tidak aman dalam melakukan aktivitas karena adanya razia Satpol PP yang dilakukan secara mendadak ataupun rutin. Untuk kasus gangguan kriminal seperti pencopetan, pencurian, preman dll masih jarang terjadi di kawasan ini apalagi terdapat pos keamanan, sehingga masyarakat merasa aman berkunjung ke lokasi ini.</p>	<p>Pengunjung berjalan melebihi batas bahu jalan.</p>  <p>Lokasi pos keamanan (p)</p>
		III. Kenyamanan	Adanya jaminan kenyamanan bagi pengunjung dapat dilihat dari ketersediaan lahan kosong yang cukup luas untuk penempatan pedagang kaki lima dan berada jauh dari jalan utama sehingga dapat dilakukan penataan sirkulasi bagi pejalan kaki. Sehingga dampak negatif seperti yang diperlihatkan pada gambar disamping dapat diminimalisasi.	<p>Kondisi PKL di depan Pasar Kota Gresik tidak menyisakan trotoar bagi pejalan kaki mengakibatkan tidak nyaman</p> 

No.	Faktor	Aspek	Penjelasan	Gambar/Lokasi pada peta
				<p>Pengunjung di depan Pasar Baru Gresik berjalan pada badan jalan</p> 
		IV. Kebersihan	<p>Kawasan pusat perdagangan Jl. Gubernur Suryo kurang terjaga kebersihannya karena adanya PKL makanan/minuman dan PKL bahan mentah yang berada di sepanjang Jl. Gubernur Suryo paling menghasilkan sampah basah dan kering disekitarnya bahkan kadang sampah tersebut dibiarkan berserakan di lokasi. Namun permasalahan ini bisa diatasi dengan pengelolaan sampah, disamping juga memaksimalkan fasilitas gerobak sapat, kontainer, dan TPS yang berada di Jl. Gubernur Suryo. Sehingga penetapan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di kawasan ini harus disertai dengan jaminan kebersihan lokasi.</p>	<p>Sampah basah dan sampah kering banyak berceceran di sepanjang jalan.</p>  <p>Fasilitas gerobak, kontainer sampah dan TPS yang ada di pinggir Jl. Gubernur Suryo</p> 
C.	Fisik	I. Kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi	<p>Lokasi PKL dilewati oleh 6 rute angkutan yang melayani hampir seluruh wilayah Kota Gresik. Terdapat terminal Gubernur Suryo dengan skala Kabupaten yang berada di sebelah barat pasar baru Gresik, dengan jenis angkutan kota yang dapat menjangkau seluruh daerah Kota dan sebagian Kabupaten Gresik.</p>	<p>Terminal Gubernur Suryo (e)</p> 

No.	Faktor	Aspek	Penjelasan	Gambar/Lokasi pada peta
		II. Kedekatan dengan pusat keramaian kota/kegiatan masyarakat	Terdapat berbagai macam bangunan dengan jenis kegiatan yang menjadi pusat keramaian pengunjung yaitu Mall Ramayana, Pasar Baru Gresik, Pasar Kota Gresik, Pertokoan Pecinan, Terminal Gubernur Suryo. Sehingga dapat menjadi jaminan kesejahteraan bagi pedagang karena adanya keramaian masyarakat/pengunjung.	<p>Mall Ramayana (m) Pasar Baru Gresik (j)</p>   <p>Pertokoan (n) Terminal Gubernur Suryo (e)</p>  
		III. Kedekatan lokasi PKL dengan tempat tinggal PKL	Terdapat perkampungan di sekitar kawasan pusat perdagangan Jl. Gubernur Suryo yang banyak dibuat kontrakan atau kos. Dan menurut data sekunder bahwa sebagian besar pedagang yang berjualan di kawasan ini bertempat tinggal di perkampungan dekat lokasi jualannya (90%).	Lokasi perumahan penduduk (g)
		IV. Terdapat lahan kosong	Masih terdapat lahan kosong di Kawasan Jl. Gubernur Suryo ini yaitu terletak di belakang Pasar Baru Gresik yang selalu ramai dikunjungi masyarakat. Letaknya yang strategis sangat dekat dengan keramaian kota seperti, Mall Ramayana, Pasar Baru, dan Pasar Kota menjadikan lahan ini berpotensi tinggi digunakan pula sebagai aktivitas perdagangan. Lahan kosong ini milik PT. Multi Sarana Plaza yang masih belum digunakan untuk aktiivitas apapun.	<p>Lahan kosong milik PT. Multi Sarana Plaza yang terletak di belakang Pasar Baru Gresik (o)</p>  <p>Akses masuk menuju lahan kosong dari jalan besar Gubernur Suryo (s)</p> 

Sumber : Hasil Pembahasan 2006

Setelah diketahui kesesuaian lokasi PKL di kawasan Jl. Gubernur Suryo dengan hasil urutan aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi jualan dari berbagai *Stakeholder* yang berpengaruh di atas, maka ada beberapa kriteria yang juga harus dipertimbangkan sebagai tolak ukur kesesuaian ruang aktivitas pedagang kaki lima pada suatu kawasan pusat kota, antara lain :

- a. Lokasi tersebut memiliki ruang untuk aktivitas PKL dengan ukuran lebar minimal ruang usaha yang dipakai PKL di kawasan ditambah 2 meter ruang untuk pejalan;
- b. Lokasi PKL mudah dilihat dan berada pada lokasi yang sering dikunjungi orang (tingkat kunjungan tinggi);
- c. Ruang aktivitas PKL yang dikembangkan harus sesuai dengan guna lahan yang telah ditentukan pemerintah;
- d. Ruang aktivitas PKL keberadaannya tidak melanggar ketentuan-ketentuan teknis dalam pembangunan;
- e. Aktivitas PKL pada suatu ruang mempunyai interaksi dengan aktivitas formal di sekitarnya (memiliki hubungan yang saling mendukung);
- f. Keberadaan PKL diterima oleh masyarakat sekitar (rasa aman masyarakat tidak terganggu) dan memiliki batas sosial dengan jarak minimal 1,2 meter dari bangunan tempat masyarakat tinggal;
- g. Ruang aktivitas PKL mendapat dukungan masyarakat (terutama masyarakat sekitar lokasi PKL).

Berdasarkan keterangan di atas, maka lokasi di sekitar kawasan pusat kota Jl. Gubernur Suryo yang sesuai kriteria adalah **di lahan milik PT. Multi Sarana Plaza** dimana lahan ini berupa lahan yang telah disediakan kavling-kavling (bedak-bedak untuk pedagang) namun tidak dipergunakan lagi dan juga berupa lahan kosong yang dapat dijadikan lokasi penataan pedagang kaki lima. Kondisi lahan kosong milik PT. Multi Sarana Plaza ini jika ditinjau dari persyaratan teknis di atas dapat dilihat pada gambar dan gambar 4.107.

Berdasarkan keterangan mengenai lokasi pusat perdagangan Jalan Gubernur Suryo di atas maka dengan peluang yang dimiliki, lokasi tersebut dapat dijadikan pusat lokasi jualan pedagang kaki lima namun dengan adanya penataan dan pengaturan yang lebih spesifik lagi. Adapun mengenai penataan dan pengaturan secara mendetail pada lokasi tersebut dapat diajukan sebagai studi lanjutan dari penelitian ini.

BAB IV	82
HASIL DAN PEMBAHASAN	82
4.1 Tinjauan Wilayah Kota Gresik	82
4.1.1 Kondisi fisik geografis dan luas wilayah	82
4.1.2 Struktur tata ruang dan fungsi wilayah kota gresik	82
4.1.3 Kependudukan wilayah kota gresik	90
4.1.4 Penggunaan tanah	93
4.1.5 Fasilitas perkotaan	97
4.1.3 Perekonomian wilayah kota gresik	101
4.2 Tinjauan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap Pedagang Kaki Lima .	103
4.2.1 Peraturan daerah kabupaten gresik nomor 03 tahun 2003 tentang ijin penempatan dan pembinaan pedagang kaki lima	103
4.2.2 Peraturan daerah kabupaten gresik nomor 25 tahun 2004 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kabupaten gresik	105
4.3 Karakteristik Pedagang Kaki Lima Wilayah Kota Gresik	108
4.3.1 Jumlah pedagang kaki lima kabupaten gresik	109
4.3.2 Karakteristik responden pedagang kaki lima	110
A. Jenis kelamin pedagang kaki lima	112
B. Usia pedagang kaki lima	112
C. Tingkat pendidikan pedagang kaki lima	113
D. Status pedagang kaki lima	114
E. Asal daerah pedagang kaki lima	114
F. Status tempat tinggal pedagang kaki lima	115
G. Mata pencaharian pedagang kaki lima	116
4.3.3 Karakteristik aktivitas pedagang kaki lima	117
A. Jenis dagangan pedagang kaki lima	117
B. Waktu dagang pedagang kaki lima	118
C. Lama menjadi pedagang kaki lima	123
D. Alasan menjalankan usaha	123
E. Kerjasama antar pedagang kaki lima	124
4.3.4 Kondisi fisik bangunan/tempat usaha pedagang kaki lima	125
A. Tempat berdagang	125
B. Sarana berdagang	126
C. Ruang usaha	127
D. Pola melakukan usaha dagang	128
4.3.5 Aspek permodalan pedagang kaki lima	129
A. Modal usaha	129
B. Asal modal usaha	130
C. Jumlah keluarga yang ditopang	130
D. Jumlah pendapatan yang diperoleh per hari	131
4.3.6 Permasalahan pedagang kaki lima di kabupaten gresik	133
A. Kesulitan/kendala yang dihadapi dalam aktivitas pedagang kaki lima	133
B. Pengetahuan tentang perda pengaturan pedagang kaki lima	134
C. Bantuan, penyuluhan (pembinaan) untuk mengembangkan usaha pedagang kaki lima	135
D. Penertiban pedagang kaki lima	136
E. Kesan terhadap kebijakan penertiban	137

4.4	Karakteristik Masyarakat Pengunjung	139
4.4.1	Jenis kelamin pengunjung	139
4.4.2	Usia pengunjung	140
4.4.3	Asal daerah pengunjung	140
4.4.4	Status pengunjung	141
4.4.5	Tingkat pendidikan pengunjung	142
4.4.6	Mata pencaharian	143
4.4.7	Pendapatan pengunjung	144
4.4.8	Frekwensi belanja	144
4.5	Pembahasan	145
4.5.1	Identifikasi persepsi mengenai lokasi usaha pedagang kaki lima dalam faktor fisik, ekonomi dan sosial menurut pedagang, masyarakat dan pemerintah	145
	A. Identifikasi persepsi mengenai aspek ekonomi dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima	147
	B. Identifikasi persepsi mengenai aspek sosial dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima	149
	C. Identifikasi persepsi mengenai aspek fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima	154
4.5.2	Identifikasi urutan prioritas dari aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima	157
	A. Identifikasi urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima menurut pedagang	157
	B. Identifikasi urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima menurut responden pemerintah	178
	C. Identifikasi urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima menurut responden masyarakat	190
	D. Identifikasi urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima menurut para ahli	203
	1) Identifikasi urutan prioritas aspek ekonomi dalam menentukan lokasi jualan pedagang kaki lima	205
	2) Identifikasi urutan prioritas aspek sosial dalam menentukan lokasi jualan pedagang kaki lima	247
	3) Identifikasi urutan prioritas aspek fisik dalam menentukan lokasi jualan pedagang kaki lima	253
	4) Kesimpulan urutan prioritas aspek penentuan lokasi pkl menurut pedagang, masyarakat, pemerintah dan ahli	282
4.5.3	Penentuan lokasi aktivitas pedagang kaki lima sesuai hasil urutan prioritas	289
	Tabel 4.1 Pembagian wilayah dan arahan kegiatan	87
	Tabel 4.2 Pembagian jumlah penduduk menurut jenis kelamin	90
	Tabel 4.3 Pembagian jumlah penduduk menurut lapangan usaha	91
	Tabel 4.4 Pembagian jumlah pencari kerja wilayah kota gresik tahun 2004	92
	Tabel 4.5 Fasilitas perdagangan kota gresik tahun 2002	99
	Tabel 4.6 Perekonomian kota gresik tahun 2002	101
	Tabel 4.7 Jumlah pedagang kaki lima di wilayah kota gresik tahun 2005	109
	Tabel 4.8 Jumlah pedagang kaki lima di timur alon-alon gresik	109
	Tabel 4.9 Jumlah pedagang kaki lima di lahan milik pt. multi sarana plaza	110
	Tabel 4.10 Jumlah pedagang kaki lima di pasar kota gresik	110

Tabel 4.11 Jenis kelamin pedagang kaki lima	112
Tabel 4.12 Usia pedagang kaki lima	112
Tabel 4.13 Tingkatan pendidikan pedagang kaki lima	113
Tabel 4.14 Status pedagang kaki lima	114
Tabel 4.15 Asal daerah pedagang kaki lima	114
Tabel 4.16 Status tempat tinggal pedagang kaki lima	115
Tabel 4.17 Pekerjaan sebelum menjadi pedagang kaki lima	116
Tabel 4.18 Jenis barang dagangan pedagang kaki lima	117
Tabel 4.19 Kesesuaian jenis barang dagangan dengan keinginan pedagang kaki lima	118
Tabel 4.20 Waktu berdagang pedagang kaki lima	118
Tabel 4.21 Lama menjadi pedagang kaki lima	123
Tabel 4.22 Alasan menjalankan usaha pedagang kaki lima	123
Tabel 4.23 Kerjasama antar pedagang kaki lima	124
Tabel 4.24 Pemilihan tempat berdagang	125
Tabel 4.25 Sarana berdagang	126
Tabel 4.26 Ukuran ruang usaha (sarana berdagang)	127
Tabel 4.27 Pola melakukan usaha berdagang	128
Tabel 4.28 Modal usaha pedagang kaki lima	129
Tabel 4.29 Asal modal pedagang kaki lima	130
Tabel 4.30 Jumlah keluarga yang ditopang	131
Tabel 4.31 Jumlah pendapatan yang diperoleh per hari	131
Tabel 4.32 Kecukupan jumlah pendapatan yang diperoleh per bulan	132
Tabel 4.33 Kesulitan/kendala yang dihadapi dalam	133
Tabel 4.34 Pengetahuan tentang perda pengaturan pedagang kaki lima	135
Tabel 4.35 Bantuan, penyuluhan (pembinaan) untuk mengembangkan	136
Tabel 4.36 Pernah/tidak mengalami razia penertiban pedagang kaki lima	136
Tabel 4.37 Kesan terhadap kebijakan penertiban oleh pemerintah daerah	137
Tabel 4.38 Jenis kelamin pengunjung	139
Tabel 4.39 Usia pengunjung	140
Tabel 4.40 Asal daerah pengunjung	140
Tabel 4.41 Status pengunjung	141
Tabel 4.42 Tingkatan pendidikan pengunjung	142
Tabel 4.43 Mata pencaharian pengunjung	143
Tabel 4.44 Pendapatan pengunjung	144
Tabel 4.45 Frekwensi belanja pengunjung	144
Tabel 4.46 Identifikasi persepsi aspek ekonomi dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima	147
Tabel 4.47 Identifikasi persepsi aspek sosial dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima	153
Tabel 4.48 Identifikasi persepsi aspek fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima	154
Tabel 4.49 Urutan prioritas aspek ekonomi menurut responden pedagang kaki lima	157
Tabel 4.50 Urutan prioritas jenis dagangan pedagang kaki lima responden	158
Tabel 4.51 Penggunaan lahan dan jenis aktivitas di sekitar lokasi pkl di wilayah kota gresik	164
Tabel 4.52 Urutan prioritas pilihan lokasi responden pedagang kaki lima	166
Tabel 4.53 Urutan prioritas waktu jual pedagang kaki lima responden	167
Tabel 4.54 Urutan prioritas aspek sosial menurut pedagang kaki lima responden	170

Tabel 4.55 Urutan prioritas aspek dalam faktor fisik menurut pedagang kaki lima responden	171
Tabel 4.56 Urutan prioritas sarana transportasi pilihan pedagang kaki lima responden	172
Tabel 4.57 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan pasar/pusat perbelanjaan menurut pedagang kaki lima responden	174
Tabel 4.58 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perkantoran/sekolah	174
Tabel 4.59 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan terminal.	175
Tabel 4.60 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perumahan	176
Tabel 4.61 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan tempat tinggal	177
Tabel 4.62 Kesimpulan urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima	178
Tabel 4.63 Urutan prioritas aspek ekonomi menurut responden pemerintah kabupaten gresik	178
Tabel 4.64 Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha makanan	179
Tabel 4.65 Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha non makanan/minuman	180
Tabel 4.66 Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha bahan mentah..	180
Tabel 4.67 Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima makanan/minuman	181
Tabel 4.68 Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima non makanan/minuman menurut responden pemerintah kabupaten gresik	182
Tabel 4.69 Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima bahan mentah	182
Tabel 4.70 Urutan prioritas aspek sosial menurut responden pemerintah kabupaten gresik	184
Tabel 4.71 Urutan prioritas aspek fisik menurut responden pemerintah kabupaten gresik	185
Tabel 4.72 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima	186
Tabel 4.73 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perkantoran/sekolah menurut responden pemerintah kabupaten gresik	187
Tabel 4.74 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan terminal.	187
Tabel 4.75 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perumahan penduduk menurut responden pemerintah kabupaten gresik	188
Tabel 4.76 Kesimpulan urutan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima	189
Tabel 4.77 Urutan prioritas aspek ekonomi menurut masyarakat responden	190
Tabel 4.78 Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha makanan/minuman	191
Tabel 4.79 Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha non makanan/minuman	192
Tabel 4.80 Urutan prioritas pilihan lokasi pedagang kaki lima usaha bahan mentah..	193
Tabel 4.81 Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima makanan/minuman	194
Tabel 4.82 Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima non makanan/minuman menurut masyarakat responden	195

Tabel 4.83 Urutan prioritas pilihan waktu berjualan pedagang kaki lima bahan mentah	196
Tabel 4.84 Urutan prioritas aspek sosial menurut masyarakat responden	197
Tabel 4.85 Urutan prioritas aspek fisik menurut masyarakat responden	198
Tabel 4.86 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan pasar/pusat perbelanjaan menurut masyarakat responden	199
Tabel 4.87 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perkantoran/sekolah	200
Tabel 4.88 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan terminal	201
Tabel 4.89 Urutan prioritas jarak lokasi usaha pedagang kaki lima dengan perumahan penduduk menurut masyarakat responden	202
Tabel 4.90 Urutan kesimpulan prioritas aspek penentuan lokasi pedagang kaki lima	203
Tabel 4.91 Urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima makanan/minuman	206
Tabel 4.92 Kesimpulan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima makanan/minuman	209
Tabel 4.93 Keterangan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima makanan/minuman menurut responden ahli	210
Tabel 4.94 Urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima non makanan/minuman	213
Tabel 4.95 Kesimpulan urutan prioritas lokasi	215
Tabel 4.96 Keterangan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima non makanan/minuman menurut ahli	216
Tabel 4.97 Urutan prioritas lokasi pkl bahan mentah jawaban para ahli	219
Tabel 4.98 Kesimpulan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima bahan mentah menurut ahli	221
Tabel 4.99 Keterangan urutan prioritas lokasi pedagang kaki lima bahan mentah menurut ahli	222
Tabel 4.100 Urutan prioritas waktu jual pedagang kaki lima makanan/minuman	225
Tabel 4.101 Kesimpulan urutan prioritas waktu jualan	228
Tabel 4.102 Keterangan urutan prioritas waktu jualan pedagang kaki lima makanan/minuman menurut ahli	229
Tabel 4.103 Urutan prioritas waktu jual pedagang kaki lima non makanan/minuman	231
Tabel 4.104 Kesimpulan urutan prioritas waktu jualan	234
Tabel 4.105 Keterangan urutan prioritas waktu jualan pedagang kaki lima non makanan/minuman menurut ahli	235
Tabel 4.106 Urutan prioritas waktu jual pedagang kaki lima bahan mentah jawaban para ahli	237
Tabel 4.107 Kesimpulan urutan prioritas waktu jualan	239
Tabel 4.108 Keterangan urutan prioritas waktu jualan pedagang kaki lima bahan mentah menurut ahli	240
Tabel 4.109 Urutan prioritas aspek ekonomi jawaban para ahli	242
Tabel 4.110 Kesimpulan urutan prioritas aspek ekonomi menurut ahli	244
Tabel 4.111 Keterangan urutan prioritas aspek ekonomi dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima menurut ahli	245
Tabel 4.112 Jawaban urutan prioritas aspek sosial jawaban para ahli	248
Tabel 4.113 Kesimpulan urutan prioritas aspek sosial menurut ahli	250
Tabel 4.114 Keterangan urutan prioritas aspek sosial dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima menurut ahli	251
Tabel 4.115 Jawaban urutan prioritas pusat keramaian berjarak dekat (<100m)	253

Tabel 4.116 Kesimpulan urutan prioritas pusat keramaian berjarak dekat (<100m) ..	257
Tabel 4.117 Keterangan urutan prioritas pusat keramaian berjarak dekat (<100m) dengan lokasi pedagang kaki lima menurut ahli.....	258
Tabel 4.118 Jawaban urutan prioritas pusat keramaian berjarak sedang (100 – 500 m)	260
Tabel 4.119 Kesimpulan urutan prioritas pusat keramaian berjarak sedang (100 – 500 m)	263
Tabel 4.120 Keterangan urutan prioritas pusat keramaian berjarak sedang (100 – 500 m) dengan lokasi pedagang kaki lima menurut ahli	264
Tabel 4.121 Jawaban urutan prioritas pusat keramaian berjarak jauh (>500 m)	266
Tabel 4.122 Kesimpulan urutan prioritas pusat keramaian berjarak jauh (>500 m)...	269
Tabel 4.123 Keterangan urutan prioritas pusat keramaian berjarak jauh (>500 m) dengan lokasi pedagang kaki lima menurut ahli.....	270
Tabel 4.124 Jawaban urutan prioritas jarak lokasi pedagang kaki lima	272
Tabel 4.125 Kesimpulan urutan prioritas jarak lokasi pedagang kaki lima	274
Tabel 4.126 Keterangan urutan jarak prioritas lokasi pedagang kaki lima dengan tempat tinggalnya menurut ahli.....	275
Tabel 4.127 Jawaban urutan prioritas aspek fisik menurut ahli.....	277
Tabel 4.128 Kesimpulan urutan prioritas aspek fisik menurut ahli	279
Tabel 4.129 Keterangan urutan prioritas aspek fisik dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima menurut ahli	280
Tabel 4.130 Kesimpulan prioritas aspek ekonomi penentuan lokasi pedagang kaki lima	282
Tabel 4.131 Prioritas aspek ekonomi dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima	284
Tabel 4.132 Kesimpulan prioritas aspek sosial penentuan lokasi pedagang kaki lima	284
Tabel 4.133 Prioritas aspek sosial dalam menentukan lokasi	286
Tabel 4.134 Kesimpulan prioritas aspek fisik penentuan lokasi pedagang kaki lima...	287
Tabel 4.135 Prioritas aspek fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima di kota gresik	288
Tabel 4.136 Persyaratan lokasi aktivitas utama pedagang kaki lima sesuai hasil urutan prioritas	289
Tabel 4.137 Eksisting lokasi pasar/pusat perbelanjaan/pertokoan di Kota Gresik.....	290
Tabel 4.138 Matriks analisis alternatif lokasi pedagang kaki lima	306
Tabel 4.139 Hasil pembobotan alternatif lokasi pedagang kaki lima di kota gresik.....	307
Tabel 4.140 Kawasan pusat perdagangan jl. gubernur suryo dilihat dari urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik	309
Gambar 4.1 Peta orientasi wilayah Kabupaten Gresik.....	83
Gambar 4.2 peta orientasi Kota Gresik	84
Gambar 4.3 peta Administrasi Kota Gresik	85
Gambar 4.4 Pembagian SWP Kabupaten Gresik	86
Gambar 4.5 Peta Struktur Kota Gresik.....	89
Gambar 4.6 Pembagian jumlah penduduk.....	90
Gambar 4.7 Pembagian jumlah penduduk menurut lapangan usaha	91
Gambar 4.8 Pembagian jumlah penduduk menurut lapangan usaha	92
Gambar 4.9 Pembagian jumlah pencari kerja wilayah kota gresik tahun 2004.....	92

Gambar 4.10 Pembagian jumlah pencari kerja	93
gambar 4.11. Eksisting penggunaan lahan/ daratan di wilayah Kota Gresik	96
Gambar 4.12. Lokasi fasilitas transportasi yang ada di wilayah perencanaan selengkapnya ..	98
Gambar 4.13 Grafik fasilitas perkotaan kota gresik tahun 2002	99
Gambar 4.14. Lokasi fasilitas Perdagangan dan jasa	100
Gambar 4.15 Sektor Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2004	103
Gambar 4.16 Peta persebaran lokasi PKL di Kota Gresik	111
Gambar 4.17 Jenis Kelamin Pedagang Kaki Lima	112
Gambar 4.18 Usia Pedagang Kaki Lima	112
Gambar 4.19 Tingkatan Pendidikan Pedagang Kaki Lima	113
Gambar 4.20 Status Pedagang Kaki Lima	114
Gambar 4.21 Asal Daerah Pedagang Kaki Lima	115
Gambar 4.22 Status Tempat Tinggal Pedagang Kaki Lima	115
Gambar 4.23 Pekerjaan Sebelum Menjadi Pedagang Kaki Lima	116
Gambar 4.24 Jenis Barang Dagangan Pedagang Kaki Lima	117
Gambar 4.25 Waktu Berdagang Pedagang Kaki Lima	118
gambar 4.26 Peta jenis dagangan PKL di Kota Gresik	119
Gambar 4.27 Lama Menjadi Pedagang Kaki Lima	123
Gambar 4.28 Alasan Menjalankan Usaha Pedagang Kaki Lima	124
Gambar 4.29 Pemilihan Tempat Berdagang	126
Gambar 4.30 Sarana Berdagang	126
Gambar 4.31 Ukuran Ruang Usaha (Sarana Berdagang)	127
Gambar 4.32 Pola Melakukan Usaha Berdagang	128
Gambar 4.33 Modal Usaha Pedagang Kaki Lima	129
Gambar 4.34 Asal Modal Pedagang Kaki Lima	130
Gambar 4.35 Jumlah Keluarga Yang Ditopang	131
Gambar 4.36 Jumlah Pendapatan Yang Diperoleh Per Hari	132
Gambar 4.37 Kesulitan/kendala yang dihadapi dalam	134
Gambar 4.38 Pengetahuan Tentang Perda Pengaturan Pedagang Kaki Lima	135
Gambar 4.39 Pernah/Tidak Mengalami Razia Penertiban Pedagang Kaki Lima	136
Gambar 4.40 Jenis Kelamin Pengunjung	139
Gambar 4.41 Usia Pengunjung	140
Gambar 4.42 Asal Daerah Pengunjung	141
Gambar 4.43 Status Pengunjung	141
Gambar 4.44 Tingkatan Pendidikan Pengunjung	142
Gambar 4.45 Mata pencaharian pengunjung	143
Gambar 4.46 Penghasilan Pengunjung	144
Gambar 4.47 Frekwensi Belanja Pengunjung	145
Gambar 4.48	150
Gambar 4.49	151
Gambar 4.50	152
Gambar 4.51	152
Gambar 4.52 Urutan Prioritas Aspek Ekonomi Menurut Pedagang Kaki Lima	157
gambar 4.53.a Guna Lahan dan Aktivitas	160
Gambar 4.54 Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Responden	166
Gambar 4.55 Urutan Prioritas Waktu Jual Pedagang Kaki Lima Responden	168
Gambar 4.56 Peta asal/domisili PKL	169

Gambar 4.57 Urutan Prioritas Aspek Sosial Menurut Pedagang Kaki Lima Responden	170
Gambar 4.58 Urutan Prioritas Aspek Fisik Menurut Pedagang Kaki Lima Responden	171
Gambar 4.59 Urutan Prioritas Sarana Transportasi Pilihan Pedagang Kaki Lima Responden	173
Gambar 4.60 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha PKL dengan	174
Gambar 4.61 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima Dengan Perkantoran/Sekolah Menurut Pedagang Kaki Lima Responden	175
Gambar 4.62 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Terminal	175
Gambar 4.63 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima	176
Gambar 4.64 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima	177
Gambar 4.65 Urutan Prioritas Aspek Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik	178
Gambar 4.66 Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Makanan/minuman	179
Gambar 4.67 Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Usaha Bahan Mentah	180
Gambar 4.68 Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Makanan/Minuman Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik	181
Gambar 4.69 Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Non Makanan/Minuman Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik	182
Gambar 4.70 Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Bahan Mentah	183
Gambar 4.71 Urutan Prioritas Aspek Sosial	184
Gambar 4.72 Urutan Prioritas Aspek Fisik	185
Gambar 4.73 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Pasar/Pusat Perbelanjaan Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik	186
Gambar 4.74 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Perkantoran/Sekolah Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik	187
Gambar 4.75 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Terminal	188
Gambar 4.76 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Perumahan Penduduk Menurut Responden Pemerintah Kabupaten Gresik	188
Gambar 4.77 Prioritas Aspek Ekonomi Menurut Masyarakat Responden	190
Gambar 4.78 Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Usaha Makanan	192
Gambar 4.79 Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Usaha Non Makanan/Minuman Menurut Masyarakat Responden	193
Gambar 4.80 Urutan Prioritas Pilihan Lokasi Pedagang Kaki Lima Usaha Bahan Mentah	194
Gambar 4.81 Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Makanan/Minuman Menurut Masyarakat Responden	195
Gambar 4.82 Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Non Makanan/Minuman Menurut Masyarakat Responden	196
Gambar 4.83 Urutan Prioritas Pilihan Waktu Berjualan Pedagang Kaki Lima Bahan Mentah	196
Gambar 4.84 Urutan Prioritas Aspek Sosial Menurut Masyarakat Responden	197

Gambar 4.85 Urutan Prioritas Aspek Fisik Menurut Pemerintah Kabupaten Gresik.	198
Gambar 4.86 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Pasar/Pusat Perbelanjaan Menurut Masyarakat Responden.....	200
Gambar 4.87 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Perkantoran/Sekolah Menurut Masyarakat Responden.....	200
Gambar 4.88 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Terminal.....	201
Gambar 4.89 Urutan Prioritas Jarak Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima dengan Perumahan Penduduk Menurut Masyarakat Responden	202
Gambar 4.90 Diagram Venn Aspek Ekonomi	283
Gambar 4.91 Diagram Venn Aspek Sosial.....	285
Gambar 4.92 Diagram Venn Aspek Fisik	287
Gambar 4.93. Eksisting lokasi pasar/pusat perbelanjaan/pertokoan di Kota Gresik.....	291
Gambar 4.94. Penilaian Indikator Prioritas I Aspek Ekonomi : Jenis Dagangan	296
Gambar 4.95. Penilaian Indikator Prioritas II Aspek Ekonomi : Waktu Jualn	297
Gambar 4.96. Penilaian Indikator Prioritas III Aspek Ekonomi : Biaya Angkutan	298
Gambar 4.97. Penilaian Indikator Prioritas IV Aspek Ekonomi : Sewa Lahan	299
Gambar 4.98. Penilaian Indikator Prioritas V Aspek Ekonomi : Daya Beli Masyarakat	300
Gambar 4.99. Penilaian Indikator Prioritas I Aspek Sosial : Ketertiban	301
Gambar 4.100. Penilaian Indikator Prioritas I Aspek Fisik : Kedekatan Lokasi Dengan Pusat Keramaian	302
Gambar 4.101. Penilaian Indikator Prioritas II Aspek Fisik : Kemudahan Aksesibilitas/Sarana Transportasi.....	303
Gambar 4.102. Penilaian Indikator Prioritas III Aspek Fisik : Kedekatan Lokasi dengan Tempat Tinggal PKL	304
Gambar 4.103. Kawasan pusat perdagangan dan jenis kegiatan ini terpusat di daerah Jl. Gubernur Suryo.....	308

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini merupakan kesimpulan jawaban dari ketiga rumusan masalah di awal penelitian. Adapun kesimpulan jawaban dari ketiga rumusan masalah tersebut adalah.

A. Persepsi mengenai aspek ekonomi, sosial, dan fisik menurut pedagang, masyarakat dan pemerintah dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima

- Ditinjau dari aspek ekonomi, PKL yang berkembang di Kota Gresik adalah PKL makanan/minuman yang tidak mempertimbangkan biaya transportasi, namun mempertimbangkan kesesuaian waktu jualan dengan aktivitas masyarakat. Pengunjung paling berminat dengan PKL makanan/minuman, dan dalam menentukan lokasi PKL yang dikunjungi mempertimbangkan biaya transportasi dan waktu jualan PKL yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Menurut data Pemerintah, PKL Makanan/minuman memiliki jumlah terbanyak, dan hanya mempertimbangkan kesesuaian waktu jual dengan aktivitas masyarakat dalam menentukan lokasi PKL.
- Ditinjau dari aspek sosial, pedagang kaki lima di Kota Gresik lebih membutuhkan keamanan dalam berusaha dengan harapan adanya penurunan gangguan petugas razia dan mereka ingin dilibatkan dalam rangka meningkatkan kesadaran mereka terhadap lingkungan. Masyarakat sebagai pengguna jasa PKL, cenderung melihat kenyamanan dan kebersihan dari PKL baik dari tempat/lokasi berjualan, cara berjualan, jenis dagangan, dll. Sedangkan pemerintah lebih mementingkan keamanan ruang publik dan ketertiban PKL karena sesuai dengan persepsi dasar pemerintah yaitu kepentingan menyelamatkan sarana dan fasilitas umum dan mencegah dari usaha yang mengganggu ketertiban umum, keindahan, kebersihan dan kelancaran lalu lintas.
- Ditinjau dari aspek fisik, baik pedagang, pengunjung dan pemerintah di Kota Gresik dalam menentukan lokasi PKL mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas/sarana transportasi karena aktivitas perekonomian kota umumnya merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku kegiatan. Pedagang kaki lima di Kota Gresik mempunyai kecenderungan memasarkan barang dagangannya sedekat mungkin dengan calon pembeli. Oleh karena itu mereka memilih lokasi-lokasi yang

strategis dan menguntungkan yang dekat dengan pusat keramaian, dalam hal ini juga terdapat kesamaan persepsi dengan masyarakat dan pemerintah yang lebih memilih lokasi PKL dekat dengan pusat keramaian kota karena mempunyai daya tarik.

B. Urutan prioritas dari aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam menentukan lokasi pedagang kaki lima

Hasil kesimpulan mengenai urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik menurut pedagang, pemerintah, masyarakat pengunjung/ yang berada di sekitar lokasi dan para ahli beserta masukan aspek-aspek lainnya adalah sebagai berikut :

a) Aspek ekonomi

- I. Kesesuaian jenis dagangan pedagang kaki lima dengan kebutuhan masyarakat pengunjung/ yang berada di sekitar lokasi
- II. Kesesuaian waktu jualan pedagang kaki lima dengan aktivitas masyarakat yang mengunjungi dan yang berada di sekitar lokasi
- III. Besar biaya angkutan yang dikeluarkan menuju lokasi PKL
- IV. Biaya sewa tempat pada lokasi
- V. Daya beli masyarakat sekitar lokasi

b) Aspek sosial

- I. Ketertiban pedagang kaki lima pada lokasi
- II. Keamanan lokasi baik bagi pedagang dan pengunjung
- III. Kenyamanan bagi masyarakat pengunjung dan yang berada di sekitar lokasi
- IV. Kebersihan pada lokasi yang diperuntukkan untuk pedagang kaki lima
- V. Keindahan

c) Aspek fisik

- I. Kedekatan lokasi PKL dengan pusat keramaian masyarakat
- II. Kemudahan Aksesibilitas/Sarana Angkutan
- III. Kedekatan lokasi PKL dengan tempat tinggal PKL
- IV. Adanya lahan kosong pada suatu lokasi

C. Penentuan lokasi aktivitas utama pedagang kaki lima sesuai hasil urutan prioritas aspek ekonomi, sosial dan fisik

Berdasarkan persyaratan yang diambil terutama mengacu dari pendapat para ahli dan disesuaikan dengan pendapat pedagang, masyarakat dan pemerintah maka lokasi aktivitas utama pedagang kaki lima baik makanan/minuman, non makanan/minuman dan bahan mentah harus terpusat di daerah sekitar pasar/pusat perbelanjaan/ruko.

Berdasarkan hasil pembobotan, telah ditentukan lokasi utama aktivitas pedagang kaki lima di Kota Gresik adalah di BWK I yang berpusat di kawasan pusat perdagangan Jl. Gubernur Suryo. Sedangkan berdasarkan beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan sebagai tolak ukur kesesuaian ruang aktivitas pedagang kaki lima pada suatu kawasan kota, maka lokasi di sekitar kawasan pusat kota Jl. Gubernur Suryo yang sesuai kriteria adalah di lahan milik PT. Multi Sarana Plaza dimana lahan ini berupa lahan yang disediakan kavling-kavling (bedak-bedak untuk pedagang) namun tidak dipergunakan lagi dan juga berupa lahan kosong yang dapat dijadikan lokasi penataan pedagang kaki lima.

5.2 Rekomendasi

- a. Berdasarkan hasil konsensus mengenai aspek penentuan lokasi PKL, maka lokasi jualan pedagang kaki lima baik makanan/minuman, non makanan/minuman dan bahan mentah harus **terpusat di daerah sekitar pasar/pusat perbelanjaan/ruko**. Sedangkan waktu jualan untuk **PKL makanan/minuman adalah pagi – malam (jam 06.00 s.d 21.00)**, waktu jualan **PKL non makanan/minuman adalah sore – malam jam 18.00 – 21.00**, sedangkan waktu jualan **PKL bahan mentah adalah pagi – siang jam 06.00 – 14.00**.
- b. Langkah yang diprioritaskan dalam menentukan lokasi PKL di Kota Gresik pada aspek ekonomi adalah mengatur dan mengelompokkan jenis dagangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada lokasi.
- c. Langkah yang diprioritaskan dalam menentukan lokasi PKL di Kota Gresik pada aspek sosial adalah menjamin ketertiban dan keamanan sehingga tidak menimbulkan masalah kekumuhan dan menjamin kenyamanan masyarakat pengunjung.
- d. Langkah yang diprioritaskan dalam menentukan lokasi PKL di Kota Gresik pada aspek fisik adalah mempertimbangkan kemudahan sarana transportasi bagi PKL sebagai pelaku kegiatan dan masyarakat sebagai pengguna jasa PKL, serta

mempertimbangkan kedekatan lokasi PKL dengan pusat kegiatan masyarakat terutama dengan pasar/pusat perbelanjaan/ruko.

- e. Berdasarkan persepsi dari pedagang kaki lima bahwa mereka bersedia ditempatkan dimana saja dengan syarat lokasi tersebut dapat menjamin kesejahteraan mereka, maka penentuan lokasi untuk tempat khusus PKL harus memenuhi persyaratan berdasarkan hasil urutan prioritas aspek penentuan lokasi, yaitu :

- Lokasi harus sesuai dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan, dan sebagian besar PKL yang akan direlokasi adalah PKL makanan minuman sebanyak 46,4%.
- Lokasi harus berada di dekat tempat keramaian masyarakat sebagai daya tarik pengunjung

Jika persyaratan utama kedua hal di atas terpenuhi maka akan dapat menjamin kesejahteraan PKL disamping dilakukan penataan lokasi yang dapat menarik pengunjung.

- f. Berdasarkan hasil konsensus terdapat perbedaan signifikan pada urutan prioritas mengenai aspek sosial dimana PKL cenderung mengutamakan keamanannya dalam berjualan dari gangguan preman, razia Satpol PP, sedangkan hasil konsensus cenderung mengutamakan ketertiban mereka dalam berjualan. Pada dasarnya pemerintah tidak bisa hanya melakukan penertiban tanpa adanya konsekuensi bagi PKL, sehingga adanya kebijakan penentuan lokasi disertai dengan pembinaan dan penataan bagi PKL, maka dengan sendirinya pihak PKL akan merasa aman dari gangguan, sedangkan pemerintah dapat mewujudkan aspek ketertiban. Keuntungan dan kelemahan bagi PKL yang dapat dibina dan ditata antara lain :

Keuntungan :

- PKL mendapatkan legalitas usaha
- PKL mendapatkan sarana prasarana pendukung usaha
- PKL mendapatkan jaminan kesejahteraan untuk jangka panjang

Kelemahan cenderung pada ketersediaan modal PKL mengingat karakteristik PKL ± Rp.500.000, dengan rata-rata pendapatan setiap hari <Rp. 100.000,-, digunakan untuk menopang anggota keluarga >3 orang), yaitu:

- Pertimbangan besarnya biaya sewa tempat
- Pertimbangan keseimbangan retribusi dengan pendapatan usaha

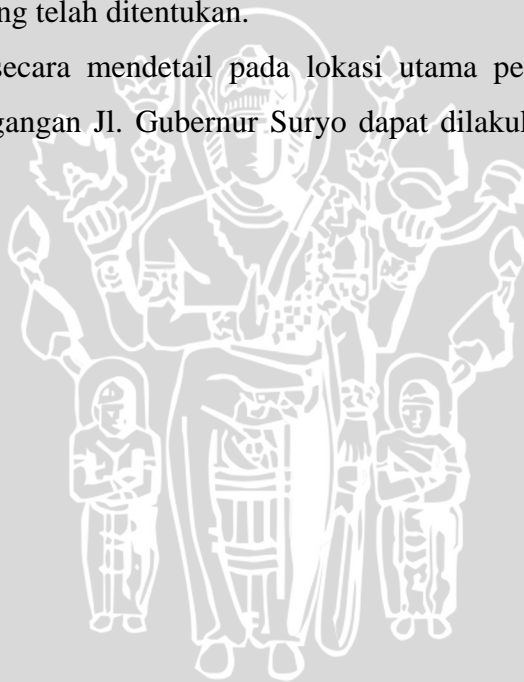
Sehingga dalam pelaksanaan pembinaan dan penataan PKL, pemerintah menyediakan bantuan kredit bagi mereka.

- g. Berdasarkan keseluruhan hasil konsensus terdapat perbedaan signifikan pada urutan prioritas mengenai aspek fisik, dimana PKL cenderung mengutamakan kedekatan lokasi dengan tempat keramaian, kedekatan lokasi dengan tempat tinggal, baru kemudahan aksesibilitas menuju lokasi.

Sedangkan hasil konsensus akhir hasilnya adalah mengutamakan kedekatan lokasi dengan tempat keramaian, kemudahan aksesibilitas, baru kedekatan lokasi dengan tempat tinggal PKL.

Menyikapi adanya perbedaan urutan prioritas yang kedua, dengan melihat kondisi eksisting bahwa sebagian besar PKL berjualan dengan berjalan kaki (82,1%), sehingga untuk meminimalisasi biaya dan tenaga dapat dilakukan dengan pengaturan relokasi pedagang dengan memprioritaskan pedagang yang bertempat tinggal di sekitar lokasi PKL dengan jumlah maksimal pedagang dan radius jarak dari tempat tinggal yang telah ditentukan.

- h. Mengenai penataan secara mendetail pada lokasi utama pedagang kaki lima di kawasan pusat perdagangan Jl. Gubernur Suryo dapat dilakukan studi lebih lanjut dari penelitian ini.



BAB V	315
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	315
5.1 Kesimpulan.....	315
5.2 Rekomendasi.....	317

